



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

Pasuruan
Always Fresh



P-RPJMD

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

2018-2023



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.35-5847 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengesahkan pengangkatan Saudara:

MOHAMMAD IRSYAD YUSUF

sebagai Bupati Pasuruan Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa jabatan Bupati Pasuruan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : dst.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
SEKREJANIS-DITJEN OTDA,



Drs. AKMAL MALIK, M.Si

Kepada Saudara MOHAMMAD IRSYAD YUSUF

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat serta karuniaNya penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang bersinergi dengan Visi, Misi Propinsi Jawa Timur dan Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap bernuansa kedaerahan. Secara umum materi Perubahan RPJMD berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Wilayah, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya alam, Politik, Hukum, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dan Aparatur.

Terima Kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah menyusun Dokumen Perubahan RPJMD, Pemerintah Daerah berharap seluruh pihak terkait dapat membantu dalam implementasi dan pengawasannya.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
PERDA P-RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	9
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	18
1.5. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	24
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	24
2.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis	24
2.1.2. Topografi	25
2.1.3. Geologi	26
2.1.4 Jenis Tanah.....	28
2.1.5. Hidrologi	30
2.1.6. Klimatologi.....	34
2.1.7. Penggunaan Lahan.....	34
2.1.8. Wilayah Potensi Rawan Bencana	39
2.1.8.1 Potensi Kerawanan Bencana Alam.....	39
2.1.8.2 Kejadian Bencana	42
2.1.9. Kondisi Demografi	43
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	45
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	45
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB.....	45
2.2.1.1.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	48
2.2.1.1.2 Pertambangan dan Penggalian	49
2.2.1.1.3 Industri Pengolahan	49
2.2.1.1.4 Pengadaan Listrik dan Gas.....	50
2.2.1.1.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang.....	51
2.2.1.1.6 Konstruksi.....	52
2.2.1.1.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor....	53
2.2.1.1.8 Transportasi dan Pergudangan	53
2.2.1.1.9 Penyedia Akomodasi dan Makan Minum.....	54
2.2.1.1.10 Informasi dan Komunikasi.....	55

2.2.1.1.11	Jasa Keuangan dan Asuransi.....	56
2.2.1.1.12	Real Estate	57
2.2.1.1.13	Jasa Perusahaan.....	57
2.2.1.1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	58
2.2.1.1.15	Jasa Pendidikan	59
2.2.1.1.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	60
2.2.1.1.17	Jasa Lainnya	61
2.2.1.2	Persentase Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan	62
2.2.1.3	Persentase Kemiskinan Kabupaten Pasuruan	65
2.2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan.....	68
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	69
2.2.2.1	Pendidikan	69
2.2.2.1.1	APK SD/MI	69
2.2.2.1.2	APK SMP/MTs.....	70
2.2.2.1.3	Angka Partisipasi Murni	72
2.2.2.2	Kesehatan	73
2.2.2.2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	73
2.2.2.2.2	Cakupan Balita Gizi Buruk	74
2.2.2.2.3	Presentase Desa Siaga Aktif	75
2.2.2.3	Tenaga Kerja.....	75
2.2.2.3.1	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	75
2.2.2.3.2	Rasio Penduduk yang Bekerja	76
2.2.2.3.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	76
2.2.2.4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77
2.2.2.4.1	Persentase Tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	77
2.2.2.4.2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78
2.2.2.4.3	TFR (Total Fertility Rate)	79
2.2.2.4.4	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	80
2.2.2.4.5	Unmet Need KB	80
2.2.2.4.6	ASFR 15-19 (Age Specific Fertility Rate 15 – 19)	81
2.2.2.5	Keuangan	81
2.2.2.5.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	81
2.2.2.6	Pangan	82
2.2.2.6.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	82
2.2.2.7	Fokus Seni, Budaya, Dan Olahraga.....	82
2.2.2.7.1	Jumlah atlit yang berprestasi.....	83
2.2.2.7.2	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	84
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	84

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	85
2.3.1.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	85
2.3.1.1.1 Pendidikan	85
2.3.1.1.2 Kesehatan	89
2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	104
2.3.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman	117
2.3.1.1.5 Ketentraman, Ketertban Umum dan Perlindungan Masyarakat	119
2.3.1.1.6 Sosial	123
2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	126
2.3.1.2.1 Ketenagakerjaan	126
2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	130
2.3.1.2.3 Pangan	133
2.3.1.2.4 Pertanahan.....	138
2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup.....	139
2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	142
2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	146
2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150
2.3.1.2.9 Perhubungan.....	152
2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika.....	155
2.3.1.2.11 Koperasi dan Usaha Mikro	160
2.3.1.2.12 Penanaman Modal	165
2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga.....	167
2.2.3.1.14 Statistik.....	169
2.2.3.1.15 Persandian.....	170
2.2.3.1.16 Kebudayaan	171
2.2.3.1.17 Perpustakaan.....	172
2.3.1.2.18 Kearsipan	174
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	176
2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan.....	176
2.3.2.2 Pariwisata.....	177
2.3.2.3 Pertanian	178
2.3.2.4 Perdagangan.....	182
2.3.2.5 Perindustrian	183
2.3.2.6 Transmigrasi	184
2.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan.....	185
2.3.3.1. Perencanaan Pembangunan.....	185
2.3.3.2 Keuangan	186
2.3.3.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	187

2.3.3.4	Penelitian dan Pengembangan.....	189
2.3.3.5	Pengawasan.....	191
2.2.3.6	Sekretariat Dewan	193
2.3.3.6	Sekretariat Daerah.....	194
2.3.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	196
2.3.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	197
2.3.4.2.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.....	197
2.3.4.3.	Nilai Tukar Petani.....	198
2.3.4.4.	Daya Beli	199
2.3.5.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	200
2.3.5.1.	Sarana Prasarana Transportasi	200
2.3.5.2.	Jaringan Listrik.....	200
2.3.5.3.	Ketersediaan Air Baku.....	200
2.3.6.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	201
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....		237
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	237
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	238
3.1.2	Neraca Daerah	255
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	260
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	261
3.2.2	Analisis Pembiayaan	264
3.2.2	Pembiayaan Non Pemerintah.....	268
3.3	Kerangka Pendanaan	269
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	269
3.3.2	Penghitungan kerangka pendanaan	275
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....		279
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	279
4.2	Isu Strategis	285
4.2.1	Isu Strategis Internasional.....	286
4.2.2	Isu Strategis Nasional	290
4.2.3	Isu Strategis Regional	295
4.2.4.	Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Pasuruan.....	301
4.2.5.	Telaahan KLHS Kabupten Pasuruan	303
4.2.6.	Telaah Isu Strategis Daerah Sekitar	309
4.2.7.	Isu Strategis Kabupaten Pasuruan.....	309
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....		326
5.1.	VISI	326
5.2.	MISI	330
5.4.	TUJUAN DAN SASARAN.....	331

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	353
6.1. Strategi Umum Pembangunan	353
6.2. Arah Kebijakan.....	413
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	441
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	486
8.1. Indikator Kinerja Utama	486
8.2. Indikator Kinerja Daerah.....	486
BAB IX PENUTUP	
9.1. Pedoman Transisi.....	497
9.2. Kaidah Pelaksanaan.....	497

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2020	46
Grafik 2.2	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	47
Grafik 2.3	PDRB ADHK Menurut Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan 2015-2020	48
Grafik 2.4	PDRB ADHK Menurut Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Pasuruan 2015-2020	49
Grafik 2.5	PDRB ADHK Menurut Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan 2015-2020	50
Grafik 2.6	PDRB ADHK Menurut Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Pasuruan 2015-2020	51
Grafik 2.7	PDRB ADHK Menurut Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	52
Grafik 2.8	PDRB ADHK Menurut Konstruksi Kabupaten Pasuruan 2015-2020	52
Grafik 2.9	PDRB ADHK Menurut Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Pasuruan 2015-2020	53
Grafik 2.10	PDRB ADHK Menurut Transportasi dan Pergudangan Kab. Pasuruan 2015-2020	54
Grafik 2.11	PDRB ADHK Menurut Penyedia Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	55
Grafik 2.12	PDRB ADHK Menurut Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pasuruan 2015-2020	56
Grafik 2.13	PDRB ADHK Menurut Jasa Keuangan dan Asuransi Kab. Pasuruan 2015-2020	56
Grafik 2.14	PDRB ADHK Menurut <i>Real Estate</i> Kabupaten Pasuruan 2015-2020	57
Grafik 2.15	PDRB ADHK Menurut Jasa Perusahaan Kabupaten Pasuruan 2015-2020	58
Grafik 2.16	PDRB ADHK Menurut Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	59
Grafik 2.17	PDRB ADHK Menurut Jasa Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2015-2020	60
Grafik 2.18	PDRB ADHK Menurut Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	60
Grafik 2.19	PDRB ADHK Menurut Jasa Lainnya Kabupaten Pasuruan 2015-2020	61
Grafik 2.20	Persentase Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan 2015-2020	63
Grafik 2.21	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2015-2020	64
Grafik 2.22	Indeks Ketimpangan 2015-2020	65
Grafik 2.23	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur 2015-2020	67
Grafik 2.24	Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Pasuruan dengan IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional 2015-2020.....	69
Grafik 2.25	APK SD/MI di Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	70

Grafik 2.26	APK SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	71
Grafik 2.27	Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	73
Grafik 2.28	Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	74
Grafik 2.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	77
Grafik 2.30	Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.....	78
Grafik 2.31	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2015- 2020	79
Grafik 2.32	TFR (Total Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020	79
Grafik 2.33	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	80
Grafik 2.34	Unmet Need KB di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020	80
Grafik 2.35	ASFR 15-19 (Age Specific Fertility Rate 15 – 19) di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2019	81
Grafik 2.36	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	81
Grafik 2.37	Capaian Pola Pangan Harapan.....	82
Grafik 2.38	Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	83
Grafik 2.39	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional.....	84
Grafik 2.40	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI di Kabupaten Pasuruan 2015- 2020	87
Grafik 2.41	Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan 2015-2020	87
Grafik 2.42	Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Pasuruan 2015-2020.....	88
Grafik 2.43	Perkembangan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	93
Grafik 2.44	Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	95
Grafik 2.45	Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015- 2019	96
Grafik 2.46	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan.....	98
Grafik 2.47	Cakupan desa / kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019.....	99
Grafik 2.48	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2015-2020 di Kabupaten Pasuruan.....	100
Grafik 2.49	Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas.....	100
Grafik 2.50	Prevalensi Kusta Tahun 2015-2020 Kabupaten Pasuruan	103
Grafik 2.51	Penanganan Penderita HIV AIDS tahun 2015-2020 di Kabupaten Pasuruan.....	104
Grafik 2.52	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	107
Grafik 2.53	Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	108

Grafik 2.54	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	108
Grafik 2.55	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	109
Grafik 2.56	Persentase penanganan darurat banjir di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	110
Grafik 2.57	Ketersediaan Lahan untuk pembangunan Embung di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	111
Grafik 2.58	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	111
Grafik 2.59	Persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	112
Grafik 2.60	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	113
Grafik 2.61	Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	113
Grafik 2.62	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	114
Grafik 2.63	Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	115
Grafik 2.64	Rumah Tangga pengguna air bersih (pedesaan dan perkotaan) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	115
Grafik 2.65	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi tahun 2015-2020	116
Grafik 2.66	Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan tahun 2015-2020	118
Grafik 2.67	Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	119
Grafik 2.68	Persentase Penegakan PERDA yang diselesaikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	121
Grafik 2.69	Persentase Konflik SARA di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019	121
Grafik 2.70	Persentase Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2018	122
Grafik 2.71	Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	123
Grafik 2.72	Persentase Penanganan PMKS di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	124
Grafik 2.73	Persentase Jumlah PMKS Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	125
Grafik 2.74	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	126
Grafik 2.75	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	127
Grafik 2.76	Pencari Kerja yang di Tempatkan Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	127

Grafik 2.77	Angka Sangketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	128
Grafik 2.78	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	129
Grafik 2.79	Ketersediaan pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020.....	137
Grafik 2.80	Kepemilikan KTP di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	143
Grafik 2.81	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019	144
Grafik 2.82	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	145
Grafik 2.83	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	145
Grafik 2.84	Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Pasuruan tahun 2020.....	146
Grafik 2.85	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	150
Grafik 2.86	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 – 2020.....	151
Grafik 2.87	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	152
Grafik 2.88	Persentase Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	161
Grafik 2.89	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	163
Grafik 2.90	Persentase KOPPONTREN Aktif di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019	163
Grafik 2.91	Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	165
Grafik 2.92	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	165
Grafik 2.93	Data Permohonan dan Penerbitan Ijin di Kabupaten Pasuruan 2015-2020	166
Grafik 2.94	Nilai Investasi yang Terealisasi Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	166
Grafik 2.95	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kepemudaan Dan Olahraga di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	167
Grafik 2.96	Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	167
Grafik 2.97	Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	168
Grafik 2.98	Jumlah Atlit yang Dibina di Kabupaten Pasuruan tahun 2019	169
Grafik 2.99	Jumlah Pemuda yang Dibina di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020	169
Grafik 2.100	Persentasi Pemenuhan Standart Keamanan Informasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	170
Grafik 2.101	Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	173

Grafik 2.102	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Arsip di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	176
Grafik 2.103	Aspek Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan	177
Grafik 2.104	Kunjungan Wisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	178
Grafik 2.105	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020.....	180
Grafik 2.106	Produksi Daging Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	181
Grafik 2.107	Produksi Telur Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	181
Grafik 2.108	Produksi Susu Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	182
Grafik 2.109	Jumlah Penelitian yang dilakukan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019	190
Grafik 2.110	Presentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan (Tindak Lanjut Tuntas (TS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019	192
Grafik 2.111	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2017	198
Grafik 2.112	Indeks Daya Beli Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019.....	199
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020	246
Grafik 3.2	Rincian Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020.....	247
Grafik 3.3	Total Belanja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020.....	251
Grafik 3.4	Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2016-2020	259
Grafik 3.5	Rincian kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2016-2020	260
Grafik 3.6	Persentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja.....	264

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan.....	26
Gambar 2.2 Kondisi Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Pasuruan	28
Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan.....	35
Gambar 2.4 Peta Kondisi Kerawanan terhadap Bencana BANjir di Wilayah Kabupaten Pasuruan	40
Gambar 2.5 Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Pasuruan.....	41
Gambar 4.1 Visi, Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.....	291
Gambar 4.2 Peta Kawasan prioritas Gerbangkertasusila.....	292
Gambar 4.3 Peta Lokasi Program di Kawasan Prioritas Gerbangkertasusila.....	293
Gambar 5.1 Grand Design Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023	328
Gambar 5.2 Penjabaran Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 .	329
Gambar 5.2 Grand Design Misi 1 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023	326
Gambar 5.3 Grand Design Misi 2 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023	326
Gambar 5.4 Grand Design Misi 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023	327
Gambar 5.5 Grand Design Misi 4 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023	328
Gambar 5.6 Grand Design Misi 5 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023	329
Gambar 5.7 Hubungan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 dengan Visi Misi RPJMN 2020-2024 dan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.....	326
Gambar 6.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi.....	353
Gambar 6.2 Inovasi Kebal Covid-19 Kabupaten Pasuruan	407
Gambar 6.3 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 1	423
Gambar 6.4 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 2	423
Gambar 6.5 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 3	424
Gambar 6.6 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 4	424
Gambar 6.7 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 4	425

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Pasuruan Dengan RPJMN Dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.....	11
Tabel 1.2	Hubungan Periodesasi RPJMD Kabupaten Pasuruan Dengan RPJP dan RTRW Kabupaten Pasuruan.....	14
Tabel 2.1	Kecamatan di Kabupaten Pasuruan	25
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.....	25
Tabel 2.3	Sungai di Kabupaten Pasuruan	31
Tabel 2.4	Jumlah Sumber Air dan Debit Yang Dapat Dimanfaatkan Di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015	31
Tabel 2.5	Jumlah Sumber Air dan Debit Yang Dapat Dimanfaatkan Di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015	32
Tabel 2.6	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2013.....	34
Tabel 2.7	Persebaran Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan	36
Tabel 2.8	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2016.....	42
Tabel 2.9	Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan.....	42
Tabel 2.10	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2017 .	43
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Pekerjaan.....	44
Tabel 2.12	Perkembangan jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2017	44
Tabel 2.13	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	66
Tabel 2.14	Perkembangan TPT Kabupaten Pasuruan dan Perbandingan TPT Kabupaten Pasuruan dengan TPT Jawa Timur dan TPT Nasional	67
Tabel 2.15	IPM Kabupaten Pasuruan, Komponennya, dan Perbandingannya dengan IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional	68
Tabel 2.16	Perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	72
Tabel 2.17	Perkembangan APM SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020 ..	73
Tabel 2.18	Persentase Desa siaga aktif tahun 2015-2020 di Kabupaten Pasuruan.....	75
Tabel 2.19	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan.....	75
Tabel 2.20	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pasuruan	76
Tabel 2.21	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	85
Tabel 2.22	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	89
Tabel 2.23	Capaian Indikator Kinerja Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan Sehat	97
Tabel 2.24	Tercukupinya pelayanan masyarakat miskin tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan	102
Tabel 2.25	Persentase Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD	102

Tabel 2.26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	105
Tabel 2.27 Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan	117
Tabel 2.28 Capaian Indikator Kinerja Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	120
Tabel 2.29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Pasuruan	124
Tabel 2.30 Kemiskinan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pasuruan	125
Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasuruan	130
Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasuruan 2015-2020	131
Tabel 2.33 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan.....	132
Tabel 2.34 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019.....	132
Tabel 2.35 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	133
Tabel 2.36 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	133
Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pasuruan.....	134
Tabel 2.38 Stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	136
Tabel 2.39 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	136
Tabel 2.40 Jumlah Desa Prioritas Rawan Pangan tahun 2020	138
Tabel 2.41 Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	139
Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020.....	140
Tabel 2.43 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2020.....	140
Tabel 2.44 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020.....	141
Tabel 2.45 Indeks Kualitas Air di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020.....	141
Tabel 2.46 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020.....	141
Tabel 2.47 Nilai TPA di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020	142
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	142
Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	147
Tabel 2.50 Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019.....	147
Tabel 2.51 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019.....	148

Tabel 2.52 Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019	148
Tabel 2.53 Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019	149
Tabel 2.54 Indeks Membangun Desa di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2020	149
Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	153
Tabel 2.56 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	153
Tabel 2.57 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	153
Tabel 2.58 Jumlah Terminal di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	154
Tabel 2.59 Jumlah Orang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	155
Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	155
Tabel 2.61 Peningkatan Sistem Komunikasi Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	157
Tabel 2.62 Pusat Layanan Internet Kecamatan/Telecenter di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	157
Tabel 2.63 Media Luar Ruang di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	158
Tabel 2.64 Pameran/Expo di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	159
Tabel 2.65 Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	160
Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	161
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Statistik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	170
Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kebudayaan	171
Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perpustakaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	173
Tabel 2.70 Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	174
Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	174
Tabel 2.72 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020	175
Tabel 2.73 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pertanian di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	179
Tabel 2.74 Indikator Perdagangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	182
Tabel 2.75 Aspek Perindustrian Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020	184
Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Ketransmigrasian ..	185
Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan	186

Tabel 2.78	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	186
Tabel 2.79	Pegawai yang pernah mengikuti Pendidikan & Pelatihan Aparatur	188
Tabel 2.80	ASN Yang Mengikuti dan Lulus Ujian Tahun 2015-2019	189
Tabel 2.81	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti tahun 2019-2020	190
Tabel 2.82	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2015-2019	193
Tabel 2.83	Perkembangan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019	195
Tabel 2.84	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019	198
Tabel 2.85	Nilai Tukar Petani Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019	199
Tabel 2.86	Nilai Investasi Tahun 2015-2020	201
Tabel 2.87	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020	202
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	239
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	244
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan	249
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan	253
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca daerah Kabupaten Pasuruan 2016-2020..	256
Tabel 3.6	Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	262
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	263
Tabel 3.8	Surplus (Defisit Riil) Anggaran Kabupaten Pasuruan	265
Tabel 3.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran	266
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pasuruan	267
Tabel 3.11	Penyertaan Modal Pihak Ketiga	268
Tabel 3.12	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan	270
Tabel 3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan	276
Tabel 3.14	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	277
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Urusan Pembangunan Daerah	279
Tabel 4.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	284
Tabel 4.4	Isu Strategis Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan	305
Tabel 4.5	Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Pasuruan	310
Tabel 4.6	Skala Penilaian Metode <i>Scoring</i>	316

Tabel 4.7	Daftar Panjang Isu PB	316
Tabel 5.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Pasuruan dengan RPJMN	326
Tabel 5.2	Hubungan RPJMD Kabupaten Pasuruan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur	328
Tabel 5.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Sebelum Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023	334
Tabel 5.4	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023	343
Tabel 6.1	Misi 1.....	355
Tabel 6.2	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	358
Tabel 6.3	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	359
Tabel 6.4	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	360
Tabel 6.5	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah	361
Tabel 6.6	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah	362
Tabel 6.7	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	363
Tabel 6.8	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	364
Tabel 6.9	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	365
Tabel 6.10	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	367
Tabel 6.11	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah	368
Tabel 6.12	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	369
Tabel 6.13	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah	370
Tabel 6.14	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	371
Tabel 6.15	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	372
Tabel 6.16	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	373
Tabel 6.17	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	374
Tabel 6.18	Misi 2.....	375
Tabel 6.19	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	376
Tabel 6.20	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	377
Tabel 6.21	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	378
Tabel 6.22	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	379
Tabel 6.23	Misi 3.....	380
Tabel 6.24	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	381
Tabel 6.25	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	382
Tabel 6.26	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	383
Tabel 6.27	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	384
Tabel 6.28	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	385
Tabel 6.29	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	386
Tabel 6.30	Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	387
Tabel 6.31	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	388
Tabel 6.32	Misi 4	389

Tabel 6.33 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	390
Tabel 6.34 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	391
Tabel 6.35 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	393
Tabel 6.36 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	394
Tabel 6.37 Misi 5.....	395
Tabel 6.38 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	397
Tabel 6.39 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	398
Tabel 6.40 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah	400
Tabel 6.41 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	400
Tabel 6.42 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	402
Tabel 6.43 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	403
Tabel 6.44 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah.....	404
Tabel 6.45 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	405
Tabel 6.46 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Pasuruan.....	408
Tabel 6.47 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan	413
Tabel 6.48 Program Pembangunan Jargon Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan	414
Tabel 6.49 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023	426
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.....	442
Tabel 7.2 (T-C. 16) Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pasuruan	443
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023.....	486
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasuruan	488



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018–2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Bahwa sehubungan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan dengan terjadinya bencana Pandemi corona virus disease 2019, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. Bahwa perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

- Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Proinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Renan Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2018-2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor
ITahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada
tanggal 29 Desember 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di pasuruan pada
tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SYAIFUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 10
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 323-
10/2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018–2023

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Normor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkatdaerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, terdapat 3 alasan utama Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang meliputi: 1) Penyelarasan dengan RPJMN 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 2) Penyesuaian regulasi kebijakan Pemerintah Pusat; 3) Perubahan Nomenklatur SOTK, dan 4] Dampak Pandemi Covid- 19.

II. PASAL

DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup

jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 323

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Bab VII Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah Pasal 342, maka amanat Perubahan RPJMD secara umum dapat dilakukan, apabila :

1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini (dengan pertimbangan efektivitas, sebab ini tidak dapat digunakan pada RPJMD dengan masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun);
2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini (dengan pertimbangan efektivitas, sebab ini tidak dapat digunakan pada RPJMD dengan masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun); dan
3. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya: bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD yang dihasilkan dari proses tersebut diatas, menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Kecuali RPJMD tidak perlu dilakukan apabila perubahan dalam proses dimana terjadi penambahan program dan/atau kegiatan baru (pada KUA PPAS yang tidak terdapat di dalam RKPD, akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan), merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD. RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 khususnya Pasal 342, diamanatkan perubahan karena alasan/sebab ke-3 terjadi perubahan yang mendasar, yaitu adanya perubahan kebijakan nasional, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, adanya Kebijakan Nasional berlakunya beberapa Peraturan Perundangan baru yang menjadi dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan dan penganggaran/keuangan di daerah, diantaranya :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah, yang kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan masih dimungkinkan nanti akan ada pemutakhiran lagi terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan satu pedoman yang bersifat nasional terkait kode, klasifikasi dan nomenklatur baik program/kegiatan/ subkegiatan dsbnya dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah sinergi untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang akuntabel.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Perubahan regulasi ini, akan memberikan dampak pula terhadap perubahan klasifikasi belanja dalam struktur APBD. Dan diturunkan dengan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang juga secara langsung mencabut beberapa peraturan yang terkait yang digunakan sebelumnya, diantaranya Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 4) Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 5) Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan sehingga harus disesuaikan.

Kedua, adanya Kebijakan Nasional terkait Perencanaan – Program Strategis berskala Nasional, diantaranya: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tentang Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingskar Wilis dan Lintas Selatan.

Ketiga, adanya Kebijakan Nasional terkait Perangkat Daerah yang secara tidak langsung mempengaruhi terhadap tindaklanjut penggunaan dokumen perencanaan pembangunan ini nantinya yaitu perangkat daerah penanggungjawab dan/atau pelaksana program/kegiatan/ subkegiatan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Keempat, adanya Kebijakan Nasional terkait penanganan wabah COVID-19 yang bukan saja mempengaruhi aspek kesehatan saja, tetapi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bernegara termasuk perencanaan dan penganggarnya, antara lain:

- 1) Pada 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- 2) Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Berisi refocusing dan efisiensi pada anggaran di beberapa Kementerian terkait.
- 3) Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN).
- 4) Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020; dan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.
- 5) Beberapa peraturan perundangan masih akan terus dikeluarkan terkait masih berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Beberapa diantaranya yang sudah dikeluarkan baik di Pusat dan Daerah untuk mendukung penanganan COVID-19 yang secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi aspek perencanaan maupun penganggarnya, termasuk perubahan skala prioritas nasional, provinsi dan kabupaten yang harus dituangkan dalam perencanaan tahunan, dan sudah dilakukan.

Keempat kebijakan Nasional diatas menjadi sebab utama Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dilakukan, dan juga sebagai tindaklanjut dari Reviu RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang telah dilakukan APIP. Mengingat dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan adalah Perubahan RPJMD, maka penggunaannya harus disinkronkan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ada sebelumnya, atau menjadi satu kesatuan dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan (dan penetapan) Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 sama dengan dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Pembedaannya adalah hanya pada review terhadap beberapa Peraturan Perundangan yang sudah dicabut, dan/atau sudah diubah dengan peraturan perundangan lain atau penambahan beberapa peraturan perundangan lain.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **6055**);
 16. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penegakan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

- Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
 32. Peraturan Presiden Nomor 80 tentang Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

- Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1114)
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447)
 40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994)
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781)
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 SERI D);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 SERI D);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2005–2025

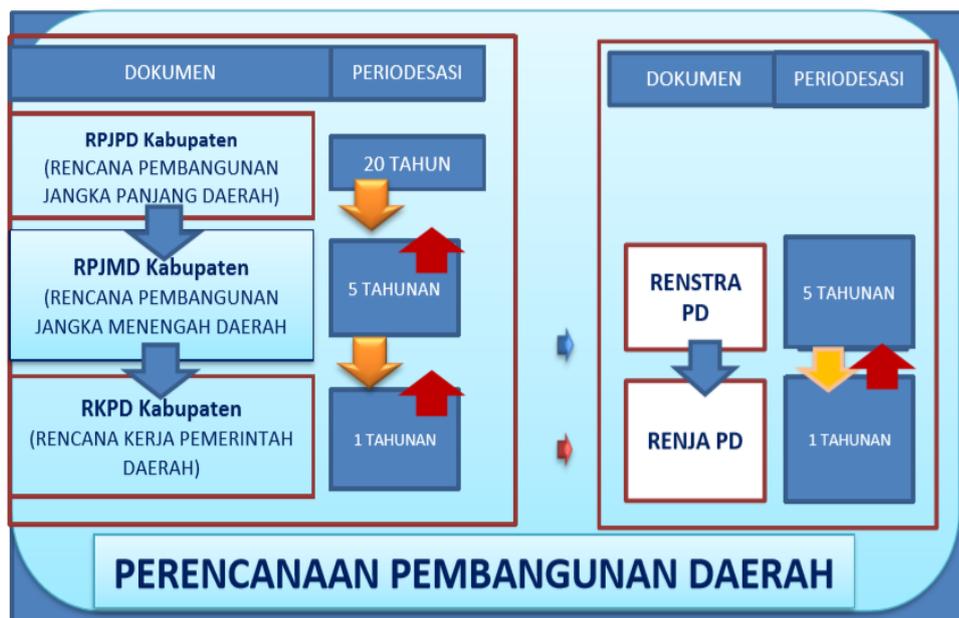
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 232);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 329);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 323).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota. Ada beberapa penyesuaian dan peringkasan dari yang tertuang dalam Dokumen induknya

1.3.1. Hubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tahun 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya
(Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017; Diolah, 2021)

- 1) Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang memiliki periodisasi perencanaan 5 tahunan dan berpedoman pada Dokumen RPJPD kabupaten (periodisasi 20 tahunan). Dokumen RPJMD harus sesuai dengan kaidah yang sudah tersistematis dengan perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan provinsi.
- 3) Dokumen RPJMD dijabarkan per tahun dalam Dokumen RKPD Kabupaten dan digunakan untuk penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing Perangkat Daerah (PD) Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Pilihan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

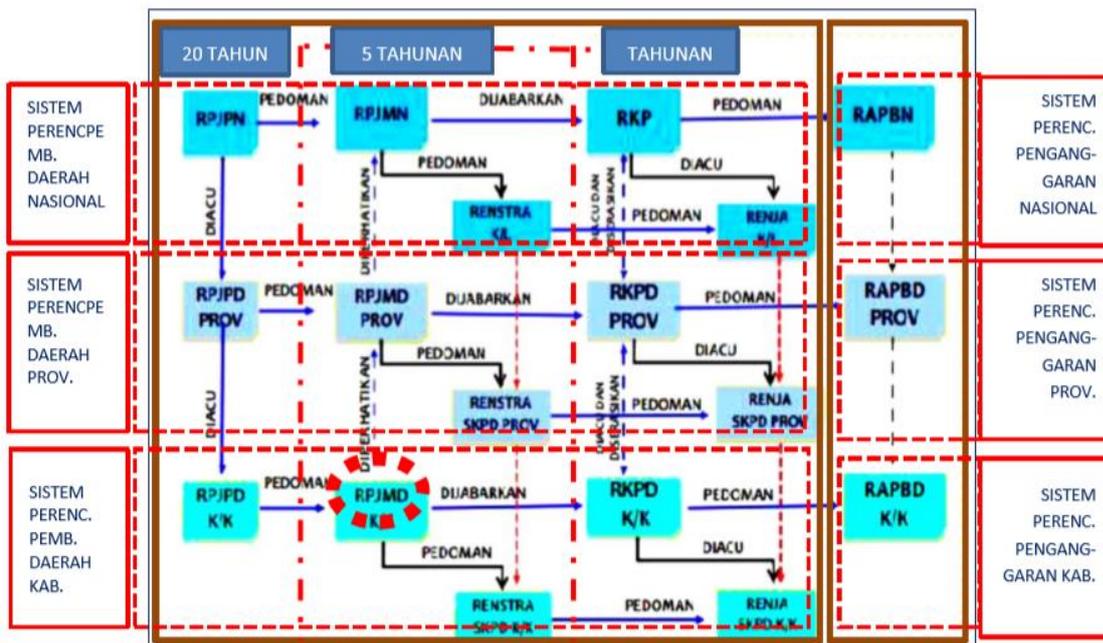
Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 memiliki acuan atau pedoman yang digunakan sebagai dasar perancangan dokumen ini. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Pasuruan. Selain itu tentu saja juga didukung dengan regulasi serta dokumen lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan hasil dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Suatu perencanaan pembangunan daerah yang baik tentu saja harus terintegrasi dengan dokumen lainnya. Hubungan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat di lihat dari gambar berikut ini :

1.3.2. Hubungan/Kedudukan RPJMD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJMD Kabupaten merupakan subsistem dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, juga subsistem dari Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan juga subsistem dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan nasional. Sinergitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan pada Gambar 1.2



Gambar 1.2 Diagram Hubungan Keterkaitan antara RPJMD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Penganggaran)

Sumber: Kemendagri, 2018

Tabel 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Pasuruan Dengan RPJMN Dan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun Perencanaan	RPJM Nasional 2019-2024	RPJMD Prov. Jatim 2019-2024	RPJMD Kab. Pasuruan 2018-2023
VISI	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong	Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing
MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan Keterbukaan wilayah 2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan



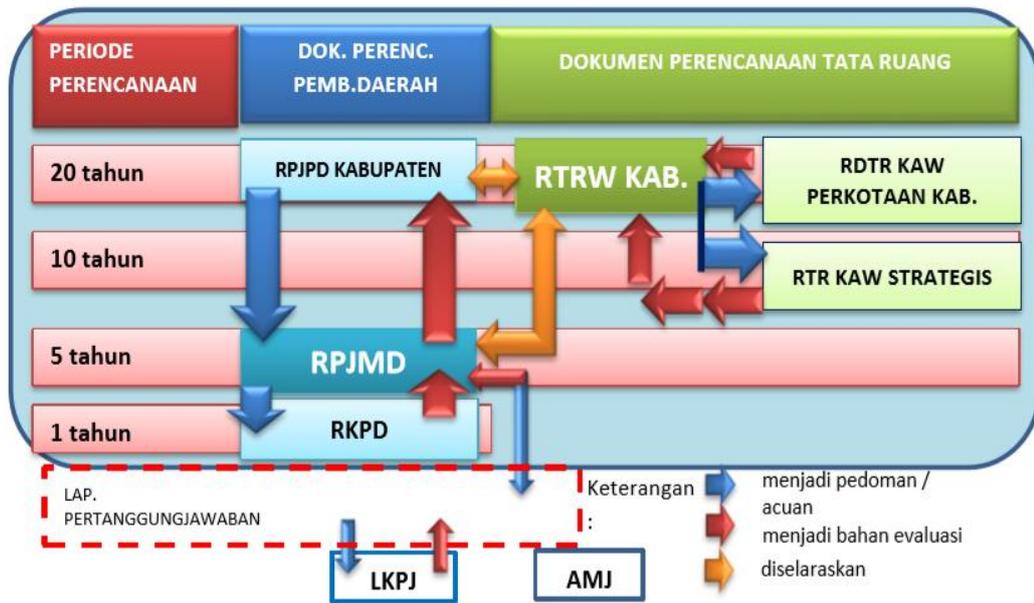
Tahun Perencanaan	RPJM Nasional	RPJMD Prov. Jatim	RPJMD Kab. Pasuruan
	2019-2024	2019-2024	2018-2023
	<p>5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa</p> <p>6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya</p> <p>7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p> <p>8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya</p> <p>9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan</p>	<p>3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.</p> <p>4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.</p>	<p>2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.</p> <p>4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman, dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal</p>

Tahun Perencanaan	RPJM Nasional 2019-2024	RPJMD Prov. Jatim 2019-2024	RPJMD Kab. Pasuruan 2018-2023
			sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Sumber: RPJMN 2019-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023

1.3.3. Hubungan/Kedudukan RPJMD Kabupaten dengan Dokumen RTRW dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Hubungan/Kedudukan RPJMD dengan RTRW



Gambar 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan RPJMD kabupaten berpedoman pada RTRW Kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah dengan visi, misi dan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah (sebagaimana dalam Lampiran Tabel dibawah ini).

Tabel 1.2 Hubungan Periode desasi RPJMD Kabupaten Pasuruan Dengan RPJP dan RTRW Kabupaten Pasuruan

ASPEK	RPJMD Kabupaten Pasuruan	RPJP Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025	RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029
Periode desasi Perencanaan	5 Tahunan (2018-2023)	<u>Lima tahun pertama (2005-2010):</u> Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang bermoral, beretika dan berbudaya serta pemerintahan yang baik dan bersih serta demokratis;	
		<u>Lima tahun kedua (2010-2015)</u> Terwujudnya daya saing untuk mencapai kemnadirian dan kesejahteraan	<u>Tahun Perencanaan Kesatu:</u> Periode Tahun 2010-2014
		<u>Lima Tahun ketiga (2015-2020)</u> Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan	<u>Tahun Perencanaan Kedua:</u> Periode Tahun 2015-2019
		<u>Lima Tahun keempat (2020-2025)</u> Terwujudnya kabupaten pasuruan yang asri dan lestari	<u>Tahun Perencanaan Ketiga:</u> Periode Tahun 2020-2024
			<u>Tahun Perencanaan Keempat:</u> Periode Tahun 2025-2029
Visi	Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing	"Kabupaten Pasuruan Yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera"	Visi penataan ruang wilayah adalah Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Mampu Mendorong Investasi Produktif, Lestari dan Optimal Secara Berkadililn Bagi Seluruh Masyarakat
Misi	1. Meningkatkan kualitas & produktivitas sektor sektor produksi dan Produk produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa	1. Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah memantapkan jati diri masyarakat, mengutamakan kejujuran, membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial, mempromosikan	a. Mengoptimal kan instrument instrumen yang berada dalam sistem penataan ruang di guna terwujudnya tujuan penataan ruang; b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan



ASPEK	RPJMD Kabupaten Pasuruan	RPJP Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025	RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029
	<p>berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menguatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.</p> <p>4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada</p>	<p>ketaatan terhadap peraturan (hukum), memelihara nilai luhur bangsa, dan memperkuat semangat kegotongroyongan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.</p> <p>2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparatur, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif adalah mengupayakan terbentuknya pemerintahan yang demokratis, terwujudnya desentralisasi ekonomi, menjamin kebebasan media, memperkuat peran masyarakat sipil, dan mengarahkan setiap program pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat.</p> <p>3. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah adalah pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah, pembangunan sumber daya</p>	<p>han wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdayasaing tinggi;</p> <p>c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan</p> <p>d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan masyarakat;</p> <p>e. Mewujudnya terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.</p>



ASPEK	RPJMD Kabupaten Pasuruan	RPJP Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025	RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029
	<p>teknologi informasi.</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman, dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.</p>	<p>manusia, kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pemerataan pembangunan dan kerjasama dengan pihak lain, memperkuat infrastruktur ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan adalah mengembangkan potensi pertanian, memperkuat industri berbasis sektor perdagangan, mempromosikan perdagangan dan investasi, mengembangkan pariwisata, kemitraan antarpelaku ekonomi, pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal, melibatkan seluruh masyarakat (partisipasi) dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin.</p> <p>5. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat adalah mengembangkan layanan kesehatan, akses pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan</p>	



ASPEK	RPJMD Kabupaten Pasuruan	RPJP Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025	RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029
		sosial, peningkatan upah tenaga kerja, dan menjamin keamanan masyarakat.	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat;3. Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;4. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan5. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, selaras dengan tujuan jangka panjang nasional	Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan

Sumber: RPJMD, RPJPD, RTRW Kabupaten Pasuruan

b. Hubungan/Kedudukan Dokumen RPJMD dengan Dokumen KLHS



Gambar 1.4 Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD

Pemerintah Kabupaten Pasuruan turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Provinsi Jawa Timur terdapat 212 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 16 dari TPB/SDGs. Berkelanjutan yang dimaksudkan pada RPJMD Paruruhan yakni pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan & mutu hidup generasi masa kini & generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam & sumber daya manusia.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disini adalah maksud dan tujuan dilakukannya “Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan” antara lain adalah :

- 1) Alat kendali dan evaluasi agar dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Pasuruan yang disusun, secara tahapan, prosedur dan substansi sesuai dengan Pedoman dan Aturan yang berlaku;
- 2) Menjamin terlaksananya sistem perencanaan yang holistic tematik dan integratif antara dokumen perencanaan pembangunan (Nasional-Provinsi kabupaten) dan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; serta

- 3) Merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Pasuruan beserta dokumen Perubahannya sebagai satu kesatuan dokumen yang transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan
- 4) Adanya Perubahan Parameter pada tahun 2021 hingga tahun 2023 atau kondisi akhir RPJMD Kabupaten Pasuruan dan Penyesuaian karena kondisi pandemi covid19 yang berdampak pada seluruh aspek ekonomi daerah sehingga perlu disesuaikan dengan adanya penyusunan perubahan RPJMD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang.

mengingat dokumen ini adalah “Dokumen Perubahan RPJMD” dan nantinya menjadi kesatuan dengan dokumen induknya, maka yang ditampilkan disini adalah lebih ke penekanan apa itu Perubahan Dokumen RPJMD serta alasan atau dasar kenapa dilakukan perubahan berdasarkan peraturan yang mendasarinya)

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD maupun Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018-2023, baik yang berskala nasional, maupun lokal yang terkait dengan perencanaan pembangunan serta keuangan daerah

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota. Ada beberapa penyesuaian dan peringkasan dari yang tertuang dalam Dokumen induknya

1.4. Maksud dan Tujuan

memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan. Ada beberapa penyesuaian dan peringkasan dari yang tertuang dalam dokumen induknya

1.5. Sistematika Penulisan

mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Pasuruan secara komprehensif sebagai basis pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas adalah Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi..

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini. Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan. Bagian ini diawali dengan

pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut: Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.2

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas. Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.3

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk Tabel T-C.5

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.8.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disertai tujuan dan sasaran.

5.1. Visi

Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD; Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

5.2. Misi

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya Maksud perumusan misi;

5.3. Tujuan dan Sasaran

Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan Penjelasan masing-masing misi. Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya: Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya; Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

BAB IX PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi implementasi RPJMD sebelum dan sesudahnya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPd setelah RPJMD berakhir.



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan mumutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang akan dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga sinkron dengan permasalahan dan isu strategis daerah pada bab IV. Mengingat Sektor Pariwisata merupakan sumber daya tak terbatas, selain itu terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi beberapa kawasan di Jawa Timur dimana Kawasan Bromo Tengger Semeru termasuk dalam program percepatan pengembangan kawasan industri menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai Kawasan Potensial dengan sejumlah destinasi wisata alam, budaya dan yang lainnya.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu.

2.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7,30'-8,30' Lintang Selatan dan 112° 30'-113 ° 30' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan adalah 148.610 ha. Jumlah kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebanyak 24 kecamatan dan memiliki jumlah desa sebanyak 365 desa/kelurahan. Batas administrasi Kabupaten Pasuruan, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.1 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Bangil	4318,87	2,91%
2	Beji	3914,37	2,63%
3	Gempol	6049,72	4,07%
4	Gondang Wetan	2698,73	1,82%
5	Grati	4672,14	3,14%
6	Kejayan	7995,15	5,38%
7	Kraton	5623,31	3,78%
8	Lekok	4767,23	3,21%
9	Lumbang	12275,99	8,26%
10	Nguling	4532,84	3,05%
11	Pandaan	4358,05	2,93%
12	Pasrepan	8341,78	5,61%
13	Pohjentrek	1256,42	0,85%
14	Prigen	13156,24	8,85%
15	Purwodadi	9099,62	6,12%
16	Purwosari	7460,18	5,02%
17	Puspo	7189,01	4,84%
18	Rejoso	3526,88	2,37%
19	Rembang	5718,74	3,85%
20	Sukorejo	5810,90	3,91%
21	Tosari	8160,27	5,49%
22	Tutur	9031,30	6,08%
23	Winongan	4291,60	2,89%
24	Wonorejo	4362,73	2,94%
Jumlah	148612,05	100%	

Sumber : Batas Administratif RTRW Kabupaten Pasuruan, 2009-2029

2.1.2. Topografi

Kabupaten Pasuruan memiliki ketinggian antara 0-3313 mdpl yang dirinci per wilayah administrasi kecamatan. Dataran rendah terdapat di bagian utara, tepatnya di Pesisir Selat Madura, dengan ketinggian 0-290 mdpl. Kawasan tersebut memiliki ancaman bencana banjir. Dataran tinggi berada pada bagian tenggara (Kawasan Gunung Bromo) dan bagian barat daya (Kawasan Gunung Welirang). Meninjau terdapat kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan, menunjukkan adanya kelerengan yang terjal atau curam. Area-area di Kabupaten Pasuruan dengan kelerengan curam tersebut memiliki potensi bencana longsor.

Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

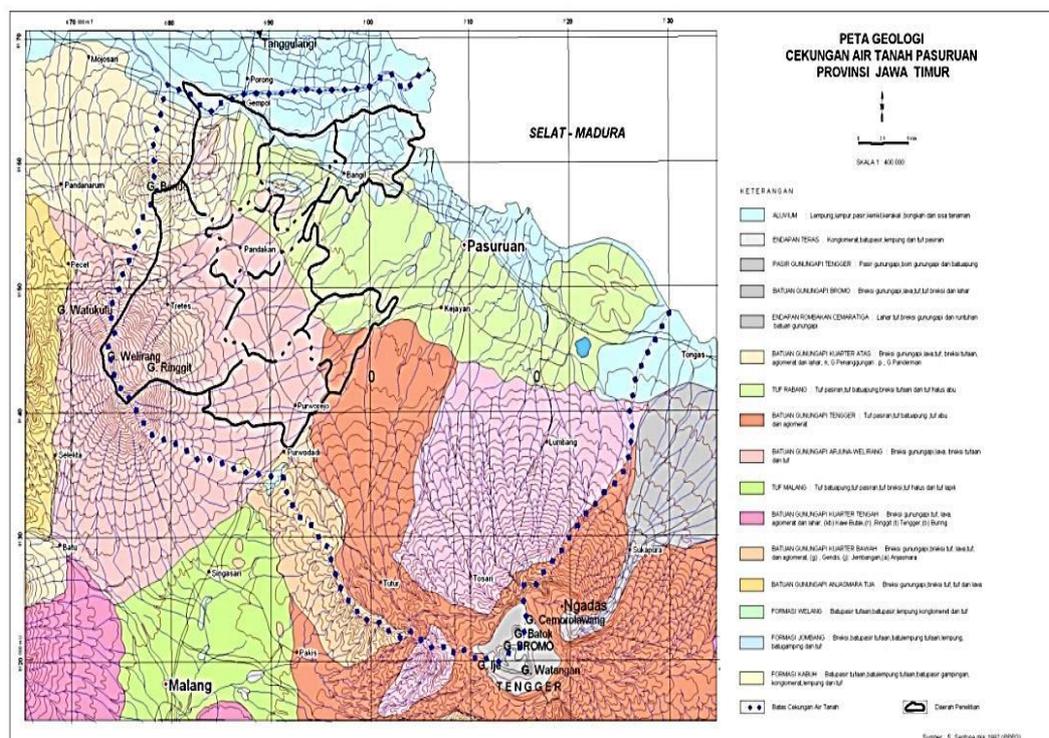
Kecamatan	Luas Administrasi (Ha)	Ketinggian (mdpl)
Bangil	4318.9	0-112
Beji	3914.4	0-290
Gempol	6049.7	0-1326
Gondang Wetan	2698.7	0-112
Grati	4672.2	0-290
Kejayan	7995.1	0-290
Kraton	5623.3	0-112
Lekok	4767.2	0-112
Lumbang	12276.0	0-3313
Nguling	4532.9	0-290
Pandaan	4358.1	0-510
Pasrepan	8341.8	0-1326
Pohjantrek	1256.4	0-112

Prigen	13156.3	112-3313
Purwodadi	9099.6	112-3313
Purwosari	7460.2	112-761
Puspo	7189.1	290-3313
Rejoso	3526.9	0-112
Rembang	5718.7	0-112
Sukorejo	5810.9	0-510
Tosari	8160.3	3313
Tutur	9031.3	112-2439
Winongan	4291.6	0-290
Wonorejo	4362.7	112-290

Sumber: Data Demnas Badan Informasi Geospasial, 2020

2.1.3. Geologi

Jenis geologi di Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar yaitu : batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api. Dengan banyaknya jenis batuan yang ada, menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang cukup kaya. Dilihat dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua kelompok besar yaitu gunung api kuartar muda (*young quarternary*) seluas 52,43% dan kuartar tua (*old quarternary*) seluas 34,95%



Gambar 2.1 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan, 2010

Kondisi Geologi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari tiga belas (13) satuan batuan yaitu Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuartar atas penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api arjuno welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuartar tengah ringgit (Qvr), Satuan gunung api kuartar

tengger tua (Qpvtr). Secara garis besar jenis batuan yang ada di Kabupaten Pasuruan dikelompokkan ke dalam :

1. Endapan Permukaan

a. Batuan Alluvium :

1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur
2. Terdiri dari endapan sungai dan endapan pantai. Endapan sungai terhampar di sepanjang daerah aliran Sungai Rejoso sedangkan endapan pantai terhampar disepanjang pantai Selat Madura, sebagian besar berupa pasir kasar-halus dan lepas, setempat banyak tercampur pecahan cangkang cangkang, moluska atau kerang-kerangan dan koral.

b. Batuan Sedimen

➤ Formasi Kabuh:

1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batulempung tufan, batupasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan
2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji.

➤ Formasi Jombang:

1. Terdiri dari bahan breksi, batupasir tufan, batulempung tufan, lempung, batugamping dan tufan
2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan

➤ Formasi Welang:

1. Terdiri Terdiri dari bahan batupasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan
2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang

2. Batuan Gunung Api

a. **Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis).** Terdiri dari bahan breksi gunungapi, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat

b. **Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit).** Terdiri dari batuan gunungapi ringgit, batuan gunungapi tengger tua

c. **Batuan Gunung Api Arjuna – Welirang.** Terdiri dari breksi gunungapi, lava, breksi tufan dan tuf.

d. **Batuan Gunung Api Tengger.** Terdiri dari tuf pasiran, tuf batuapung, tuf abu dan aglomerat

e. **Tuf Rabano.** Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus

f. **Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan.** Terdiri dari breksi gunungapi, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar

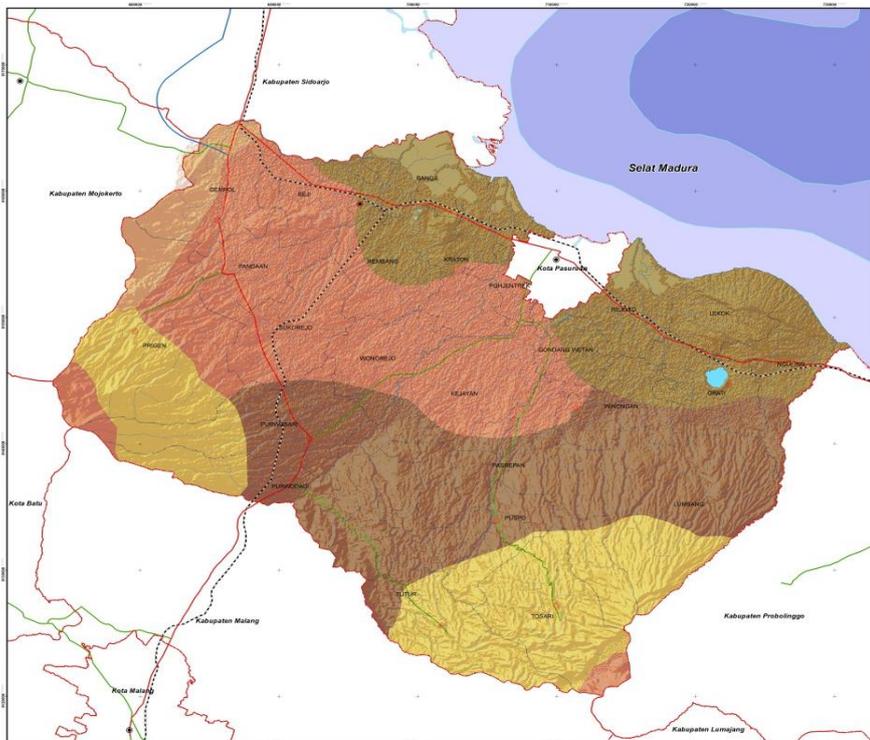
g. Batuan Gunung Api Bromo:

- Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar
- Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo. Pusat erupsinya berpindah pindah yang saling berdekatan, antara lain pada G. Bromo I (+2392 meter), G. Bromo II (+ 2339 m) dan G. Batok (+ 2440 m). G. bromo dianggap sebagai salah satu gunungapi yang masih aktif

h. Pasir Gunung Api Tengger:

- Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung
- Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo.

2.1.4 Jenis Tanah



Gambar 2.2 Kondisi Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan, 2010

Keberagaman jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasuruan karena dipengaruhi oleh faktor litologi dan strukturnya, yaitu mencakup: alluvial, regosol, andosol, grumosol, mediteran dan latosol. Penjelasan jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kelompok besar yaitu :

1. Alluvial

- a. Baham Induk : alluvial dari aneka macam asal

- b. Sifat dan Corak : warna: kelabu, tekstur : liat, keasaman : aneka, zat organik : kadar lemah, kejenuhan : sedang hingga tinggi, permeabilitas : rendah, kepekaan erosi : tinggi, tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya,
- c. Pemakaian : padi sawah, palawija dan perikanan.

2. Regosol

- a. Bahan induk : alluvial dari aneka macam asal
- b. Sifat dan Corak : warna: kelabu hingga kuning, tekstur : pasir, kadar liat <40%, keasaman : aneka, zat organik : kadar rendah, Kejenuhan : aneka, Permeabilitas : tinggi, Kepekaan erosi : tinggi,
- c. Pemakaian : padi sawah, palawija, tebu, sayuran

3. Andosol

- a. Bahan induk : abu dan tuf vulkan
- b. Sifat dan Corak : warna: hitam hingga kuning, tekstur : lempung hingga debu, liat menurun, keasaman : agak masam hingga netral, zat organik: lemah, Kejenuhan : basa, Permeabilitas : sedang, Kepekaan erosi : besar,
- c. Pemakaian : sayuran, bunga-bunga, teh , kopi, hutan pinus.

4. Grumusol

- a. Bahan induk : merjel, liat, tuf vulkan.
- b. Sifat dan Corak : warna: kelabu hingga hitam, tekstur : liat makin ke bawah makin meningkat, keasaman : sedikit asam hingga alkalin, zat organik : kadar rendah, kejenuhan : basa tinggi, permeabilitas : rendah, kepekaan erosi : besar,
- c. pemakaian : padi sawah, jagung, kedelai, tebu, kapas dan hutan jati.

5. Mediteran

- a. Bahan induk : batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf vulkan basa,
- b. Sifat dan Corak : warna: kuning hingga merah, tekstur : lempung liat, keasaman : agak masam hingga netral, zat organik : rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas : sedang, Kepekaan erosi : besar hingga sedang,
- c. Pemakaian : padi sawah, tegalan, rumput ternak.

6. Latosol

- a. Bahan induk : tuf vulkan, bahan vulkan,
- b. Sifat dan Corak : warna: merah hingga kuning, tekstur : liat tetap dari atas hingga ke bawah, keasaman : masam hingga agak masam, zat organik : kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas, menurun ke bawah, Kejenuhan : basa rendah hingga sedang, Permeabilitas : tinggi, Kepekaan erosi : kecil,

- c. Pemakaian : padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika.

2.1.5. Hidrologi

Kabupaten Pasuruan memiliki 7 sungai yang mengalir, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan, Sungai Kedunglarangan dan Sungai Petrung. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Pasuruan dan bermuara di Selat Madura yaitu:

- Sungai Laweyan : bermuara di Desa Penunggul - Kecamatan Nguling
- Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
- Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
- Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto – Kecamatan Kraton
- Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci – Kecamatan Bangil
- Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kalianyar – Kecamatan Bangil

Umumnya, penduduk Kabupaten Pasuruan memanfaatkan aliran sungai untuk irigasi teknis lahan pertanian. Selain dapat memberi manfaat bagi penduduk setempat, hampir seluruh sungai tersebut berpotensi menjadi penyebab bencana banjir. Banjir luapan sungai di Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh rusaknya hutan, pendangkalan sungai, tingginya curah hujan, perubahan tata ruang, dan lain sebagainya.

Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air cukup besar baik berupa air permukaan maupun air tanah, oleh karena itu disamping sistem aliran sungai di Kabupaten Pasuruan terdapat juga danau atau waduk alami cukup besar dan sejumlah mata air. Untuk potensi air tanah akan digambarkan melalui kondisi hidrogeologi. Kondisi hidrologi Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Air Permukaan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir enam sungai besar yang bermuara di Selat Madura, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan dan Sungai Kedunglarangan. Oleh karena itu tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian cukup memadai. Selain potensi sungai di atas, terdapat danau dan sejumlah mata air. Potensi tersebut agak terganggu dengan perubahan iklim yang ekstrem sehingga hujan lebih banyak dimungkinkan menjadi *run off* dibandingkan menjadi *recharge* potensi air permukaan dan infiltrasi untuk air tanah dangkal dan dalam.

Terdapat 15 (lima belas) sungai yang melintasi Kabupaten Pasuruan yang secara umum sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang tidak terlalu panjang, di bagian hulunya memiliki kemiringan dasar sungai yang terjadi, dan ada beberapa sungai yang

merupakan sungai musiman sehingga pada musim kemarau debit air tidak teratur. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.3 Sungai di Kabupaten Pasuruan

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m ³ /detik)
1	Sungai Kambeng	7,22	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Sungai Kedunglarangan	13,99	31	17	4,8	0,5 - 71,65
3	Sungai Masangan	5,95	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Sungai Raci	6,87	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Sungai Gerongan	6,22	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Sungai Pilang	9,82	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Sungai Welang	40,09	29	23	4,53	0,95 - 95,15
8	Sungai Gembong	8,57	17	13	2,42	0,38 - 137
9	Sungai Petung	14,34	15	12	4,88	0,75 - 73,43
10	Sungai Rejoso	15,72	25	18	4	10,40 - 227,1
11	Sungai Lawean	30,71	11	7		
12	Sungai Kramat	13,61	26	13	5,35	0,70 - 5,75
13	Sungai Pakelan	45,60	16,03	9	1,68	0,74 - 35,52
14	Sungai Rondoningo	24,16	11,6	8,5	1,47	0,30 - 3,34
15	Sungai Pancarglagas	16,06	13	11	2,54	0,42 - 12,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2015

2. Danau

Danau yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, merupakan sumber mata air dan terletak di Kecamatan Grati, dikenal dengan nama Ranugrati yang mempunyai volume efektif sebesar 5013 m³ dan volume maksimum sebesar 5217 m³, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det. Dari sejumlah sumber air yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 4000an l/det, kemudian Sumber Mata Air Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 225 l/det. Beberapa sumber air yang terdapat atau terbesar di seluruh Kabupaten Pasuruan jumlah, serta debitnya seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Sumber Air dan Debit Yang Dapat Dimanfaatkan Di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Sumber	Debit Total	
			Mainimum (l/det)	Maksimum (l/det)
1	Prigen	59	510,00	955,01
2	Pandaan	10	305,00	401,01
3	Gempol	12	169,80	275,01
4	Beji	22	205,00	371,01
5	Bangil	3	105,00	130,01

6	Rembang	14	479,00	687,01
7	Sukorejo	13	136,00	295,01
8	Purwosari	24	358,00	684,01
9	Purwodadi	29	211,00	417,01
10	Kraton	1	15,00	30,01
11	Tutur	7	46,00	181,01
	Jumlah	194	2.539,80	4.426,00

Sumber: Dokumen Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan, 2020

3. Sumber Air

Sejumlah sumber air yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 4000an l/det, kemudian Sumber Mata Air Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 225 l/det. Beberapa sumber air yang terdapat atau terbesar di seluruh Kabupaten Pasuruan jumlah, serta debitnya seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Sumber Air dan Debit Yang Dapat Dimanfaatkan Di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUMBER	DEBIT TOTAL	
			MINIMUM (I/DET)	MAKSIMUM (I/DET)
1	Prigen	59	510,00	955,01
2	Pandaan	10	305,00	401,01
3	Gempol	12	169,80	275,01
4	Beji	22	205,00	371,01
5	Bangil	3	105,00	130,01
6	Rembang	14	479,00	687,01
7	Sukorejo	13	136,00	295,01
8	Purwosari	24	358,00	684,01
9	Purwodadi	29	211,00	417,01
10	Kraton	1	15,00	30,01
11	Tutur	7	46,00	181,01
	Jumlah	194	2.539,80	4.426,00

Sumber: Dokumen Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan, 2015

4. Air Tanah

Secara umum air tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan ini mengalir dari daerah imbuhan di daerah puncak dan tubuh Gunung (G.) Arjuno dan G. Welirang, serta G. Bromo ke daerah luahnya, yaitu daerah dataran Gempol-Bangil-Pasuruan-Rejoso. Besarnya aliran air tanah dari daerah imbuhan di daerah Pegunungan Arjuno-Welirang dan Pegunungan Bromo-Tengger tersebut ke daerah luasanya di daerah dataran Gempol-Bangil-Pasuruan-Rejoso sangat dipengaruhi oleh jenis batuan yang dilaluinya, serta penyebaran akuifernya. Oleh karena itu penyebaran air tanah tidaklah merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana keterdapatannya serta potensinya akan sangat tergantung pada sifat lapisan akuifernya. Sedangkan sifat akuifer tersebut akan ditentukan oleh parameter dari akuifernya, yang antara lain menyangkut kapasitas jenis dan keterusannya.

Wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan kuantitasnya (besarnya aliran air tanah) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu Besar (debit > 10 liter/detik), Sedang (debit : 2-10 liter/detik), dan Kecil (debit < 2 liter/detik). Sedangkan menurut kualitas air tanahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES /SK /VI I/ 2002 (Tabel 9) termasuk kategori baik.

a. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi

Wilayah potensi air tanah tinggi ini menempati hampir seluruh daerah dataran tinggi, yaitu meliputi seluruh wilayah Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondang Wetan, dan Kecamatan Winongan, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Grati.

b. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang

Wilayah potensi air tanah sedang ini meliputi daerah dataran aluvium pantai dan kaki gunungapi, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, dan Kecamatan Nguling, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Grati.

c. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah

Wilayah potensi air tanah rendah ini mempunyai penyebaran hampir seluruh daerah tubuh dan puncak gunung api Arjuno-Welirang serta daerah perbukitan bergelombang yang ditutupi oleh batuan sedimen padu F. Jombang dan F. Kabuh, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo, dan Kecamatan Lumbang, serta sebagian wilayah Kecamatan

Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Pasrepan.

2.1.6. Klimatologi

Keadaan iklim di Kabupaten Pasuruan adalah pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson ini mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat). Antara curah hujan di musim hujan dan curah hujan di musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi mulai bulan November sampai dengan bulan Mei, sedang musim kemarau biasanya mulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Temperatur rata-rata berkisar antara 220 C sampai dengan 320 C. Temperatur 220 C terjadi di bulan Juli dan bulan Agustus sedangkan temperatur 320C umumnya terjadi di bulan April.

2.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan proses panjang pembangunan yang berpengaruh terhadap kerentanan suatu wilayah. Persebaran penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa luas guna lahan terbesar di Kabupaten Pasuruan adalah sawah irigasi, dengan total luasan 38.391,34 hektare. Luas lahan terbangun adalah 17.301,60 ha (17%) dari luas total Kabupaten Pasuruan. Hutan dan semak belukar yang menjadi variabel nilai kerentanan masing masing memiliki luas 47.415 ha dan 13.188,88 ha. Luas hutan sangat berpengaruh pada tingkat resiko bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, karena rusaknya hutan dapat meningkat resiko bencana pada tiga jenis bencana tersebut.

Tabel 2.6 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

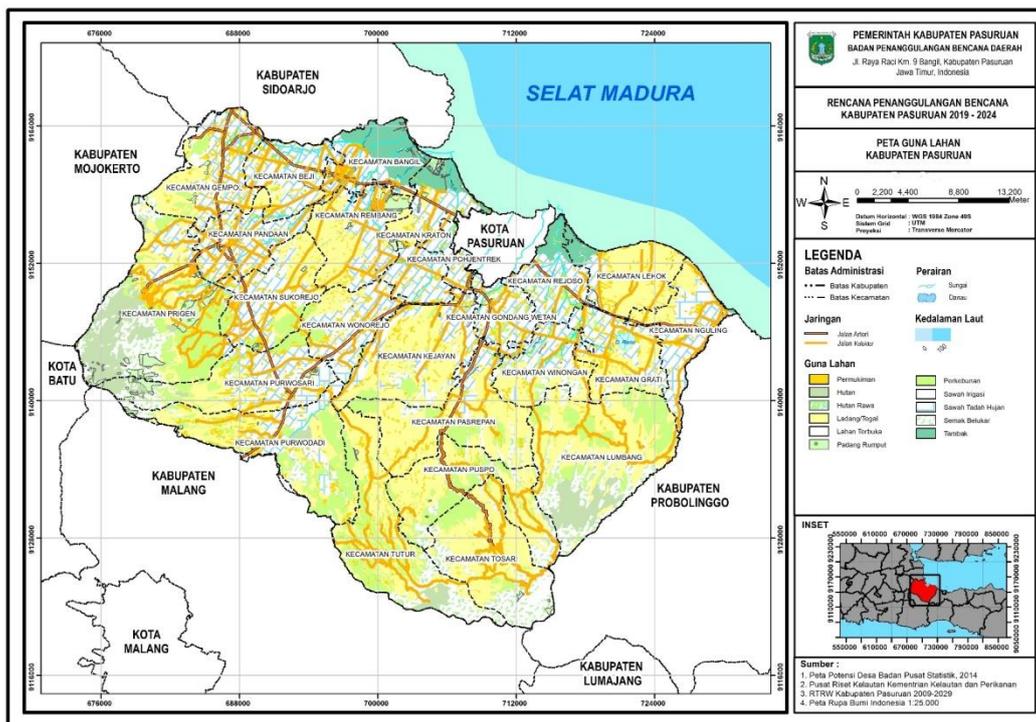
NO.	URAIAN PENGGUNAAN LAHAN	LUAS LAHAN (m ²)	(%)
1.	Aneka Industri	14.765.996,387	0,994%
2.	Industri Kecil	344.680,139	0,023%
3.	Jasa, Permukiman	151.082.038,245	10,169%
4.	Peternakan Unggas	306.630,756	0,021%
5.	Tambak	25.195.544,215	1,696%
6.	Sawah Irigasi	389.073.550,587	26,187%
7.	Sawah Tadah Hujan	22.819.534,847	1,536%
8.	Buah-Buahan	87.986,002	0,006%
9.	Kebun Campuran	48.162.199,470	3,242%
10	Perkebunan (Sudah Menghasilkan)	41.673.344,380	2,805%
11.	Tegalan/Ladang	535.637.977,722	36,051%
12.	Hutan Sejenis	176.485.297,965	11,878%
13.	Padang Rumput	10.501.461,735	0,707%

NO.	URAIAN PENGGUNAAN LAHAN	LUAS LAHAN (m ²)	(%)
14.	Semak	40.232.080,775	2,708%
15.	Kolam Air Tawar	15.667,390	0,001%
16.	Lapangan Olahraga	3.198.786,977	0,215%
17.	Tanah Kosong Sudah Diperuntukan	483.204,616	0,033%
18.	Tanah kosong/tanah terbuka	18.181.668,571	1,224%
19.	Sungai	3.225.073,791	0,217%
20.	Danau/Situ/Telaga	1.888.426,623	0,127%
21.	Jalan Aspal	1.197.233,686	0,081%
22.	Kuburan/Pemakaman	1.201.168,810	0,081%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Hasil Digitasi dan Analisa, 2013.

Dari Tabel dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Persentase Luasan Penggunaan lahan terhadap luasan keseluruhan Wilayah Kabupaten Pasuruan yang terbesar yaitu Tegalan/Ladang (sekitar 36,1%), Sawah Irigasi (sekitar 26,2%), dan Hutan (sekitar 1,9%), Jasa & Permukiman Penduduk (sekitar 10,2%),
- Luasan penggunaan lahan untuk Industri secara umum (terhadap keseluruhan luasan Wilayah Kabupaten Pasuruan) adalah relatif kecil yaitu sekitar kurang dari 1%,
- Luasan penggunaan lahan untuk Hutan (bukan penetapan kawasan) adalah sekitar 11,9%.



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan

Sumber: BPN, 2017

Potensi (kasar) untuk pembangunan terhadap lahan-lahan tidak potensial (diluar budidaya pertanian dan lindung) masih relatif cukup besar ke depan (yaitu meliputi penggunaan lahan berupa padang rumput, semak, dan tanah kosong) adalah sekitar 69.398.415,697 m² atau 6939,84 Ha atau 4,7%.

Tabel 2.7 Persebaran Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan

Kecamatan	Guna Lahan	Luas (Ha)
Bangil	Sawah Irigasi	1378.19
	Hutan Rawa	151.56
	Air Tawar	28.48
	Tambak	2047.03
	Permukiman	491.51
	Padang Rumput	107.85
	Perkebunan	22.56
	Ladang/Tegal	91.69
Beji	Air Tawar	19.01
	Ladang/Tegal	294.23
	Padang Rumput	24.44
	Perkebunan	65.50
	Permukiman	658.24
	Sawah Irigasi	2823.36
	Semak Belukar	29.59
Gempol	Ladang/Tegal	1331.39
	Semak Belukar	90.35
	Permukiman	1167.19
	Perkebunan	431.67
	Sawah Irigasi	2751.17
	Air Tawar	41.67
	Padang Rumput	105.93
	Sawah Tadah Hujan	8.52
Padang Pasir	121.37	
Gondang Wetan	Permukiman	446.19
	Sawah Irigasi	1926.53
	Padang Rumput	6.52
	Perkebunan	319.29
	Semak Belukar	0.21
Grati	Permukiman	664.53
	Ladang/Tegal	1675.14
	Semak Belukar	101.41
	Perkebunan	198.08
	Sawah Tadah Hujan	163.53
	Sawah Irigasi	1672.27
	Danau	188.70
	Padang Rumput	2.99
	Padang Pasir	5.46
Kejayan	Sawah Tadah Hujan	471.31
	Ladang/Tegal	4030.64
	Permukiman	773.23
	Semak Belukar	230.02
	Sawah Irigasi	2048.90
	Perkebunan	426.74

Kecamatan	Guna Lahan	Luas (Ha)
Kraton	Padang Rumput	14.30
	Sawah Irigasi	3117.82
	Permukiman	636.54
	Ladang/Tegal	600.43
	Perkebunan	86.60
	Padang Rumput	143.08
	Air Tawar	33.81
	Tambak	812.89
	Hutan Rawa	189.78
	Sawah Tadah Hujan	2.34
	Lekok	Permukiman
Padang Rumput		31.38
Air Tawar		5.26
Ladang/Tegal		3245.32
Danau		2.66
Sawah Tadah Hujan		18.65
Sawah Irigasi		440.48
Tambak		483.14
Hutan Rawa		18.91
Perkebunan		8.15
Semak Belukar		24.67
Lumbang		Ladang/Tegal
	Perkebunan	2522.45
	Permukiman	236.80
	Hutan	1413.03
	Sawah Tadah Hujan	16.87
	Sawah Irigasi	1.12
	Padang Rumput	3.03
	Padang Rumput	0.84
	Air Tawar	0.33
	Semak Belukar	2847.90
Nguling	Permukiman	603.13
	Sawah Tadah Hujan	1171.71
	Ladang/Tegal	1025.11
	Semak Belukar	5.39
	Sawah Irigasi	1676.37
	Air Tawar	1.13
	Padang Rumput	10.15
	Tambak	24.52
	Hutan Rawa	3.79
	Perkebunan	11.53
Pandaan	Ladang/Tegal	302.87
	Permukiman	821.13
	Perkebunan	61.46
	Sawah Irigasi	3147.84
	Air Tawar	4.36
	Padang Rumput	18.51
	Semak Belukar	1.88
Pasrepan	Ladang/Tegal	5030.84
	Permukiman	553.83
	Sawah Irigasi	727.50
	Perkebunan	1230.34
	Semak Belukar	578.13

Kecamatan	Guna Lahan	Luas (Ha)
	Sawah Tadah Hujan	217.98
	Padang Rumput	3.17
Pohjantrek	Sawah Irigasi	1015.73
	Permukiman	192.22
	Ladang/Tegal	0.36
	Perkebunan	45.01
	Air Tawar	3.08
	Padang Rumput	0.00
Prigen	Hutan	2453.39
	Padang Rumput	1155.44
	Semak Belukar	2250.15
	Permukiman	3956.80
	Ladang/Tegal	2004.58
	Lahan Terbuka	1.02
	Sawah Tadah Hujan	25.29
	Sawah Irigasi	1306.03
Air Tawar	3.49	
Purwodadi	Padang Rumput	78.25
	Semak Belukar	640.17
	Permukiman	884.50
	Sawah Irigasi	686.69
	Sawah Tadah Hujan	885.89
	Ladang/Tegal	2831.85
	Perkebunan	2415.67
	Air Tawar	0.27
Hutan	240.51	
Purwosari	Hutan	360.66
	Padang Rumput	304.09
	Semak Belukar	604.44
	Permukiman	968.61
	Sawah Irigasi	2257.34
	Ladang/Tegal	1268.77
	Perkebunan	1065.99
	Sawah Tadah Hujan	1066.08
Puspo	Ladang/Tegal	3769.23
	Perkebunan	1644.27
	Permukiman	276.23
	Semak Belukar	1436.09
	Padang Rumput	8.43
	Hutan	54.04
Rejoso	Sawah Tadah Hujan	0.68
	Air Tawar	20.96
	Permukiman	380.54
	Sawah Irigasi	2262.94
	Tambak	571.22
	Padang Rumput	15.53
	Hutan Rawa	7.59
	Perkebunan	257.16
Semak Belukar	10.95	
Rembang	Permukiman	562.71
	Ladang/Tegal	2412.23
	Perkebunan	60.84
	Padang Rumput	541.49

Kecamatan	Guna Lahan	Luas (Ha)
	Semak Belukar	5.94
	Air Tawar	4.56
	Sawah Irigasi	2130.96
Sukorejo	Ladang/Tegal	1429.96
	Semak Belukar	29.22
	Permukiman	844.52
	Perkebunan	763.38
	Sawah Irigasi	2662.80
	Padang Rumput	81.02
Tosari	Semak Belukar	2371.48
	Ladang/Tegal	4380.63
	Perkebunan	950.95
	Permukiman	105.72
	Padang Rumput	63.72
	Padang Pasir	275.01
	Lahan Terbuka	12.33
	Danau	0.29
	Sawah Tadah Hujan	0.09
Tutur	Perkebunan	2301.80
	Semak Belukar	1572.10
	Ladang/Tegal	4105.22
	Permukiman	610.85
	Padang Rumput	18.38
	Hutan	422.92
Winongan	Sawah Irigasi	1813.36
	Perkebunan	375.25
	Permukiman	369.41
	Ladang/Tegal	1286.76
	Semak Belukar	358.80
	Sawah Tadah Hujan	82.98
	Air Tawar	0.15
	Padang Rumput	4.89
Wonorejo	Sawah Tadah Hujan	162.28
	Ladang/Tegal	693.33
	Sawah Irigasi	2543.94
	Perkebunan	349.59
	Padang Rumput	5.03
	Permukiman	608.56

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 1:25.000

2.1.8. Wilayah Potensi Rawan Bencana

2.1.8.1 Potensi Kerawanan Bencana Alam

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan. Keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

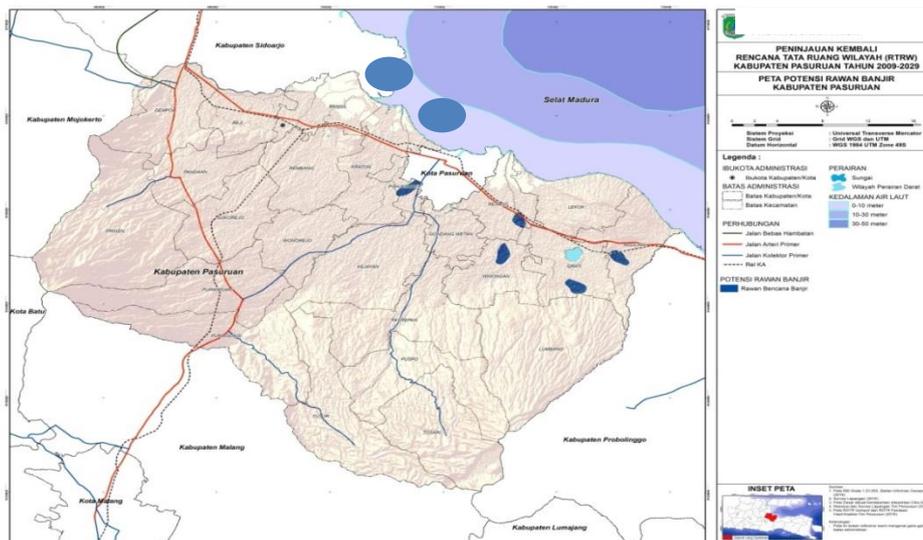
Yaitu kawasan Gunung Bromo seluas 1.320 ha dan daerah waspada seluas 751 ha yang berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa Kedawung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang, sedangkan kawasan rawan bencana gunung berapi di Gunung Welirang seluas 1.368 Ha dan waspada seluas 809 Ha yang meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo dan Desa Tambaksari di Kecamatan Purwosari.

2. Kawasan rawan longsor/kerawanan gerakan tanah

Potensi kawasan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelerengan > 40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.

3. Kawasan rawan banjir

Potensi kawasan rawan banjir di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 11.948,15 ha, berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, karena merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai. Kondisi banjir ini diakibatkan adanya hujan di hulu sungai cukup tinggi, sehingga mengakibatkan air meluap, serta beberapa kecamatan lagi yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton merupakan daerah rawan banjir yang biasanya disebabkan adanya rob.



Gambar 2.4 Peta Kondisi Kerawanan terhadap Bencana BANjir di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: BPBD Kabupaten Pasuruan, 2017

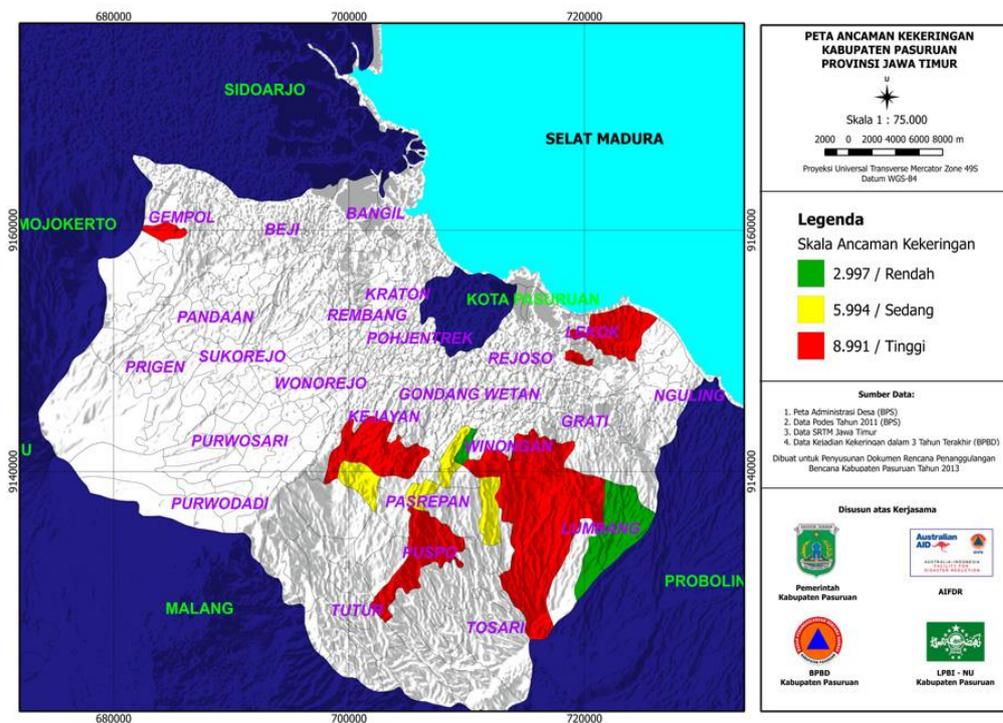
4. Kawasan rawan bahaya angin puyuh/puting beliung

Berpotensi di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo, serta kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.

5. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan

Berpotensi terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang merupakan kawasan hutan dan semak belukar diantaranya beberapa yang merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengelolanya adalah Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, CA Gunung Abang, TWA Tretes, Kawasan Hutan/Pegunungan di R.Soeryo, Kawasan Pegunungan Arjuna Welirang dan Penanggungan (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol).

6. Kekeringan



Gambar 2.5 Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Pasuruan

Sumber: Hasil Pemetaan Ancaman, 2013

Ancaman kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terbagi atas 3 tingkatan, yaitu :

- Ancaman kekeringan tinggi, berpotensi terjadi di beberapa desa berikut ini : Kecamatan Lumbang (Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa Watulumbang), Kecamatan Kejayan (Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo), Kecamatan Lekok (Desa Pasinan, Desa Wates, Desa

- Semedusari, dan Desa Branang), Kecamatan Winongan (Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi), Kecamatan Puspo (Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran), Kecamatan Gempol (Desa Bulusari), Kecamatan Grati (Desa Karanglo).
- b. Ancaman kekeringan sedang terjadi di Kecamatan Pasrepan (Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, Desa Tambakrejo).
 - c. Ancaman kekeringan rendah terjadi di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang), dan Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

Kebakaran di area permukiman/industri yang terjadi di Kabupaten pasuruan antara tahun 2012-2016 tertera pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2016

TAHUN	LOKASI/FREKUENSI KEJADIAN
2015	<ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pandaan (3 Kl) b. Kecamatan Sukorejo (1 Kl) c. Kecamatan Purwodadi (1 Kl) d. Kecamatan Gempol (1 Kl) e. Kecamatan Beji (4 Kl) f. Kecamatan Bangil (1 Kl) g. Kecamatan Kraton (6 Kl) h. Kecamatan Rembang (5 Kl) i. Kecamatan Kejayan (1 Kl) j. Kecamatan Pohjentrek (1 Kl)
2016	<ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pandaan (1 Kl) b. Kecamatan Purwosari (2 Kl) c. Kecamatan Purwodadi: 1 Kl) d. Kecamatan Wonorejo (2 Kl) e. Kecamatan Wonorejo (2 Kl) f. Kecamatan Gempol (4 Kl) g. Kecamatan Beji (> 3 Kl) h. Kecamatan Rembang (2 Kl) i. Kecamatan Kejayan (1 Kl)

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2017

2.1.8.2 Kejadian Bencana

Kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9 Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan

No.	Jenis Bencana	Lokasi
1.	Erupsi Gunung Berapi	Tutur, Tosari, Puspo, Lumbang, Prigen
2.	Tanah Longsor	Tosari, Tutur, Puspo, Lumbang, Pasrepan, Purwodadi, Prigen, Gempol

No.	Jenis Bencana	Lokasi
3.	Banjir	Bangil, Rejoso, Grati, Winongan, Nguling, Beji, Kraton, Rembang, Gempol, Pandaan, Pohjentrek dan Gondangwetan.
4.	Kekeringan	Puspo, Lumbang, Kejayan, Winongan, Gempol, Pasrepan, Grati, Lekok.
5.	Kebakaran Hutan	Purwodadi, Puspo, Tosari.

Sumber: BPBD Kabupaten Pasuruan, 2017

2.1.9. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan dan menjadi salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk secara kuantitas dan kualitas menjadi perhatian utama, karena jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (surat nomor 050/4014/Bangda Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Penggunaan Data Kependudukan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah), bahwa untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah, RPJMD dan RKPD, diharuskan menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,1% dengan *sex ratio* diatas 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Angka *sex ratio* di atas 100, mengindikasikan beberapa hal, yaitu jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih besar daripada bayi perempuan, banyak penduduk perempuan yang bermigrasi keluar daerah, dan tingkat kematian penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.

Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2017

URAIAN	2015	2016	2017
Laki-laki (jiwa)	864.785	880.810	898.243
Perempuan (jiwa)	849.541	865.279	881.162
Jumlah (jiwa)	1.714.326	1.746.089	1.779.405
Pertumbuhan (%)	2,56	1,85	1,91
Sex ratio (laki-laki/perempuan)	101,79	101,79	101,94

Sumber : *Dispenduk Capil, 2017*

Secara kualitas kondisi kependudukan antara lain dapat digambarkan melalui aspek pendidikan. Komposisi penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017 menunjukkan bahwa 52% (mayoritas) berpendidikan SD/belum tamat SD, 15% berpendidikan SMP/ sederajat, 14% berpendidikan SMA/ sederajat, dan 3% berpendidikan tinggi (D3 ke atas). Kondisi tersebut menunjukkan adanya relevansi

dengan angka rata-rata lama sekolah (salah satu komponen indeks pembangunan manusia) tahun 2017 sebesar 6,82 tahun atau rata-rata berpendidikan SD.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	2016		2017	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Belum/Tidak Bekerja	383.441	21,96	373.639	21,00
2	Mengurus Rumah Tangga	217.971	12,48	223.851	12,58
3	Pelajar/Mahasiswa	263.729	15,10	271.814	15,28
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	21.460	1,23	20.351	1,14
5	Petani/Peternak/Nelayan	257.607	14,75	260.483	14,64
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	25.800	1,48	25.675	1,44
7	Perdagangan/Industri/Konstruks/Transportasi	2.477	0,14	2.431	0,14
8	Buruh Harian Lepas	12.795	0,73	12.672	0,71
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer	355.066	20,33	367.594	20,66
10	Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker/Psikolog	1.175	0,07	1.274	0,07
11	Guru/Dosen	11.281	0,65	11.598	0,65
12	Pembantu Rumah Tangga	1.259	0,07	1.191	0,07
13	Tukang Batu/Kayu	2.808	0,16	2.672	0,15
14	Pedagang/Wiraswasta	176.433	10,10	191.159	10,74
15	Kepala /Perangkat Desa	1.400	0,08	1.382	0,08
16	Lainnya	11.387	0,65	11.619	0,65
Jumlah		1.746.089	100	1.779.405	100

Sumber: Dispenduk Capil, 2017

Adapun karakteristik penduduk Kabupaten Pasuruan menurut pekerjaan sebagaimana Tabel 2.11 Penduduk Kabupaten Pasuruan terbanyak bekerja sebagai karyawan swasta/BUMN/BUMD/honorer yaitu sekitar 20%. Selanjutnya sekitar 16% sebagai petani/peternak/nelayan dan buruh petani/peternak/nelayan, serta sekitar 10% sebagai pedagang/wiraswasta. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebergantungan terhadap investasi swasta cukup tinggi, sehingga tingkat keberlanjutannya cukup rendah atau rentan terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu ke depan perlu dikembangkan iklim yang mendukung tumbuhnya minat wirausaha masyarakat berbasis potensi daerah.

Tabel 2.12 Perkembangan jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2017

Uraian	2016	2017
Usia muda (0-14 tahun)	306.528	336.454
Usia produktif (15-64 tahun)	1.302.189	1.313.037
Usia tua (65 tahun ke atas)	150.436	150.163
Rasio ketergantungan	35,09	37,06

Sumber: Dispenduk Capil, 2017

Berdasarkan tingkat produktivitasnya, penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2017 menunjukkan bahwa 72,96% merupakan usia produktif (umur 15-64 tahun), 18,70% usia muda (umur 0-14 tahun), dan 8,34% usia tua (umur 65 th ke atas). Kondisi tersebut menghasilkan angka rasio ketergantungan sebesar 37,06 yang bermakna bahwa dari setiap 100 orang usia produktif menanggung sejumlah 37 orang usia nonproduktif. Angka rasio ketergantungan tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Hal ini tentu saja menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan karena beban yang ditanggung penduduk usia produktif semakin berat. Berdasarkan data yang ada, penambahan beban tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia muda. Oleh karena itu salah satu upaya yang perlu menjadi perhatian adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

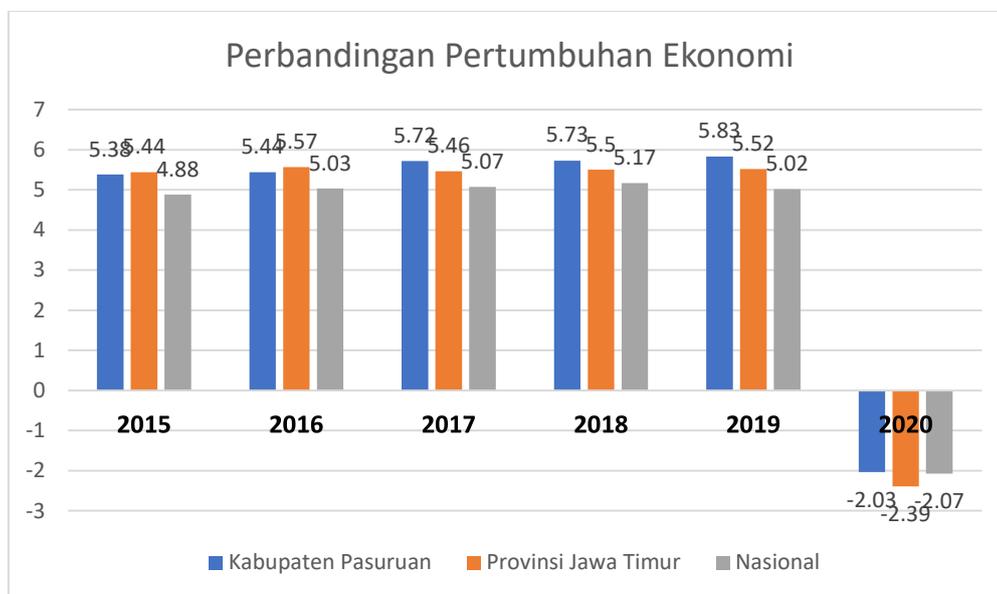
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam rangka perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat. Permasalahan ekonomi dapat dipandang sebagai sebuah masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat dari penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besar.

1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Perbandingan dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi dalam melihat perbedaan (selisi) maupun kesamaan dari dua hal (benda, dsb). Perbandingan pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kondisi dalam melihat perbedaan dan kesamaan dari perkembangan kegiatan produksi barang dan jasa dalam rangka peningkatan kemakmuran masyarakat. Perbandingan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi provinsinya maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, perbandingan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat dilihat dari perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tiap tahunnya.



Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

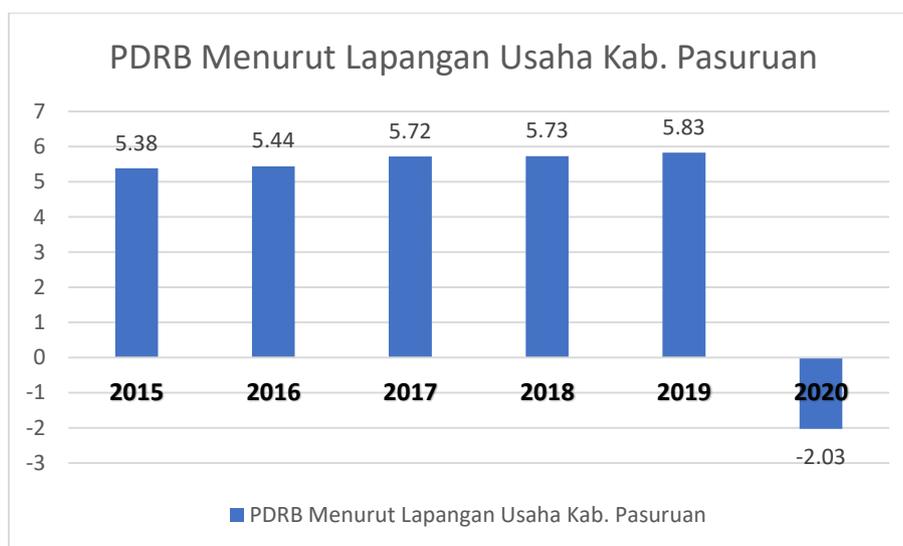
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 mencapai angka 5,83%, meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yaitu 5,73%. Peningkatan persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi barang dan jasa di Kabupaten Pasuruan memiliki dampak baik dalam meningkatkan pdrbarakat di Kabupaten Pasuruan. Jika membandingkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2019, maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan berkontribusi baik pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan angka dimana Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019 berada pada angka 5,83% sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2019 berada pada angka 5,52% dan Pertumbuhan Eknomi Nasional tahun 2019 berada pada angka 5,02%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya mencapai angka -2,03%. Dalam Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2020 pun mengalami penurunan, dilihat dari perbandingan angka dimana Provinsi Jawa Timur tahun 2020 berada pada angka -2,39% dan Pertumbuhan Eknomi Nasional tahun 2020 berada pada angka -2,07%. Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Kondisi diatas perlu dorongan dengan melakukan tiga strategi utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama penguatan neraca perdagangan. Pemerintah harus berupaya untuk mendorong ekspor melalui pengembangan hortikultura serta mengurangi ketergantungan impor. Strategi kedua adalah penguatan permintaan domestik. Pemerintah akan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan

Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan Kartu Prakerja, dan kemudahan Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kemudian, untuk meningkatkan konsumsi Pemerintah, akan dilakukan dengan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. Strategi terakhir adalah transformasi struktural. Hal ini dilakukan dengan cara revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor jasa, transformasi pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan hilirisasi pertambangan.

2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antar. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh (PDRB) atas dasar harga konstan.



Grafik 2.2 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

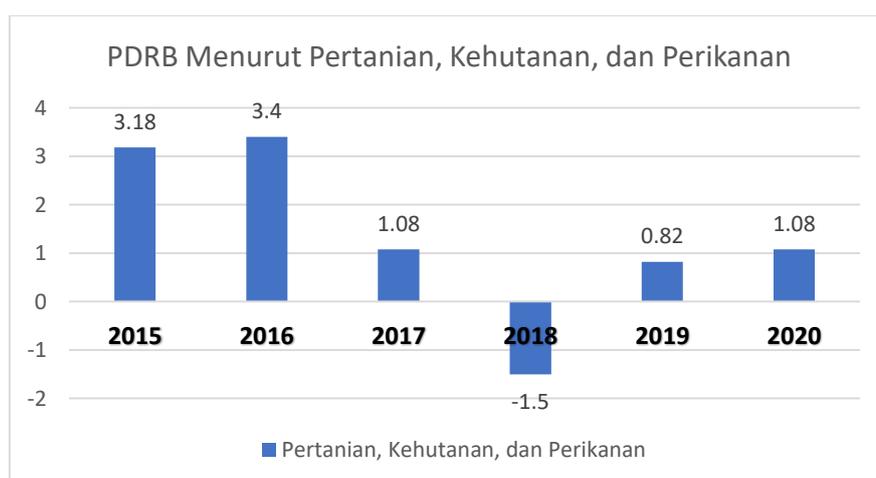
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Jika melihat nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan tiap tahunnya selalu meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Data tahun 2019 menunjukkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten Pasuruan mencapai angka 5,83% yang mana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar 0,04% yaitu pada angka 5,73% di tahun 2018. Peningkatan nilai ini juga dapat dilihat dari data tahun 2017 yaitu 5,72% atau meningkat 0,07%. Peningkatan nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa

nilai tambah bruto Kabupaten Pasuruan pada seluruh sektor perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang baik. Data tahun 2020 menunjukkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten Pasuruan mencapai angka -2,03%, jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya maka mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan didasarkan pada dampak pandemi Covid-19.

2.2.1.1.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala lapangan usaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda maupun barang hidup (biologis) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau dijual kepada orang lain. Lapangan usaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Data PDRB ADHK menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2017 menunjukkan angka 1,08% atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu -1,44%. Namun, PDRB ADHK menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan mencapai angka 0,82% serta di tahun 2020 mencapai angka 1,08% adanya dampak Pandemi Covid-19 Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan produksi dan memiliki pengaruh positif dalam pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.3 PDRB ADHK Menurut Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Kondisi diatas dapat didorong pertumbuhannya kembali dengan melakukan tiga langkah. Pertama adalah revitalisasi pertanian dengan cara pembangunan infrastruktur pertanian; penguatan kelembagaan petani melalui penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan

dan tenaga penyuluh; perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan 19-5 akses petani ke sistem pembiayaan; dan penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Kedua adalah revitalisasi kehutanan dengan cara revitalisasi industri kehutanan; pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Ketiga adalah revitalisasi perikanan dengan cara pendayagunaan sumber daya perikanan yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.1.2 Pertambangan dan Penggalian

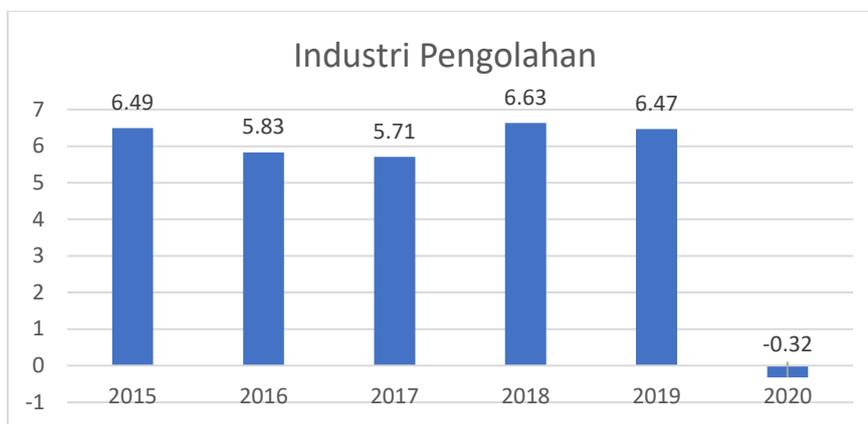


Grafik 2.4 PDRB ADHK Menurut Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Kategori ini mencakup pada empat sub kategori yaitu subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; sub kategori Pertambangan Batubara dan Lignit; sublapangan usaha Pertambangan Bijih Logam; serta subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Pada Kabupaten Pasuruan hanya ada subkategori yang terakhir, yaitu Pertambangan dan Penggalian. Data PDRB ADHK menurut lapangan usaha jenis pertambangan dan penggalian tahun 2017 menunjukkan angka 3,97% atau menurun menjadi 2,45% di tahun 2018. Kondisi ini semakin menurun di tahun 2019 yaitu mencapai angka 1,25% dan tahun 2020 yaitu mencapai angka -7,43% akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori pertambangan dan penggalian mengalami penurunan produksi sejak tahun 2018 hingga 2020.

2.2.1.1.3 Industri Pengolahan



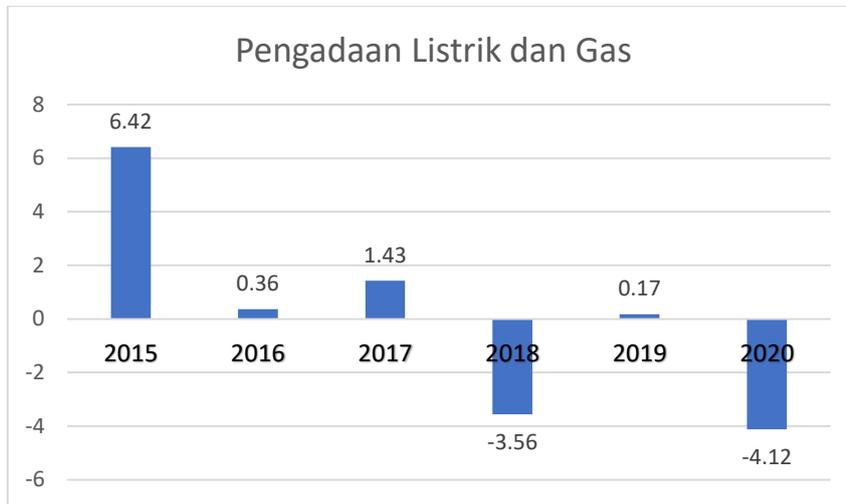
Grafik 2.5 PDRB ADHK Menurut Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Kategori Industri Pengolahan meliputi bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Industri Pengolahan tahun 2017 menunjukkan angka 5,71% yang kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 6,63%. Namun capaian PDRB ADHK Menurut Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 6,47% dan di tahun 2020 menjadi -0,32% akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori industri pengolahan mengalami penurunan produksi dan bernilai negatif bagi pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha.

2.2.1.1.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas yang mencakup pengadaan uap panas dan AC.



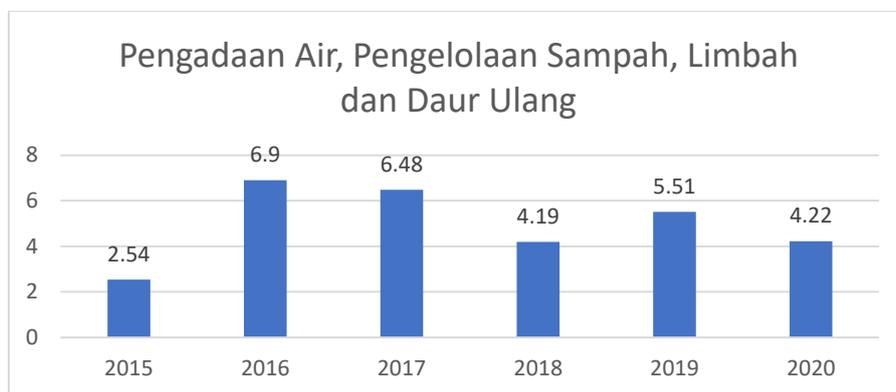
Grafik 2.6 PDRB ADHK Menurut Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2017 menunjukkan angka 1,43% yang kemudian menurun menjadi -3,56%. Capaian PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Pengadaan Listrik dan Gas kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 0,17%, namun menurun pada tahun 2020 menjadi -4,12%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori pengadaan listrik dan gas serta keadaan pandemi Covid-19 mengalami penurunan produksi dan memiliki pengaruh buruk dalam pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan dibandingkan tahun 2019.

2.2.1.1.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.



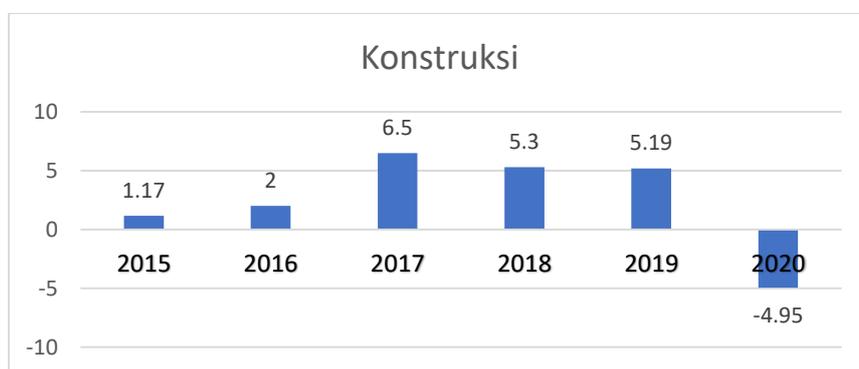
Grafik 2.7 PDRB ADHK Menurut Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang tahun 2017 menunjukkan angka 6,48% yang kemudian turun menjadi 4,19% di tahun 2018. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang meningkat di tahun 2019 menjadi 5,51% yang kemudian turun menjadi 4,22% di tahun 2020 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami penurunan produksi dan memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan PRDB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan dibandingkan tahun 2019.

2.2.1.1.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. Kategori ini digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.

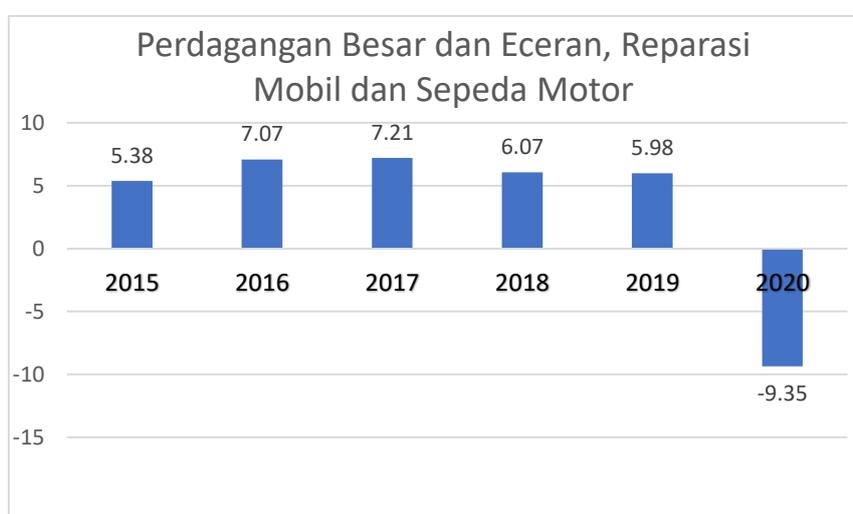


Grafik 2.8 PDRB ADHK Menurut Konstruksi Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Konstruksi tahun 2017 menunjukkan angka 6,5% yang kemudian turun menjadi 5,3% di tahun 2018. Angka PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Konstruksi kembali menurun menjadi 5,19% di tahun 2019 dan menjadi -4,95% di tahun 2020 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori konstruksi selalu mengalami penurunan produksi mulai dari tahun 2018 dan memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan PRDB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan jika dibandingkan tahun 2017 dan 2018.

2.2.1.1.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



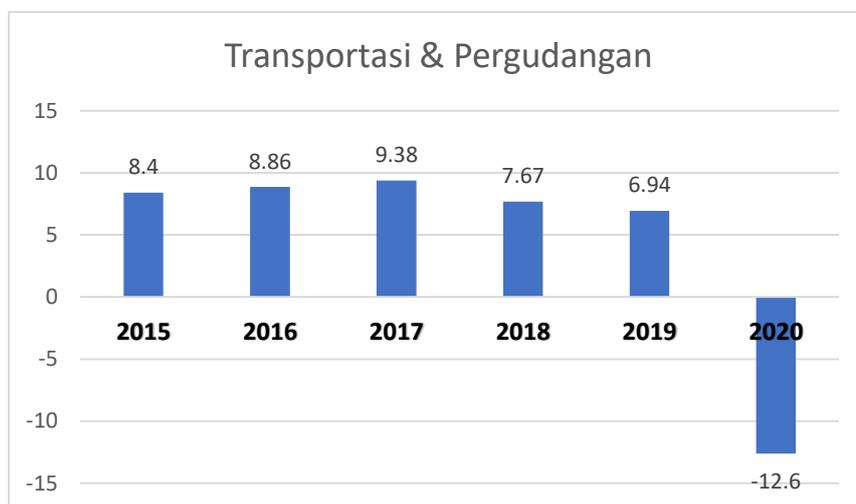
Grafik 2.9 PDRB ADHK Menurut Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Kategori ini meliputi lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut mulai dari penjualan secara grosir maupun eceran. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha jenis Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2019 menunjukkan angka 5,98% yang kemudian menurun menjadi -9,35% pada tahun 2020 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Kondisi menurun ini Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2019 mengalami penurunan produksi dan berdampak negatif pada nilai tambah PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

2.2.1.1.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.



Grafik 2.10 PDRB ADHK Menurut Transportasi dan Pergudangan Kab. Pasuruan 2015-2020

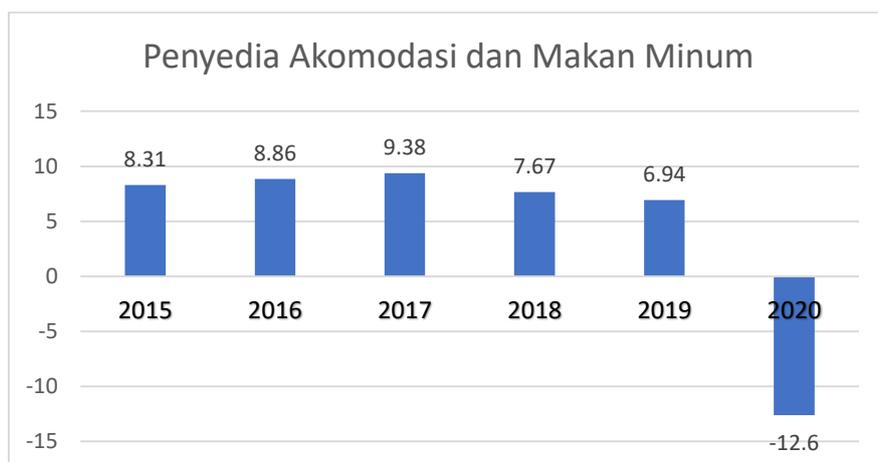
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan mulai dari tahun 2017 menunjukkan angka 9,38%, tahun 2018 menjadi 7,67%, tahun 2019 menjadi 6,94%, hingga tahun 2020 menjadi -12,6% akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah dari lapangan usaha kategori Transportasi dan Pergudangan selalu mengalami penurunan produksi mulai dari tahun 2018 hingga 2020 dan memiliki dampak negatif pada nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan dibandingkan tahun 2017.

2.2.1.1.9 Penyedia Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat

tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.



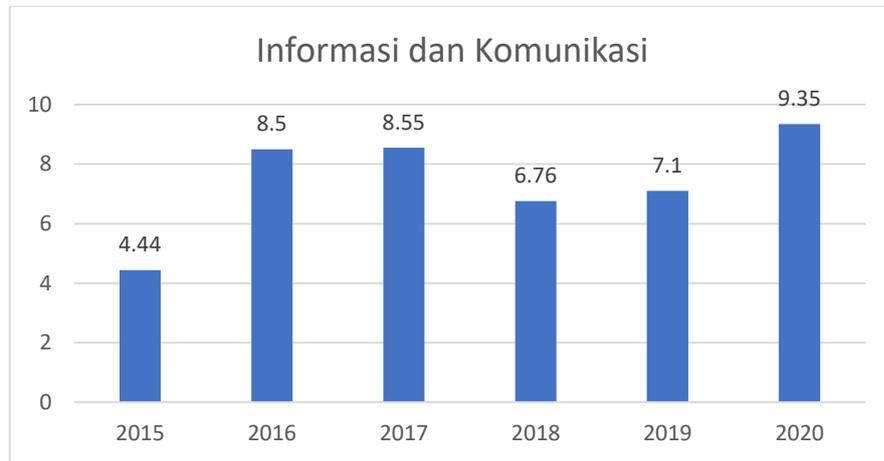
Grafik 2.11 PDRB ADHK Menurut Penyedia Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Penyedia Akomodasi dan Makan Minum tahun 2017 menunjukkan angka 9,38% kemudian menurun menjadi 7,67% di tahun 2018. Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan usaha Jenis Penyedia Akomodasi dan Makan Minum kembali menurun menjadi 6,94% di tahun 2019 dan menjadi -12,6% di tahun 2020 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2020 mengalami penurunan produksi dan berdampak negatif pada nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan dibandingkan tahun 2018 dan 2017 dan paling rendah dari 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.1.1.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk tersebut serta data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.



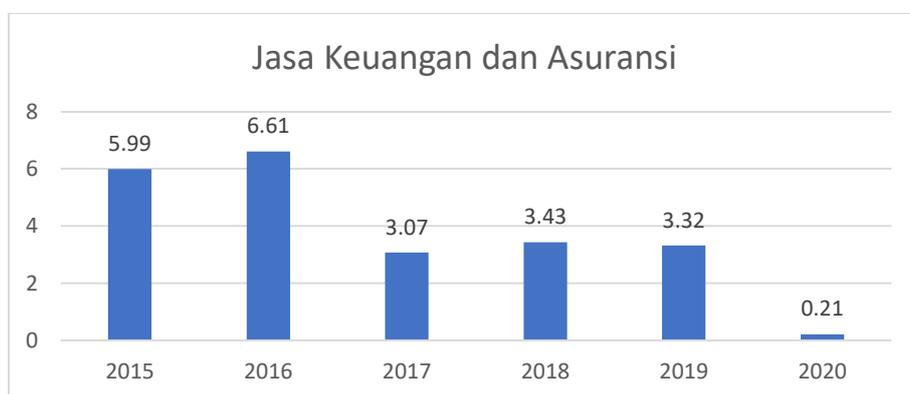
Grafik 2.12 PDRB ADHK Menurut Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Informasi dan Komunikasi tahun 2017 menunjukkan angka 8,55% kemudian menurun menjadi 6,76% di tahun 2018. Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Informasi dan Komunikasi kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 7,1% dan pada tahun 2020 menjadi 9,35% akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Informasi dan Komunikasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan produksi dikarenakan adanya kebijakan untuk bekerja dan belajar di rumah sejak pandemi Covid-19 dan berdampak positif bagi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pasuruan jika dibandingkan tahun 2019.

2.2.1.1.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.



Grafik 2.13 PDRB ADHK Menurut Jasa Keuangan dan Asuransi Kab. Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2017 menunjukkan angka 3,07% kemudian meningkat menjadi 3,43% di tahun 2018. Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami penurunan kembali menjadi 3,32% di tahun 2019 dan menjadi 0,21 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami penurunan produksi di tahun 2020 dan berdampak negatif bagi pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.

2.2.1.1.12 Real Estate



Grafik 2.14 PDRB ADHK Menurut Real Estate Kabupaten Pasuruan 2015-2020

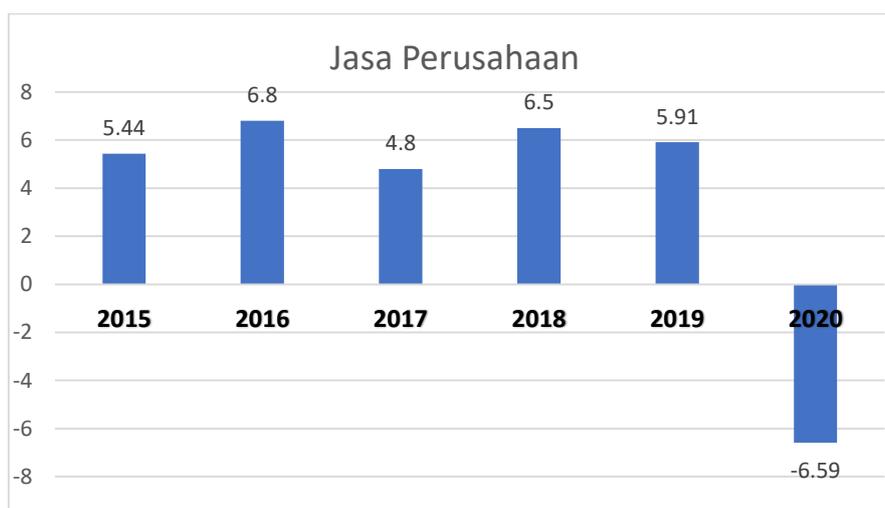
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen maupun perantara dalam penjualan atau pembelian *real estate* serta penyediaan jasa *real estate* lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan, serta penyewaan bangunan. Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha jenis *Real Estate* pada tahun 2017 menunjukkan angka 3,7% kemudian meningkat menjadi 4,55% di tahun 2018. Angka PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis *Real Estate* meningkat menjadi 5,53% di tahun 2019, yang kembali menurun menjadi 2,28% di tahun 2020 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori *Real Estate* penurunan produksi tahun 2020 dan bernilai negatif bagi pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.

2.2.1.1.13 Jasa Perusahaan

Kategori ini merupakan gabungan dari dua kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.



Grafik 2.15 PDRB ADHK Menurut Jasa Perusahaan Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PRDB ADHK Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Perusahaan tahun 2017 4,8% kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,5% di tahun 2018. Angka PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Perusahaan mengalami penurunan menjadi 5,91% di tahun 2019 dan menjadi -6,95% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Perusahaan tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan produksi dan bernilai negatif bagi pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha dibandingkan dengan tahun 2018 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19.

2.2.1.1.14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib



Grafik 2.16 PDRB ADHK Menurut Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha jenis Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib pada Tahun 2017 menunjukkan angka 2,2% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 4,22% di tahun 2018. Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan menjadi 3,5% di tahun 2019 dan menjadi -2,36% di tahun 2020 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2020 mengalami penurunan produksi dan bernilai negatif bagi pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.

2.2.1.1.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta serta mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

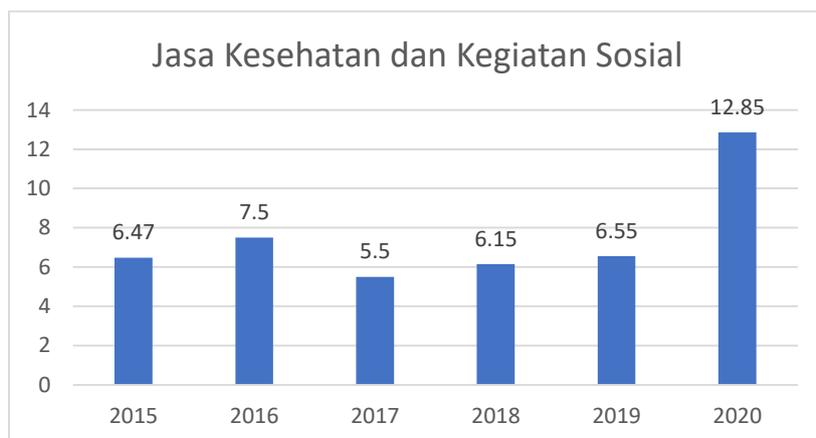


Grafik 2.17 PDRB ADHK Menurut Jasa Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Pendidikan Tahun 2018 menunjukkan angka 4,1% yang kemudian meningkat menjadi 6,54% di tahun 2019. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Pendidikan menurun dan mencapai angka paling rendah yaitu 1,75% pada tahun 2020 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Pendidikan mengalami penurunan produksi dan berdampak negatif bagi pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha dibandingkan tahun 2019.

2.2.1.1.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial



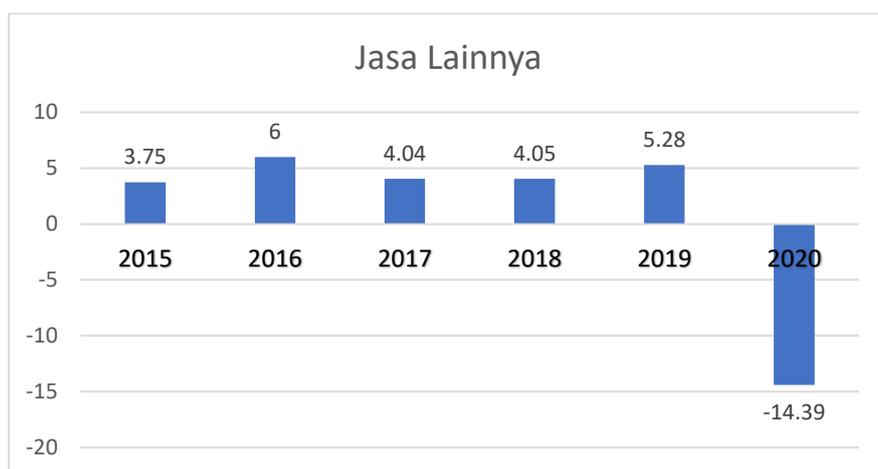
Grafik 2.18 PDRB ADHK Menurut Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan cakupannya dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Kesehatan;

Jasa Angkutan Khusus Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial. Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2018 menunjukkan angka 6,15% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,55% pada tahun 2019. Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 12,85% akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2020 mengalami peningkatan produksi dan berdampak positif bagi pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan mulai pada tahun 2018 hingga 2020.

2.2.1.1.17 Jasa Lainnya



Grafik 2.19 PDRB ADHK Menurut Jasa Lainnya Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain. Data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Lainnya Tahun 2017 menunjukkan angka 4,04% yang kemudian meningkat 0,01% menjadi 4,05% di tahun 2018. Nilai PDR ADHK B Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Lainnya kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 5,28%. Sedangkan Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Lainnya penurunan pada tahun 2020 menjadi -14,39% akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Lainnya

tahun 2020 mengalami penurunan produksi dan berdampak negatif bagi pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.

2.2.1.2 Persentase Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

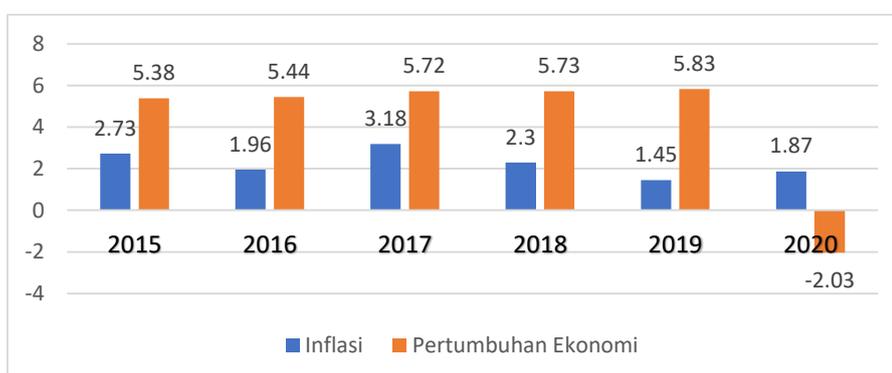
1. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi merupakan sebuah keadaan yang menjelaskan proses naiknya harga-harga umum secara terus menerus. Inflasi yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini karena harga barang dan jasa mengalami peningkatan sehingga menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diukur dengan menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Data Inflasi Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2015-2020 dapat dikendalikan di bawah 2 digit (10 persen) dan berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara makro kemampuan/daya beli masyarakat dapat terjaga.

Data inflasi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 berada pada angka 3,18%. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai inflasi Jawa Timur di tahun 2017 yaitu 4,04%. Hal serupa juga terjadi di tahun 2018, dimana nilai inflasi Kabupaten Pasuruan yang berada pada angka 2,3% lebih rendah dengan nilai inflasi Provinsi Jawa Timur dengan nilai 2,86%. Inflasi Kabupaten Pasuruan yang relatif rendah akan meningkatkan daya beli Masyarakat terhadap barang dan jasa.

Selain data inflasi, pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah penting untuk diukur ketercapaiannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan output perkapita.



Grafik 2.20 Persentase Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

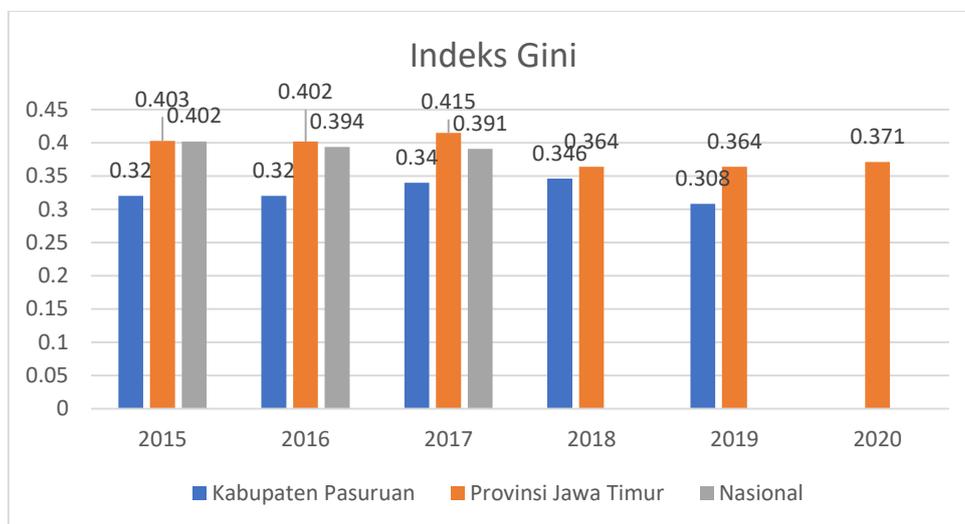
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berada pada angka 5,38% yang kemudian meningkat menjadi 5,44% di tahun 2016 dan 5,72% di tahun 2017. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan meningkat kembali di tahun 2018 dengan angka 5,73 % dan 5,83% di tahun 2020. Namun, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan di tahun 2020 menurun menjadi -2,03% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi tidak stabil.

2. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan jika Koefisien Gini bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan yang sempurna atau dalam arti lain aset hanya dikuasai oleh sekelompok penduduk saja.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995):

1. $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
2. $0.4 < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat);
3. $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.



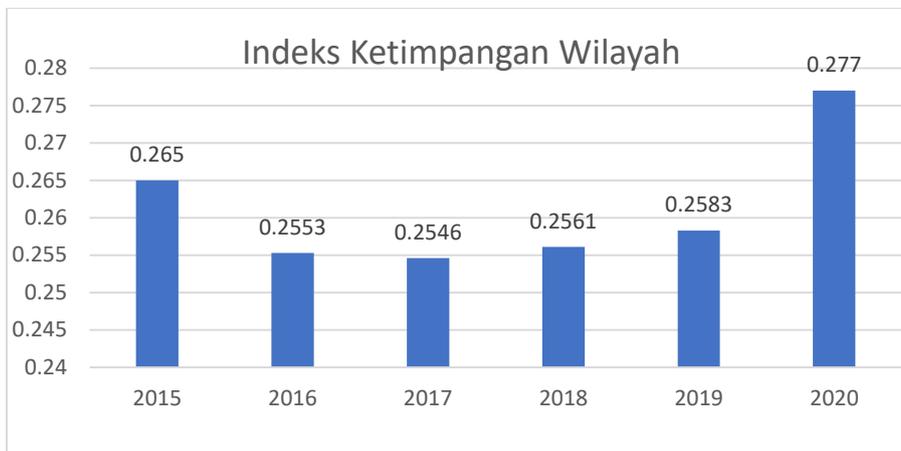
Grafik 2.21 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Indeks Gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2015-2020 cenderung mengalami kenaikan walaupun masih dalam standar kriteria ketimpangan rendah. Nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan tahun 2015 berada pada angka 0,32% dan tetap berada pada angka yang sama di tahun 2016. Nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan mulai mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 0,34% dan di tahun 2018 menjadi 0,346%. Nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 0,308%. Jika nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan dengan kriteria ketimpangan rendah, ternyata sudah berada lebih baik daripada capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Timur serta Indeks Gini Nasional. Hal ini karena Indeks Gini menggambarkan tingkatan ketimpangan antara yang paling miskin dan kaya dan harus dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor penyumbang rasio gini yang paling utama adalah indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, inflasi rendah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi.

3. Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)

Indeks Williamson merupakan pola perhitungan yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah. Dasar perhitungannya pada Indeks Williamson adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah, dalam hal ini PDRB perkapita perkecamatan.



Grafik 2.22 Indeks Ketimpangan 2015-2020

Sumber: LKjIP Kabupaten Pasuruan, 2020

Indeks Williamson Kabupaten Pasuruan periode tahun 2015 – 2020 menunjukkan kecenderungan naik atau kondisi yang kurang baik, karena kesenjangan wilayah mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Indeks Williamson berada pada angka 0,265% yang kemudian turun menjadi 0,2553% di tahun 2016 dan 0,2546% di tahun 2017. Nilai Indeks Williamson kemudian naik di tahun 2018 menjadi 0,2561% dan kembali naik menjadi 0,2583% di tahun 2019. Nilai Indeks Williamson naik cukup tinggi di tahun 2020 menjadi 0,277% akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan antisipasi agar kesenjangan tidak semakin lebar dan menjadi isu strategis yang harus ditemukan solusi konkritnya dengan memperhatikan kendala dan peluang yang ada.

2.2.1.3 Persentase Kemiskinan Kabupaten Pasuruan

1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari) dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dijadikan sebagai garis kemiskinan. Oleh karena itu penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.13 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

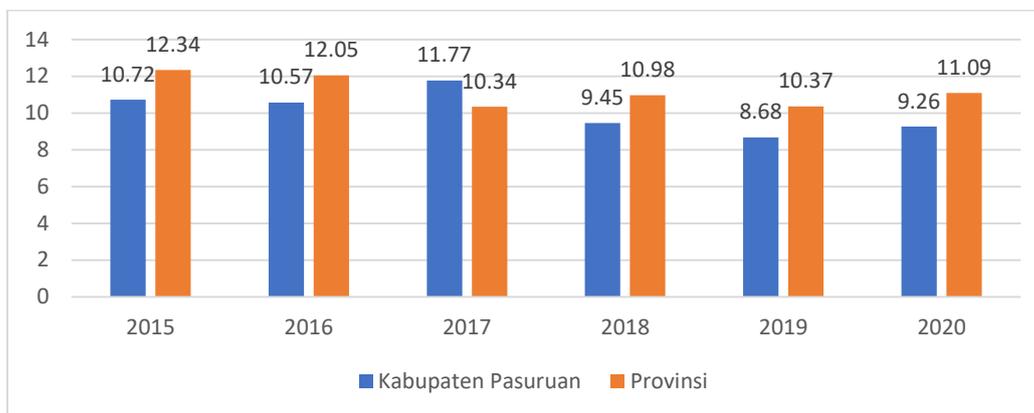
Sumber : BPS Kab Pasuruan, 2021

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	169,190	168,060	165,640	152,480	141,090	151,430
Persentase Penduduk Miskin	10.72	10.34	10.34	9,45	8,68	9,26
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	292,281	315141	315,141	331057	335 653	355 299
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.43	1.67	1.67	1.5	1.56	1.15
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0.31	0.44	0.44	0.37	0.43	0.23

Secara kuantitas kemiskinan Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan berada pada angka 169.190 jiwa kemudian menurun menjadi 168.060 di tahun 2016 dan 165.640 di tahun 2017. Penurunan juga terjadi di tahun 2018 dimana Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan berada pada angka 152.480 jiwa dan di 2019 menjadi 141.090 jiwa. Kuantitas kemiskinan Kabupaten Pasuruan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 151,430 jiwa. Begitupun secara kualitas, kondisi kemiskinan mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan indek kedalaman dan indek keparahan.

Perkembangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan juga dapat dilihat dari capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten pada tahun 2015-2020 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan berada di angka 1,43% yang kemudian meningkat menjadi 1,67% di tahun 2016 dan bertahan di tahun 2017. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasuruan baru turun menjadi 1,5% di tahun 2018, namun kembali naik pada tahun 2019 menjadi 1,56%. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasuruan kembali turun menjadi 1,15% di tahun 2020 akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan tidak menentu (kadang mengalami peningkatan dan/atau penurunan) selama lima tahun terakhir.

Sama dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020 juga mengalami fluktuatif. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 menunjukkan angka 0,31 % yang kemudian meningkat menjadi 0,44% di tahun 2016 dan bertahan dengan angka yang sama di tahun 2017. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan kembali menurun menjadi 0,37% di tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 0,43% di tahun 2019. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan kembali menurun menjadi 0,23%. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan tidak menentu (kadang mengalami peningkatan dan/atau penurunan) selama lima tahun terakhir.



Grafik 2.23 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Tabel 2.14 Perkembangan TPT Kabupaten Pasuruan dan Perbandingan TPT Kabupaten Pasuruan dengan TPT Jawa Timur dan TPT Nasional

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja	8.473	10.014	12.395	13.564	11.473	4.233
TPT Kab Pasuruan	6.41	4.18	4.97	6.11	5.42	6.24
TPT Jatim	4.47	4.21	4	3.85	3.83	5.17
TPT Nasional	6.18	5.61	5.5	5.30	5.23	7.07

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) terdiri dari penduduk yang bekerja, penduduk yang mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020 cenderung meningkat. Data tahun 2015 menunjukkan jumlah angkatan kerja yang bekerja di tahun 2015 adalah 8.473 orang yang kemudian meningkat 10.014 orang di tahun 2016 serta 12.395 di tahun 2017. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di tahun 2018 juga meningkat menjadi 13.564 orang namun menurun menjadi 11.473 orang di tahun 2019. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di tahun 2020 mengalami penurunan 4.233 orang dikarenakan banyak yang mengalami pemberhentian kerja akibat adanya dampak Pandemi Covid-19.

Data TPT Kabupaten Pasuruan periode tahun 2015-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2015 TPT Kabupaten Pasuruan berada pada angka 6,41% namun diatas TPT Provinsi Jawa Timur yaitu 4,47% dan TPT Nasional yaitu 6,18%. Angka TPT Kabupaten Pasuruan menurun di tahun 2016 menjadi 4,18% dan dibawah TPT Provinsi Jawa Timur yaitu 4,21% dan TPT Nasional yaitu 5,61%. Nilai TPT Kabupaten Pasuruan

mengalami peningkatan kembali di tahun 2017 menjadi 4,97% dan diatas dari TPT Provinsi Jawa Timur yaitu 4% namun dibawah TPT Nasional yaitu 5,5%. Peningkatan TPT Kabupaten Pasuruan juga terjadi di tahun 2018 dengan angka 6,11% dan jauh diatas TPT Provinsi Jawa Timur yaitu 3,99% dan TPT Nasional yaitu 5,28%. Namun, ditahun 2019 TPT Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan menjadi 5,42% walaupun masih diatas TPT Nasional yaitu 5,28%. Di tahun 2020 TPT Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan kembali menjadi 6,24% akibat adanya dampak Pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, nilai TPT Kabupaten Pasuruan jika dibandingkan dengan PT Jawa Timur dan TPT Nasional masih di atas angka rata-rata. Kondisi ini menjadi perhatian karena investasi yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Pasuruan belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang masuk sebagian besar bersifat padat modal. Perlu upaya yang bersifat holistik dan integratif dalam penanganan permasalahan pengangguran.

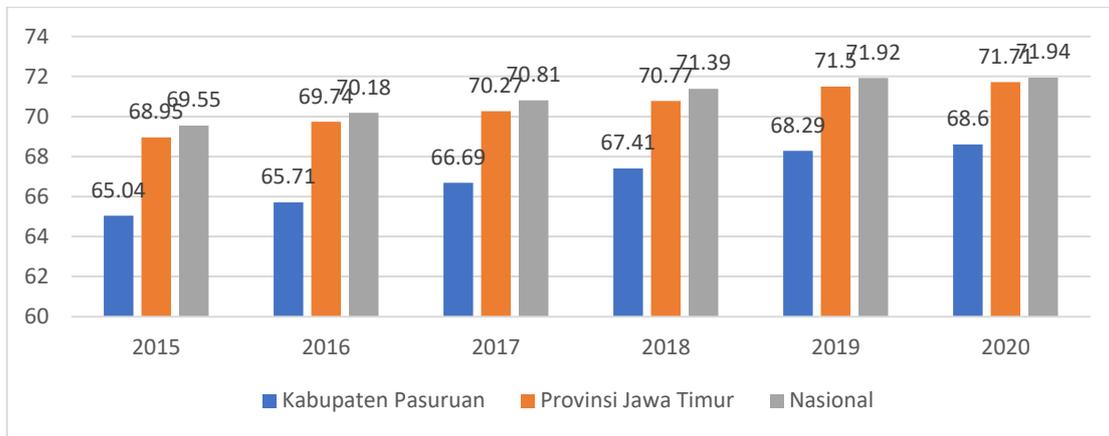
2.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. IPM digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel 2.15 IPM Kabupaten Pasuruan, Komponennya, dan Perbandingannya dengan IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IPM Kab Pasuruan	65.04	65,71	66,69	67,41	68,29	68,6
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.83	69.86	69.9	70.01	70,17	70,23
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	13.56	13.57	12,05	12,3	12,31	12,41

Sumber : BPS Kab. Pasuruan,2021



Grafik 2.24 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Pasuruan dengan IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data IPM Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2015-2020 menunjukkan tren naik (positif) dan berada dalam kelompok kategori “sedang” (angka 60 – 70). IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2015 berada pada angka 65,04% namun masih dibawah IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 68,95% dan IPM Nasional yaitu 69,55%. IPM Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan menjadi 65,71% di tahun 2016 meskipun dibawah IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 69,74% dan IPM Nasional yaitu 70,18%. Peningkatan IPM Kabupaten Pasuruan juga terjadi di tahun 2017 menjadi 66,69% walaupun masih dibawah dari IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 70,27% dan IPM Nasional yaitu 70,81%. Di tahun 2018 IPM Kabupaten Pasuruan meningkat menjadi 67,41% meskipun masih dibawah IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 70,77% dan IPM Nasional yaitu 71,39%. Angka IPM Kabupaten Pasuruan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 68,29% meskipun masih dibawah IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 71,5% dan IPM Nasional yaitu 71,92% . Angka IPM Kabupaten Pasuruan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 68,6% meskipun masih dibawah IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 71,71% dan IPM Nasional yaitu 71,94% Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu terus mendorong peningkatan nilai IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

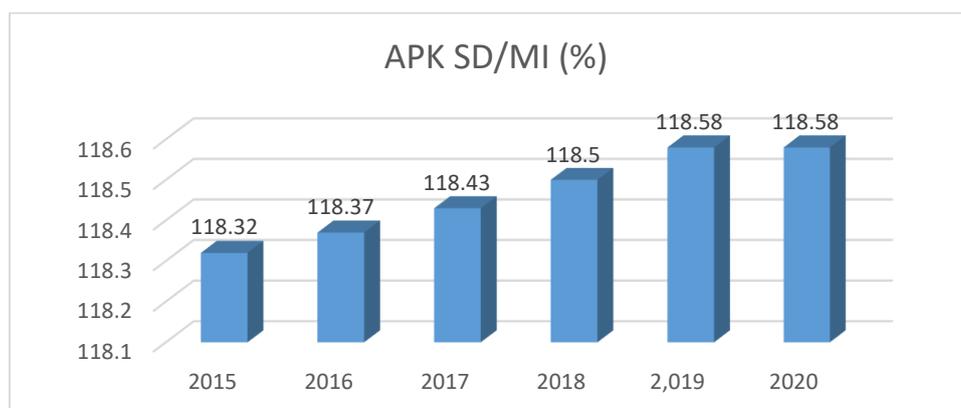
2.2.2.1.1 APK SD/MI

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Data dasar yang digunakan:

- (a) Penduduk usia sekolah SD adalah 7-12 tahun, tingkat SMP adalah usia 13 - 15 tahun,

(b) Siswa usia sekolah sesuai jenjangnya, misalnya siswa usia 7-12 tahun di tingkat SD, siswa usia 13-15 tahun di tingkat SMP.

Dengan demikian bahwa angka partisipasi kasar tidak melihat pada batasan usia sekolah tertentu pada setiap jenjang pendidikan, namun lebih kepada jumlah siswanya di setiap jenjang pendidikannya. Berikut gambaran pencapaian APK sebagai berikut.

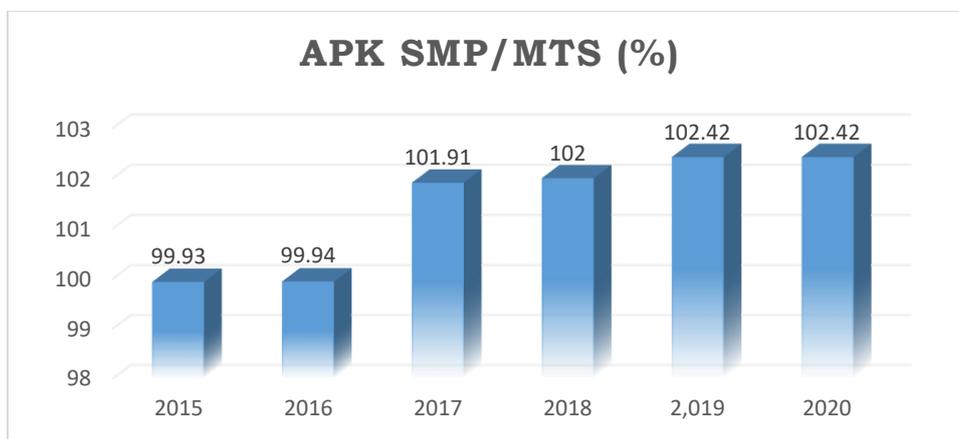


Grafik 2.25 APK SD/MI di Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, 2021

Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2020 mencapai 118,58 %. Sementara Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2018 sebesar 118,50 % atau sejumlah 189.319 siswa SD/MI dari 159.766 usia penduduk 7-12 tahun, jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 118,43 %, terjadi peningkatan sebesar 0,07 %, capaian tahun 2017 sesuai target yang telah ditetapkan sebesar yakni sebesar 118,43 %, pencapaian ini di atas nilai rata-rata APK Provinsi Jawa Timur yakni 108.43% dan di atas rata-rata nilai APK Nasional tahun 2017 yakni 105,89 %. Peningkatan realisasi angka partisipasi kasar dari tahun 2017 ke 2018 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan di jenjang SD/MI telah terpenuhi serta diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Upaya ini adalah usaha Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya dalam memberikan kesadaran dan semangat kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan.

2.2.2.1.2 APK SMP/MTs



Grafik 2.26 APK SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, 2021

Dapat diketahui dari gambar bahwa Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2020 mencapai 102,42 % dimana melampaui dari capaian tahun 2018. Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2018 sebesar 102.00 % atau 84.880 siswa SMP/MTs dari 83.219 usia penduduk 13-15 tahun, dibandingkan tahun 2017 sebesar 101.91%, terjadi peningkatan sebesar 0.09 % dan sesuai target yang ditentukan sebesar 102.00%. Pada jenjang SMP/MTs adalah bagian dari program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan realisasi angka partisipasi kasar ini bersamaan dengan upaya peningkatan di jenjang SD/MI dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih luas. Peningkatan realisasi angka partisipasi kasar dari tahun 2017 ke 2018 ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan beserta masyarakat dalam penyediaan lembaga sekolah disisi lain dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan kecakapan/ketrampilan siswa, *support* anggaran. Pencapaian ini diatas nilai rata-rata APK Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yakni 90.90 %. Hal ini dilakukan sebagai usaha dalam mempersiapkan wajib belajar pendidikan 12 tahun atau pendidikan menengah.

Seperti halnya perhitungan APM, perhitungan APK apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka angka partisipasi kasar SD/MI dan SMP/MTs telah mengalami peningkatan dikarenakan upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan yang melakukan layanan pendidikan semaksimal mungkin di semua jenjang pendidikan. Kedepan indikator APK maupun APM baik SD/MI maupun SMP/MTs yang telah melampaui angka di atas 100 %, tidak lagi termasuk dalam penilaian indikator kinerja pelayanan pendidikan, namun lebih mengarah pada pemerataan layanan dan pemerataan mutu layanan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.

2.2.2.1.3 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

1. Penduduk usia sekolah SD adalah 7 - 12 tahun, tingkat SMP adalah usia 13 - 15 tahun;
2. Siswa usia sekolah sesuai jenjangnya, misalnya siswa usia 7-12 tahun di tingkat SD, siswa usia 13-15 tahun di tingkat SMP.

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi murni lebih menunjukkan pada tingkat partisipasi sekolah, penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah tidak memperhitungkan pada kelompok umur tertentu, melainkan pada jumlah semua penduduk yang terdaftar pada sekolah sesuai jenjangnya.

Berikut dapat di lihat gambaran jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12; 13-15; yang bersekolah di SD/MI; SMP/MTs; terhadap jumlah penduduk dalam kelompok usia 7-12; 13-15; tahun pada periode yang sama. APM dapat dijelaskan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2.16 Perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD (%)	99,97	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Tabel diatas menunjukkan realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM-SD) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 telah mencapai 100%, capaiannya telah mencapai angka ideal sesuai target yang telah di tetapkan sebesar 100% dan pencapaian ini diatas nilai rata-rata APM Provinsi Jawa Timur yakni 97.14 % dan diatas rata-rata nilai APM Nasional yakni 93,02 %. Pencapaian realisasi angka partisipasi murni mulai dari tahun 2017 ke 2020 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan untuk usia sekolah telah terpenuhi dengan baik, dan menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan sesuai kelompok umur. Upaya ini adalah usaha Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya dalam memberikan kesadaran dan semangat kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan

Tabel 2.17 Perkembangan APM SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

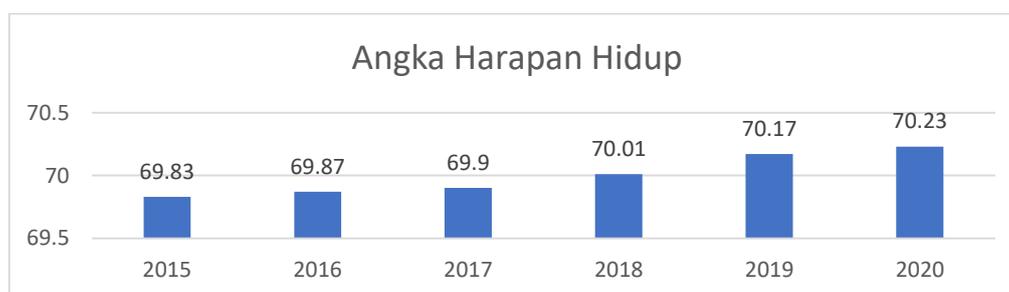
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APM SMP/MTs (%)	95,72	95,74	95,78	95,80	96	95,81

Tabel menunjukkan realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM-SMP) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 mengalami penurunan 0,19% dari nilai 96 di tahun 2019 menjadi 95,81 di tahun 2020. Hal ini diperlukan upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang merata dan mudah diakses. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap berupaya bukan hanya mewujudkan pemerataan pendidikan tetapi juga peningkatan mutu dan daya saing siswa. Upaya peningkatan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten pasuruan antara lain melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di samping dana APBD Kabupaten Pasuruan, juga ditunjang dengan dana BOS.

2.2.2.2 Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH memiliki kegunaan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Grafik 2.27 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data AHH Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan mulai tahun 2015 hingga 2020. AHH Kabupaten Pasuruan di tahun 2015 berada pada angka 69,83% kemudian meningkat menjadi 69,87% di tahun 2016 dan 69,9% di tahun 2017. Nilai AHH Kabupaten Pasuruan juga meningkat di tahun 2018 yaitu sebesar 70,01% dan di tahun 2019 berada di angka 70,17%. Nilai AHH

Kabupaten Pasuruan juga meningkat di tahun 2020 yaitu sebesar 70,23% Peningkatan ini harus terus dilakukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik melalui usaha promotif, preventif maupun kuratif.

2.2.2.2.2 Cakupan Balita Gizi Buruk

Cakupan balita dengan gizi buruk merupakan gambaran kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan, hal tersebut tetap menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, dikarenakan balita gizi buruk berkaitan erat dengan penanggulangan stunting. Oleh karena itu penanggulangan gizi buruk menjadi prioritas.



Grafik 2.28 Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2015-2020 selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah mampu menekan kasus balita dengan gizi buruk walaupun tetap perlu upaya lebih baik lagi agar nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yang signifikan. Data tahun 2015 menunjukkan cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan berada pada angka 0,06% yang kemudian menurun menjadi 0,05% di tahun 2016 dan 0,04% di tahun 2017. Cakupan balita gizi buruk juga menurun di tahun 2018 yaitu 0,034% dan di tahun 2019 menjadi 0,033%. Cakupan balita gizi buruk juga menurun di tahun 2020 sebesar 0,029%

2.2.2.2.3 Presentase Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan *top down* menjadi lebih partisipatif dan *bottom up*. Lebih lanjut, desa siaga aktif adalah gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong. Sebuah desa dikatakan Desa Siaga Aktif adalah Desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, *surveillance* berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Tabel 2.18 Presentase Desa siaga aktif tahun 2015-2020 di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Desa siaga aktif	Jumlah Desa	Persentase
2015	360	365	98.08
2016	360	365	98.63
2017	365	365	100
2018	365	365	100
2019	365	365	100
2020	365	365	100

Sumber: LKjIP Kabupaten Pasuruan, 2020

Data Persentase Desa Siaga Aktif Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa capaian desa siaga aktif mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 mencapai angka 98,08% kemudian meningkat menjadi 98,63% di tahun 2016. Mulai tahun 2017 hingga 2020 persentase desa siaga aktif di Kabupaten Pasuruan sudah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan tercapainya program desa siaga aktif di Kabupaten Pasuruan, namun perlu untuk tetap dikembangkan dan dipertahankan.

2.2.2.3 Tenaga Kerja

2.2.2.3.1 Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tabel 2.19 Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	67	73	76	70,03	70,05	43,44

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Dapat diketahui dari tabel 2.15 bahwa presentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Presentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2019 sebesar 70,05%. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 43,44%. Penurunan tersebut tentunya didasari pada situasi pandemi yang membuat jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berkurang. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan jumlah angkatan kerja serta peluang kesempatan kerja terbuka melalui even atau *job fair/job matching*.

2.2.2.3.2 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Tabel 2.20 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pasuruan

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk yang Bekerja	97.24	95.82	95.03	93,89	94,58	93,76

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan. 2021

Data Rasio Penduduk yang Bekerja tahun 2017 sebesar 95,03% menurun sebanyak 55.403 orang menjadi 95,82% jika dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 833.966 orang. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan. Penurunan ini disebabkan masih terasanya dampak krisis ekonomi global yang ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang masih belum membaik serta investor yang masuk banyak mengambil sikap pada efisiensi dengan kebijakan yang berorientasi pada pengguna mesin produksi (padat modal/bukan padat karya).

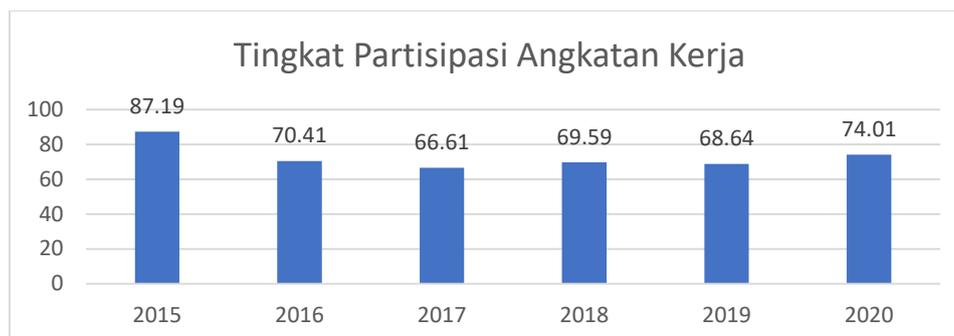
2.2.2.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Lebih lanjut, TPAK adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi angkatan

Kerja adalah Jumlah dari mereka yang bekerja ditambah dengan yang mencari kerja terhadap semua penduduk usia kerja.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah Angkatan Kerja} \times 100\%}{\text{Penduduk Usia Kerja}}$$

Penduduk Usia Kerja



Grafik 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2021

Data TPAK Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020 cenderung mengalami penurunan. Nilai TPAK Kabupaten Pasuruan tahun 2015 berada pada angka 87,19% yang kemudian menurun menjadi 70,41% di tahun 2016 dan 66,61% di tahun 2017. Nilai TPAK Kabupaten Pasuruan kembali naik di tahun 2018 menjadi 69,59% namun turun kembali di tahun 2019 menjadi 68,64% dan di tahun 2020 menjadi 67,67%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Pasuruan mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2018 angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan menjadi 69,59% yang sebelumnya berada pada angka 66,61% di tahun 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan menurun di tahun 2019 yaitu 68,64% dan di tahun 2020 menjadi 74,01%

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja membahas mengenai tersedianya jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan tenaga kerja (penduduk usia kerja) di Kabupaten Pasuruan. Indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Tingkat pertumbuhan ekonomi;
- Tingkat investasi yang masuk;
- Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- Peningkatan SDM melalui ketrampilan keahlian, sertifikasi serta kompetensi;
- Perkembangan perluasan kerja yang berorientasi pada kewirausahaan (minat usaha); dan
- Regulasi pemerintah pada bidang ketenagakerjaan.

2.2.2.4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.2.4.1 Persentase Tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I ini memberikan gambaran mengenai tingkatan kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, Keluarga Sejahtera -I, Keluarga Sejahtera -II, Keluarga Sejahtera -III dan Keluarga Sejahtera -III Plus. Keluarga Pra-Sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatan ekonominya rendah, sehingga target grup penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan sosial psikologis (*social psychological needs*). Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga Pra S dan KS I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak.

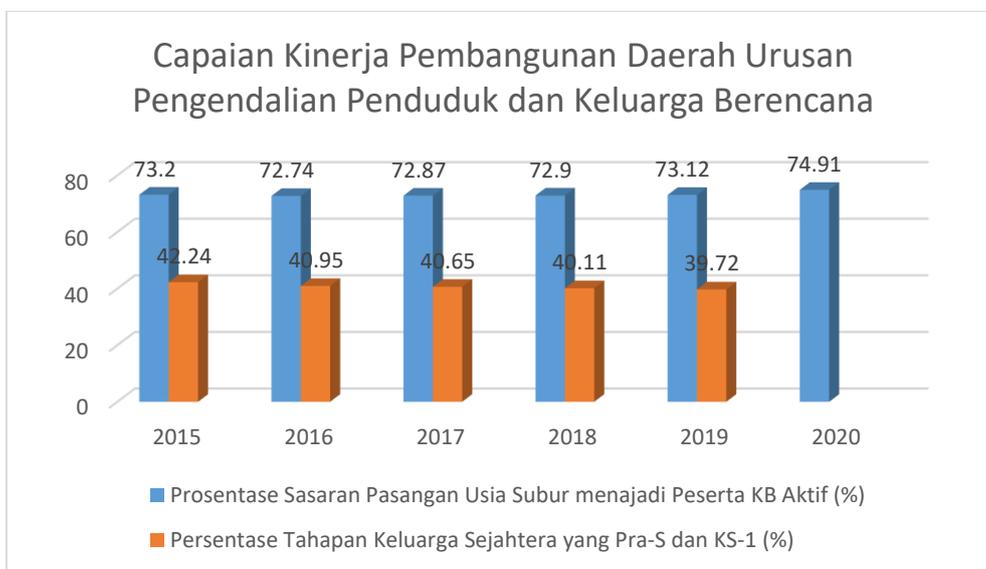


Grafik 2.290 Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Sumber: LKjIP Kabupaten Pasuruan, 2020

2.2.2.4.2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

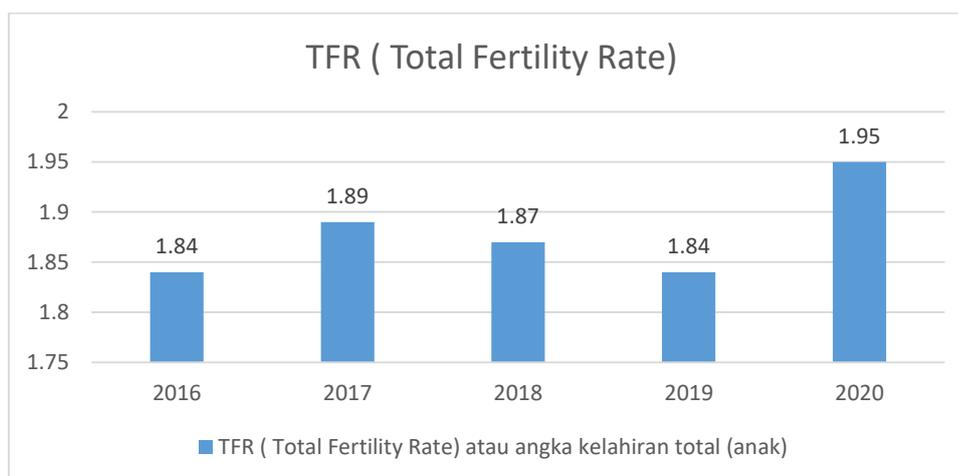
Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Dimana tolok ukur keberhasilan dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana grafik 2.32. Pada grafik capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten Pasuruan dapat dilihat bahwasanya presentase sasaran pasangan usia subur menjadi KB aktif selalu mengalami kenaikan setiap tahun dari 2015 hingga puncaknya tahun 2019 dengan presentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sebesar 75,14%. Pada tahun 2020 presentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif mengalami penurunan menjadi 74,91%.



**Grafik 2.31 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pasuruan tahun
2015-2020**

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, 2021*

2.2.2.4.3 TFR (Total Fertility Rate)

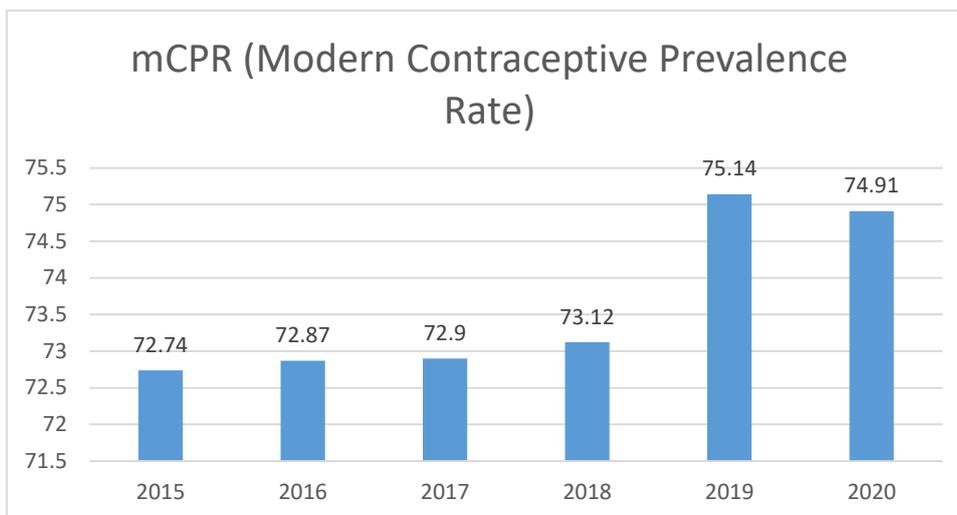


**Grafik 2.32 TFR (Total Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total di Kabupaten
Pasuruan tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, 2021*

Indikator Total Fertility Rate (TFR) dapat diistilahkan dengan angka kelahiran total yang bertujuan dalam membandingkan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan dari program keluarga berencana. Capaian TFR di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya hingga sebesar 1,95 melebihi dari target sebesar 1,87.

2.2.2.4.4 mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)

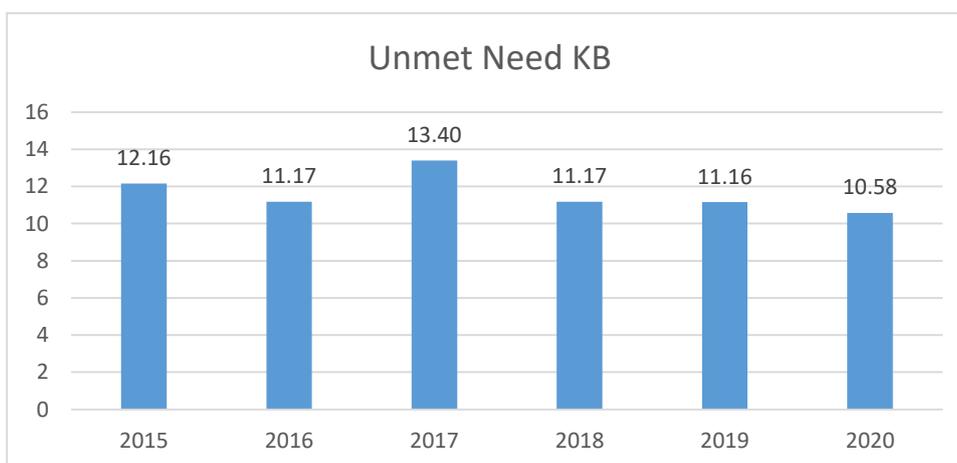


Grafik 2.33 mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Modern Contraceptive Prevalence Rate diartikan sebagai presentase perempuan usia reproduktif yang bertujuan dalam mengukur pemakaian segala metode kontrasepsi secara modern. Capaian pada Kabupaten Pasuruan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 75,14% dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 74,91%. Capaian dari tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75,20%.

2.2.2.4.5 Unmet Need KB



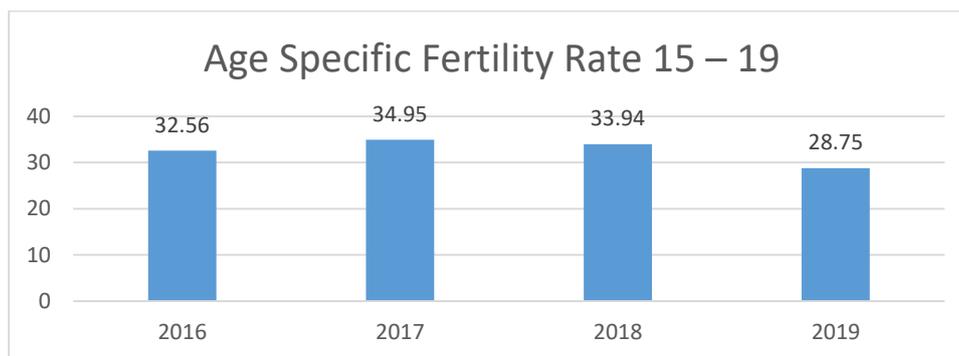
Grafik 2.34 Unmet Need KB di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Unmet Need KB diartikan sebagai kebutuhan dari keluarga berencana yang belum terpenuhi. Tingginya angka Unmet Need KB berpotensi meningkatnya dari angka kematian ibu dikarenakan dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan. Kabupaten

Pasuruan berupaya untuk menurunkan angka tersebut pada tahun 2020 dengan capaian 10,58% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 11,16%.

2.2.2.4.6 ASFR 15-19 (Age Specific Fertility Rate 15 – 19)



Grafik 2.35 ASFR 15-19 (Age Specific Fertility Rate 15 – 19) di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2019

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Age Specific Fertility Rate diartikan sebagai angka kelahiran menurut kelom umur dari 15 hingga 19 tahun, indikator tersebut bertujuan sebagai rujukan dalam pembangunan kependudukan berkaitan dengan kelahiran usia remaja wanita. Capaian *Age Specific Fertility Rate* pada tahun 2019 sebesar 28,75% lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 37%.

2.2.2.5 Keuangan

2.2.2.5.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Grafik 2.306 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan, 2021

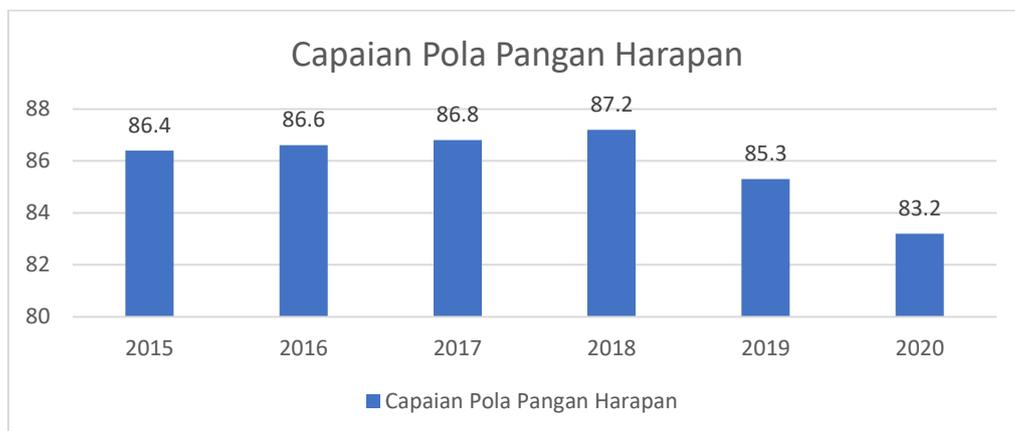
Pada tahun sebesar Rp.759.945.807.967,66 meningkat dibanding tahun 2016 sebesar Rp.480.758.720.671,31 sebesar 58,07% atau Rp.279.187.087.296,35. Persentase peningkatan PAD meningkat drastis karena pada tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri memasukkan dana BOS sebesar Rp. 122.000.000.000,00 ke pos lain-lain PAD,

sebagaimana Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang pedoman APBD yang menyebutkan bahwa Dana BOS dimasukkan dalam struktur pendapatan asli daerah dalam objek pos lain-lain pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, dimana Dana BOS dimasukkan dalam rekening Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah objek hibah.

2.2.2.6 Pangan

2.2.2.6.1 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Data PPH Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa data Kebutuhan bahan pangan masyarakat pada tahun 2010 yaitu 2.000 kkal/kapita/hari. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa konsumsi beras diperoleh skor sama dengan skor maksimal PPH yaitu 25. Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi beras masih mendominasi dan belum mampu digantikan oleh bahan pangan non beras (umbi-umbian) serta pangan alternatif lainnya (sorgum) sebagai upaya diversifikasi pangan.



Grafik 2.37 Capaian Pola Pangan Harapan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Pasuruan, 2021

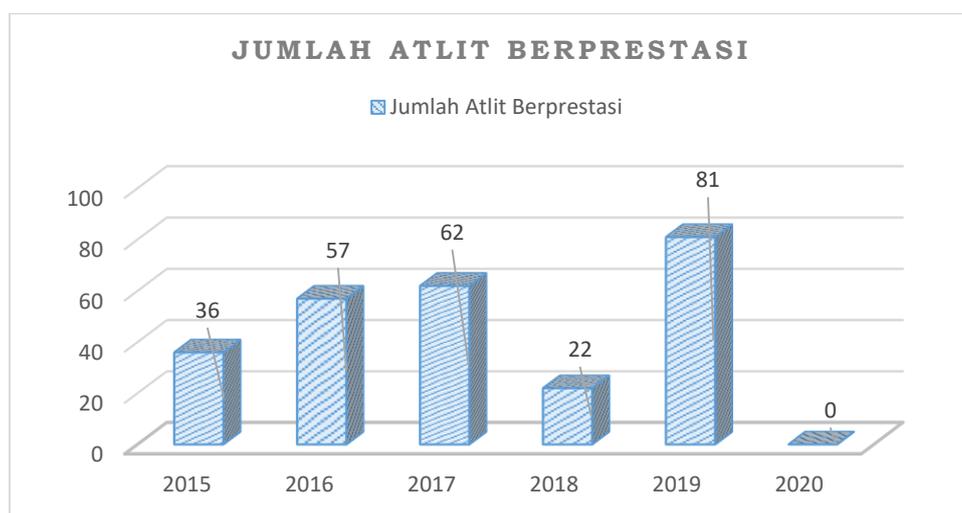
Sedangkan skor konsumsi minyak dan lemak sudah sesuai dengan harapan (nilai PPH). Angka skor PPH 87,2 pada tahun 2018 menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masih belum beragam dan seimbang, hal ini ditunjukkan dengan nilai konsumsi protein hewani dan konsumsi sayuran dan buah masih di bawah angka ideal, sehingga skor PPH belum dapat mencapai nilai skor 100. Pada tahun berikutnya selalu mengalami penurunan, di tahun 2019 menurun menjadi 85,3 dan di tahun 2020 menurun menjadi 83,2. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi Covid-19, dengan adanya kebijakan *lockdown* menjadikan keterbatasan dalam pengiriman bahan pangan.

2.2.2.7 Fokus Seni, Budaya, Dan Olahraga

1. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah. Guna mewujudkan ketahanan budaya telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya. Urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya daerah melalui pemeliharaan situs-situs sejarah dan penyelenggaraan *event* budaya. Sasaran yang akan dicapai pada urusan kebudayaan adalah Meningkatnya kreatifitas seni budaya.

2.2.2.7.1 Jumlah atlit yang berprestasi



Grafik 2.38 Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2021

Dapat diketahui bahwa Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 81 orang orang. Pada tahun 2018 atlit yang berprestasi berjumlah 22 orang, capaian ini menurun dari pada target yang ditentukan yaitu 25 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 62 orang atlit mengalami penurunan sebanyak 40 orang atlit. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan hingga tidak ada atlit. Hal ini disebabkan karena Pada Tahun 2020 jumlah event kompetisi olahraga ditiadakan dikarenakan adanya situasi pandemi.

2. Kebudayaan

2.2.2.7.2 Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional



Grafik 2.3931 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan, 2021

Kelompok kesenian merupakan salah satu faktor pendukung dari meningkatnya seni budaya dan juga sebagai salah satu faktor pendukung daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2017, kesenian tradisional sebanyak 419 kelompok meliputi: (1) Seni pencak Kembangan; (2) Wayang; (3) Ludruk; (4) Musik kentong tretek janger; (5) Reog; (6) Sangar seni tari; (7) Kuda kacak; (8) Bantengan; dan (9) Dll. Hal tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 387 kelompok, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 31 kelompok. Peningkatan ini membuktikan bahwa pelestarian kesenian di Kabupaten Pasuruan tinggi dan kesadaran dari seniman untuk mendaftarkan keseniannya masih tinggi.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek Pelayanan Wajib Dasar, Pelayanan Wajib Non Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Pemerintah. Adapun Aspek Pelayanan Umum yang berkaitan dengan Layanan Urusan Pemerintah Wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Sementara Layanan Urusan Pemerintah Tidak Wajib meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Kemudian selanjutnya yaitu Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian. Berikutnya, yaitu Fungsi Penunjang Pemerintah adalah perencanaan pembangunan. Berikut penjelasan serta data terkait.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.1.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Pelayanan Urusan Wajib Dasar merupakan segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berbagai indikator ditampilkan untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan Pelayanan Urusan Wajib Dasar pada Kabupaten Pasuruan.

2.3.1.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang penting dalam upaya mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan di Kabupaten Pasuruan. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.21 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

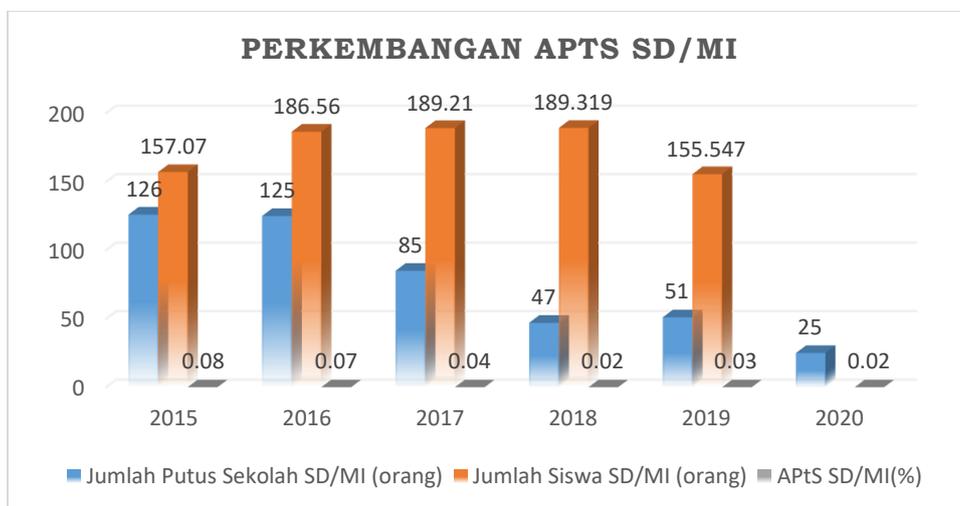
No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidikan								
1.	Angka Partisipasi Kasar							
a.	APK SD/MI	%	118,32	118,37	118,43	118,5	118,58	118,58
b.	APK SMP/MTs	%	99,93	99,94	101,91	102	102,42	102,42
2.	Angka partisipasi Murni							
a.	APM SD/MI	%	99,97	99,99	100	100	100	100

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
b.	APM SMP/MTs	%	95,72	95,74	95,78	95,8	95,80	95,81
3.	Angka Putus Sekolah							
a.	APS SD/MI	%	0,08	0,07	0,04	0,02	0,03	0,02
b.	APS SMP/MTs	%	0,05	0,05	0,02	0,02	0,21	0,02
4.	Angka Kelulusan							
a.	AK SD/MI	%	100	100	100	100	97,21	100
b.	AK SMP/MTs	%	100	100	100	100	97,33	100
5.	Angka Melanjutkan							
a.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,82	99,83	99,87	99,91	76,66	n/a
b.	AM dari SMP ke SMA	%	99,64	99,65	99,69	99,73	n/a	n/a
6.	Rasio guru terhadap murid							
a.	Rasio guru terhadap murid SD/MI	Rasio	157-700	157-599	189-210	189-319	n/a	n/a
b.	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1-14	1-15	1-18	1-18	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

1 Angka Putus Sekolah

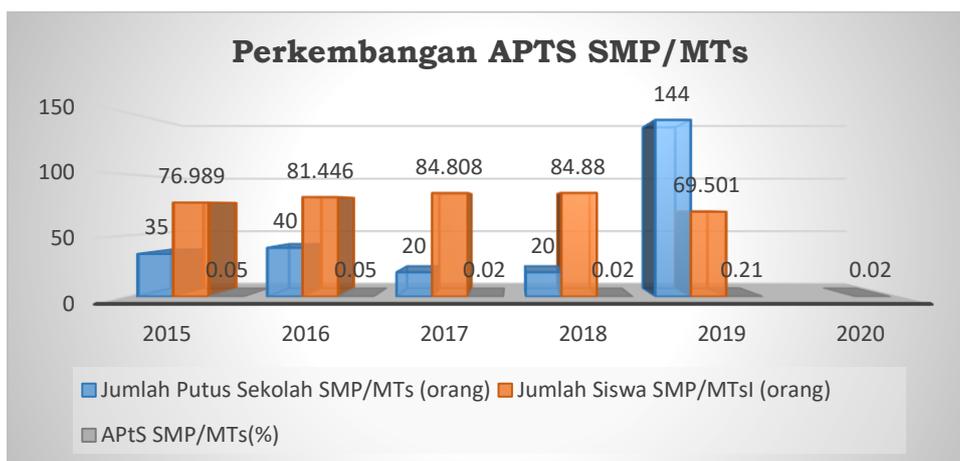
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah. Angka putus sekolah dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pendidikan SDM di daerah tertentu. Angka putus sekolah di definisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, seperti jenjang pendidikan SD maupun SMP. Berikut adalah capaian dalam 5 tahun terakhir.



Grafik 2.40 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI di Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Dari gambar dapat diketahui bahwa Persentase angka putus sekolah tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu mencapai 0,02%. Sedangkan persentase putus sekolah SD/MI pada tahun 2019 sebesar 0.03 % yang menunjukkan tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa angka putus sekolah SD/MI berkurang dari tahun ketahun menurun secara signifikan. Keberhasilan terhadap penurunan ini atas usaha dan partisipasi Pemerintah baik pusat maupun daerah seperti BOS, BOP, Bansos, hibah dan lain lain.



Grafik 2.41 Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan 2015-2020

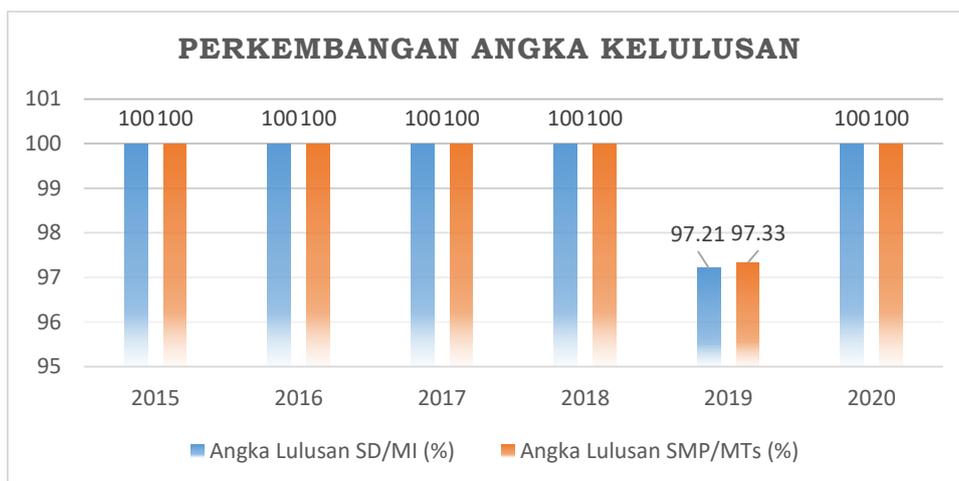
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Dapat diketahui dari gambar indikator persentase putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,2 % dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,21%. Dalam upaya menurunkan realisasi angka putus sekolah adalah bagian dari program penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Pemerintah

Kabupaten Pasuruan berusaha dengan melaksanakan kegiatan diantaranya pembinaan SMP terbuka, mendirikan SMP satu atap, menyediakan dana BOS, Bansos, BOP APBD, hibah APBD dan lain lain.

2 Angka Kelulusan

Terdapat faktor, atau indikator yang memberikan sumbangsih, serta menjadi tolak ukur pula terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan yaitu adalah Angka Kelulusan baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Angka Kelulusan (AL) merupakan cerminan dari pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Angka Kelulusan (AL) akan memberikan dampak positif terhadap kualitas sekolah serta terhadap Kabupaten Pasuruan. Karena, apabila Angka Kelulusan (AL) sekolah tinggi di Kabupaten Pasuruan, maka akan mencitrakan bahwa potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan terutama usia 7-15 tahun keatas sangat luar biasa dan berpendidikan, dan akan membuat nama suatu instansi pendidikan (sekolah) menjadi lebih baik. Dalam hal ini, diperlukan perhatian dan kerjasama yang baik dan bersinergi antara segala elemen yang dapat menunjang tingginya Angka Kelulusan (AL) di kabupaten Pasuruan. Berikut adalah capaian dalam 5 tahun terakhir.



Grafik 2.42 Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Angka Kelulusan SD/MI kembali meningkat sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 97,21 %. Sementara untuk lulusan SMP/MTs pada tahun 2020 juga bali meningkat sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 97,33 %. Untuk pendidikan SD/MI realisasi angka kelulusan tahun ajaran 2017/2018 sebesar 100 % atau dari 24.002 siswa peserta ujian dinyatakan lulus, hal ini sama dengan realisasi pada tahun ajaran 2016/2017 sebesar 100% dan sama dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 100%. Sementara untuk pendidikan SMP/MTs realisasi angka kelulusan tahun

ajaran 2017/2018 sebesar 100 % atau dari 21.642 siswa peserta ujian dinyatakan lulus, hal ini sama dengan realisasi pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 100% dan sama dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 100%.

2.3.1.1.2 Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Maka, harus ada pembangunan kesehatan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Di sisi lain, adanya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.22 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kesehatan								
1.	Jumlah bayi meninggal	(orang)	198	171	166	135	134	105
2.	Jumlah bayi lahir hidup	(orang)	25.624	25.104	24.924	25.152	25.118	23.702
3.	Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran hidup	/1000 KH	11,44	6,81	6,66	5,37	5	4,4
4.	Jumlah ibu melahirkan yang mati	(orang)	26	23	21	28	21	19
5.	jumlah ibu melahirkan	(orang)	25.624	25.624	24.294	25.152	25.118	24.887
6.	Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran hidup	/1000 KH	101,47	91,62	84,26	111,32	83,61	76,34
7.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Orang	68	67	44	41	40	34

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.	Jumlah Balita	Orang	121.781	121.782	121.781	119.273	118.492	117.832
9.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,029
10.	Jumlah Posyandu Balita	unit	1.886	1.893	1.898	1.907	1.909	1.911
11.	Rasio Posyandu / Satuan Balita	Rasio	15,49	15,54	15,59	16,00	19,60	19,60
12.	Rumah Tangga yang ber PHBS	Rumah Tangga	16,104	23,614	53.392	53.392	49.196	41.106
13.	Jumlah RT/KK yang disurvei	RT/KK	37,782	53,124	112.718	112.718	94.026	84.864
14.	Persentase Rumah Tangga PHBS	%	42,62	44,45	47,37	47,37	51,24	51,5
15.	Persentase Sanitasi Sehat	%	65,39	68,75	74,29	n/a	83,88	n/a
16.	Persentase Puskesmas dan RSUD terakreditasi madya	%	n/a	12	40	100	94,12	94
17	Jumlah Puskesmas Kabupaten Pasuruan	Unit	33	33	33	33	33	33
18	Persentase IKM Kabupaten Pasuruan	%	78,91	88,82	80,82	82,12	82,73	82,75
19	Prevalensi Kusta	%	1,13	1,33	1,45	0,98	0,96	0,62
20	Jumlah Kasus HIV	orang	192	225	257	430	456	267
21	Jumlah HIV yang akses ARV	orang	156	160	191	282	456	267
22	Persentase penderita HIV AIDS	%	81,25	71,11	74,32	66	100	100
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Nilai)	82,27	81,89	82,28	n/a	n/a	82,75
24	Angka usia harapan hidup	tahun	69,83	69,87	69,9	70,01	70,17	70,23
25	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	92,96	93,89	96,33	97,40	97,4

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,44	99,46	99,46	99,28	99,51	98,6
27	Cakupan kunjungan bayi	%	97,74	98,74	99,25	100	90,63	98,25
28	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	74,79	86,85	90,96	95,62	98,6	98,1
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	92,62	89,77	100	100	100	100
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
31	Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	%	96,7	96,71	101,15	103,59	127,58	92
32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	52,86	92,41	112,95	117,78	n/a	146,14
33	Rasio Dokter persatuan Penduduk	%	20,48	48,94	51,08	69,77	n/a	n/a
34	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	%	77,61	78,35	68,84	55,59	59,2	53,5
35	<i>Nett Dead Rate</i> (NDR)	/mil	22,76	19,82	19,78	20,67	11,2	12,1
36	Tercukupinya pelayanan masyarakat miskin	%	100	100	100	100	n/a	n/a
37	Persentase jumlah penduduk yang	%	15,15	16,49	16,79	15,81	n/a	n/a

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	memanfaatkan Rumah Sakit							
38	Perentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	97,17	91,63	92,07	93,7	95	93,54
39	Perentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Bersalin sesuai standar	%	99,44	99,46	99,46	99,28	99,51	98,6
40	Perentase Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	97,74	98,74	99,25	100	90,63	98,25
41	Perentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	79,02	100	23,86	77,1	91	n/a
42	Perentase Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	93,67	16,66	95,21	94,6	75	73,69
43	Perentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	57,77	41,26	72,61	83,13	100	92,1

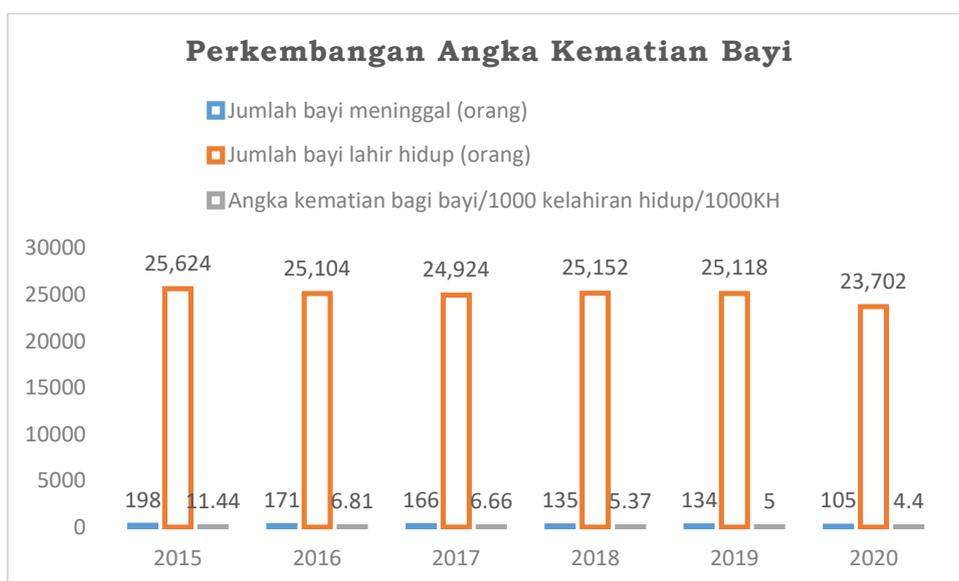
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan

dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan dalam empat tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Target dari Pemerintah yang juga menjadi target SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dibawah 12 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030. Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sehingga indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan seribu. Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif.



Grafik 2.43 Perkembangan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 angka kematian bayi mengalami penurunan yaitu sebesar 4,4 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari target RPJMD untuk tahun 2018 sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup maka pencapaian tahun 2018 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Jumlah kematian bayi tahun 2018 sebanyak 135 kasus, menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 166 kasus. Penyebab kematian terbesar adalah karena : BBLR sebanyak 52 kasus (38,5%), asfiksia sebanyak 25 kasus (18,51%), Sepsis sebanyak 13 kasus (9,62%), kelainan kongenital bawaan sejumlah 20 kasus (14,81%),

lain lain sebanyak 17 kasus, Pneumonia sebanyak 4 kasus (2,96%), Infeksi sebanyak 4 kasus (2,96%)

Kematian bayi terbanyak karena BBLR disebabkan Ibu Hamil dalam keadaan KEK dan PEB , Asfiksia disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan asfiksia oleh bidan dengan baik sesuai dengan kompetensi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi pada bidan dan juga komunikasi secara intens dengan dokter spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil. Tujuan adanya jejaring antara Puskesmas, Polindes dan Bidan Praktek dengan RSUD Bangil agar bayi asfiksia bisa tertangani dengan baik sebelum dirujuk ke RSUD Bangil. Kasus BBLR bisa terpantau dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil selalu mendapatkan penyuluhan. Kasus Kematian bayi yang terjadi ditolong oleh Bidan sebanyak 70 kasus (51,85%), Dokter sebanyak 59 kasus (43,70%), dan untuk persalinan yang ditolong dukun sebanyak 6 kasus (4,44%).

Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 95,6%, maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh bidan dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RSUD. Namun demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Dari 135 bayi yang meninggal, kasus kematian di RSUD Bangil sebanyak 89 (65,92%) kasus kematian terjadi di RS Luar Wilayah sebanyak 12 (8,88%) , RS Swasta sebanyak 7 (5,18%), BPM sebanyak 2 (1,48%), Puskesmas sebanyak 1 (0,74%), di Perjalanan sebanyak 6 (4,44%), Rumah Ibu sebanyak 18 (13,33 %). Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah pelaksanaan Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (P-PWS KIA), Audit Maternal Perinatal, Supervisi Fasilitatif, Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu serta penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga medis meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Angka pengukuran resiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia

kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dibawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.



Grafik 2.44 Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

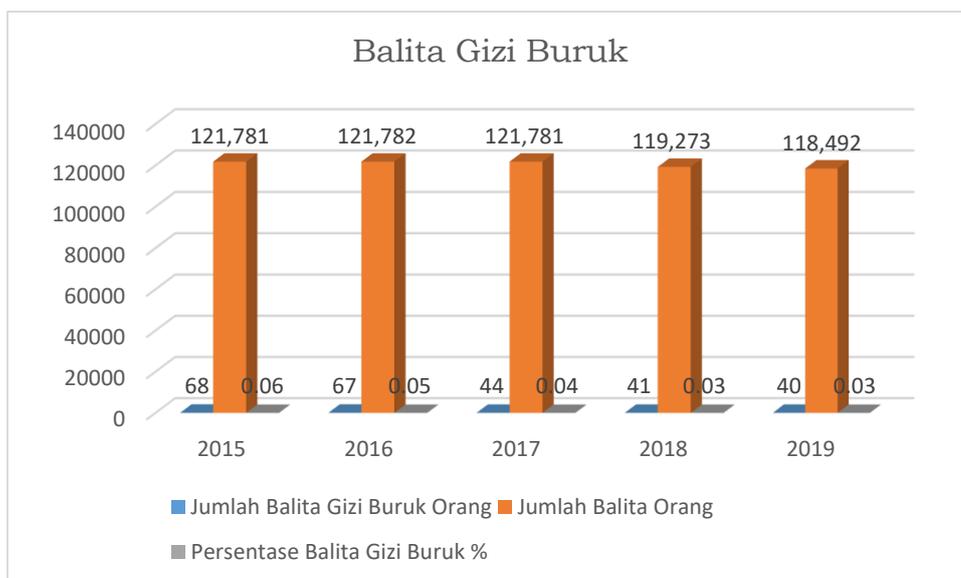
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan data capaian angka kematian ibu Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar 76,4 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tahun 2018 menurun dibandingkan capaian tahun 2017 yakni sebesar 83,61 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 19 kasus sedangkan tahun 2019 sebanyak 21 kasus. Upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yakni:

1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan (*ANC/ Ante Natal Care*) pada ibu hamil secara kontinu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (*Bidan*)
2. Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang resiko tinggi dapat dilakukan sejak awal
3. Membuat SIP (*sistem informasi posyandu*)
4. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yakni
 - a. Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu

- b. Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
- c. Pertemuan kader KIBBLA
- d. Audit Maternal Perinatal
- e. Pengembangan P4K di desa masalahat
- f. Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu dan anak
- g. Supervisi fasilitatif
- h. Pelatihan APN
- i. Pelatihan Kelas ibu hamil
- j. Kemitraan Bidan dan dukun bayi – kader (melalui PERDA nomor 2 tahun 2009 tentang KIBBLA).
- k. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu.
- l. Drill *emergency* kegawatdaruratan Maternal disetiap Puskesmas.
- m. Meningkatkan kerkjasama sistem rujukan kesehatan
- n. Menambah fasilitas RS Rujukan (RSUD Grati) di Wilayah Timur

3. Persentase Balita Gizi Buruk



Grafik 2.45 Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

Persentase balita dengan gizi buruk menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2019 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dengan capaian sebesar 0,03% atau

sebanyak 40 balita dari 118.492 balita. Jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2018 sebesar 0,03% atau sebanyak 41 balita dari 119.273 balita yang diperiksa di Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar 0,04% atau 44 balita maka mengalami penurunan sebesar 0,01%. Capaian tahun 2018 ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 0,03%. Kedepannya penanganan balita gizi buruk akan lebih ditingkatkan guna menekan secara signifikan jumlah balita yang mengalami gizi buruk. Dalam menanggulangi balita gizi buruk, maka upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah

- a. Pertemuan lintas program dan lintas sektor program gizi.
- b. Pemberian Makanan Tambahan – Pemulihan (PMT-P) kepada balita dan bumil KEK (ibu hamil Kekurangan Energi Kronis).
- c. Penyuluhan gizi menggunakan dana BOK.
- d. Evaluasi program gizi di Puskesmas secara rutin.
- e. Pemetaan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi).
- f. Pemetaan Kecamatan Rawan Gizi.
- g. Pemetaan Desa Rawan Gizi.
- h. Pembentukan kelompok pendukung ASI
- i. *Surveylanse* gizi dalam rangka kewaspadaan dini terhadap kasus gizi buruk.
- j. Pembentukan kelompok pendukung ASI (KP-ASI)
- k. Kelorisasi dan katukisasi khususnya untuk ibu hamil dan ibu balita
- l. pemberian MP ASI dan makanan tambahan bagi balita miskin yang kurang gizi
- m. Meningkatkan kegiatan *Surveylans* Gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sehingga penemuan dan penanganan kasus sedini mungkin.
- n. Mengoptimalkan dukungan dana CSR untuk kegiatan pemantauan gizi buruk kewaspadaan dini

4. Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan Sehat

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah Tangga yang ber PHBS	Rumah Tangga	16,104	23,614	53.392	53.392	49.196	41.106
2.	Jumlah RT/KK yang disurvei	RT/KK	37,782	53,124	112.718	112.718	94.026	84.864
3.	Persentase Rumah Tangga PHBS	%	42,62	44,45	47,37	47,37	51,24	51,5

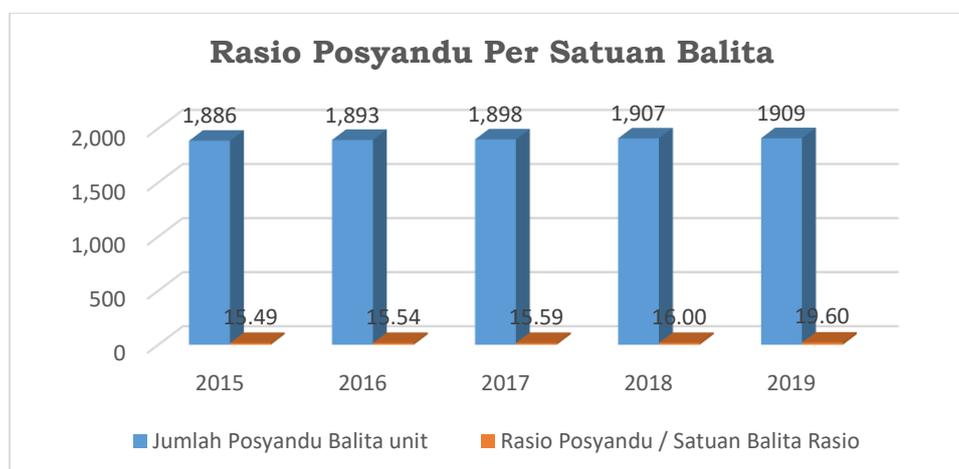
4.	Persentase Sanitasi Sehat	%	65,39	68,75	74,29	n/a	83,88	n/a
----	---------------------------	---	-------	-------	-------	-----	-------	-----

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2021

Capaian Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan Sehat tahun 2020 mengalami kestabilan sebesar 51,5 %, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 51,24 %. Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga tidak rentan terkena penyakit. Kegiatan hidup bersih dan sehat lebih menekankan pada kegiatan promotif dan preventif.

5. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan posyandu di masyarakat. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah posyandu dibagi jumlah balita dikalikan 1.000. Rasio Posyandu per 1.000 balita tahun 2018 sebesar 16.



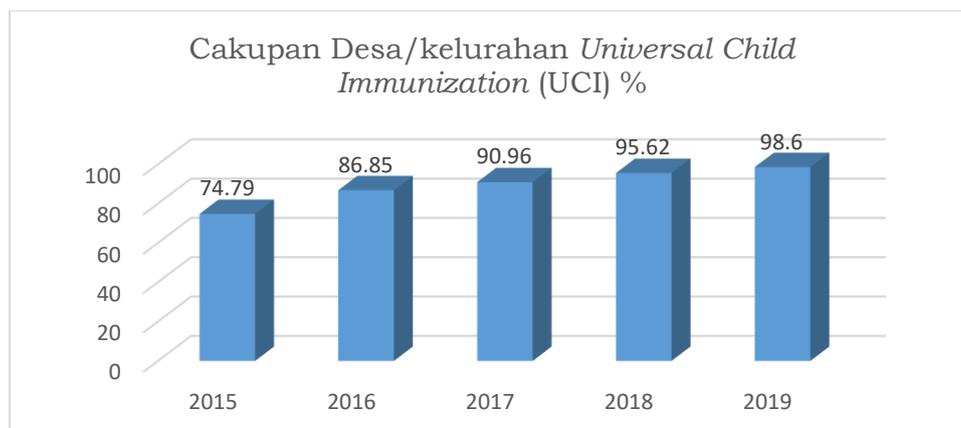
Grafik 2.46 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

Pada tahun 2019 jumlah posyandu yang ada sebesar 1.909 posyandu. Pada tahun 2018 Jumlah posyandu yang ada sebanyak 1.907 posyandu dan balita yang terlayani sebanyak 119.214 balita sehingga 1 posyandu melayani 64 balita. Jika dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar 15,59 posyandu, maka terjadi peningkatan sebesar 0,41. Berdasarkan Standar Pelayanan Kesehatan Terpadu (Nasional) Rasio Posyandu di Kabupaten Pasuruan masih dalam batas ideal yakni 1 posyandu melayani antara 80 – 100 balita. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan Rasio Posyandu per 1.000 balita melalui revitalisasi posyandu, pemberian jasa insentif

kader, dan pengembangan Taman Posyandu, serta kegiatan Paguyuban Kader tingkat Kabupaten.

6. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)



Grafik 2.47 Cakupan desa / kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

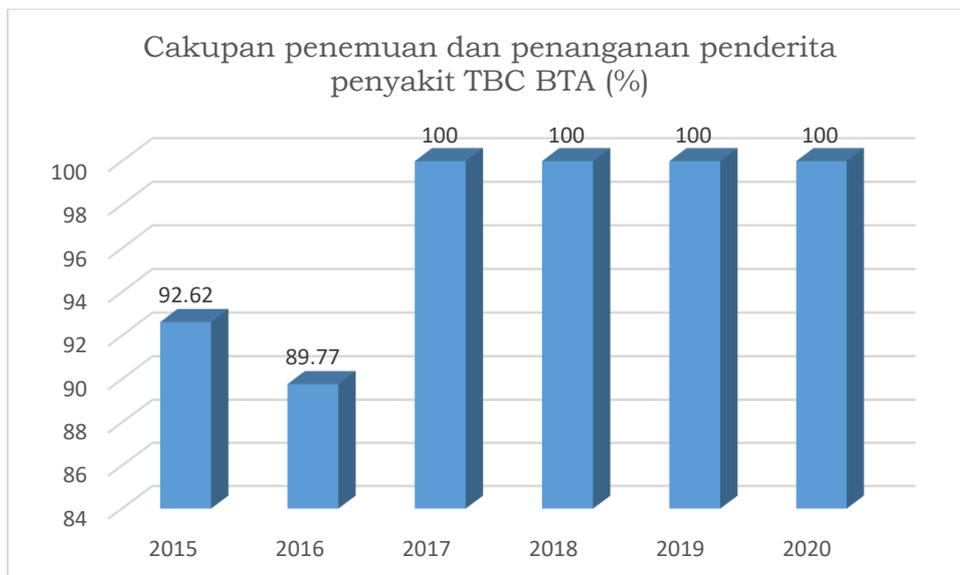
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

Cakupan desa / kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menunjukkan tercapainya jumlah anak dalam satu desa / kelurahan yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah desa/ kelurahan yang UCI dibagi dengan jumlah seluruh desa/kelurahan. Capaian tahun 2018 sebesar 90,96% atau sebanyak 332 desa/ kelurahan, capaian ini meningkat dari tahun 2016 yang terealisasi 86,85% atau sebanyak 317 desa/kelurahan yang UCI.

Dilihat dari jumlah desa yang UCI pada tahun 2018 sebesar 349 desa, naik 17 dari capaian tahun 2017 sebanyak 332 desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar seluruh desa di Kabupaten Pasuruan UCI sebagai berikut :

- a. Melakukan pendekatan pada tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk dapat bisa menggerakkan masyarakat yang mempunyai Bayi/Balita untuk mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
- b. Memotivasi dan memenuhi alat/prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi dengan menambah 11 *Cold Chain* di Puskesmas
- c. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam sistem pelaporan imunisasi menggunakan metode *My Home My Village*
- d. Memaksimalkan koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program dalam Pelaksanaan Program yang berhubungan dengan kegiatan Bayi/Balita dengan melakukan wisuda imunisasi bagi bayi dengan IDL (Imunisasi dasar Lengkap)
- e. Maksimalnya kontribusi lintas program dan lintas sektor.
- f. Tercukupinya sarana dan prasarana.

7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA



Grafik 2.48 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2015-2020 di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2021

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC menggambarkan jumlah penderita TB paru yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Hal ini menggambarkan kewajiban pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kepada seluruh orang dengan TBC sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pada tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi tahun 2019 sebesar 100%, dan apabila dikategorikan sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan, maka capaian di atas 80% termasuk dalam kategori sebesar 100%. Dilihat dari penemuan penderita TBC yang diobati, yang mengindikasikan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi penyakit TBC.

8. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas



Grafik 2.49 Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan strata 1 (pertama) dibutuhkan oleh masyarakat sebagai upaya kuratif, promotif dan preventif. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kunjungan pasien puskesmas dengan jumlah penduduk. Penduduk yang berobat di Puskesmas tahun 2018 sebesar 103,59%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercapai sebesar 101,15%, dan jika dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 87,50%, maka capaian tahun 2018 telah melebihi target. Apabila dilihat dari jumlah penduduk yang memanfaatkan puskesmas maka terjadi peningkatan sebanyak 177.788 kunjungan, dari tahun 2017 sebesar 1.799.954 ke tahun 2018 sebesar 1.900.359.

Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas masih menjadi pilihan utama dalam penanganan kesehatan serta menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan pelayanan. Program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas adalah :

1. Pembangunan sarana pelayanan Kesehatan di 7 Puskesmas induk yaitu: Karangrejo, Sebani, Beji, Nguling, Bulukandang, Gempol, Prigen dan Pasrepan
2. Pembangunan sarana pelayanan Kesehatan di 24 Puskesmas Pembantu , Gerbo, Blarang, Ngembal, janjag wulung, Mororejo, Wonokitri, Kronto, Welulang, Ampelsari, Galih, Klakah, Klintar, Klangkrong, Tejowangi, Gunting, Sebandung, Kemirisewu, Ngerong, Watukosek, Kedungboto, Cangkring malang, Kalirejo, Menyarik dan Kedung banteng
3. Akreditasi puskesmas di 19 Puskesmas yaitu : Gondangwetan, Lekok, Nguling, Lumbang, Wnongan, Rejoso, Grati, Kedawung wetan, Pohjentrek, Tosari, Puspo, Kraton, Kepulungan, bulukandang, Wonorejo, Karangrejo, Nongkojajar, Sumberpitu dan Sebani

9. Tercukupinya Pelayanan Masyarakat Miskin (PBI dan PBID)

Dalam rangka menunjang program Pemerintah Pusat yaitu Program UHC (Universal Health Coverage) dilakukan dengan memberikan jaminan kesehatan melalui PBI dan PBID terhadap warga negaranya secara menyeluruh sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia, maka Pemerintah kabupaten pasuruan memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan. Implementasi kebijakan tersebut oleh Pemerintah Daerah melalui RSUD Bangil diwujudkan dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang masuk dalam PBI dan PBID.

Tabel 2.24 Tercukupinya pelayanan masyarakat miskin tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Tercukupinya Pelayanan masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	n/a

Indikator tercukupinya pelayanan masyarakat miskin menggambarkan tentang banyaknya kunjungan pasien miskin sesuai dengan ketentuan yang datang dan dilayani RSUD Bangil dalam satu tahun dibagi dengan jumlah pasien miskin yang datang ke RSUD Bangil dalam periode tahun tersebut dikalikan seratus persen. Tahun 2018 realisasi indikator tercukupinya kunjungan masyarakat miskin sebesar 100%. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2017 dan melebihi target yang ditetapkan yakni 96%. Jumlah kunjungan masyarakat miskin dengan PBI dan PBID tahun 2018 sebanyak 79.977 (PBI sejumlah 46.203 dan PBID sejumlah 33.774), kunjungan tersebut terdiri dari kunjungan rawat jalan dan kunjungan rawat inap. Jika dibandingkan dengan kunjungan pelayanan masyarakat miskin tahun 2017 sebanyak 27.651, pada tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar 52.362 kunjungan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam peningkatan layanan kesehatan serta kemudahan dalam akses pemberian kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin.

10. Persentase jumlah penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit

Tabel 2.25 Persentase Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase jumlah penduduk memanfaatkan RSUD	15,15	16,49	16,79	15,81	n/a

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan, 2020

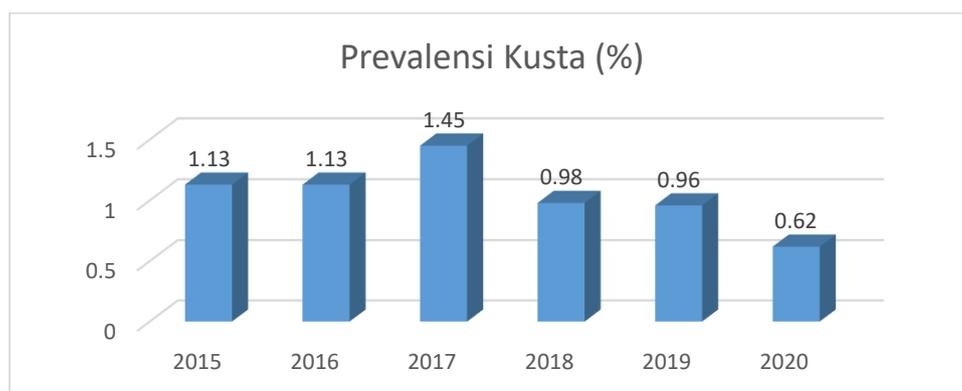
Persentase jumlah penduduk yang memanfaatkan rumah sakit adalah indikator yang digunakan untuk mengukur akses penduduk terhadap rumah sakit dan besarnya upaya rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Angka ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kunjungan ke RSUD Bangil dengan jumlah total penduduk Kabupaten Pasuruan dikalikan seratus persen. Jumlah kunjungan penduduk Kabupaten Pasuruan yang memanfaatkan RSUD Bangil tahun 2018 sebanyak 290.046 atau sebesar 15,81% dari jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan 1.834.529 jiwa. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang sebesar 298.761 atau 16,79% jumlah penduduk, maka pada tahun 2018 ada penurunan sebesar 8.715 kunjungan atau 0,03%. Penurunan kunjungan masyarakat ke RSUD Bangil antara lain disebabkan oleh ;

- Terjadinya kebakaran yang menyebabkan tidak beroperasinya instalasi bedah sentral dan CSSD sehingga berdampak penurunan kunjungan.
- Kebijakan BPJS tentang pembatasan pelayanan tentang jarak rujukan.
- Beropersinya rumah sakit Grati serta rumah sakit baru disekitar RSUD Bangil.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh RSUD Bangil dalam meningkatkan pelayanan adalah :

- a. Memperbaiki Sarana dan prasarana akibat kebakaran
- b. Memperkuat jejaring pemasaran dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dengan menjadikan dokter spesialis RSUD Bangil sebagai konsultan Puskesmas.
- c. Menambahkan infrastruktur baik pelayanan maupun penunjang pelayanan yang memiliki potensi pasar dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial misalnya pelayanan farmasi, Radiologi, rehab medik, ruang intensif care, dan ruang isolasi dan penyakit menular, PONEK, antrian mandiri, serta pelayanan penunjang lainnya
- d. Memperluas jaringan pemasaran dengan perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan
- e. Untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis, RSUD Bangil menambah tenaga dokter Spesialis dan dokter spesialis konsultan dengan cara kontrak kerja waktu tertentu.
- f. Mengoptimalkan gedung rawat inap jantung dan paru
- g. Memanfaatkan kamar operasi di gedung IGD baru untuk pasien gawat darurat dan untuk pasien yang terjadwal.

11. Prevalensi Kusta



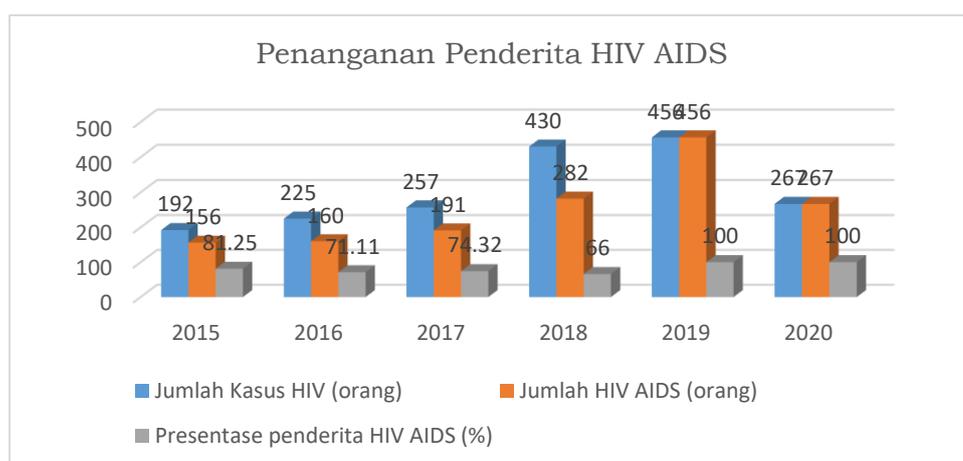
Grafik 2.50 Prevalensi Kusta Tahun 2015-2020 Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan Hasil capaian program penanggulangan penyakit kusta bahwa prevalensi rate penyakit kusta Kabupaten Pasuruan tidak terjadi perubahan yang signifikan, dari tahun 2014 sebesar 1,37, pada tahun 2015 prevalensinya adalah 1,13, prevalensi pada tahun 2016 adalah 1,33, sampai dengan tahun 2017 terjadi kenaikan prevalensi kembali. Hal tersebut diakibatkan adanya program *intensive case finding* yang mana kasus penyakit kusta semakin banyak ditemukan. Maka dengan banyaknya kasus yang ditemukan menyebabkan prevalensi yang tinggi. Kabupaten Pasuruan ditargetkan

dapat eliminasi tahun 2018, tetapi bila dilihat kemampuan dan masih banyaknya temuan kasus yang didapatkan petugas dan layanan kesehatan, maka target eliminasi kusta di Kabupaten Pasuruan diusahakan menjadi tahun 2020. Jadi akhir tahun 2020 Kabupaten Pasuruan dapat mencapai eliminasi kusta yaitu prevalensi sebesar 0,62 per 100.000 penduduk atau kurang dari 1 per 100.000 penduduk.

12. Persentase Penanganan Penderita HIV AIDS



Grafik 2.51 Penanganan Penderita HIV AIDS tahun 2015-2020 di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2021

Salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan HIV adalah pengobatan Anti Retro Virus (ARV). Jumlah penderita HIV yang mendapatkan pengobatan ARV mengalami peningkatan dari 2013 sampai 2015 karena masih beberapa fasilitas kesehatan yang bisa melakukan pemeriksaan HIV. Pada tahun 2015 fasyankes yang melakukan pemeriksaan bertambah sehingga kasus yang ditemukan juga bertambah. Namun jumlah penderita HIV yang mendapatkan ARV mengalami penurunan karena layanan Pendampingan Dukungan Pengobatan (PDP) dimana layanan ini memberikan pengobatan ARV hanya ada 1 di Kabupaten Pasuruan yaitu di RSUD Bangil. Sehingga keterbatasan akses (biaya dan transportasi) membuat penderita HIV tidak mau ke RSUD Bangil. Namun tahun 2017 Kabupaten Pasuruan mengusulkan tambahan layanan PDP sejumlah 7 puskesmas untuk meningkatkan akses pengobatan ARV. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu mencapai 267 orang.

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Rasio Jaringan Irigasi	%	9,48	9,55	10,89	12,27	13,47	14,77
2	Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	23.757	25.554	25.562	27.662	28.712	29.779
3	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	76,77	88,51	96,95	98,7	98,90	98,99
4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	73,29	73,33	75,71	78,21	80,20	82,1
5	Persentase penanganan darurat banjir	%	85,5	88,5	94	96,5	97,20	98,2
6	Ketersediaan Lahan untuk pembangunan Embung	Unit	6	6	6	6	7	7
7	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	76,86	77,85	80,52	84,04	79,50	81,23
8	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	98,96	99,3	99,73	100	81,47	83,09
9	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	23,01	24,81	25,87	26	26,72	26,92
10	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	42,05	44,21	46,03	48	49,25	49,46
11	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	dokumen	2	2	2	2	2	2
12	Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	(Titik)	45.335	45.610	45.860	48.465	46.440	46.710
13	Indeks Ketahanan Air	Indeks	n/a	n/a	n/a	77,68	77,68	77,65

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Rumah tangga pengguna air bersih (perdesaan dan perkotaan)	KK	n/a	340,28	360,77	380,78 4	389,18 4	405,07
15	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	%	n/a	70,02	75,01	80,7	78,85	82,45
16	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Indeks	n/a	n/a	n/a	1,19	1,2	1,3

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan 2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan SDA ada 2 (dua) yaitu:

- a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi (DI) yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu aspek yang prioritas untuk dilakukan dan wajib menjadi perhatian semua pihak, karena pengelolaan sumber daya air yang kurang baik akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius seperti banjir saat musim hujan, kekeringan lahan pertanian saat musim kemarau, sulitnya air baku untuk air minum, menurunnya debit sumber air atau bahkan banyak sumber air yang hilang atau mati.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan ada 2 (dua) wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Brantas (Kali Wрати, dan Kali Kedunglarangan) yang merupakan kewenangan Nasional dan Wilayah Sungai Welang – Rejoso yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Timur. Dimana setiap tahunnya ketika musim hujan kedua wilayah sungai tersebut meluap dan mengakibatkan banjir pada daerah hilirnya. Kali Wрати menyebabkan banjir pada sebagian wilayah Beji dan Bangil, Kali Kedunglarangan menyebabkan banjir pada sebagian wilayah Kecamatan Bangil, Kali Welang menyebabkan banjir pada sebagian wilayah kecamatan Kraton, dan Kali Rejoso menyebabkan banjir pada sebagian wilayah kecamatan Rejoso. Guna menanggulangi dan mengurangi kejadian banjir di wilayah kecamatan Beji dan Bangil pada tahun 2017 – 2019 Pemerintah Pusat melalui BBWS Brantas melakukan normalisasi Kali Kedunglarangan bagian hilir sepanjang 7 (tujuh) km. Selanjutnya juga direncanakan pemanfaatan Kali Wрати Lama (Kali Mati) sebagai *long storage* dan pembangunan 3 (tiga) kolam retensi pada aliran sungai/kali Kedunglarangan.

Guna menanggulangi banjir dan sebagai upaya konservasi, di wilayah Kabupaten Pasuruan telah dibangun 6 (enam) unit embung yaitu Embung Kertosari (Kecamatan Purwosari), Embung Sukorame (Kecamatan Sukorejo), Embung Kedungbanteng (Kecamatan Rembang), Embung Krikilan (Kecamatan Kejayan), Embung Kalisat (Kecamatan Rembang) dan Embung Sanganom (Kecamatan Nguling), Embung-embung ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku air minum maupun untuk keperluan irigasi dan pariwisata. Selain sumber daya air sungai, Kabupaten Pasuruan juga memiliki sumber daya air lainnya berupa sumber air, danau/ranu dan air tanah.

1. Rasio Jaringan Irigasi



Grafik 2.52 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2021

Rasio Jaringan Irigasi Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 14,77%. Dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 yakni sebesar 13,47% maka pada tahun 2019 ada penambahan rasio jaringan irigasi sebesar 1,3 %. Kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh kejadian alam berupa banjir maupun karena usia konstruksi sudah tua.

2. Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

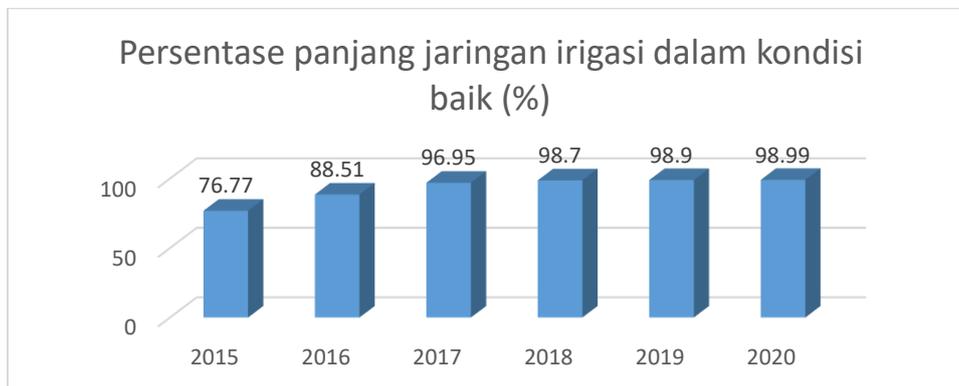


Grafik 2.53 Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2021

Luas daerah irigasi dalam kondisi baik merupakan gambaran dari sudah baiknya daerah irigasi di Kabupaten Pasuruan yang mendapatkan pengairan dari sistem irigasi teknis. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu mencapai 29.779. Pada Tahun 2020 capaian kinerja dari indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dimana untuk target kinerja tahun 2020 adalah seluas 28.712 ha. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 seluas 28.712 ha maka pada tahun 2020 terdapat penambahan daerah irigasi dalam kondisi baik seluas 1.067 ha. Peningkatan kinerja ini selain didukung adanya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, juga adanya peran serta masyarakat (HIPPA/GHIPPA) dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi maupun perbaikan - perbaikan ringan.

3. Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik



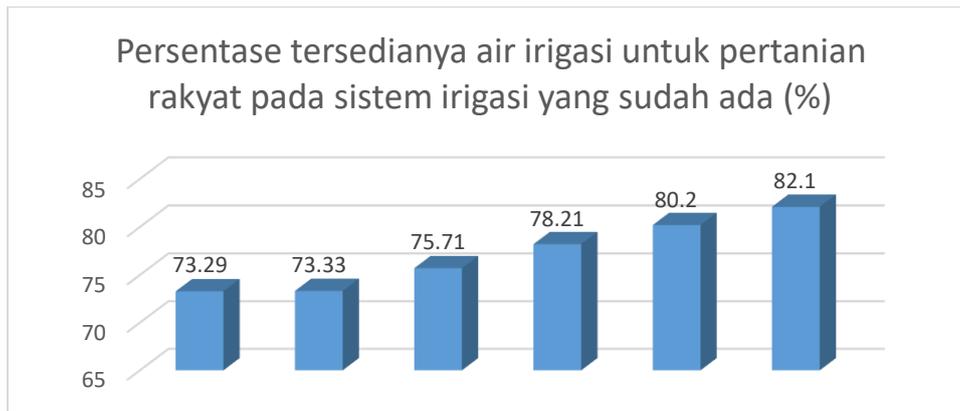
Grafik 2.54 Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2021

Luasnya ketersediaan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Pasuruan menjadikan pertanian sebagai sektor yang berpotensi besar dalam penyediaan komoditi pertanian dan ketahanan pangan, hal ini tentunya harus didukung oleh keberadaan jaringan irigasi yang baik. Kondisi jaringan irigasi yang baik berpengaruh langsung terhadap tingkat pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air irigasi dalam proses budi daya tanaman pangan (khususnya tanaman padi). Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 98,90% dibandingkan dengan tahun 2018. Target kinerja indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2018 sebesar 71,60%, dengan capaian kinerja sebesar 98,70%, dapat dilihat capaian kinerja tahun 2018 naik secara signifikan dari target yang ditetapkan. Dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 96,95%, terdapat peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 1,75% atau sepanjang 5000 m. Adapun peningkatan ini didukung adanya alokasi anggaran untuk optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun,

rehabilitasi/pemeliharaan berkala jaringan irigasi, pemeliharaan dan pemberdayaan Petani Pemakai Air serta dukungan dana hibah Pemerintah melalui Program WISMP2.

4. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

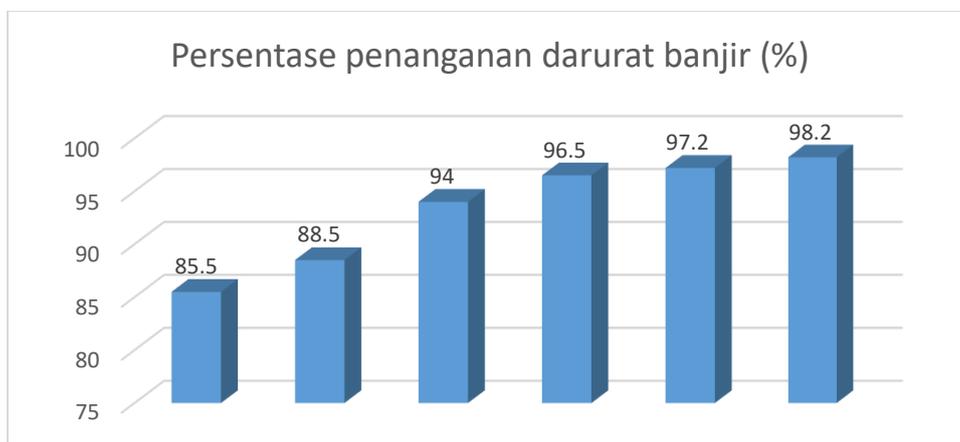


Grafik 2.55 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2021

Penilaian kinerja pelayanan irigasi khususnya pemenuhan kebutuhan air disaat musim tanam diperlukan adanya indikator untuk menilai yakni indikator Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada. Pada tahun 2020 persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 82,1% . Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 80,2%, maka pada Tahun 2020 terdapat peningkatan pelayanan irigasi sebesar 1,9% dan berdasarkan SPM Pekerjaan Umum untuk kinerja pelayanan irigasi di Kabupaten Pasuruan dikategorikan baik. Kondisi yang demikian ini didukung adanya upaya mengoptimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jaringan irigasi, pemberdayaan Petani Pemakai Air serta dukungan dana hibah Pemerintah melalui Program WISMP-2.

5. Persentase penanganan darurat banjir



Grafik 2.56 Persentase penanganan darurat banjir di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2021

Wilayah Kabupaten Pasuruan dilalui oleh sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar antara lain Sungai Kedunglarangan, Sungai Rejoso, dan Sungai Welang beserta anak sungainya. Sungai sungai ini berhulu di kawasan Gunung Arjuna-Welirang dan Gunung Bromo yang bermuara di laut utara Jawa. Penyebab kerawanan banjir di wilayah Kabupaten Pasuruan sangat kompleks mulai dari penyempitan dan pendangkalan sungai, kemudian berkurangnya hutan di hulu sehingga air langsung turun saat hujan lebat, dan kondisi pasang surut air laut. Penanganan masalah banjir dan pengelolaan sungai merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dalam upaya penanganan dan pencegahan bencana banjir, Pemerintah Kabupaten hanya dapat melakukan penanganan darurat pada titik-titik wilayah banjir. Pada tahun 2020 penanganan banjir meningkat yaitu mencapai 98,20%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 97,20% terdapat peningkatan dalam penanganan darurat banjir pada tahun 2020 yakni sebesar 1%.

6. Ketersediaan Lahan untuk pembangunan Embung

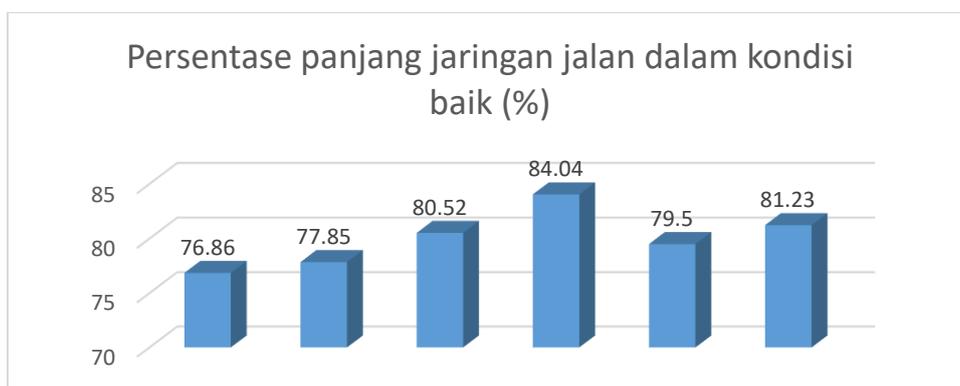


Grafik 2.57 Ketersediaan Lahan untuk pembangunan Embung di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2021

Dalam upaya penanggulangan banjir dan konservasi air, di wilayah Kabupaten Pasuruan telah dibangun embung dan akan dibangun beberapa embung lagi pada tahun-tahun mendatang. Pembangunan embung dibiayai oleh Pemerintah sedangkan lahan harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Target kinerja untuk indikator ini pada tahun 2018 sebanyak 1 lokasi, dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 1 lokasi, sehingga total Embung yang terbangun sampai dengan Tahun 2018 sejumlah 6 (enam) lokasi dari target 8 (delapan) lokasi, disebabkan proses SID untuk 2 (dua) lokasi masih dalam proses. Tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi total 7 lokasi.

7. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik



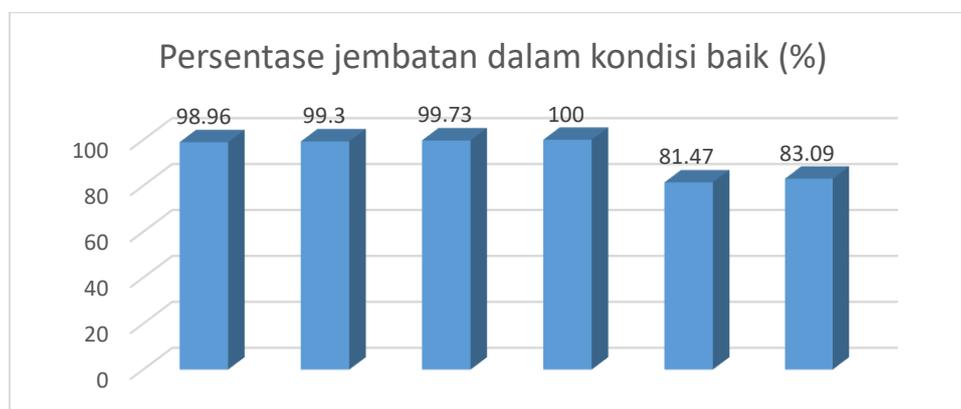
Grafik 2.58 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2021

Salah satu wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan salah satu standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

adalah penyediaan infrastruktur jalan dalam kondisi baik. Pada indikator ini ditahun 2018 target capaiannya sesuai RPJMD 2018 sebesar 84% atau sepanjang 1.945,35 km dari panjang jalan kabupaten keseluruhan sepanjang 2.315,89 km. Pada tahun 2018 dukungan untuk mewujudnya hal tersebut baik dari segi kebijakan maupun pendanaan cukup memadai sehingga diperoleh capaian pada akhir tahun 2018 sebesar 84,04 % atau 1.946,22 km, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 80,52 % atau sepanjang 1.864,67 km, maka pada tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,19% atau sepanjang 81,55 km. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu mencapai 79,80% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 mencapai 81,23%.

8. Persentase Jembatan dalam kondisi baik

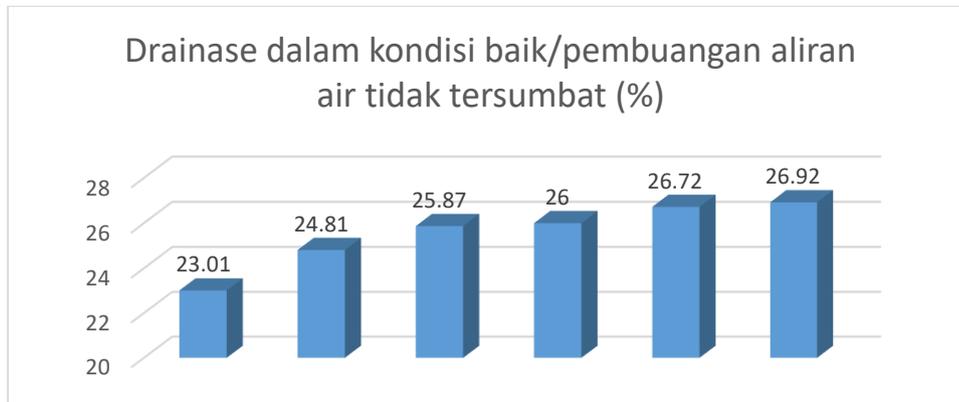


Grafik 2.59 Persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2021

Jembatan merupakan penghubung antar ruas jalan yang berfungsi untuk kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat, jika kondisi jembatan dalam keadaan baik maka mobilitas masyarakat akan lancar yang manfaat bagi masyarakat setempat khususnya dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Target dan capaian indikator ini pada tahun 2018 adalah 100% atau sebanyak 1.140 jembatan dari total jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Capaian ini didukung oleh segi kebijakan maupun pendanaan yang cukup memadai sehingga dapat dikatakan capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 99, 73% atau mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,27%. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu mencapai 81,47% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 mencapai 83,09%.

9. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

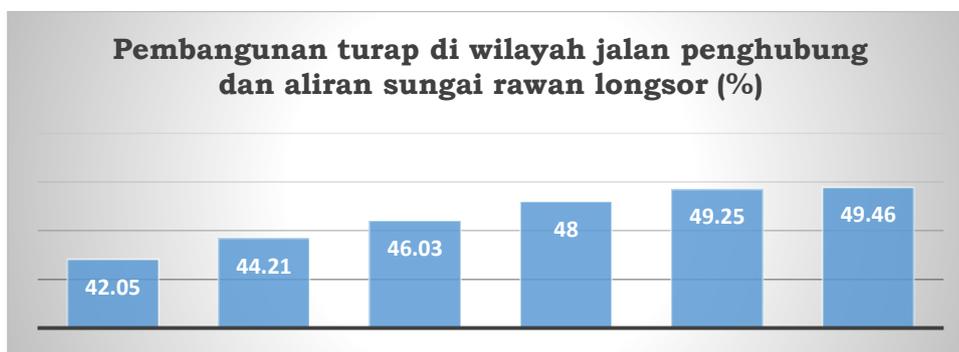


Grafik 2.60 Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2021

Drainase berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan dari badan jalan. Jika saluran drainase tidak berfungsi dengan baik maka akan terjadi genangan yang mengakibatkan rusak atau turunnya kondisi jalan. Sehingga untuk kondisi drainase perlu diperhatikan secara khusus. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 26,92%. Sedangkan pada tahun 2018 target kinerja drainase dalam kondisi sebesar 26,00% atau sepanjang 99,84 km dari panjang drainase yang ada di Kabupaten Pasuruan sepanjang 384 km, dengan adanya dukungan untuk mewujudkan hal tersebut baik dari segi kebijakan maupun pendanaan yang cukup memadai sehingga diperoleh capaian realisasi kinerjanya sebesar 26% atau telah sesuai dengan target. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017, target kinerja drainase dalam kondisi baik sebesar 25%, realisasi capaian kinerjanya sebesar 25,87%, maka pada tahun 2018 ada penambahan drainase dalam kondisi baik sebesar 0,13% atau sepanjang 0,5 km.

10. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

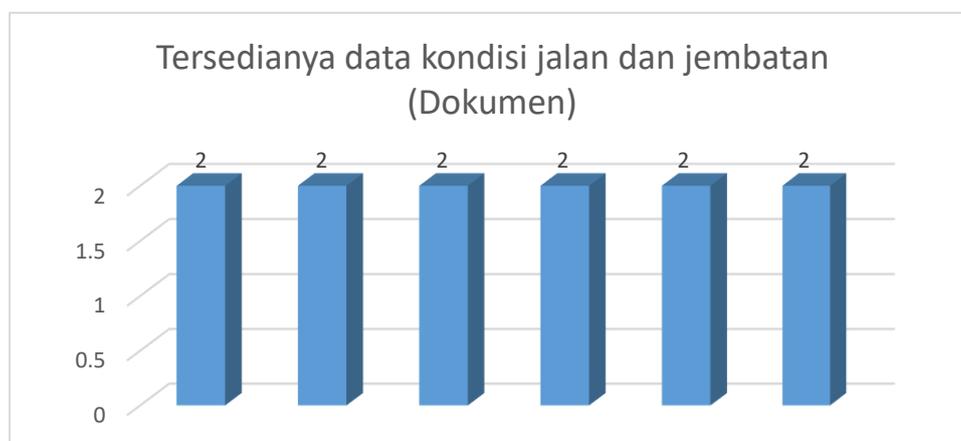


Grafik 2.61 Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2021

Turap dibangun di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor bertujuan untuk memperkuat badan jalan dari bahaya longsor. Turap biasanya dibangun pada daerah - daerah pegunungan atau wilayah dataran tinggi dan ruas jalan yang berbatasan langsung dengan sungai, saluran atau laut, kerusakan jalan dapat disebabkan oleh bencana longsor. Pada tahun 2020 Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sehingga menjadi 49,46%. Target kinerja pada tahun 2018 sebesar 48,00% atau sepanjang 457,44 km dari panjang turap yang ada di kabupaten pasuruan sepanjang 953 km dengan realisasi sebesar 48 % atau sesuai target. Sedangkan target kinerja pada tahun 2017 sebesar 46 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 46,03%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 maka ada peningkatan persentase pembangunan turap sebesar 0,21%.

11. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan

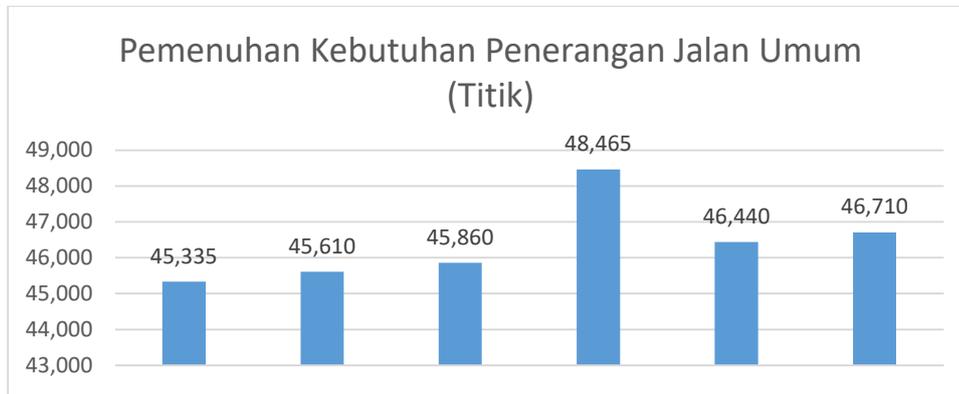


Grafik 2.62 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2021

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasuruan rutin dilakukan oleh OPD agar dapat diketahui kondisi jalan dan jembatan. Data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh OPD terkait sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur. Target kinerja tersedianya data kondisi jalan dan jembatan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu 2 dokumen, setiap tahunnya realisasi dari indikator ini sebanyak 2 dokumen atau 100% yaitu dokumen data kondisi jalan dan dokumen data kondisi jembatan. Begitu juga dengan target kinerja tahun 2017 terdapat data sebanyak 2 dokumen, dan telah dilakukan pembaharuan data kondisi jalan dan jembatan dengan capaian sebanyak 2 dokumen.

12. Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)



Grafik 2.63 Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2021

Pemenuhan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu standar pelayanan dan keselamatan transportasi yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam perencanaan pembangunan lima tahun jumlah kebutuhan Lampu PJU dihitung dari panjang jalan kabupaten 2.315,89 km dan setiap 50 m panjang jalan dibutuhkan 1 titik LPJU. Target kinerja pada tahun 2018 yaitu sebanyak 45.083 titik dari 46.317 titik yang dibutuhkan, dengan capaian kinerja sesuai target yang ditentukan yaitu sebesar 45.083 titik. Dibandingkan pada tahun 2017, target kinerja indikator ini sebanyak 45.016 titik PJU, dengan realisasi capaian kinerjanya mencapai 45.860 titik, maka pada tahun 2017 ada penurunan pemasangan PJU sebanyak 777 titik. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 46.440 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 mencapai 46.710.

13. Rumah Tangga pengguna air bersih (pedesaan dan perkotaan)



Grafik 2.64 Rumah Tangga pengguna air bersih (pedesaan dan perkotaan) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2021

Di wilayah Kabupaten Pasuruan pemenuhan pelayanan air minum dilaksanakan oleh PDAM untuk wilayah perkotaan dan oleh masyarakat sendiri melalui wadah HIPPAM untuk wilayah perdesaan maupun wilayah perkotaan yang tidak terjangkau layanan PDAM. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga menjadi 405.070 KK. Layanan air bersih untuk masyarakat didukung oleh layanan PDAM untuk wilayah perkotaan dan melalui program PPAB yang dikelola oleh HIPPAM. Capaian kinerja air bersih yang cukup signifikan ini didukung oleh dana DAK, dana Hibah Air Minum Perdesaan, dan melalui program Pamsimas.

Program Pamsimas yang bertujuan mempercepat pencapaian akses air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat, di Kabupaten Pasuruan dimulai pada tahun 2014 dan sampai saat ini telah mencakup 52 desa / 15.600 KK. Pendanaan program ini merupakan sharing antara dana APBN, APBD Kabupaten dan partisipasi masyarakat. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 rumah tangga penggunaan air bersih sebesar 389.184 KK. Capaian akses air bersih ini juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2013 – 2018, tetapi untuk pencapaian target 100% masyarakat terlayani air bersih pada tahun 2019 masih diperlukan kerja keras semua pihak.

14. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi



Grafik 2.65 Persentase penduduk yang terlayani sanitasi tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2021

Selain akses air bersih pada tahun 2020 Pemerintah menargetkan capaian akses sanitasi, khususnya akses masyarakat pada pengelolaan air limbah (jamban), sebesar 100%. Karena peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan derajat kesehatan masyarakat salah satunya juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana pengelola air limbah. Pada tahun 2019 Penduduk yang terlayani sanitasi sebesar 78,85%. Sementara Pada Tahun 2020 penduduk terlayani sanitasi meningkat sebesar 3,6%, capaian kinerja tahun 2020 sebesar 82,45% atau lebih besar dari tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja akses sanitasi ini tidak hanya didukung oleh pendanaan APBD Kabupaten, tetapi juga adanya dukungan program Pamsimas, dana DAK, dana desa dan juga swadaya masyarakat. Capaian akses sanitasi masyarakat ini juga telah melebihi

target akhir RPJMD tahun 2013 – 2018, meskipun demikian Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasuruan masih memiliki pekerjaan yang cukup berat untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Pasuruan ODF (bebas dari BAB's).

2.3.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi beberapa hal, yaitu : penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten, penyelenggaraan PSU perumahan, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Berikut merupakan indikator Kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan:

Tabel 2.27 Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan

NO	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan	m	164.114,70	166.058,8	176.098,7	188.949,2	198.849,23	221.138,23

NO	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perumahan dan Kawasan Permukiman								
2	Rumah Tidak Layak Huni	%	42,34	67,04	93,99	100	28,11	32,38
3	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%
4	Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a
5	Indeks Permukiman Layak Huni	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	71,46	78,70

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan

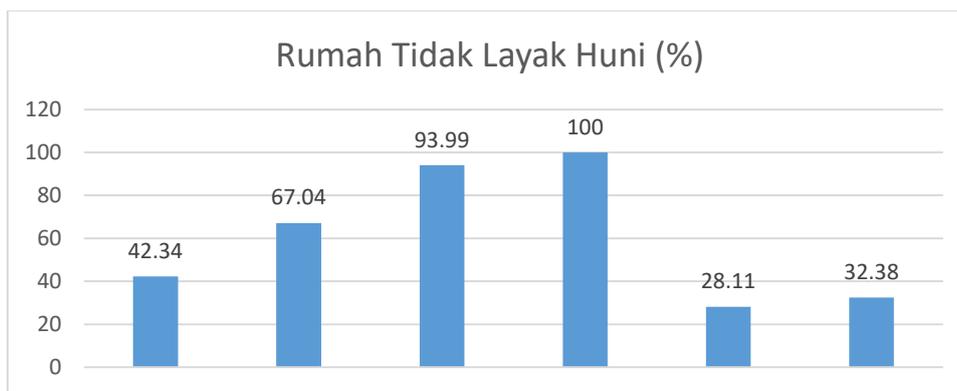


Grafik 2.66 Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2021

Salah penentu kualitas kawasan permukiman adalah tersedianya jalan lingkungan yang dilengkapi dengan drainasenya, selain itu jalan lingkungan juga sangat diperlukan guna mendukung aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pada tahun 2020 panjang jalan lingkungan perkotaan mengalami peningkatan yaitu mencapai 221.138,23 m'. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sepanjang 198.849,23m', atau ada penambahan jalan lingkungan di wilayah Kabupaten Pasuruan sepanjang 22.334 m'.

2. Rumah Tidak Layak Huni yang direhab



Grafik 2.67 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2021

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakatnya telah diberikan bantuan kepada masyarakat berupa stimulan untuk rehab rumah tidak layak huni. Pada tahun 2020 Rumah Tidak layak huni mencapai 32,38%. Sampai dengan tahun 2018 telah dilakukan rehab sebanyak 6.002 rumah tidak layak huni (RTLH) yang didukung oleh dana APBD Kabupaten maupun dana APBN. Rehab RTLH bertujuan menyediakan rumah/hunian yang layak secara kesehatan, teknis dan kenyamanan. Bantuan stimulan rehab RTLH ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau sangat rendah (MBR), kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor informal atau masyarakat miskin. Target kinerja yang ditetapkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2018 sebesar 48,06% dari 6.002 unit RTLH atau sebanyak 2.884 unit. Capaian kinerja rehab RTLH tahun 2018 sebesar 100% atau 6.002 unit. Sejak tahun 2017 guna mewujudkan pencapaian Kabupaten Pasuruan ODF, pada program rehab RTLH para penerima bantuan diharuskan untuk membangun jamban keluarga dari dana yang diberikan.

2.3.1.1.5 Ketenteraman, Ketertban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki setiap pemerintah daerah maupun masyarakat. Keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai dengan pengertian dari trantibum itu sendiri. Penyelenggaraan trantibum sendiri merupakan penghargaan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatan dengan tertib dan tentram. Menurut Undang-undang 23 tahun 2014 urusan ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraannya di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

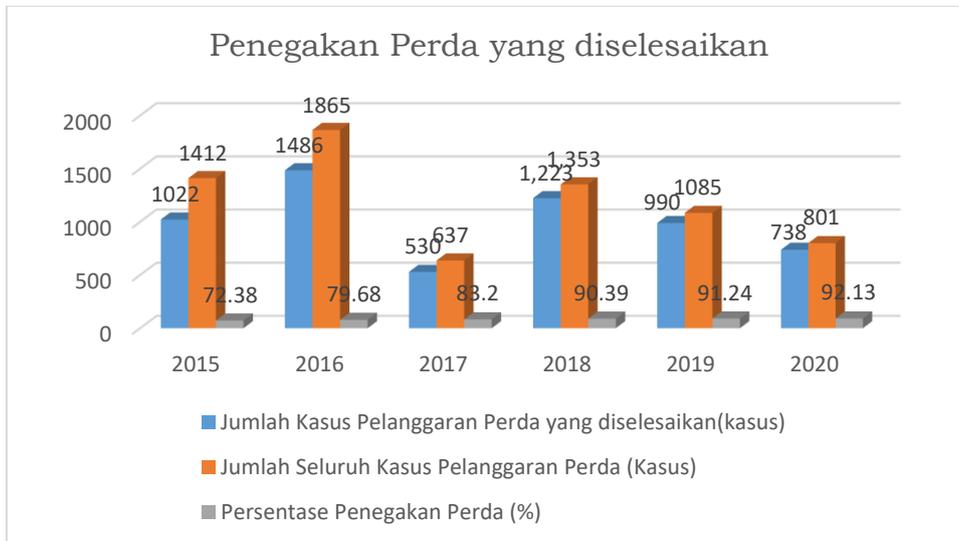
Tabel 2.28 Capaian Indikator Kinerja Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat								
1	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	(kasus)	1022	1486	530	1.223	990	738
2	Jumlah Seluruh Kasus Pelanggaran Perda	(kasus)	1412	1865	637	1.353	1085	801
3	Persentase Penegakan Perda	(%)	72,38	79,68	83,2	90,39	91,24	92,13
4	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum terhadap Masyarakat dan Badan Usaha	(kali)	48	34	24	12	n/a	n/a
5	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	%	12,57	15,79	20,65	26,62	n/a	n/a
6	Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat	%	96,39	97,45	99,99	100	100%	100
7	Persentase Konflik SARA	%	0	0	0	0	0	0

Sumber: Satpol PP, BPBD, dan Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Persentase Penegakan PERDA yang diselesaikan

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan indikator Penegakan PERDA dengan menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda yang ditangani. Berikut merupakan capaian Penegakan PERDA yang diselesaikan.



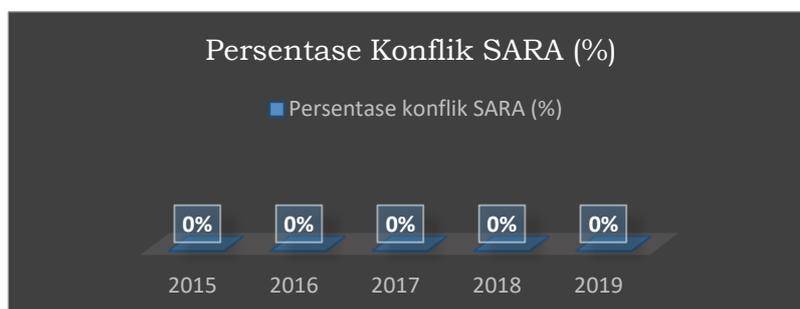
Grafik 2.68 Persentase Penegakan PERDA yang diselesaikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pasuruan, 2021

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan indikator Penegakan PERDA dengan menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda yang ditangani. Pada tahun 2020 capaian indikator mencapai 92,13%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar 91,24% tampak mengalami kenaikan sebesar 2,11%. Untuk penegakan perda ditahun mendatang lebih fokus pada :

1. Lebih mengintensifkan jejaring komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran instansi terkait agar penanganan penindakan pertama dapat segera dilakukan
2. Meningkatkan volume pengawasan terhadap badan huk, badan usaha dan masyarakat untuk memastikan penanganan pelanggaran perda sehingga cepat tertangani
3. Melakukan jemput paksa terhadap pelanggar yang tidak kooperatif.

2. Persentase Konflik SARA



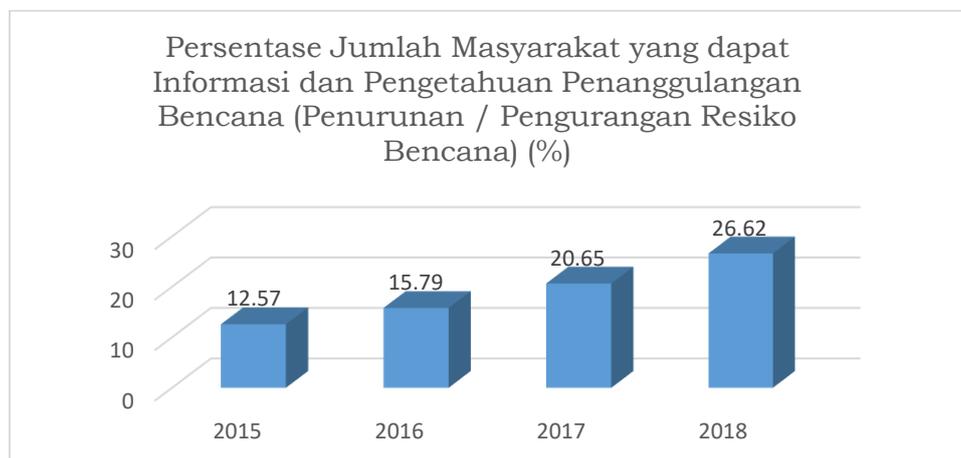
Grafik 2.69 Persentase Konflik SARA di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, 2020

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan beberapa indikator yang termuat dalam dokumen perencanaan salah satunya yaitu Persentase penurunan konflik SARA indikator ini merupakan indikator baru yang pada periode RPJMD sebelumnya menggunakan indikator Forum Antar Umat Beragama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun indikator tersebut diganti menjadi Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat pada tahun 2019.

3. Persentase Pengurangan Risiko Bencana

Kabupaten Pasuruan, karena posisi geografisnya, memiliki banyak potensi bencana. Potensi bencana tersebut antara lain: banjir, tanah longsor, puting beliung, ancaman erupsi gunung berapi dan Rob. Oleh karena itu pencegahan dini dan penanggulangan kejadian bencana menjadi salah satu perhatian pemerintah.



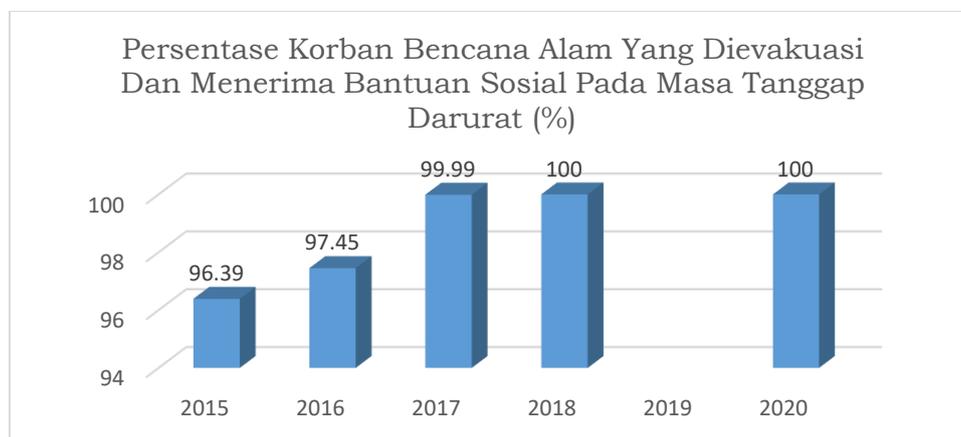
Grafik 2.70 Persentase Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2018

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2019

Pengarusutamaan rencana penanggulangan bencana, prioritas pada 3 (tiga) strategi yaitu :

1. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana pada kebijakan, perencanaan dan program pembangunan yang berkelanjutan yang memprioritaskan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penurunan tingkat kerentanan.
2. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan nasional, daerah serta masyarakat untuk bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi ancaman bencana.
3. Penyertaan pendekatan pengurangan resiko bencana pada perencanaan, pelaksanaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

4. Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat



Grafik 2.71 Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Keberhasilan upaya penanggulangan bencana dinilai dengan indikator indeks resiko bencana, resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Indeks untuk menghitung resiko bencana memperhatikan banyak aspek, seperti dampak posisi geologi, lingkungan, geografi dan kependudukan, ekonomi, dan profil bencana yang sudah terjadi, serta dilengkapi dengan perkiraan nilai kerugian yang timbulkan. Indeks resiko bencana berfungsi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di satu daerah dengan memperhatikan perlakuan beberapa parameter resiko dengan dasar yang jelas dan terukur, serta menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Upaya pengurangan resiko bencana dapat dilakukan melalui beberapa hal antara lain : pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana, peringatan dini terjadinya bencana, dan pembentukan desa tangguh bencana. Sampai akhir tahun 2017 di Kabupaten Pasuruan telah terbentuk 7 (tujuh) desa tangguh bencana.

2.3.1.1.6 Sosial

Sosial merupakan interaksi antar individu, atau kelompok yang menciptakan suatu pola sehingga terjadilah kegiatan yang bersifat umum dan menjadi ciri khas tersendiri. Dengan adanya proses sosial maka pasti akan tercipta suatu permasalahan pula yang menjadi tugas seluruh elemen khususnya pemerintah agar dapat tertangani. Sosial tidak hanya sekedar interaksi melainkan pula berhubungan atau berdampak pada ekonomi, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Maka, sosial bersifat sangat penting bagi suatu daerah untuk memajukan dan mensejahterakan daerah tersebut.

Tabel 2.29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Pasuruan

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sosial								
1	Persentase Penanganan PMKS	(%)	31,35	81,85	96,99	99,99	99,93	100
2	Persentase Jumlah PMKS Kabupaten Pasuruan	(%)	7,49	6,97	6,49	5,99	6,11	5,41
3	Persentase PMKS yang dibina	(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54675
4	Persentase PMKS yang berdaya	(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	219

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Persentase Penanganan PMKS

Penanganan PMKS menggambarkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Pasuruan telah ditangani dan mendapat perlindungan sosial. Penanganan PMKS di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan pada lima tahun terakhir. Oleh karena itu penanganan PMKS menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang sosial.

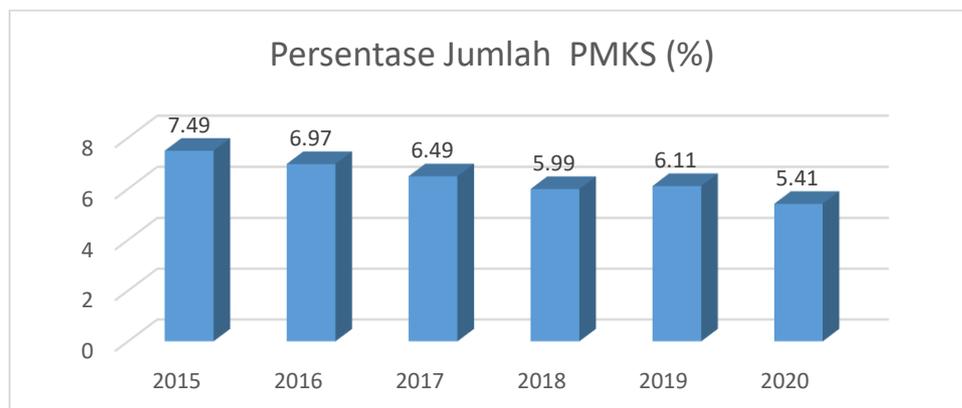


Grafik 2.72 Persentase Penanganan PMKS di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2021

Dapat diketahui bahwa dari grafik tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2015 capaian penanganan PMKS sebesar 31,35%. Pada tahun 2016 capaian penanganan PMKS sebesar 81,85%. Lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,99%. Tidak hanya itu, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 99,99%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi 99,93% dan pada tahun 2020 mencapai 100%.

2. Persentase Jumlah PMKS Kabupaten Pasuruan



Grafik 2.73 Persentase Jumlah PMKS Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2021

Pengukuran kinerja atas indikator persentase jumlah PMKS dilakukan dengan membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk tahun 2018 sebesar 109.903 orang atau 5,99 % dari jumlah penduduk sebesar 1.834.529 orang. Pencapaian tahun 2018 mengalami penurunan 0,5 % bila dibandingkan tahun 2017 yang mencapai presentase sebesar 6,49 %. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan atau presentase jumlah PMKS yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir sebesar 6,11%.

Tabel 2.30 Kemiskinan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pasuruan

Kecamatan	Jumlah
LEKOK	73.267
KRATON	65.485
GRATI	63.996
NGULING	54.639
WONOREJO	52.865
KEJAYAN	47.575
WINONGAN	45.445
PASREPAN	44.845
PURWOSARI	41.619
GONDANGWETAN	40.454
REMBANG	37.290
PURWODADI	36.323
REJOSO	35.345
LUMBANG	33.505
BEJI	33.414
SUKOREJO	29.654
GEMPOL	29.212
PUSPO	27.802
BANGIL	23.741

Kecamatan	Jumlah
TUTUR	19.359
PANDAAN	18.463
PRIGEN	18.423
POHJENTREK	17.232
TOSARI	10.595

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah kemiskinan tertinggi yang ada di Kabupaten Pasuruan berada pada Kecamatan Lekok yang mencapai 73.267 penduduk miskin. Kecamatan Kraton lebih rendah dari Kecamatan Lekok namun menduduki urutan kedua dengan mencapai 65.483 jumlah penduduk miskin. Kemiskinan terendah berdasarkan pada kecamatan yaitu Kecamatan Tosari sebesar 10.595 jumlah penduduk miskin.

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah diluar pelayanan dasar. Berbagai indikator ditampilkan untuk menjelaskan Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.1.2.1 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam menjalankan proses pemerintahan.



Grafik 2.74 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja



Grafik 2.75 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan drastis setelah tahun 2018. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2019 sebanyak 2.450 dan tahun 2020 sebanyak 1.839, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 9.499. Penurunan pada dua tahun terakhir disebabkan oleh salah satu faktor yang mendasari merupakan dampak akan terjadinya covid-19. Hal ini dapat menjadi beban tersendiri bagi perekonomian karenamenurunnya jumlah penempatan tenaga kerja menyebabkan tinggat tingginya pengangguran terbuka.

2. Pencari Kerja yang di Tempatkan



Grafik 2.76 Pencari Kerja yang di Tempatkan Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

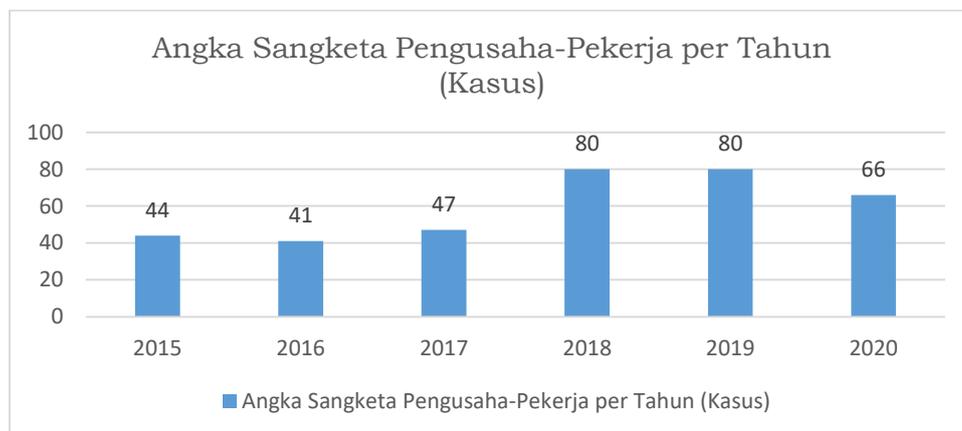
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Pencari kerja yang di tempatkan tahun 2020 mencapai 1.839 orang. Jika dibandingkan dengan pencari kerja yang di tempatkan selama lima tahun sebelumnya capaian ini mengalami penurunan cukup drastis. Jumlah penduduk yang tinggi serta

kondisi pandemi menjadi masalah di bidang ketenagakerjaan khususnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sehingga berpengaruh pada pencari kerja. Untuk itu perlu adanya lapangan kerja baru yang menyerap angkatan kerja yang tersedia dan perlunya pola pendidikan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

3. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Sengketa pengusaha dengan pekerja bisa diakibatkan karena adanya perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan hak terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak dalam hubungan pengusaha dengan pekerja, masing-masing memiliki beda pelaksanaan dan penafsiran mengenai haknya baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan muncul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja. Perselisihan PHK muncul karena tidak ditemuinya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.



Grafik 2.77 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Indikator angka sengketa pengusaha-pekerja diperoleh dari jumlah sengketa/perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan baik berupa anjuran mediator maupun perjanjian bersama, pada tahun 2019 ini terdapat 55 kasus yang dapat diselesaikan dari target 80 kasus yang didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2020 mengalami peurunan yaitu realisasi mencapai 66 kasus dengan rincian diselesaikan dari target 81 kasus.

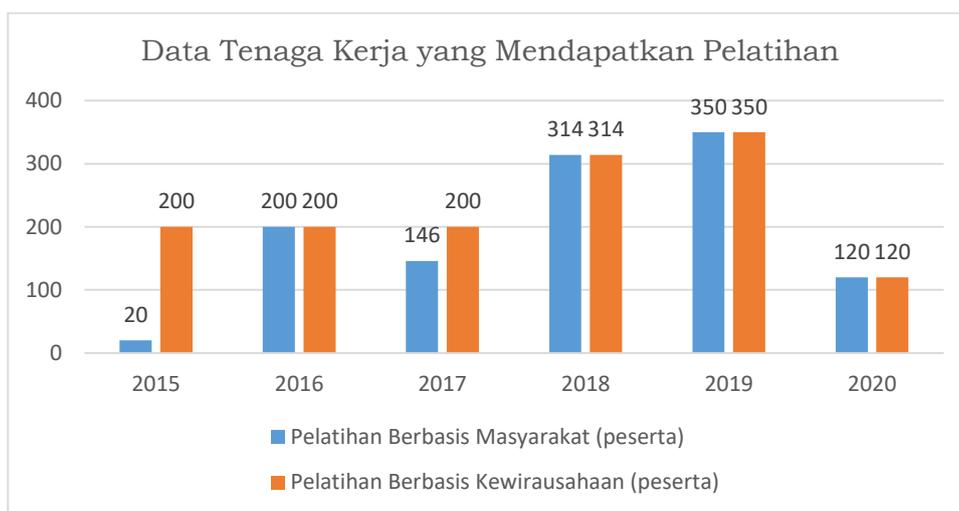
4. Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Salah satu awal dari jenis pendidikan non formal adalah pelatihan, kegiatan pelatihan memberikan manfaat yang cukup besar bagi peserta pelatihan apabila dikelola dengan baik. Dewasa ini banyak orang telah memanfaatkan pelatihan untuk membantu

mereka dalam melaksanakan berbagai tugas dalam kehidupan, pada hakikatnya pelatihan merupakan pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku dalam hal ini pengetahuan *skill* dan sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan.

Salah satu akibat dari globalisasi adalah terjadinya persaingan yang semakin kuat di bidang ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut kualitas tenaga kerja yang dicetak (*Supply*) harus memenuhi standar kebutuhan dan permintaan (*demand*) dunia usaha dan dunia industri. Proses pelatihan untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai (*match*) dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu diklat keterampilan dan produktifitas tenaga kerja bagi masyarakat sangat diperlukan.

Adapun lembaga pelatihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan adalah UPT LKD yang beralamatkan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan guna menjawab tantangan tersebut dan memberikan bekal kepada masyarakat untuk ikut bersaing dan untuk meningkatkan pendapatan. Begitu urgennya penanganan masalah pengangguran masyarakat bagi pemerintah daerah, maka Pemerintah Pasuruan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten melaksanakan berbagai pelatihan *skill* / keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Lembaga ini memiliki tujuan mempersiapkan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan IPTEK.



Grafik 2.78 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Dapat diketahui bahwa pada gambar dijelaskan mengenai gambaran data tenaga kerja yang mendapat pelatihan kerja di Kabupaten Pasuruan. Pelatihan Kerja tersebut dibagi menjadi dua yaitu Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan. Pelatihan Berbasis Masyarakat maupun Pelatihan Berbasis Kewirausahaan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan.

Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 dengan capaian 350 peserta pelatihan. Sedangkan pada tahun 2020 Pelatihan Berbasis Masyarakat mengalami penurunan hingga 120 peserta serta Pelatihan Berbasis Kewirausahaan dengan capaian 120 peserta. Pengadaan pelatihan yang mengalami penurunan terkendala dengan pandemi Covid-19, yang mempengaruhi dari tata cara pelaksanaan pelatihan.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak harus terus diperkuat. Hal ini dirasa perlu mengingat perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi penting untuk masa depan suatu daerah.

Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasuruan

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Jumlah KDRT	(kali)	58	16	69	39	55	48
2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	(%)	1,97	1,97	1,68	1,8	1,8	1,8
3	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	4,88	46,91	48	56,54	n/a	n/a
4	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	(%)	91,38	100	100	100	n/a	n/a
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(%)	90.11	90.49	90.45	90.45	90.68	90.48

Sumber: Dinas KBPP, 2021

1. Persentase Rasio KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO), antara 40 hingga 70 persen perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Tahun	Jumlah KDRT	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Rasio KDRT
2015	28	418.244	0,014
2016	16	420.232	0,004
2017	69	422.561	0,016
2018	39	449.450	0,008
2019	55	n/a	n/a
2020	48	n/a	n/a

Sumber: Dinas KBPP, 2021

Dari data dapat dilihat bahwa rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,008 % dimana dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dari 449.450 Rumah Tangga terdapat 39 kasus KDRT. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 0,016 % dan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh RPJMD tahun 2018 sebesar 0,008%, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat keberanian, kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan keberhasilan program inovasi SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Dengan semakin banyak kasus yang terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Keberhasilan pembangunan dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu sendiri karena secara normatif perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama juga mempunyai peranan penting dalam usaha perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun disisi lain banyak permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan salah satu diantaranya adalah kelangkaan lapangan pekerjaan bagi perempuan di Lembaga pemerintahan khususnya sejak dilakukan moratorium rekrutmen ASN. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam menentukan kebijakan daerah. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan penentuan kebijakan sangat penting sehingga kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu,

kebijakan - kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan diperoleh dari perbandingan Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Jumlah Pekerja Perempuan.

Tabel 2.33 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase	1,97	1,97	1,68	1,8	1,8	1,8

Sumber: Dinas KBPP, 2021

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terhadap pekerja di Kabupaten Pasuruan mencapai 1,80 % di tahun 2018 yang berarti bahwa dari 308.180 pekerja perempuan terdapat 5.537 pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 2% dan mengalami penurunan jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan namun secara Persentase mengalami peningkatan sebesar 0,12% dibandingkan tahun 2017.

3. Presentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk mengukur kesempatan kerja dan peluang yang diperoleh perempuan dalam berusaha serta memiliki kesempatan kerja dan aktif dalam kegiatan yang bernilai ekonomis. Presentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan merupakan perbandingan dari jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan Jumlah Angkatan Kerja Perempuan.

Tabel 2.34 Presentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Presentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase	46,88	46,91	48	56,54	n/a	n/a

Sumber: Dinas KBPP, 2021

Dari data Tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2018 mencapai 56,54 %, dimana dari 545.079 angkatan kerja perempuan terdapat 308.180 partisipasi angkatan kerja perempuan, nilai tersebut telah melebihi target RPJMD tahun 2018 yang telah ditetapkan sebesar 40,06 %, capaian tahun 2018 meningkat sebesar 8,54% dari tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sudah lebih dari 50% dari angkatan kerja perempuan telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya dunia kerja.

4. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan upaya awal dari penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya pengaduan tindakan kekerasan menjadi indikator yang penting terkait peran aktif Masyarakat, organisasi perempuan dan Lembaga Perlindungan Anak untuk bersama-sama menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk KDRT didalamnya).

Tabel 2.35 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (%)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase	91,38	100	100	100	n/a	n/a

Sumber: Dinas KBPP, 2021

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel 2.36 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase	90.11	90.49	90.45	90.45	90.68	90.48

Sumber: Dinas KBPP, 2021

Tingkat keberhasilan pembangunan yang telah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender. Indikator tersebut diartikan sebagai ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit khususnya menekan berkaitan dengan gender. Dari hal tersebut dapat menjelaskan berbagai program pembangunan yang mengakomodasi dari kesetaraan dan keadilan gender. Capaian dari indeks pembangunan gender Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 90,48% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 90,68%. Capaian pada tahun 2020 juga belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90,91%.

2.3.1.2.3 Pangan

Pembangunan ketahanan pangan pada tataran implementasi secara teknis adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani dalam membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, melalui pengembangan sistem usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Terkait dengan upaya ketahanan

pangan pemerintah daerah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sedangkan masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, serta terjangkau sesuai dengan daya beli.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik yang diolah maupun tidak diolah. Selain itu pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sebagai komponen dasar untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pasuruan

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pangan								
1	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	96	93	95	97	97	95
2	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	86,4	86,6	86,8	87,2	85,3	83,2
3	Rasio Ketersediaan pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	2,53	2,58

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021

1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan prinsip atau asas penyelenggaraan pangan di Indonesia harus berdasarkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap daerah mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Pembangunan pangan memiliki permasalahan dan tantangan yang besar. Kapasitas sumberdaya alam untuk memproduksi pangan semakin terbatas karena adanya kompetisi pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan sektor lain.

Infrastruktur penunjang pangan diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, meliputi:

- 1.) Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis hulu untuk menunjang kelancaran barang masuk. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa jalan penghubung antar desa-kota, gudang penyimpanan sarana produksi pertanian dan tempat bongkar muat sarana produksi pertanian;

- 2.) Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha tani/pertanian primer (*on farm*) untuk peningkatan produksi budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan); 3.) Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis hilir (*off farm*) berupa industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa sarana pengeringan hasil pertanian, gudang penyimpanan hasil pertanian termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*), sarana pengolahan hasil pertanian, sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian, terminal dan tempat bongkar muat barang termasuk Sub Terminal Agribisnis (STA) serta sarana penunjang (pembangkit listrik/ generator listrik, sarana air bersih, sarana pembuangan limbah industri dan sampah hasil olahan).

2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan penting lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha pangan serta melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan. Adapun tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan melalui indikator ketersediaan pangan utama yang diperoleh dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibanding jumlah penduduk dikalikan seratus persen. Dari penyelenggaraan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan menjadi bentuk dukungan terhadap Pemerintahan Pusat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan secara nasional dengan penyusunan dokumen RAD-PG serta melaksanakan berbagai kegiatan.

3. Keamanan Pangan

Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (UU RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Perlindungan Pangan).

Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan setiap tahunnya telah dilakukan uji laboratorium pangan segar meliputi sayuran dan buah yang ada di pasar kecamatan terhadap kandungan residu pestisida dan hasilnya tidak ditemukan adanya residu pestisida yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan.

Selain itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan yang sasarannya anak-anak Sekolah Dasar (SD) tentang jajanan anak sekolah yang aman dan sehat. Kegiatan ini juga diberikan kepada ibu-ibu TP PKK tentang pangan yang sehat dan aman.

A. Stabilitas harga dan pasokan pangan

Tabel 2.38 Stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase	96	93	95	97	97	95

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021

Pada tahun 2018 dan 2019 capaian nilai stabilitas harga dan pasokan pangan mencapai 97% yang menunjukkan harga dan pasokan 9 komoditas utama selama 1 tahun cukup stabil (stabilnya harga dan pasokan pangan yaitu jika nilai perhitungan mencapai 100%). Realisasi tersebut sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam RPJMD periode 2013 -2018 sebesar 97 %. Stabilitas harga dan pasokan pangan merupakan informasi harga per minggu selama 1 tahun untuk 9 komoditas utama, yaitu beras, jagung pipilan, kedele, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. Namun mengangalai penurunan di tahun 2020 menjadi 95% dipengaruhi oleh kondisi Covid-19 membuat harga dan pasokan pangan kurang stabil.

B. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tabel 2.39 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai	86,4	86,6	86,8	87,2	85,3	83,2

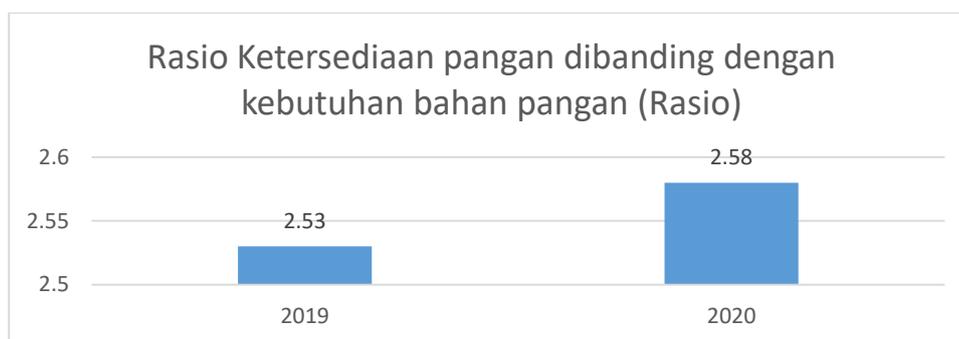
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021

Kebutuhan bahan pangan masyarakat Kabupaten Pasuruan dari setiap komoditas berpedoman pada angka kebutuhan perkapita pertahun. Hasil Susenas tahun 2010 yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Berdasarkan hasil survei identifikasi pola konsumsi yang dilakukan setiap tahunnya oleh Tim dari Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan pada masyarakat tingkat sosial ekonomi rendah, menengah dan tinggi (responden di 9 kecamatan masing-masing 10 rumah tangga) meliputi Kecamatan Gempol, Beji, Rembang, Purwodadi, Prigen, Winongan, Bangil, Kraton dan Rejoso, bahwa konsumsi beras menunjukkan skor sama dengan skor maksimal yaitu 25 dari Pola Pangan Harapan

(PPH). Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi beras masih sulit digantikan oleh bahan pangan non beras (umbi-umbian) dan pangan alternatif lainnya (sorgum) sebagai upaya diversifikasi pangan. Sedangkan skor konsumsi minyak dan lemak sudah sesuai dengan harapan (nilai PPH).

Angka skor PPH tahun 2018 ini 87,2 menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masih belum beragam dan seimbang, hal ini ditunjukkan dengan nilai konsumsi protein hewani dan konsumsi sayuran dan buah masih di bawah angka ideal, sehingga skor PPH belum dapat mencapai nilai skor 100. Meskipun demikian, angka skor PPH 87,2 sudah melampaui target tahun 2018 yaitu sebesar 87 naik dibanding tahun 2017. Kenaikan ini selain disebabkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang semakin meningkat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) juga disebabkan lokasi survei sebagian di kecamatan yang merupakan wilayah pengembangan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang memiliki ketersediaan pangan terutama protein hewani dan sayuran di pekarangan. Selain itu dilaksanakannya kegiatan pelatihan olahan pangan lokal (umbi-umbian) dan pangan alternatif lainnya (sorgum) dan penyuluhan sumber pangan alternatif sebagai substitusi beras telah mampu meningkatkan skor PPH.

C. Rasio Ketersediaan pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan



Grafik 2.79 Ketersediaan pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020

Sumber: Dinas Pertanian, 2021

Penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama di dalam pelaksanaan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan bahan pangan domestik khususnya pangan utama sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat. Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduksi bahan pangan dan menjaga kestabilan stok pangan baik yang berada di gudang Bulog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah, dan Koperasi Unit Desa serta alur distribusi bahan pangan lainnya tanpa

mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk. Ketersediaan pangan pada tahun 2020 meningkat sebesar 2,58 dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,53.

2. Daerah Rawan Pangan

Peta Komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suwayu wilayah yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Di Kabupaten pasuruan Desa Rawan Pangan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas, Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 menjadi prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, desa prioritas 1 menjadi desa yang memiliki risiko yang paling tinggi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 365 desa yang ada di Kabupaten pasuruan maka didapatkan 1 Desa (Prioritas 1), 36 Desa (Prioritas 2), 67 Desa (Prioritas 3), 104 desa (Prioritas 4), 113 desa (Prioritas 5) dan 45 desa (Prioritas 6). Berikut tabel sebaran desa rawan pangan.

Tabel 2.40 Jumlah Desa Prioritas Rawan Pangan tahun 2020

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	1	0,27%
2	36	9,86%
3	67	18,36%
4	103	28,21%
5	113	30,96%
6	45	12,33%

Sumber: Dinas Ketahanan Pertanian, 2021

2.3.1.2.4 Pertanahan

Pelaksanaan Urusan Pertanahan di Kabupaten Pasuruan dinilai menggunakan tolok ukur keberhasilan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013 – 2018 yaitu :

1. Tertanganinya Kasus dan Sengketa Pertanahan

Tabel 2.41 Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

Target indikator kinerja penanganan kasus dan sengketa pertanahan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 32,05% dan terealisasi sebesar 100%, atau lebih besar dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 maka capaian kinerja pada tahun 2018 sama capaian tahun 2020 sebesar 100%, hal ini menggambarkan bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus dan sengketa tanah yang ada agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Guna menunjang ketercapaian target kinerja urusan pertanahan pada tahun 2018 dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Pembinaan administrasi pertanahan desa

Pada kegiatan pembinaan administrasi pertanahan desa mempunyai tujuan pengsaduran Buku C desa untuk membantu masyarakat apabila akan memproses sertifikat tanah.

2. Identifikasi dan pemetaan tanah negara selain oloran

Kegiatan identifikasi dan pemetaan tanah negara selain oloran bertujuan untuk mengidentifikasi tanah terutama tanah negara. Pada tahun 2018 sasaran kegiatan ini yaitu tanah negara untuk tanah eigendom, karena efisiensi anggaran untuk tahun 2018 maka ditiadakan.

3. Bimtek Administrasi Pertanahan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaksana PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan sasaran pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap proses pendaftaran awal mengenai pembuatan akta tanah di tingkat Desa dan Kecamatan.

3.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup pada tahun 2018 sesuai dengan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2015 - 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	n/a	n/a	n/a	57,10	57,37	62,547
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	n/a	n/a	82,25	78,83	79	82,22
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	n/a	n/a	50	50	53,73	52,14
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	n/a	n/a	43,57	43,57	43,84	44,04
5	Nilai TPA (Program Adipura)	Poin	65	74	74	74	78	79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tabel 2.43 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)			
Tahun	2018	2019	2020
Poin	82,25	78,83	79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2021

Kualitas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan dengan pentapan indeks lingkungan hidup bertujuan adanya gambaran atau indikasi awal yang kedepannya akan memberikan kesimpulan secara cepat terhadap suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup serta periode tertentu. Kualitas lingkungan hidup berpengaruh langsung kepada kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 79 poin dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 78,83 poin.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Tabel 2.44 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020

Indeks Kualitas Udara (Poin)				
Tahun	2017	2018	2019	2020
Poin	82,25	78,83	79	82,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2021

Upaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan, salah satu komponen dalam mewujudkan adalah udara agar dapat memberikan dukungan terhadap makhluk hidup secara optimal. Dalam mengukur dalam menilai pencemaran udara yang memperlihatkan seberapa buruk dari kualitas udara. Pada tahun 2020 indeks kualitas udara di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan menjadi 82,22 poin dibandingkan dengan tahun 2019 dengan 79 poin. Berdasarkan pada target yang ditetapkan pada tahun 2020 indeks kualitas udara 58,67 poin sedangkan capaiannya sebesar 82,22 poin maka dari itu mencapai dari target.

3. Indeks Kualitas Air (IKA)

Tabel 2.45 Indeks Kualitas Air di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020

Indeks Kualitas Air (Poin)				
Tahun	2017	2018	2019	2020
Poin	50	50	53,73	52,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2021

Kualitas air dapat dilihat dari ukuran kondisi air terhadap karakteristiknya secara fisik, kimiawi, maupun biologis. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu perlindungan terhadap sumber daya air agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk menjaga sumber daya air maka salah satunya dengan mengukur menggunakan Indeks kualitas air sebagai bentuk dari survei terhadap kualitas air secara umum. Pada tahun 2020 indeks kualitas air mengalami penurunan hingga sebesar 52,14 poin dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 53,73 poin.

4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tabel 2.46 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)				
Tahun	2017	2018	2019	2020
Poin	43,57	43,57	43,84	44,04

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2021

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) terutama pada metode perhitungan yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan dari aspek konsevasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial. Pada setiap tahunnya indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan selalu meningkat terutama pada tahun 2020 yang mencapai sebesar 44,04 poin.

5. Nilai TPA (Program Adipura)

Tabel 2.47 Nilai TPA di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020

Nilai TPA (Poin)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Poin	65	74	74	74	78	79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2021

Salah satu program dari adipura yaitu penilaian terhadap tempat pemrosesan akhir, yang merupakan tempat untuk memproses serta mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman baik bagi manusia maupun lingkungan. Pada Kabupaten Pasuruan nilai TPA tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 79 poin serta merupakan poin tertinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya.

2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil mendukung pembangunan pada aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan wajib). Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah yang tercapai sebagaimana tabel berikut.

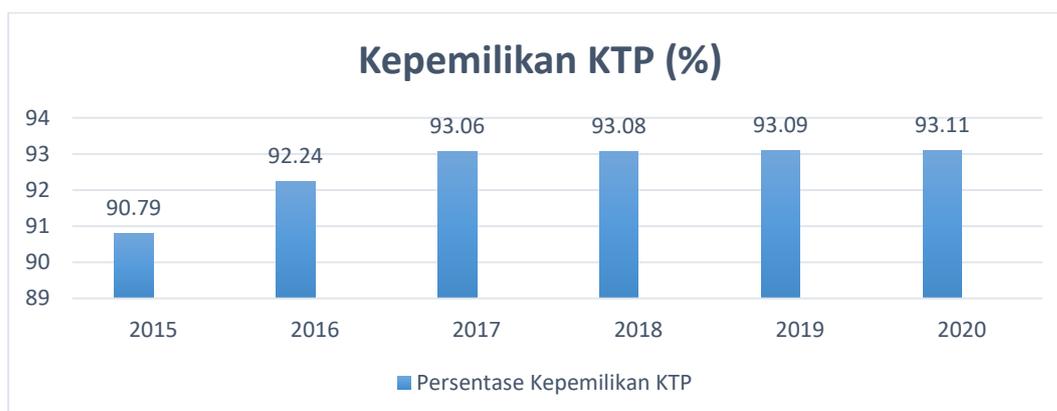
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepemilikan KTP	%	90,79	92,24	93,06	93,08	93,09	93,11
2	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Jiwa	1.181.991	1.238.522	1.286.159	1.319.174	1.347.885	n/a
3	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	Per 1000 penduduk	270	281	688	694	700	720
4	Persentase Penduduk Wajib	%	89,52	94,02	96,04	98,05	98,05	98,10

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	KK yang Memiliki KK							
5	Jumlah KIA	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1248	29594

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Kepemilikan KTP



Grafik 2.80 Kepemilikan KTP di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Capil 1.834.529 orang jumlah penduduk yang telah memiliki KTP pada tahun 2018 mencapai 1.319.174 orang atau 93,08% dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.417.322 orang. Persentase ini sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,11%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (93,06%), maka terjadi peningkatan sebesar 0,2%. Hal ini disebabkan oleh :

1. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP sebagai identitas mereka;
2. meningkatnya wajib KTP;
3. meningkatnya usia pemula kepemilikan KTP (17 tahun);
4. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan di bidang kependudukan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pengurusan KTP. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan adalah operasional mobil unit layanan keliling sebanyak 2 (dua) unit tujuan dari penyediaan mobil unit layanan keliling adalah untuk mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat melalui sistem jemput bola, sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dengan adanya sistem jemput bola dapat meningkatkan jumlah kepemilikan KTP serta kepemilikan akta kelahiran

Pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 93,11 %. Jumlah penduduk yang memiliki KTP di kabupaten Pasuruan dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan persentase setiap tahun nya.

2. KTP Nasional Berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan)



Grafik 2.81 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2020

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah selesai melaksanakan penerbitan, pencetakan dan pendistribusian NIK kepada masyarakat se Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.286.159 jiwa, sedangkan tahun 2018 mencapai 1.319.174 jiwa. Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 1.032.952 jiwa. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terjadi peningkatan penerapan KTP Nasional Berbasis NIK. Peningkatan tersebut dikarenakan bertambahnya usia pemula kepemilikan KTP (17 Tahun) serta meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan di desa – desa terpencil dan desa masalahat melalui mobil pelayanan jemput bola. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.347.885 jiwa.

3. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

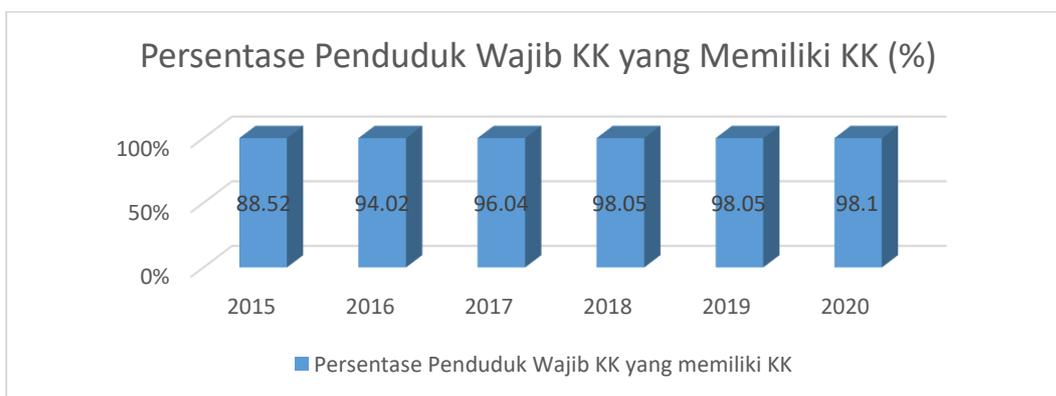


Grafik 2.82 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang ber-akta kelahiran dengan jumlah penduduk dan dikalikan 1.000. Kepemilikan Akta tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga mencapai 700 dan tahun 2020 mencapai 720. Kepemilikan akta kelahiran tahun 2018 mencapai 694 per 1000 penduduk. Jika dibandingkan dengan kepemilikan akta kelahiran tahun 2017 sebanyak 688 per 1000 penduduk, maka terjadi peningkatan sebanyak 5 per 1000 penduduk. Peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasuruan ini dikarenakan Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran serta adanya program yang terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Fasilitas pelayanan Kesehatan serta adanya kebijakan satu paket untuk kepengurusan Akte dan Kartu Keluarga secara bersama-sama.

4. Persentase penduduk wajib KK yang memiliki KK



Grafik 2.83 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2021

Dalam urusan kependudukan, kepemilikan KK bagi penduduk yang sudah berkeluarga merupakan salah satu kewajiban masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten

Pasuruan pada tahun 2018 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 1.834.529 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KK pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 745.851 penduduk atau 98,05% dari jumlah penduduk wajib KK (759.685 penduduk). Persentase ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 98%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terutama yang baru menikah untuk mengurus KK. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang memiliki KK tahun 2017 yang mencapai 709.509 penduduk atau 96,04 % dari jumlah penduduk wajib KK (738.743 penduduk), maka terjadi peningkatan sebesar 2,1 %. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KK sebagai dokumen kependudukan yang harus mereka miliki terutama bagi kepala keluarga baru dan juga dikarenakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan fasilitas layanan BPJS.

5. Kartu Indonesia Pintar (KIA)



Grafik 2.84 Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Pasuruan tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2021

Kartu Indonesia pintar merupakan upaya dalam mewujudkan program Indonesia pintar yang dituju untuk penduduk dibawah usia 17 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan tujuan untuk menurunkan dari angka putus sekolah. Capaian kartu Indonesia pintar di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar 8%, penduduk usia kurang dari 17 tahun sebesar 387.636 orang dan yang menerima kartu Indonesia pintar mencapai 29.594 orang.

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Klasifikasi Status Desa dalam PermendesaPDTTTrans Nomor 2 Tahun 2016 terbagi menjadi 3 yakni ; 1) Desa mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan; 2) Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan; 3) Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dinilai dari beberapa indikator kinerja pemerintah daerah, antara lain sebagaimana berikut :

Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan	%	73,96	67,4	90,72	100	67,4	n/a
2	Peningkatan sarana prasarana pasar desa	Unit	36	59	74	102	59	n/a
3	Rata-rata jumlah binaan lembaga masyarakat	%	40,06	120,5	98,1	100	120,5	n/a
4	Rata-rata jumlah binaan kelompok masyarakat	%	38,74	63,3	77,67	100	63,3	n/a
5	Jumlah Desa Berkembang	Desa	n/a	n/a	n/a	195	260	248
6	Jumlah Desa Maju	Desa	n/a	n/a	n/a	22	41	89
7	Jumlah Desa Mandiri	Desa	n/a	n/a	n/a	0	2	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

a. Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Tabel 2.50 Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	73,96	67,4	90,72	100	67,4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan bahwa salah satu indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dimaksud adalah Badan Usaha Ekonomi Desa (BUMDes). Saat ini jumlah BUMDes yang sudah terbentuk sebanyak 117 unit atau sebanyak 34% dari 341 Desa yang ada di

Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2018, persentase jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan sebesar 100% dengan jumlah lembaga ekonomi yang dibina sebanyak 117 lembaga, pada RPJMD target capaian Tahun 2018 sebesar 99,99% sehingga indikator ini sudah mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan capaian 90,72%, mengalami kenaikan sebesar 9,28%.

Guna mendukung indikator ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya melalui kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa / BUMDesa Bersama. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 3 hari yaitu hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2018 bertempat di Hotel Tretes Raya dan dihadiri oleh 117 Unit BUMDes. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peranan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa serta meningkatkan perekonomian desa.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa

Tabel 2.51 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa (Unit)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Unit	36	59	74	102	59

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

Pada tahun 2018 Indikator peningkatan sarana dan prasarana pasar desa di targetkan sebanyak 54 unit, realisasi pada tahun 2018 sebanyak 102 unit. Dibandingkan dengan tahun 2017 capaian sebesar 74 unit, maka capaian 2018 mengalami peningkatan sebanyak 28 unit, sebanyak 54 unit terfasilitasi dari dana APBD. Pasar Desa merupakan kegiatan perekonomian masyarakat desa dan agar keberadaan pasar desa semakin optimal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga melakukan pembinaan dalam pengelolaannya dan hal ini di tuangkan dalam kegiatan Pembinaan Pasar Desa. Salah satu bentuk wujud hasil dari Pembinaan Pasar Desa adalah diraihnya Penghargaan Pasar Desa Terbaik Jawa Timur Tahun 2018, salah satunya diraih oleh Pasar Desa Ngopak.

c. Rata-Rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat

Tabel 2.52 Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	40,06	120,5	98,1	100	n/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah lembaga masyarakat yang dibina dengan jumlah lembaga masyarakat seluruhnya Tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat ini sarasannya terdiri atas Kader Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 85 kader. Capaian untuk indikator rata-rata jumlah binaan lembaga masyarakat pada tahun 2018 sebesar 100%, capaian tersebut meningkat sebesar 1,90% dibandingkan tahun 2017.

d. Rata-rata Jumlah Binaan Kelompok Masyarakat

Tabel 2.53 Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rata-rata Jumlah Binaan Kelompok Masyarakat (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	38,74	63,3	77,67	100	n/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan bahwa salah satu indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah Rata - Rata Jumlah Binaan Kelompok Masyarakat. Persentase capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2018 sebesar 100% atau sesuai target yang ditentukan, sedangkan jumlah kelompok masyarakat yang dibina yaitu sebanyak 255 kelompok. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2017 yaitu sebesar 77,67% atau sebesar 22,33%. Kelompok masyarakat yang dibina adalah kelompok usaha ekonomi kecil masyarakat.

Guna mendukung indikator ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 hari yaitu hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 17 s/d 21 Desember 2018 bertempat di 3 tempat yaitu : Gedung Maju Bersama di Nguling, Gedung Pertemuan Eks. PNPM di Nguling dan Balai Desa Balungyar Kec. Lekok dan dihadiri masing – masing tempat 85 orang. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan kelompok masyarakat khususnya bagi KRTP / Kepala Rumah Tangga Perempuan. Hal ini mengingat untuk keselarasan program jalin matra yaitu bantuan jalin matra bagi KRTP / Kepala Rumah Tangga Perempuan.

e. Indeks Desa Membangun

Tabel 2.54 Indeks Membangun Desa di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2020

Indeks Membangun Desa (Desa)	2018	2019	2020

Jumlah Desa Berkembang	195	260	248
Jumlah Desa Maju	22	41	89
Jumlah Desa Mandiri	0	2	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2021

Indeks Desa Membangun merupakan indikator yang dikembangkan berdasarkan dengan konsepsi untuk menuju desa maju dan mandiri. Hal tersebut akan mempengaruhi kerangka kerja dalam pembangunan berkelanjutan berdasarkan dengan aspek sosial, ekonomi, serta ekologi. Selain itu, sebagai kekuatan saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan desa dalam mensejahterakan kehidupan desa. Pada tahun 2020 jumlah desa yang berkembang pada Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan sebesar 248 desa dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 260 desa, namun jumlah desa maju pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 89 desa dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 41 desa. Pada desa mandiri Kabupaten Pasuruan di setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 4 desa.

2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Dimana tolok ukur keberhasilan dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana grafik berikut.



Grafik 2.85 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif



Grafik 2.86 Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 – 2020

Sumber : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan, 2021

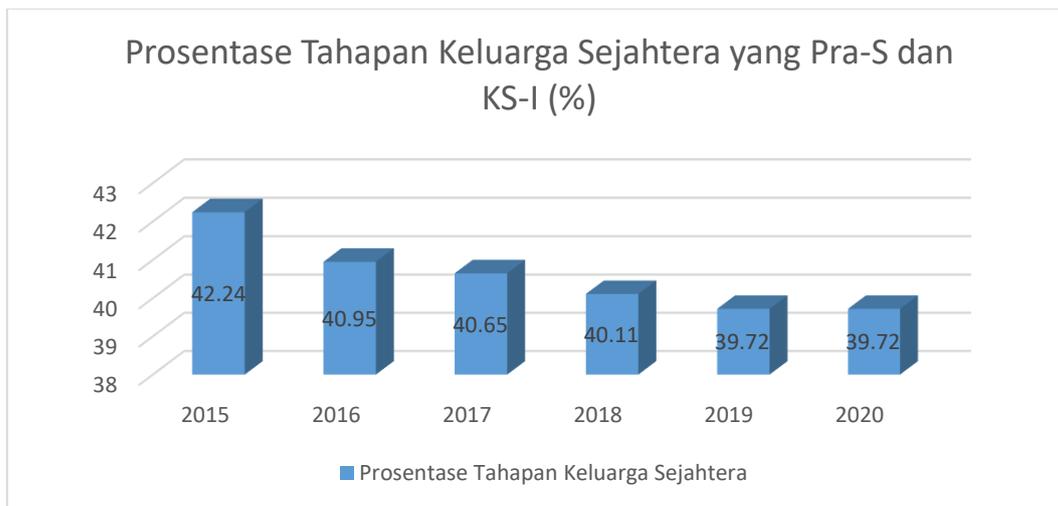
Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari indikator cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif. Dilihat dari tabel dan grafik, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga menjadi 75,14%, sedangkan pada tahun 2018 pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sejumlah 254.126 atau 73,12% dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 347.570. Capaian tahun 2018 ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 sebesar 71,55%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 72,9 %, maka capaian cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif mengalami kenaikan sebesar 0,22 % yang berarti bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif. Pada tahun 2020 pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif mengalami penurunan menjadi 74,91%.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif bagi pasangan usia subur (PUS) yakni meliputi kegiatan pelayanan KB gratis melalui kegiatan Baksos, KIE Berbagai Media dan MUPEN, Kesatuan Gerak PKK, TNI manunggal KB. Kedepannya Pemerintah daerah akan lebih berkomitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk lebih meningkatkan peserta KB aktif pada PUS.

2. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I

Pada indikator Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I ini akan menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatan ekonominya rendah, sehingga target grup penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera

(Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan social psikologis (*social psychological needs*).



Grafik 2.87 Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan, 2021

Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga PraS dan KS I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah keluarga Miskin (Keluarga Pra-S dan KS-1) pada tahun 2019-2020 mencapai 39,72%, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 198.286 KK atau 40,11% dari jumlah KK di Kabupaten Pasuruan yaitu sebanyak 494.414 KK. Jumlah ini menurun sebesar 0,54% bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercapai sebesar 40,65%. Penurunan ini disebabkan karena akseptor KB dari keluarga Pra-S dan KS-1 mendapatkan pelayanan dari program UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan akseptor. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial.

2.3.1.2.9 Perhubungan

Ketercapaian pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan wajib) dan aspek daya saing daerah (fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur). Urusan perhubungan merupakan gambaran keberhasilan pemerintah dalam menyediakan prasarana transportasi bagi masyarakat. Tolok ukur keberhasilan kinerja urusan perhubungan dinilai dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2015 – 2018. Capaian kinerja masing-masing indikator pada tahun 2015 - 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	10.961	10.932	11.724	10.291	10.424	8.562
2	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	2,84	4,78	2,164	1,71	3,25	1,06
3	Jumlah terminal	unit	5	5	5	5	3	3
4	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	708.243	727.798	749.337	769.737	678.112	415.200
5	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	7,18	7,91

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tabel 2.56 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Unit)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit	10.961	10.932	11.724	10.291	10.424	8.562

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2021

Setiap angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan wajib memiliki uji KIR, karena melalui uji KIR maka angkutan tersebut secara teknis dinyatakan layak beroperasi. Pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 10.291 unit, mengalami penurunan sebanyak 1.433 unit dibanding tahun 2017 yang sebesar 11.724 unit. Untuk target indikator ini pada tahun 2018 sebesar 11.891 unit sedangkan realisasinya sebesar 10.291 unit, atau mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebanyak 970 unit. Pada tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 8.562 unit, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 10.424 unit.

2. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.57 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase	2,84	4,78	2,164	1,71	3,25	1,06

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2021

Kepemilikan KIR ini menggambarkan semakin meningkatkan kesadaran pemilik angkutan umum akan pentingnya uji kendaraan angkutan umum, dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Indikator ini untuk menilai perbandingan antara angkutan umum yang tidak ber-KIR dengan seluruh angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan. Target kinerja tahun 2018 sebesar 4,12% dengan capaian kinerja sebesar 1,71% atau lebih rendah dari target kinerja. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 2,164%, maka capaian kinerja pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,45%. Pada tahun 2019 target kinerja mengalami peningkatan sebesar 3,25% dan kembali menurun pada tahun 2020 sebesar 1,06%. Penurunan kepemilikan KIR ini menggambarkan rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum akan pentingnya uji kendaraan angkutan umum, selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga harus semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan proses pelayanan uji KIR angkutan umum.

3. Jumlah Terminal

Tabel 2.58 Jumlah Terminal di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Jumlah Terminal (Unit)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit	5	5	5	5	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2021

Ketersediaan Terminal di Kabupaten Pasuruan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan transportasi. Target jumlah Terminal pada tahun 2018 sebanyak 5 unit dengan capaian kinerja sebanyak 5 unit atau sesuai dengan target. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 5 unit, maka pada tahun 2018 tidak ada penambahan unit Terminal baru, hanya menyelesaikan pembangunan Sarpras Terminal Pasrepan yang juga merupakan salah satu Terminal pendukung wisata kawasan Bromo. Capaian kinerja jumlah Terminal pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebanyak 3 unit.

4. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.59 Jumlah Orang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Orang	708.243	727.798	749.737	769.737	678.112	415.200

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di kabupaten Pasuruan dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan. Target capaian kinerja di tahun 2018 adalah 768.873 orang dan terealisasi sejumlah 769.737 orang yang mana melampaui target capaian kinerja pemerintah kabupaten Pasuruan 2018. Capaian ini dikarenakan meningkatkan rasa nyaman masyarakat terhadap layanan angkutan umum yang sudah diperbaiki. Pada tahun 2019 jumlah orang terangkut angkutan umum sejumlah 678.112 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sejumlah 415.200 orang. Capaian ini dikarenakan adanya pandemi yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk tetap berada dirumah sebagai upaya menekan penyebarannya.

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan komunikasi dan informatika dinilai dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019. Capaian target indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Web site Milik Pemerintah Daerah	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Peningkatan Sistem Komunikasi Antar Perangkat Daerah	Unit	65	65	65	65	65	65
3	Pusat Layanan Internet Kecamatan/ Telecenter	Unit	2	4	5	5	4	4
4	Media Luar Ruang	kali	33	26	12	10	7	7
5	Pameran / Expo							
a.	Penyelenggaraan	Kegiatan	2	3	3	2	0	0
b.	Keikutsertaan	Kali	13	11	10	2	0	0
6	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok	128	132	137	121	121	121
7	Indeks SPBE	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	2,73	3,13

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Website Milik Pemerintah Daerah

Situs web (*website*) Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dan harus ada, karena *website* merupakan salah satu media informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan maupun permasalahan daerah. Saat ini bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (*Information Communication Technology*), yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet.

Media *website* Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai sasaran agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan, dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Daerah, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. *Website* Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibuat untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, dan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

- 1) Informasi dapat diperoleh secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
- 2) Materi yang diakses melalui *website* pemerintah meliputi :
 - semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
 - semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
 - semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, keberadaan *website* Pemerintah Daerah merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana keberadaan *website* menjadi salah satu SPM dan indikator kinerja Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pada tahun 2018 jumlah pengunjung website sejumlah 675.000, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 228.000 pengunjung, yang berarti terdapat peningkatan karena adanya moment pendaftaran CPNS. *Website* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2017 sudah diperbarui dengan ditambahkan form *vote* penilaian masyarakat terhadap *website* agar masyarakat dapat menilai seberapa puas masyarakat terhadap isi dari *website* tersebut.

2. Peningkatan Sistem Komunikasi Antar Perangkat Daerah

Tabel 2.61 Peningkatan Sistem Komunikasi Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Peningkatan Sistem Komunikasi Antar Perangkat Daerah (Unit)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit	65	65	65	65	65	65

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2021

Sejak tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerapkan sistem *e-government (e-gov)* sebagai upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Adapun manfaat sistem jaringan komunikasi antar organisasi perangkat daerah antara lain:

- Sebagai tulang punggung komunikasi dan pertukaran informasi.
- Menjadi media seluruh aplikasi online milik OPD dan Pemda.
- Memberikan akses internet pada OPD yang belum memiliki koneksi internet.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 seluruh OPD (65 OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah terhubung dalam jaringan E-Gov, sehingga pada tahun ini kegiatan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pemanfaatan secara maksimal dan perawatan dengan baik serta maksimal. Perawatan jaringan dan tower dilakukan agar perawatan jaringan komunikasi dapat bekerja dengan normal, serta dapat mengidentifikasi peralatan jaringan yang tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat difungsikan kembali secara optimal, dan mengganti peralatan jaringan yang tidak berfungsi. Perangkat Daerah saat ini dapat terhubung melalui media komunikasi berupa internet dan integrasi data *website* OPD.

3. Pusat Layanan Internet Kecamatan/Telecenter

Tabel 2.62 Pusat Layanan Internet Kecamatan/Telecenter di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Pusat Layanan Internet Kecamatan/Telecenter (Unit)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit	2	4	5	5	4	4

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2021

Telecenter merupakan suatu fasilitas masyarakat dimana mereka dapat berinteraksi, belajar, bekerja, dan bermain dengan memanfaatkan komputer, internet dan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya. Walaupun berbeda-beda bentuknya, telecenter mempunyai karakteristik khusus yaitu untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti membantu kegiatan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengurangi keterisolasian serta mengurangi kesenjangan digital.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan masih ada beberapa daerah yang mengalami kesenjangan digital dan kesenjangan informasi, khususnya pada wilayah yang jauh dari pusat perkotaan dan disebabkan oleh faktor geografis. Guna menjembatani kesenjangan tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun pusat layanan internet kecamatan / telecenter guna membuka akses informasi pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan melek teknologi informasi dan komunikasi menuju *Smart City* dapat terlaksana.

Pada tahun 2018 tidak ada peningkatan jumlah telecenter karena pada awalnya Telecenter merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sudah dihentikan, sehingga tidak ada dasar regulasi yang mengatur penyediaan telecenter dan dananya dialokasikan ke pemeliharaan infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi software. Sedangkan tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4 unit. Ketersediaan telecenter ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dan meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan masyarakat, serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Media Luar Ruang

Media merupakan salah satu sarana yang cukup efektif dalam menyebarkan informasi, membangun *branding* dan mempromosikan sebuah wilayah guna menarik investor maupun wisatawan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggunakan berbagai media luar ruang seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho, untuk menyebarkan informasi tentang pembangunan maupun potensi wilayah Kabupaten Pasuruan. Indikator ini merupakan salah satu SPM yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyampaian informasi kepada masyarakat.

Tabel 2.63 Media Luar Ruang di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Media Luar Ruangan (Kali)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kali	33	26	12	10	7	7

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2021

Selain melalui media luar ruang, penyampaian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan melalui pertunjukan rakyat (ketoprak, ludruk), dialog publik dan dialog interaktif melalui siaran radio Suara Pasuruan. Pada Tahun 2020 target kinerja indikator ini sebanyak 12 kali, dengan capaian kinerja kurang dari target sebanyak 7 kali disebabkan karena terdapat efisensi anggaran dan pengalihan prioritas pada kegiatan lainnya serta keadaan pandemi dengan kebijakan *social distancing*.

Penyebaran informasi lewat pertunjukan rakyat lebih disukai oleh masyarakat, karena selain mendapatkan informasi masyarakat juga mendapat hiburan.

5. Pameran / Expo

Tabel 2.64 Pameran/Expo di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Pameran /Expo						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan (kegiatan)	2	3	3	2	0	0
Keikutsertaan (Kali)	13	11	11	2	0	0

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2021

Untuk membangun ekonomi daerah, perlu adanya promosi produk unggulan daerah, potensi investasi daerah, potensi pariwisata maupun potensi pasar, dengan demikian ajang promosi/publikasi dan pameran mempunyai peran penting sebagai sarana informasi, serta promosi potensi wilayah, potensi investasi maupun potensi produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan. Selain itu, pameran sekaligus dapat dimanfaatkan oleh *Buyer* untuk melakukan bisnis maupun investasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, melalui pameran pelaku usaha juga dapat meningkatkan peluang dan kesempatan dalam mengelola pengembangan dalam jejaring kerja (*networking*). Target kinerja penyelenggaraan pameran pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dan realisasinya pada tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyelenggarakan pelaksanaan pameran sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pameran BIATTEX di Batam dan NTB EXPO di Mataram.

Di samping menyelenggarakan pameran Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga ikut serta dalam pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain sebanyak 2 kali, antara lain pameran Bengkulu Expo di Bengkulu dan di PIATTEX Jakarta. Kegiatan Pameran Pembangunan tidak mencapai target pada Tahun 2018 disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran dan pengalihan prioritas pada kegiatan lain. Dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak ada penyelenggaraan pameran/expo dikarenakan keadaan pandemi.

6. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok informasi masyarakat (KIM) berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi

informasi kepada masyarakat selain menjembatani antara masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, oleh karena itu KIM ini harus selalu dibina dan dipantau keaktifannya. Indikator pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan merupakan salah satu SPM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan menjadi salah indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya mendorong tumbuh dan berkembangnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) secara mandiri, meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antar anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, meningkatkan kemampuan anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi untuk mengatasi kesenjangan informasi, dan mengembangkan serta meningkatkan aktifitas KIM dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menyerap/menyalurkan informasi.

Tabel 2.65 Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok	128	132	137	121	121	121

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2021

Kegiatan Tahun 2018 difokuskan pada pembinaan KIM, capaian kinerja Pembentukan KIM di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 menurun dari dibandingkan tahun 2017 sebesar 16 KIM, namun capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 121 KIM. Secara nasional Kabupaten Pasuruan telah melebihi target dimana menurut Standar Pedoman Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011) untuk target Nasional adalah sebesar 50% dari jumlah kecamatan, yakni sebesar 12 kelompok KIM. Dengan demikian capaian kinerja yang cukup signifikan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat, serta mendukung program Desa Maslahat.

2.3.1.2.11 Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah tahun 2015 - 2019 termasuk dalam aspek pelayanan umum dengan fokus layanan urusan wajib. Aspek/Fokus/Bidang

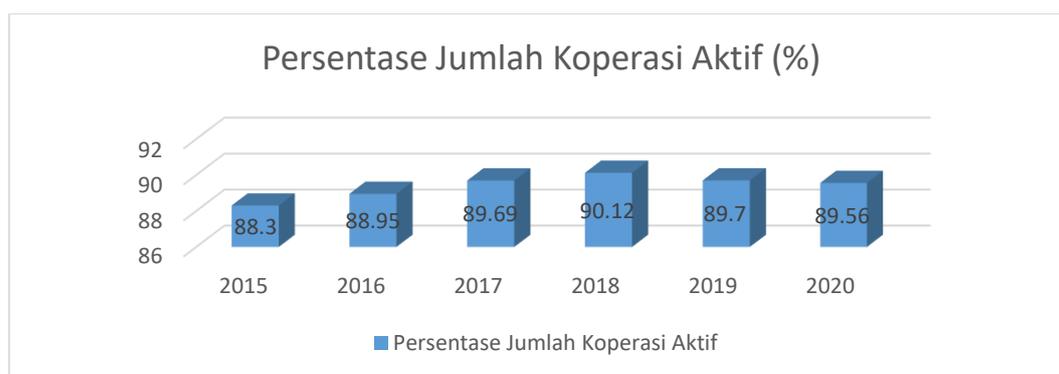
Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dilihat dalam tabel 2.82.

Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

No	Aspek/ bidang fokus/ urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	88,30	88,95	89,69	90,12	89,7	89,56
2.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Buah	150	185	161	150	200	181
3.	Persentase KOPPONTREN Aktif	%	61	61,64	81,94	86,11	84,93	n/a
4.	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	%	1,61	2,20	2,22	2,51	-1,91	2,82
5.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	53,34	50,74	53,81	58,32	n/a	n/a
6.	Persentase Jumlah Usaha Kecil	%	4,32	4,33	4,36	4,38	n/a	n/a

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Persentase Koperasi Aktif



Grafik 2.88 Persentase Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2021

Indikator tersebut menggambarkan jumlah koperasi yang aktif dibandingkan jumlah seluruh koperasi, dikalikan seratus persen. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 2017-2018 mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi aktif tahun 2018 berjumlah 967 unit dari seluruh jumlah koperasi sebanyak 1.073 atau sebesar 90,12%. Jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 10 unit dibanding tahun 2017 yang berjumlah 957 unit. Adapun penambahan jumlah koperasi aktif tersebut berasal dari 6 unit pendirian koperasi baru

serta 4 koperasi yang berhasil diaktifkan melalui kegiatan Pendampingan Akutansi Simpan Pinjam Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Dan KOPPONTREN serta Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif.

2. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Istilah umum penilaian kinerja koperasi ini adalah penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi yang ada di wilayah kewenangannya baik diminta maupun tidak.

Penilaian kesehatan koperasi penting dilakukan mengingat selain untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan juga untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap koperasi. Artinya semakin banyak koperasi yang kinerjanya mencapai nilai sehat dan cukup sehat maka dapat pula diartikan perangkat daerah telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

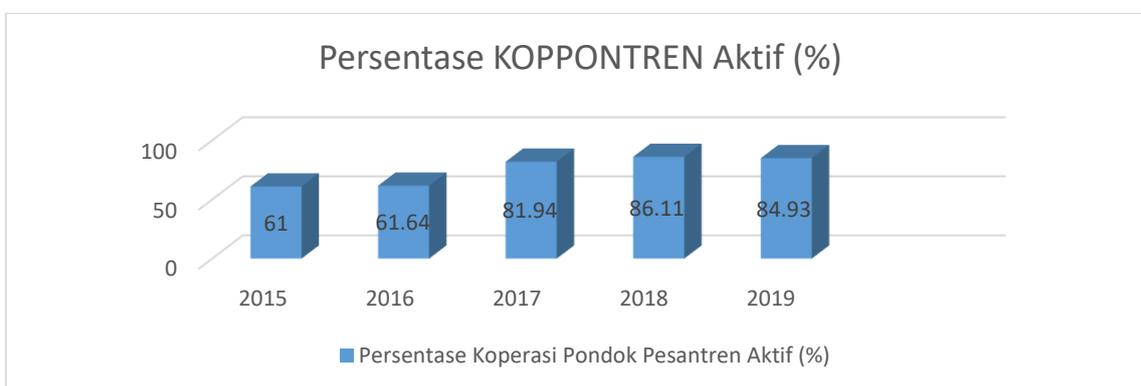
Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berpedoman pada peraturanperundang-undangan yang telah ditetapkan yaitu PP No. 9/1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 13/Per/M.UKM/IX/2015 tentang pedoman Akutansi Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 15/Per/M.UKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi & UKM RI Nomor 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi & UKM RI Nomor 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSPPS & USPPS koperasi. Penilaian kesehatan koperasi mencakup 7 aspek dengan 22 indikator dengan klasifikasi hasil penilaian yang terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penilaian kesehatan KSP & USP koperasi dilakukan satu kali dalam satu tahun setelah pelaksanaan Rapat Anggaran Tahunan (RAT), dengan demikian hanya koperasi yang telah melaksanakan RAT saja yang dapat dilakukan penilaian kesehatan koperasinya. Hal ini berlaku untuk koperasi pola konvensional maupun koperasidengan pembiayaan pola syariah. Pada akhirnya dengan semakin banyaknya koperasi yang mencapai kategori sehat dan cukup sehat diharapkan koperasi mampu menjadi penopang ekonomi dapat tercapai.



Grafik 2.89 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2021

3. Persentase KOPPONTREN Aktif



Grafik 2.90 Persentase KOPPONTREN Aktif di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2020

Jumlah seluruh Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 mencapai 72 unit yang terdiri dari 62 unit Koppontren aktif dan 10 unit Koppontren tidak aktif. Dengan demikian persentase capaian indikator Koppontren aktif dibanding jumlah seluruh Koppontren menjadi 86,11%. Capaian persentase koppontren aktif pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 85,00%. Peningkatan jumlah Koppontren aktif dikarenakan adanya kegiatan pendampingan bagi Koppontren serta revitalisasi koperasi tidak aktif yang dilakukan selama tahun 2018.

Indikator pembangunan koperasi pada tahun 2018 seluruhnya meningkat sebagai hasil dari Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif, Pendampingan Akutansi Simpan Pinjam Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Dan Koppontren, Bimtek Pengembangan Usaha Bagi Koperasi, Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi serta Peningkatan Jaringan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Kegiatan Peningkatan Jaringan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada tahun 2018 telah berhasil menumbuhkan

kemandirian permodalan koperasi melalui strategi permodalan bersama untuk kemudian digulirkan kepada anggota kelompok. Pada tahun 2018 jaringan usaha simpan pinjam yang telah dibentuk telah mampu menggulirkan pinjaman pada 4 koperasi yaitu:

- a. Kopwan Wirausaha Kecamatan Rejoso;
- b. Kopwan Bougenvile Kecamatan Prigen;
- c. Kopwan Sambang Desa Mandiri Kecamatan Purwodadi; serta
- d. Kopwan Sakinah UP2K Kecamatan Rejoso dengan nominal pinjaman masing – masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per koperasi.

Adapun indikator kinerja tambahan berupa Persentase jumlah KSP/USP yang sehat diukur berdasarkan rasio antara jumlah KSP/USP yang sehat terhadap jumlah keseluruhan KSP/USP yang dinilai dikalikan 100%. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, ruang lingkup penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dilakukan terhadap 7 aspek yaitu :

- a. Permodalan
- b. Kualitas Aktiva Produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan serta
- g. Jati diri Koperasi.

Adapun kriteria kesehatan KSP/USP koperasi adalah sebagai berikut :

- a. $80,00 \leq x < 100$ Sehat;
- b. $66,00 \leq x < 80$ Cukup Sehat;
- c. $51,00 \leq x < 66,00$ Dalam Pengawasan;
- d. $0 < x < 51,00$ Dalam Pengawasan Khusus;

Pada tahun 2018 jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai sebanyak 150 unit. Dari hasil penilaian kesehatan KSP/USP koperasi pada tahun 2018 diperoleh hasil dengan perincian 41 unit KSP/USP dengan kategori sehat serta 109 unit KSP/USP dengan kategori cukup sehat. Pada tahun 2018, proses penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dilakukan dengan melibatkan gerakan koperasi melalui aplikasi e-koperasi. Aplikasi e-koperasi merupakan inovasi layanan pelaporan kelembagaan dan usaha koperasi baik triwulanan maupun tahunan. Selain itu, aplikasi e-koperasi juga merupakan aplikasi penilaian kesehatan KSP/USP koperasi berbasis android yang bisa diunduh melalui *playstore*. Dengan adanya aplikasi e-koperasi, pelaporan kelembagaan dan usaha koperasi serta penilaian kesehatan KSP/USP koperasi bisa dilakukan secara mandiri oleh

koperasi dengan menyertakan bukti foto laporan keuangan untuk kemudian akan diverifikasi kebenarannya oleh petugas.

4. Persentase Peningkatan Usaha Mikro



Grafik 2.91 Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2021

Persentase Peningkatan Usaha Mikro di tahun 2018 mencapai 2,51% dan mengalami penurunan di tahun 2019 dengan persentase -1,19%. Presentase Peningkatan Usaha Mikro meningkat kembali di tahun 2020 mencapai 2,82%.

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Urusan penanaman modal termasuk Aspek Pelayanan Umum (Fokus Layanan Urusan Wajib) dengan indikator kinerja jumlah penyelesaian ijin, peningkatan investasi yang ditanamkan di daerah dan jumlah investor berskala nasional PMDN.

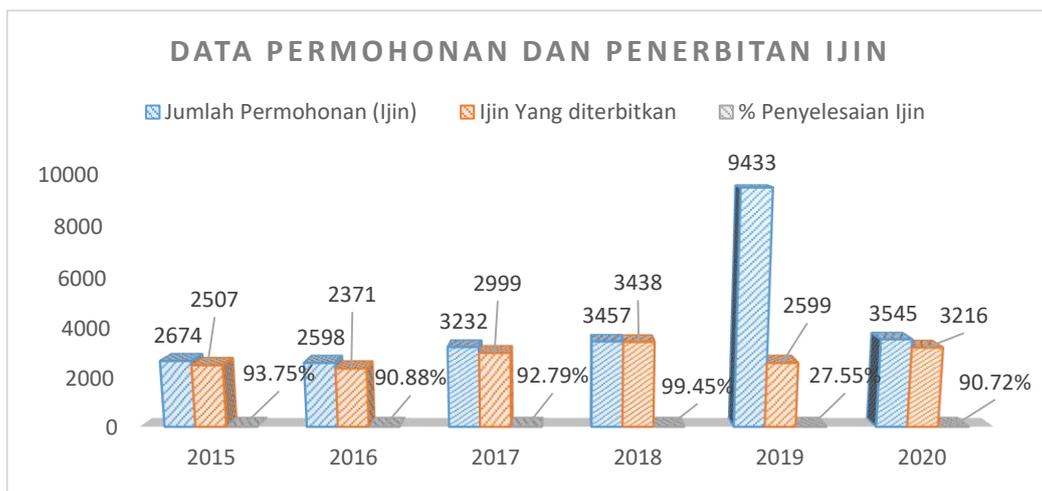


Grafik 2.92 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Jumlah Penyelesaian Ijin

Pada tahun 2019 Jumlah Permohonan Ijin sebesar 9.433 ijin, jumlah tersebut naik dibanding tahun 2018. Jumlah penyelesaian ijin tahun 2018 sebesar 3.438 ijin naik sebanyak 474 ijin atau sebesar 15,28% jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 2.964. Capaian indikator jumlah penyelesaian ijin pada tahun 2018 melampaui target RPJMD 2013 – 2018 sebanyak 2.265 ijin. Jika dilihat dari persentase ijin yang diterbitkan dibandingkan jumlah permohonan ijin yang masuk sebanyak 3.457 ijin maka kinerja DPMPT meningkat dibanding tahun lalu menjadi 99,45%. Data detil tentang jumlah permohonan ijin, ijin yang diterbitkan dan persentase penyelesaian ijin selengkapnya disajikan pada grafik.



Grafik 2.93 Data Permohonan dan Penerbitan Ijin di Kabupaten Pasuruan 2015-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2021

2. Nilai Investasi yang Terealisasi



Grafik 2.94 Nilai Investasi yang Terealisasi Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, 2021

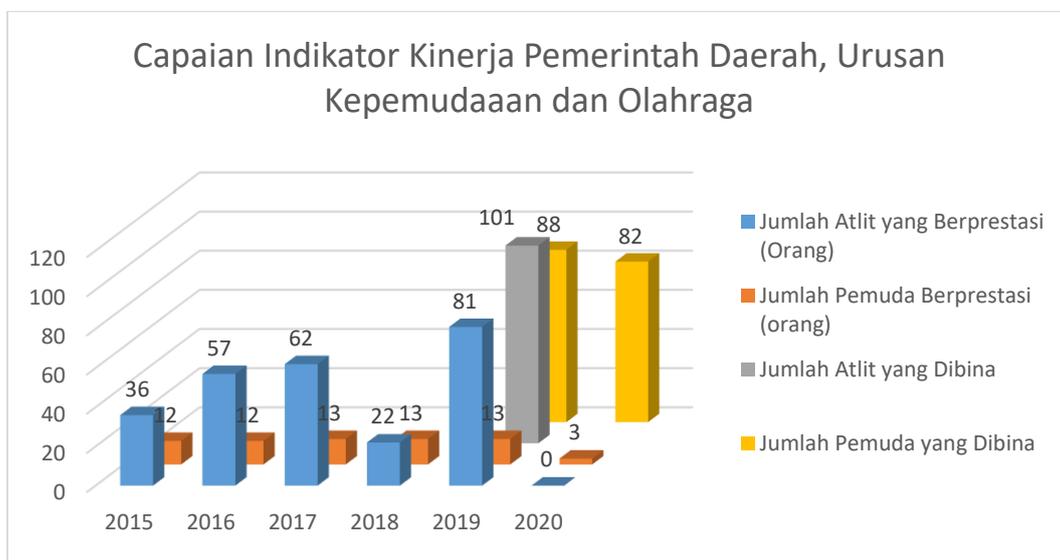
Nilai investasi yang Terealisasi Kabupaten Pasuruan Mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 10,03. Hal tersebut didasarkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang

menyebabkan semua sektor mengalami penurunan termasuk dengan nilai investasi yang terealisasi.

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional sangatlah penting artinya dan telah dibuktikan dalam berbagai peran pemuda seiring dengan kehidupan suatu bangsa. Pemuda adalah generasi penerus dan penentu masa depan sebuah bangsa. Pada RPJMD tahun 2013-2018 selain sarasanya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan juga terdapat sasaran lain yang mendukung misi ke 3 tersebut yaitu meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda.

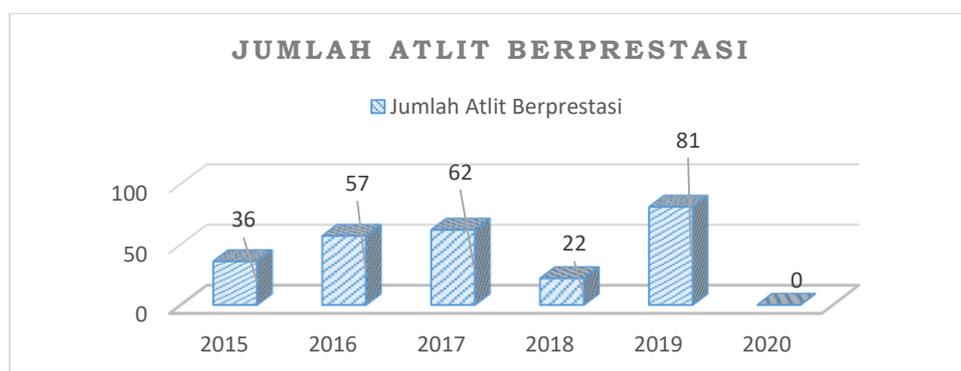
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja pada Grafik sebagai berikut :



Grafik 2.95 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kepemudaan Dan Olahraga di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Jumlah atlit yang berprestasi



Grafik 2.96 Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2021

Dapat diketahui bahwa Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 81 orang. Pada tahun 2018 atlit yang berprestasi berjumlah 22 orang, capaian ini menurun dari pada target yang ditentukan yaitu 25 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan hingga tidak ada atlit. Hal ini disebabkan karena Pada Tahun 2020 jumlah event kompetisi olahraga ditiadakan dikarenakan adanya situasi pandemi.

2. Jumlah Pemuda Berprestasi



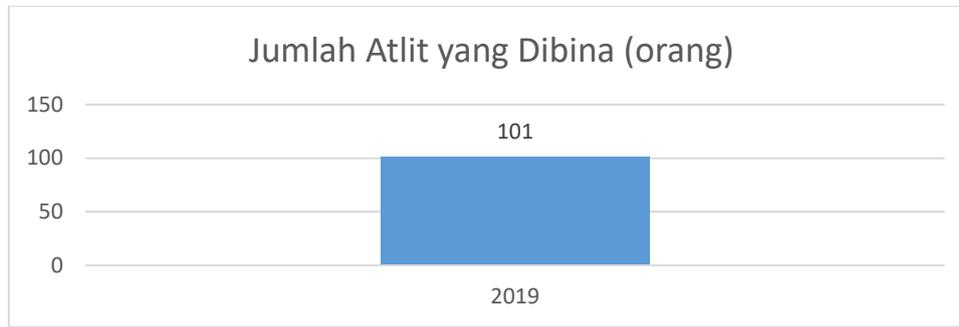
Grafik 2.97 Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2021

Dapat diketahui bahwa indikator jumlah pemuda berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 hingga tahun 2016 berjumlah 12 orang. Sementara pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 13 orang. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3 orang, didasari pada situasi pandemi maka jumlah kompetisi olahraga dan perlombaan dibatasi atau ditiadakan. Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk dapat menghasilkan bibit-bibit pemuda prestasi antara lain dengan melaksanakan kegiatan :

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
2. Seleksi Siswa Pasukan Paskibraka
3. Pameran prestasi hasil karya pemuda
4. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
5. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
6. Pelatihan pendidikan pendahuluan bela Negara

3. Jumlah Atlit yang Dibina



Grafik 2.98 Jumlah Atlit yang Dibina di Kabupaten Pasuruan tahun 2019

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah atlit yang berprestasi tentunya dipengaruhi dengan jumlah atlit yang dibina. Jumlah atlit yang dibina di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 sebanyak 101 orang melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 85 orang. Hal tersebut mempengaruhi jumlah atlit yang berprestasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 mencapai 88 orang yang menjadi capaian tertinggi dari 5 tahun terakhir.

4. Jumlah Pemuda yang Dibina



Grafik 2.99 Jumlah Pemuda yang Dibina di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah pemuda yang dibina mempengaruhi dengan jumlah pemuda yang berprestasi. Jumlah pemuda yang dibina di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 mencapai sebanyak 88 orang, capaian ini meningkat dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 80 orang. Sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 hingga 5 orang yaitu 82 orang. Namun pada capaian pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan yaitu 75 orang.

2.2.3.1.14 Statistik

Pelaksanaan urusan statistik mendukung tugas pemerintah wajib pada aspek pelayanan umum dan fokus layanan urusan wajib. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan statistik dinilai dengan ketersediaan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan.

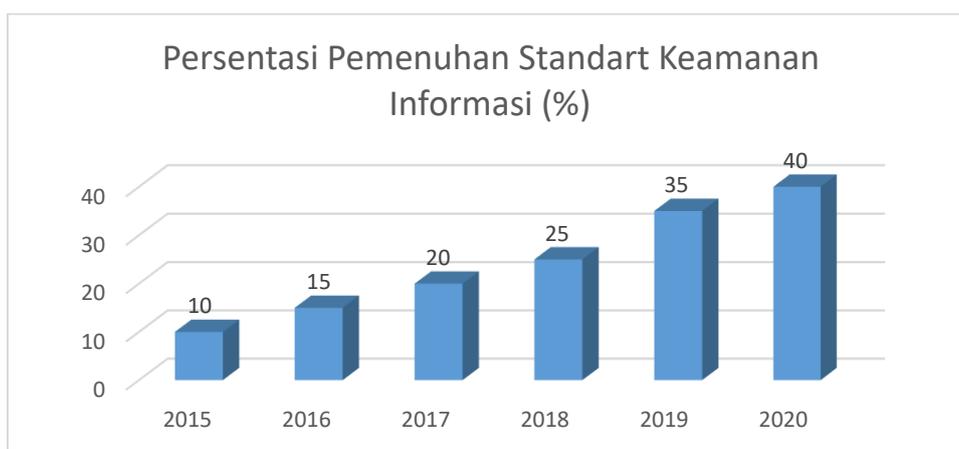
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Statistik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan penyebaran informasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	92	84.67

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Pasuruan

Perhitungan angka PDRB dan IPM Kabupaten Pasuruan merupakan tugas pokok dari BPS Kabupaten Pasuruan, sejak tahun 2016 kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data IPM dan PDRB dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang didanai dari APBN sehingga untuk menghindari tumpang tindih anggaran, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak lagi mengalokasikan dana penyusunan PDRB dan IPM Kabupaten Pasuruan. Pengukuran terhadap kedua indikator kinerja pada urusan Statistik dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 BPS Kabupaten Pasuruan telah menyusun buku PDRB Kabupaten Pasuruan, dan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.3.1.15 Persandian



Grafik 2.100 Persentasi Pemenuhan Standart Keamanan Informasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan 2021

Tujuan dari urusan persandian sebagai bentuk upaya mengamankan, melindungi, serta menjamin orsinalitas dari berita ataupun dokumen pemerintah, urusan ini merupakan hal penting dalam masa serba teknologi informasi. Dalam presentasi pemenuhan standar keamanan pada Kabupaten Pasuruan selalu mengalami peningkatan

mulai dari 2015 hingga 2020, yang menunjukkan bahwa terdapat upaya dalam meningkatkan keamanan informasi terutama mencangkup dokumen pemerintah. Pada tahun 2020 presentasi pemenuhan standar keamanan mencapai 40% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 mencapai 35%.

2.2.3.1.16 Kebudayaan

Keberhasilan pelaksanaan urusan Kebudayaan dinilai sebagai salah satu indikator kinerja pada aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum, untuk indikator pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum memenuhi target karena tidak semua kawasan benda situs dapat dijadikan lokasi untuk pagelaran seni budaya, sedangkan upaya – upaya pelestarian benda dan kawasan cagar budaya dapat dilakukan melalui pagelaran budaya di lokasi, dan dalam rangka pengenalan dan pelastarian kawasan cagar budaya tersebut. Gambaran kondisi awal tahun 2018 tentang capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kebudayaan

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	Kelompok	431	388	419	425	420	422
2	Penyelenggaraan <i>event</i> seni dan budaya	Kali	10	11	17	18	18	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	6	2	1	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya daerah melalui pemeliharaan situs-situs sejarah dan penyelenggaraan event budaya. Sasaran yang akan dicapai pada urusan kebudayaan adalah Meningkatnya kreatifitas seni budaya. Untuk menilai keberhasilan sasaran tersebut digunakan 3 indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional

Kelompok kesenian merupakan salah satu faktor pendukung dari meningkatnya seni budaya dan juga sebagai salah satu faktor pendukung daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2020, kesenian tradisional sebanyak 422 kelompok meliputi :

- a. Seni pencak kembangan

- b. Wayang
- c. Ludruk
- d. Musik kentong tretek janger
- e. Reog
- f. Sangar seni tari
- g. Kuda kencak
- h. Bantengan

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 2 kelompok. Peningkatan ini membuktikan bahwa pelestarian kesenian di Kabupaten Pasuruan tinggi dan kesadaran dari seniman untuk mendaftarkan keseniannya masih tinggi.

2. Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya

Indikator ini menunjukkan jumlah even seni budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan secara rutin setiap tahunnya. Semakin banyak event seni dan budaya mengindikasikan semakin meningkatnya kehidupan seni dan budaya di Kabupaten Pasuruan, sekaligus menunjukkan kemampuan penyediaan kesempatan berkreatifitas di urusan seni budaya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan sasaran terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah adalah dengan mengadakan event seni dan budaya. Tahun 2020 Kabupaten Pasuruan telah menyelenggarakan event sebanyak 2 kali. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang terselenggara 18 kali.

3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kabupaten Pasuruan dalam urusan kebudayaan memiliki indikator berkaitan dengan melestarikan benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Dalam indikator tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Pasuruan berupaya dalam melestarikan peninggalan sejarah serta untuk mewujudkan sasaran terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah. Di tahun 2018 dan 2019 benda, situs dan kawasan cagar budaya terdiri dari 5 unit.

2.2.3.1.17 Perpustakaan

Urusan Perpustakaan mendukung pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan perpustakaan dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perpustakaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	264.057	293.077	307.768	520.144	546.151	317.432
2	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	24,04	24,63	25,50	26,24	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2021

1. Jumlah pengunjung perpustakaan



Grafik 2.101 Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah pengunjung perpustakaan, baik itu pengunjung di perpustakaan tetap maupun di perpustakaan keliling, tahun 2018 mencapai 520.144 orang, sementara target yang ditetapkan sebesar 329.600 orang, sehingga target tercapai 100% lebih. Apabila dibandingkan tahun 2017 capaian tersebut secara kuantitatif mengalami peningkatan sebesar 212.376 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat baca masyarakat semakin meningkat atau dengan kata lain masyarakat sudah semakin sadar manfaat membaca bagi peningkatan ketrampilan dan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini cukup efektif meningkatkan minat baca masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan *story telling* dan mobil perpustakaan keliling untuk menumbuhkan minat baca sejak dini, peningkatan sarana prasarana pendukung seperti perbaikan gedung perpustakaan dan penambahan koleksi buku bacaan. Penambahan buku bacaan tahun 2018 sebanyak 7.000 eksemplar.

2. Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Tabel 2.70 Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

No.	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah judul buku	14.763	17.663	19.663	20.963	22.940	23.788
2	Jumlah koleksi buku	61.408	71.708	77.108	84.108	84.110	89.140
3	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	24,04	24,63	25,50	26,24	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa koleksi buku bacaan, baik dari jumlah buku maupun jumlah judul, menunjukkan peningkatan. Persentase koleksi buku pada tahun 2018 menunjukkan angka 26,24 %, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat 25,50 %. Berdasarkan jenisnya, koleksi buku bacaan yang ada terdiri dari buku bahasa / sastra / cerita anak / fiksi 26.820 eksemplar (31,89%), buku keagamaan 22.400 eksemplar (26,63%), buku ensiklopedia 500 eksemplar (0,59%), dan buku ilmu pengetahuan umum dan terapan 34.388 eksemplar (40,89%).

2.3.1.2.18 Kearsipan

Urusan Kearsipan mendukung pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan kearsipan dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	97,99	98,66	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	%	n/a	n/a	3,86	1,39	1,45	4,84

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2021

Unit kerja dinilai telah mengelola arsip secara baik apabila telah memenuhi standar pengelolaan arsip dinamis aktif (yaitu pemakaian lembar disposisi, buku agenda surat masuk/keluar, dan penomoran buku agenda secara benar), sedangkan unit kerja dinilai telah mengelola arsip secara baku apabila telah memenuhi standar pengelolaan arsip dinamis aktif (yaitu pemakaian lembar disposisi, buku agenda surat masuk/keluar, dan penomoran buku agenda secara benar) dan memiliki petugas arsip yang memahami kode klasifikasi penataan arsip dinamis aktif.

1. Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku

Tabel 2.72 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

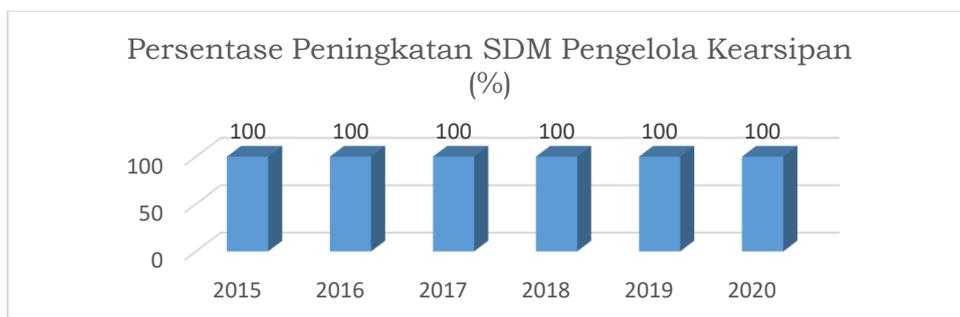
No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Unit Kerja Yang Dibina	Unit	149	149	149	149	149	149
2	Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	Unit	146	147	149	149	149	149
3	Unit Kerja Mengelola Arsip Secara Baku	%	97,99	98,66	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2021

Jumlah unit kerja yang mengelola arsip secara baku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2020 tercatat jumlah unit kerja yang mengelola arsip secara baku sebanyak 149 unit kerja atau 100% dari jumlah unit kerja yang dibina dengan predikat baik sebanyak 149 unit. Kondisi tersebut tetap jika dibandingkan tahun 2017-2019.

Dalam rangka mendorong agar pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan dengan baik dan baku sesuai ketentuan, di tahun 2018 telah dilakukan monitoring langsung terhadap masing-masing unit kerja, sedangkan untuk indikator kinerja peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2018 telah tercapai 100% atau seluruh aparatur yang mengikuti bimtek kearsipan (sebanyak 275 orang) telah dinilai memiliki ketrampilan yang baik. Capaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2017 yaitu sebanyak 175 orang. Pembinaan SDM pengelola kearsipan selain dilakukan melalui bimtek, juga dilakukan langsung di tempat melalui kegiatan monitoring.

2. Persentase Peningkatan SDM Pengelola Arsip



Grafik 2.102 Persentase Peningkatan SDM Pengelola Arsip di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2021

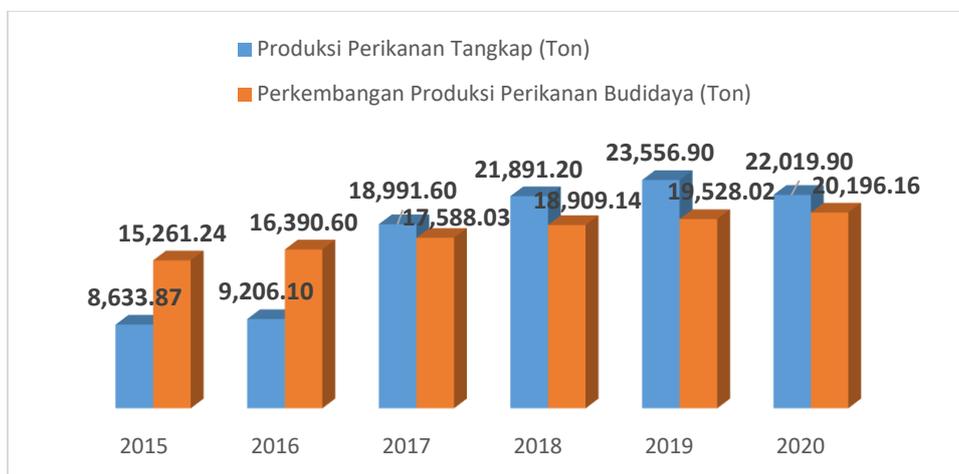
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Berikut adalah penjelasan serta data terkait.

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keberpihakan kepada rakyat miskin (*pro poor*), lapangan kerja (*pro jobs*) dan pertumbuhan (*pro growth*) dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan secara intensif, efisien dan terintegrasi antara sentra produksi budidaya dan tangkap dengan pengolahan dan pemasaran hasil sehingga menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah yang selanjutnya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya.

Sedangkan sub sektor perikanan Pasuruan, didukung oleh produksi ikan. Dilihat perkembangannya, hasil tangkapan ikan terus mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah tangkapan itu berdampak pada nilai yang dihasilkan. Berikut ini adalah perkembangannya produksi, nilai ikan dan konsumsi ikan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015-2019.



Grafik 2.103 Aspek Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 2021

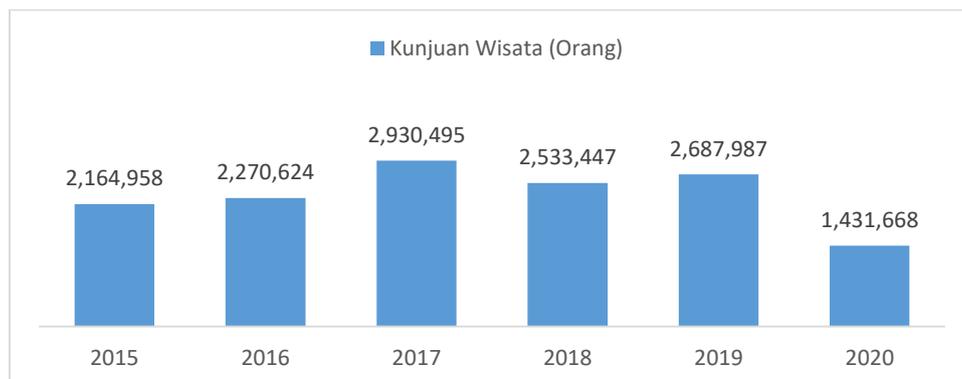
Produksi perikanan tangkap pada 2020 menurun menjadi 23.556,90 ton dari tahun sebelumnya sebesar 23.556,90 ton. Sedangkan pada Perkembangan produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 20.196,16 ton meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 19.528,02 ton.

2.3.2.2 Pariwisata

Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri (2005), pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pariwisata akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Setiap daerah pasti memiliki potensi pariwisatanya tersendiri yang dapat menjadi daya tarik bagi setiap wisatawan. Oleh karena itu butuh pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada guna menjadikannya sebagai salah satu indikator majunya suatu daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuh kembangkan kepariwisataan serta menggali sektor potensial untuk pembangunan serta mencukupi kebutuhan daerah dengan disesuaikan beban tugas yang berkembang saat ini. Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam mendapatkan devisa negara. Salah satu kawasan strategis nasional terletak di Kabupaten Pasuruan, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). TNBTS diharapkan mampu menjadi destinasi pariwisata unggulan yang mampu menjadi *anchor* bagi destinasi wisata yang lain, seperti Taman Safari Indonesia 2, Wisata Alam Banyubiru, Ranu Grati, Desa Wisata dll. Hal ini akan berdampak

pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi. Pemasaran pariwisata bertujuan untuk memperkenalkan potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pemasaran yang paling efektif dengan menyediakan tempat-tempat/*spot* yang menarik pengunjung dan selanjutnya dipublikasikan di media sosial sangat efektif untuk memasarkan destinasi wisata.



Grafik 2.104 Kunjungan Wisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2021

Indikator ini menggambarkan besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Pasuruan. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung mengindikasikan semakin meningkatnya daya tarik wisata, juga pesatnya perkembangan kegiatan pariwisata. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi destinasi wisata utama Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 mencapai 1.431.668 orang jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya penurunan yang salah satu faktornya disebabkan oleh pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan dirumah saja dan *social distancing*.

2.3.2.3 Pertanian

Berdasarkan kewenangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana prasarana pertanian diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu peningkatan nilai tambah sektor unggulan berbasis wilayah serta pemantapan ketahanan pangan daerah dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini tentunya disinergikan dengan prioritas nasional dan provinsi yaitu peningkatan nilai tambah agro dan maritim melalui industri serta pemanfaatan akselerasi pariwisata.

Adapun capaian produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan selama periode tahun 2015-2019 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.73 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pertanian di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	8,71	9,454	-0,0186	25,93	4,16	2,096
2	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,31	1,33	0,0079	0,083	17,59	8,09
3	Peningkatan produksi tanaman buah tahunan	%	2,009	2,03	0,0355	0,4312	0,62	0,48
4	Peningkatan produksi tanaman sayur	%	2,166	2,543	0,0105	0,6104	1,16	0,56
5	Peningkatan produksi tanaman hias	%	2,965	3,307	0,0469	0,1218	0,60	0,36
6	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1,15	1,5	-19,40	5	0,82	0,99
7	Presentase Peningkatan Produksi Peternakan							
	- Daging	%	1,16	1,19	1,15	1,07	2,15	0,18
	- Telur	%	1,16	1,03	1,03	0,97	3,30	0,18
	- Susu	%	1,18	1,15	1,15	1,15	2,15	0,02
8	Peningkatan Unit Usaha Olahan Hasil Ternak	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	25	27
9	Persentase Kematian Ternak:							
	a. Ternak besar	%	0,15	0,14	0,15	0,13	0,14	0,16
	b. Ternak kecil	%	0,17	0,18	0,17	0,16	0,17	0,19
	c. Unggas	%	1,4	1,3	1,2	1,2	1,8	1,8
10	Peningkatan Unit Usaha yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Produk Hewan (pra-NKV)	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	36	40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, 2021

Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran pada urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura



Grafik 2.105 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

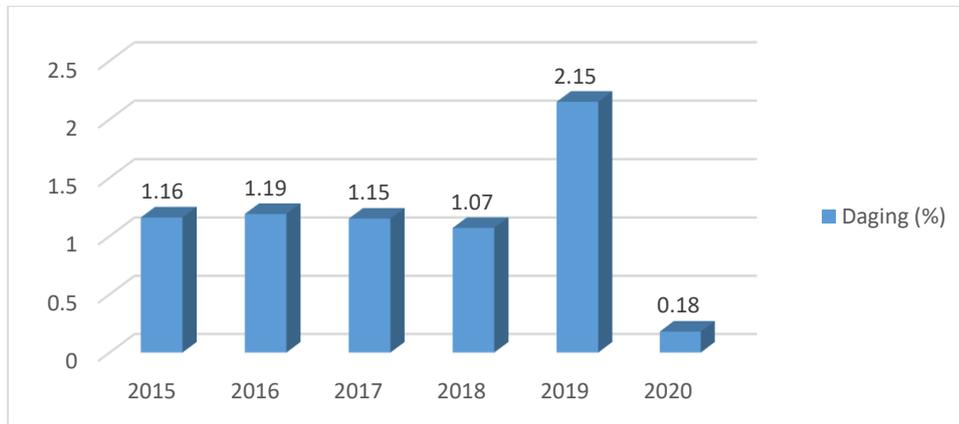
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten pasuruan, 2021

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ditentukan oleh adanya peningkatan dari tanaman pangan dan hortikultural. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat produksi tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai serta tanaman hortikultural yang meliputi sayuran kentang dan paprika, buah durian mangga dan apel, bunga sedap malam dan bunga krisan. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultural di tahun 2019 sebesar 4,16 dan tahun 2020 sebesar 2,096, jika dibandingkan dengan hasil produksi di tahun 2018 yang mencapai 25,93 maka Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultural mengalami penurunan yang drastis.

2. Peningkatan Produksi Peternakan

Peningkatan Produksi Peternakan ditentukan oleh adanya peningkatan populasi ternak baik ternak besar dan kecil. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat produksi peternakan yang meliputi daging, telur dan susu.

A. Daging

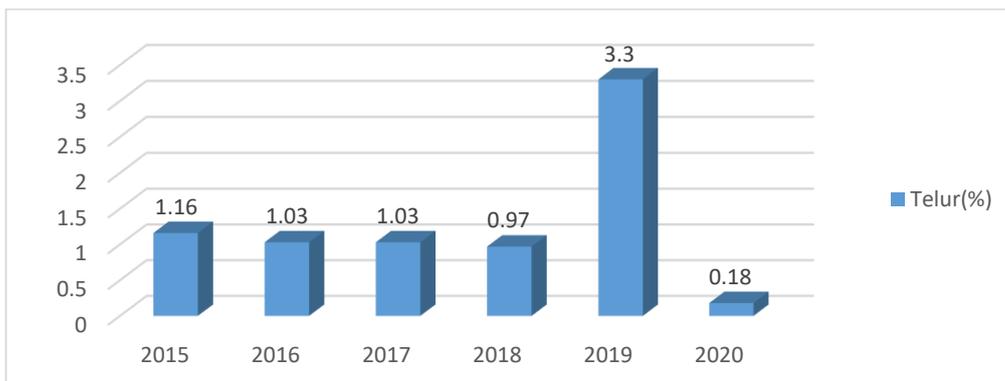


Grafik 2.106 Produksi Daging Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten pasuruan, 2021

Peningkatan Produksi daging pada tahun 2020 adalah 0,18%, tidak sebesar tahun 2019 yang mencapai sebesar 2,15%. Peningkatan produksi daging tahun 2020 yang tidak sebesar tahun 2019 disebabkan oleh konsumsi daging tidak terlalu tinggi karena pembatasan kegiatan ekonomi karena situasi pandemi Covid-19 yang berpengaruh kepada semua sektor.

B. Telur

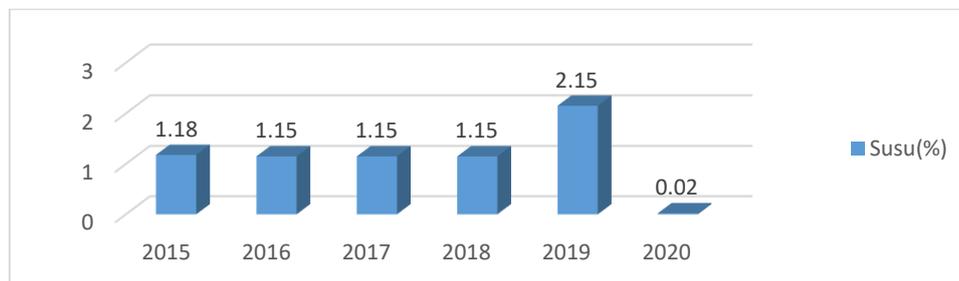


Grafik 2.107 Produksi Telur Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten pasuruan, 2021

Peningkatan Produksi Telur pada tahun 2020 adalah sebesar 0,18%, tidak sebesar tahun 2019 yang mencapai sebesar 3,3%. Peningkatan produksi telur tahun 2020 yang tidak sebesar tahun 2019 disebabkan oleh konsumsi telur tidak terlalu tinggi karena pembatasan kegiatan ekonomi karena situasi pandemi Covid-19 yang berpengaruh kepada semua sektor.

C. Susu



Grafik 2.108 Produksi Susu Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten pasuruan, 2021

Peningkatan Produksi Susu pada tahun 2020 adalah sebesar 0,02% tidak sebesar tahun 2019 yang mencapai sebesar 2,15%. Peningkatan produksi susu tahun 2020 yang tidak sebesar tahun 2019 disebabkan oleh konsumsi susu tidak terlalu tinggi karena pembatasan kegiatan ekonomi karena situasi pandemi Covid-19 yang berpengaruh kepada semua sektor.

2.3.2.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dalam upaya penyediaan dan pendistribusian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sektor industri melalui mekanisme pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perdagangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Tabel 2.74 Indikator Perdagangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Transaksi Perdagangan	Rupiah	n/a	n/a	n/a	1.938.102.000	1.964.493.500	4.192.630.500
2	Pameran Dagang Nasional	Kali	5	7	4	4	7	1
3	Pameran Dagang Lokal	Kali	13	10	9	17	24	6
4	Penerbitan Surat Keterangan Asal	Skala	2.203	2.402	2.860	2.974	3.201	3.257

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2021

Dari tabel indikator perdagangan dapat dilihat bahwa adanya kenaikan nilai transaksi pada tahun 2020 sebesar 4.192.630.500 dibandingkan di tahun 2019 sebesar 1.964.493.500. Kenaikan nilai transaksi dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2.228.137.000. Namun pada pameran dagang nasional maupun lokal mengalami

penurunan di tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang menerapkan kebijakan *social distancing* untuk mencegah kerumunan. Pada tahun 2019 pameran dagang nasional terselenggara sebanyak 7 kali namun pada tahun 2020 hanya terselenggara 1 kali sedangkan pameran dagang lokal pada tahun 2019 terselenggara sebanyak 24 kali, namun pada tahun 2020 hanya terselenggara sebanyak 6 kali. Dalam penerbitan surat keterangan asal pada tahun 2020 meningkat sebesar 3.257 skala dibandingkan di tahun 2019 sebesar 2.201 skala.

2.3.2.5 Perindustrian

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perancangan industri.

Urusan perindustrian mengemban tugas utama untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan menyelaraskan jenis industri yang berkembang dengan potensi sumber daya lokal (sektor primer) untuk menciptakan rantai pasok industri, penataan kawasan industri dan peruntukan industri, penciptaan *green and clean* industri untuk meminimalisasi limbah dan menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan sektor industri.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka pada tahun 2013 telah disusun Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Pasuruan agar Pengembangan Industri di Kabupaten Pasuruan berjalan dengan optimal. Dengan terbitnya UU No. 3 tahun 2014 dan PP 4/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta peraturan lain yang terkait dengan industri serta perkembangan kondisi yang ada, maka pada tahun 2018 dilakukan Review terhadap Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Pasuruan dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038. Dengan beberapa penyelarasan dokumen terhadap RIPIN 2015-2035 diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pengembangan industri bisa berjalan optimal, terarah, tepat sasaran untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk industri Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan perindustrian. Untuk mencapai hal tersebut maka produk yang dihasilkan haruslah produk yang bagus sesuai standar yang berlaku. Dengan

demikian maka legalitas dari pelaku industri juga harus dipenuhi untuk memberikan jaminan kepercayaan bagi pasar.

Fasilitasi bagi standarisasi produk telah dilakukan secara rutin untuk memberi kemudahan kepada pelaku industri terutama IKM agar produknya lebih berdaya saing. Sedangkan Pemenuhan legalitas didorong dengan kebijakan tentang kemudahan proses perijinan yang difasilitasi dengan Program SATRYA EMAS, dimana para pendampingnya aktif melakukan pendampingan terhadap IKM agar usaha dan produk yang mempunyai legalitas yang dibutuhkan. Hal tersebut diatas diharapkan akan mendorong pertumbuhan Industri Kecil Menengah dan Besar di Kabupaten Pasuruan yang berimplikasi pula pada peningkatan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

Tabel 2.75 Aspek Perindustrian Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah IKMB	Unit	64	50	56	54	64	59
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.817	1.181	2.584	2.299	2.643	2.437
3	Nilai Investasi	Rupiah (Ribu)	151.194.254	72.245.922	656.555.215,5	117.700.035	135.355.040	124.797.346
4	Nilai Produksi Sektor Industri	Jutaan Rupiah	48.892.576,5	51.743.162,7	54.696.836,5	58.374.043,5	62.147.131,6	61.896.361,3

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2021

2.3.2.6 Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan salah satu urusan pilihan pemerintah kabupaten yang kontribusinya cukup menentukan dalam pencapaian visi dan misi kabupaten, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan masih tinggi, maka perlu dilakukan upaya persebarannya dengan melakukan transmigrasi. Urusan ketransmigrasian dilaksanakan untuk melayani masyarakat yang akan bertransmigrasi. Program transmigrasi secara regulasi masih bergantung pada Pemerintah Pusat/Provinsi, baik untuk sarana dan prasarana maupun lokal transmigrasi, sehingga keberhasilan program/kegiatan transmigrasi di daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat/ Provinsi.

Dalam melakukan kunjungan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten di luar jawa, pemerintah kabupaten daerah pengirim baru dapat melakukan pada awal tahun anggaran berjalan, karena data/informasi tentang calon lokasi transmigrasi baru diterima pada tribulan IV tahun sebelumnya, sehingga untuk waktu 12 bulan terkadang tidak cukup untuk menyelesaikan kerjasama antar daerah. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan transmigrasi dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana berikut:

**Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan
Ketransmigrasian**

No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi (komulatif)	Lokasi	6	8	8	n/a	n/a
2	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	KK	5	10	n/a	4	n/a

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, 2020

2.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Indikator kinerja pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan diukur dengan “persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen rencana yang baik”. Indikator tersebut memperlihatkan keberhasilan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA selaku lembaga yang ditunjuk sebagai penyusun perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD, berkewajiban juga mengendalikan pelaksanaannya dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, yaitu Renstra dan Renja.

Urusan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan pada aspek pelayanan umum yang memiliki fokus pada layanan urusan wajib. Adapun tolok ukur keberhasilan pada urusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan penilaian yang menggunakan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini. Bappeda mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan secara teknokratis yaitu perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan/metode dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangka menengah/lima tahunan maupun jangka pendek/tahunan. Bappeda melakukan verifikasi, menganalisis dan memformulasikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah perencanaan terhadap materi perencanaan yang diperoleh lewat penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sedangkan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umumnya dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik (triwulan), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan koreksi/penyesuaian yang diperlukan.

Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SAKIP Perencanaan	Nilai	n/a	n/a	n/a	22,75	23,62	n/a
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Ketepatan waktu penyusunan LKPJ Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Pasuruan, 2021

2.3.3.2 Keuangan

Penunjang Urusan Keuangan Pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 salah satunya pada Indikator kinerja dalam hal Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kinerja menurut Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 31 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (bulan) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 telah menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Maret 2018. Capaian indikator kinerja pembangunan daerah fungsi penunjang Urusan Keuangan selama kurun waktu 2015 – 2020 secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.78 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	8,73	11,57	10,49	19,17	5,96	7,56
2	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Daerah (LKPD) tepat waktu							
3	Penyampaian Bahan Raperda APBD tepat waktu	Peraturan	1	1	1	1	1	1
4	Penyampaian Bahan Raperda P-APBD tepat waktu	Peraturan	1	1	1	1	1	1
5	Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi BMD dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
6	Presentase Laporan Keuangan sesuai standart akuntansi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

BPK-RI telah melakukan audit terhadap laporan keuangan 2017 tersebut mulai tanggal 27 Maret 2018–30 April 2018 dan pada tanggal 25 Mei 2018 BPK-RI telah menyerahkan hasil audit atas laporan keuangan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas dasar laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Juni 2018 dan telah dibahas seta pada tanggal 27 Juli 2018 disetujui bersama DPRD, pada tanggal 28 Agustus 2018 hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 31 Agustus 2018 rancangan peraturan daerah tersebut telah ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah disampaikan tepat waktu kepada BPK-RI dan capaian indikator kinerja sasaran berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tingkat capaiannya seratus persen, dan sesuai juga dengan rencana yang ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah. Keberhasilannya sesuai dengan target karena dalam hal pelaporan selalu diadakan rekonsiliasi dan evaluasi secara berkala dan konsisten, sehingga pelaporan keuangan selalu selesai tepat waktu.

2.3.3.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasuruan, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- b. Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyampaikan informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
- e. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan serta pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Melaksanakan Diklat Pemberdayaan Umum;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 untuk Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Indikator ini dihitung mulai tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan. Perhitungan indikator ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural sampai tahun ini dengan jumlah seluruh pegawai struktural.

2. Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah

Indikator ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah. Capaian indikator ini tahun 2017 adalah sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan itu sebesar 87%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 (97,76%) capaian indikator ini juga mengalami kenaikan karena seluruh peserta dinyatakan lulus semua. Adapun capaian tersebut diperoleh dari dua data pendukung yaitu jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus ujian dinas Tk. I dan II serta jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah.

Tabel 2.79 Pegawai yang pernah mengikuti Pendidikan & Pelatihan Aparatur

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	70,2
2	Kepemimpinan ASN yang ikut Diklat Struktural	70	84	41	71	40

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
3	Sesuai Jabatan s/d tahun sebelumnya Seluruh Pegawai Struktural	564	634	714	759	830
4	Jumlah seluruh pegawai struktural	1097	1092	1093	1006	976
5	ASN yang pernah mengikuti Pendidikan & Latihan Struktural	57,79	65,75	69,53	82,50	89,13

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Daerah, 2020

Tabel 2.80 ASN Yang Mengikuti dan Lulus Ujian Tahun 2015-2019

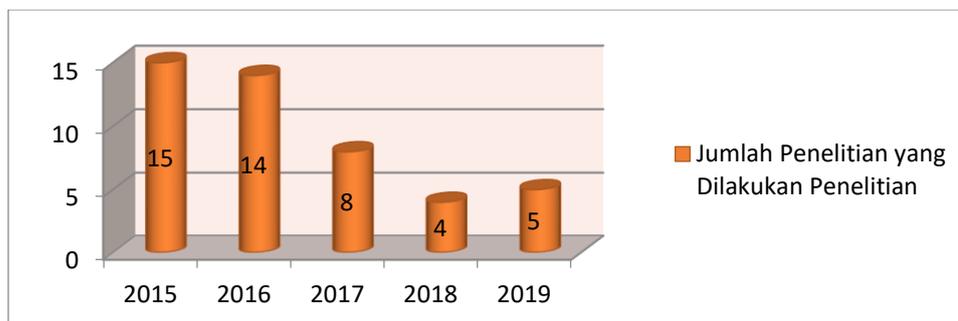
Aspek	2015	2016	2017	2018	2019
UD tk. I	95	100	100	100	100
UD tk. II	100	0	100	100	100
Ujian PI	100	97,77	100	100	100
Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas TK.I	20	19	35	31	29
Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas TK.II	2	0	0	2	2
Jumlah pegawai yang lulus penyesuaian ijazah	33	219	51	32	0
Jumlah seluruh pegawai peserta ujian dinas TK.I	21	19	35	31	29
Jumlah seluruh pegawai peserta ujian dinas TK.II	2	0	0	2	2
Jumlah seluruh pegawai peserta penyesuaian ijazah	33	224	51	32	0

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah, 2020

2.3.3.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (litbang) adalah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi penunjang litbang dinilai dengan indikator kinerja “persentase hasil litbang yang menjadi dasar kebijakan daerah”. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rencana kegiatan litbang yang dibutuhkan oleh Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Realisasi indikator kinerja tersebut tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 61,90%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan kegiatan litbang masih belum optimal.



Grafik 2.109 Jumlah Penelitian yang dilakukan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasuruan, 2020

Capaian jumlah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penelitian sebesar 15 penelitian. Pada tahun 2016 jumlah penelitian mengalami penurunan sebesar 14 penelitian. Pada tahun 2017 jumlah penelitian mengalami penurunan sebesar 8 penelitian. Pada tahun 2018 jumlah penelitian mengalami penurunan sebesar 4. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penelitian mengalami kenaikan sebesar 5.

Tabel 2.81 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti tahun 2019-2020

Indikator	Capaian	
	2019	2020
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasuruan, 2021

Indikator ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian indikator pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) penelitian, sama dengan target yaitu sebanyak 4 (empat) penelitian sehingga persentase tingkat pencapaian sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 (8 penelitian) jumlah penelitian yang dilakukan mengalami penurunan sebanyak 4 (empat) penelitian. Adapun rincian penelitian yang dilakukan tahun 2018 yaitu :

1. Kajian Dampak Industri Terhadap Pertanian.
2. Kajian Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Agro.
3. Kajian Investasi Jalan Tol.
4. Kajian Fungsi Keimigrasian.

Total pelaksanaan penelitian pada tahun anggaran 2016-2017, terdapat 21 (dua puluh satu) hasil penelitian. Kemudian setelah ditelaah dari DPA tahun anggaran 2017-2018, persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi dasar dalam kebijakan daerah adalah 10 (sepuluh) hasil penelitian yang ditindaklanjuti atau 47,62%. Seluruh hasil penelitian pada tahun anggaran 2018 telah disampaikan kepada PD yang menjadi anggota tim pendamping teknis pelaksana kegiatan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

Beberapa kegiatan kelitbangan yang teridentifikasi pada APBD 2019 antara lain:

1. Dinas Perikanan : kegiatan penataan karamba berdasarkan penelitian Pengembangan Kawasan Danau Ranu Grati.
2. Bappeda : penelitian dengan tema pemberdayaan berbasis keluarga berdasarkan penelitian Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pasuruan; dan pengembangan bibit durian unggul berdasarkan penelitian Pengembangan Pasar Daerah Berbasis Komoditi Lokal.

Penelitian dan Pengembangan merupakan kegiatan dalam rangka mencari kebenaran, baik yang bersifat epistemologi maupun yang bersifat empiris. Keberadaan penelitian dan pengembangan harus mampu mengungkapkan timbulnya gejala-gejala ketidaklurusan, harus mampu memecahkan segala permasalahan yang berkembang, serta harus mampu memberikan solusi yang tepat dengan jalan menghimpun, mengolah, dan menganalisa data secara representatif, obyektif, valid, dan *reliable*. Dengan demikian hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah, baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

2.3.3.5 Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, dan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai. Dua indikator dalam pengawasan adalah presentase tindak lanjut temuan dan kasus pelanggaran disiplin pegawai.

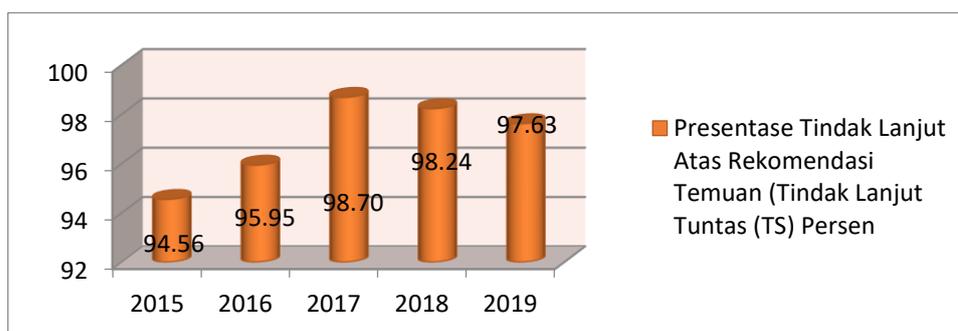
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menyebutkan bahwa yang dimaksud Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dengan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

Serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, menyebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu menjalankan tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Penyelesaian masalah atas rekomendasi temuan/tindak lanjut tuntas menjadi prioritas yang dilakukan secara terkoordinir oleh Inspektorat. Perkembangan Kinerja Layanan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019.

Adapun indikator kinerja yang tertuang di dalam RPJMD 2015-2019 yang di laksanakan oleh Inspektorat adalah “Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan/Tindak Lanjut Tuntas (TS)”. Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah sebesar 98,70 % pada tahun 2017 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92%. Indikator ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun yang lalu sebesar 95,95% Apabila capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 2,75 %.



Grafik 2.110 Presentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan (Tindak Lanjut Tuntas (TS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasuruan, 2020

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah sebesar 98,24 % pada tahun 2018 dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Indikator ini

mengalami penurunan dibanding tahun yang lalu sebesar 98,70% Apabila capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,5%. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindak lanjuti dengan jumlah rekomendasi dalam LHP. Pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 56 obyek pemeriksaan meliputi Sekretariat DPRD, Sekretariat Pemda, Satpol PP, Badan, dan Dinas. Jumlah temuan yang direkomendasikan sebanyak 447 Rekomendasi sedangkan obrik yang sudah menindaklanjuti sebanyak 455 sehingga tersisa 8 yang belum ditindaklanjuti tuntas selesai (TS), penyebabnya antara lain:

1. Terdapatnya beberapa perangkat daerah masih belum melunasi pembayaran atas kerugian Negara dan Daerah.
2. Kewajiban setor pegawai atas temuan Kelebihan tunjangan pegawai masih disetor secara diangsur
3. Kekurangan bukti pendukung atas rekomendasi temuan.

2.2.3.6 Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam menentukan sistem kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan diukur dengan indikator “persentase kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan”. Indikator tersebut diukur berdasarkan survei persepsi dari seluruh anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD, yaitu puas atau tidak puas. Realisasi indikator kinerja tersebut menunjukkan tingkat kepuasan dari seluruh anggota DPRD yaitu 100% di tahun 2017.

Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2015-2019

No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	%	104,5	58	66	90	n/a
2.	Presentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil di fasilitasi	%	75	33	58	69	100

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021

Capaian kinerja untuk Sekretariat DPRD mengalami peningkatan sebesar 27% dibandingkan dengan tahun 2017. Raperda yang disetujui menjadi Perda tahun 2018 adalah :

1. Perda tentang Pajak Daerah.
2. Perda tentang barang Milik Daerah.
3. Perda tentang Kesehatan Lingkungan.
4. Perda tentang Penyelenggaraan Kerasipan.
5. Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
7. Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya.
8. Perda tentang Kerja Sama Desa.
9. Perda tentang Badan Usaha Milik Desa.
10. Perda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
11. Perda tentang Cagar Budaya.
12. Perda tentang Pelestarian Seni dan Budaya.
13. Perda tentang Penyedia dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
14. Perda tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan.
15. Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bangil, Beji, Kraton, dan Purwosari.
16. Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
17. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017.
18. Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

2.3.3.6 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan indikator kinerja.

Beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kesepakatan bersama yang telah dibuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2013-2017 ada yang belum ditindaklanjuti dengan perjanjian

kerjasama oleh Perangkat Daerah, sehingga tujuan kesepakatan bersama tidak tercapai.

- b. Paket pengadaan tidak semuanya berhasil ditenderkan, sehingga hal ini dapat menghambat kinerja penyerapan anggaran, sehingga manfaatnya tidak optimal yang diterima masyarakat. Identifikasi permasalahan yang menjadi kendala dalam proses tender perlu diantisipasi dengan perencanaan yang lebih baik.
- c. Pelaksanaan SAKIP di setiap Perangkat Daerah perlu ditingkatkan sehingga dapat menumbuhkan budaya kinerja lebih merata ke semua level mulai dari pejabat tinggi sampai dengan staf pelaksana.

Tabel 2.83 Perkembangan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Presentase UPP yang memiliki SPP dan IKM (target UPP= 250UPP (tahun 2018 target UPP= 250 UPP))	%	93,39	95,59	93,83	92,21	n/a
2	Peningkatan jumlah mitra kerjasama daerah	MoU	10	13	20	24	28
3	Ketepatan waktu penyusunan LPPD	%	100	100	100	100	n/a
4	Presentase proyek fisik yang di monitoring	%	80,59	80,65	87,96	63,89	76,66
5	Nilai SAKIP	Nilai	60,67 (CC)	65,65 (B)	72,65 (BB)	72,70 (BB)	75,02 (BB)
6	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai	79,00	81,00	82,35	83,65	84,75

Sumber: Setda Kabupaten Pasuruan, 2020

1. Ketepatan waktu penyusunan LPPD

Ketepatan waktu penyusunan LPPD dinilai 100%, apabila LPPD selesai disusun tidak melebihi ketentuan yaitu maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahun 2018 pelaksanaan LPPD dapat disusun tepat waktu atau 100%, sama dengan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 sedang dalam proses penilaian.

2. Persentase proyek fisik yang dimonitoring

Indikator ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 80,59. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 80,65. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 87,96. Pada tahun 2018

mengalami penurunan sebesar 63,89. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 76,66.

2.3.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. Daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi (1) keselarasan, dan (2) keserasian. Selaras dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Serasi dalam menyelenggarakan hubungan antar tingkat pemerintahan, baik antar daerah maupun antara pusat dan daerah.

Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitas pada skala nasional antar daerah ataupun pada skala internasional antar negara. Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan internasional.

Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola dan berupa pembangunan infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah tercapainya produktivitas suatu negara/daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian nasional/daerah. Semakin kompetitif daya saing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat.

Dari hasil penelitian Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran didapatkan faktor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu : Perekonomian daerah

- a. Keterbukaan
- b. Sistem Keuangan
- c. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

- d. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Sumber Daya Manusia
- f. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
- g. Manajemen ekonomi mikro

2.3.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, nilai tukar petani dan indeks daya beli.

Ekonomi menjadi fokus yang memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan dan pembangunan suatu daerah. Paul A. Samuelson mengatakan bahwa Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan ekonomi guna memberikan penjelasan dan tolak ukur sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu daerah.

Kaitan antara kemampuan ekonomi daerah dengan aspek daya saing ialah suatu kapasitas ekonomi daerah harus memiliki kemampuan daya tarik tersendiri bagi setiap pelaku kegiatan ekonomi baik yang di dalam maupun luar daerah dalam upaya peningkatan daya saing daerah. Fokus kemampuan Ekonomi Daerah mempunyai beberapa indikator yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, Nilai Tukar Petani, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan), dan produktivitas total daerah. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

2.3.4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

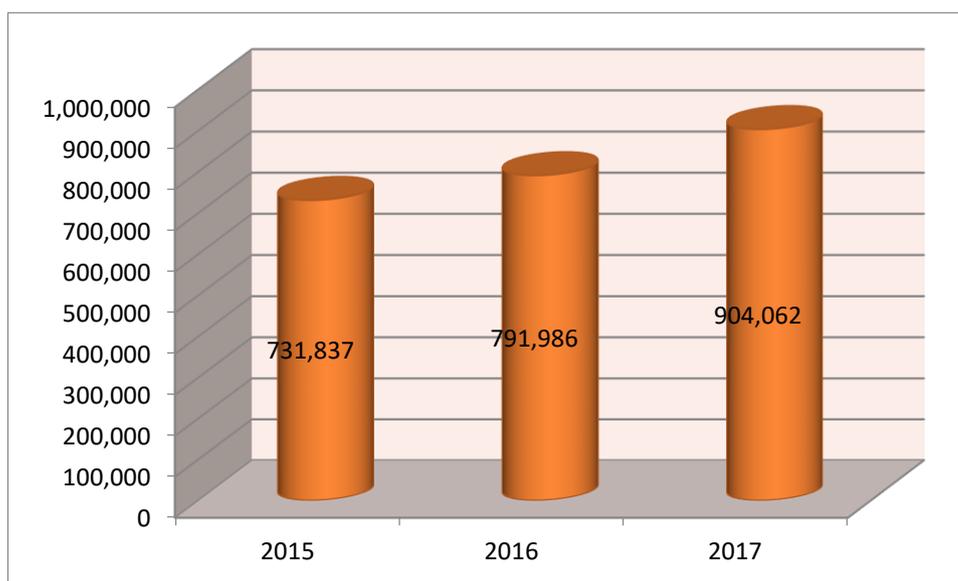
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan tembakau. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya.

Tabel 2.84 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/bln)	Rp/bln	731.837	791.986	904.062	n/a	n/a
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita (%)	%	49,37	45,66	45,16	n/a	n/a
3	Produktivitas total daerah (Rp. Juta/angka kerja)	Rp. Juta/ angka kerja	128,56	n/a	152,54	n/a	n/a

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2020

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita



Grafik 2.111 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2017

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2018

2.3.4.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar penduduk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Adapun gambaran perkembangan nilai tukar petani Kabupaten Pasuruan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

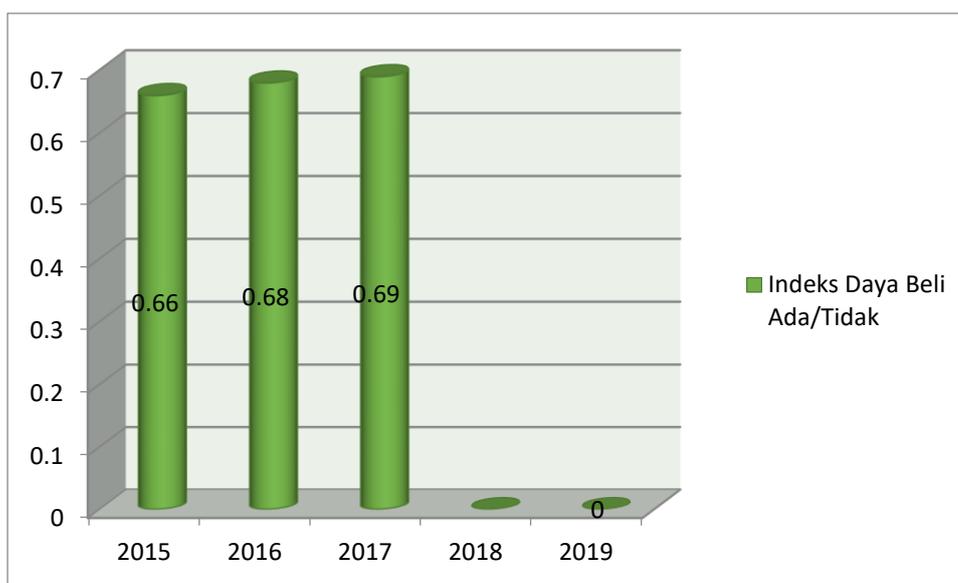
Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai tukar petani	106,19	104,13	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani secara keseluruhan mulai dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2015 nilai tukar petani sebesar 106,19. Sedangkan pada tahun 2016 nilai tukar petani mengalami penurunan sebesar 104,13.

2.3.4.4. Daya Beli

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada angka inflasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat secara umum dapat dipertahankan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang dikoordinasikan pelaksanaannya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Adapun gambaran indeks daya beli sebagai mana Tabel berikut :



Grafik 2.112 Indeks Daya Beli Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Daya Beli masyarakat mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 indeks daya beli di kabupaten pasuruan sebesar 0,66. Pada tahun 2016 indeks daya beli sebesar 0,68. Sedangkan pada tahun 2017 indeks daya beli

sebesar 0,69. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat mengalami peningkatan sehingga kemampuan untuk melakukan konsumsi meningkat.

2.3.5. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.5.1. Sarana Prasarana Transportasi

Aspek daya saing daerah yang berkaitan dengan infrastruktur memiliki sasaran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Masukan/input yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur antara lain: (1) Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar, (2) Ketersediaan listrik yang memadai dan menjadi insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi, (3) Ketersediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat.

Wilayah Kabupaten Pasuruan telah terhubung oleh jalan kabupaten sepanjang 2.315,89 km, dan didukung juga oleh adanya pembangunan jalan lingkungan. Selain itu konektivitas/aksesibilitas di wilayah Kabupaten Pasuruan juga didukung oleh jalan nasional sepanjang 88,7 km dan jalan provinsi sepanjang 86,14 km. Guna mendukung aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Jawa Timur, Pemerintah telah menetapkan proyek strategis pembangunan jalan tol yang melewati wilayah Kabupaten Pasuruan. Ruas jalan tol yang sudah selesai dibangun dan berfungsi adalah ruas Porong–Gempol, Gempol–Pandaan, Gempol–Pasuruan dan Pandaan–Malang, sedangkan yang masih dalam tahap penyelesaian adalah ruas Pasuruan–Probolinggo. Keberadaan jalan tol ini mendukung perkembangan wilayah, meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas orang, jasa dan barang. Selain pembangunan jalan tol, guna meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar arus distribusi orang dan barang, Pemerintah juga berencana untuk membangun lintasan KA *double track* lintas Surabaya–Bangil–Malang–Blitar dan Surabaya–Bangil–Banyuwangi. Sehingga ke depannya stasiun kereta api Bangil bisa menjadi salah satu pusat angkutan barang maupun orang di wilayah Jawa Timur.

2.3.5.2. Jaringan Listrik

Saat ini energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama baik individu maupun badan usaha. Pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

2.3.5.3. Ketersediaan Air Baku

Pemenuhan kebutuhan air baku air minum di Kabupaten Pasuruan didapatkan dari mata air, air tanah, dan sumur dangkal. Pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan oleh masyarakat sendiri, SPAM perdesaan/HIPPAM dan PDAM, dimana pengembangan SPAM didukung oleh dana APBD Kabupaten, APBN maupun Hibah APBN/Pamsimas. Pengembangan sistem penyediaan air minum oleh PDAM seringkali terkendala pada ketersediaan sumber air baku, karena sumber air yang ada juga dimanfaatkan untuk pengairan irigasi maupun pelayanan SPAM perdesaan.

Pada tahun 2017–2019 Pemerintah melakukan pembangunan proyek strategis SPAM Regional Umbulan yang menggunakan Mata Air Umbulan (yang terletak di Kecamatan Winongan-Kabupaten Pasuruan) sebagai sumber air bakunya. Dari proyek SPAM Regional Umbulan ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui PDAM, mendapatkan jatah sebesar 410 l/dt yang akan digunakan untuk pengembangan pelayanan di Kecamatan Rejoso, Grati, Winongan, Pohjentrek, Kraton, Rembang, Bangil, Beji, dan Gempol.

2.3.6. Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2.86 Nilai Investasi Tahun 2015-2020

Tahun	Nilai Investasi Baru (Rp.)
2015	15.342.645.635.286
2016	17.093.259.895.706
2017	17.866.326.930.105
2018	9.655.229.121.273
2019	18.944.471.131.733
2020	10.03

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, 2021

Tabel Nilai Investasi menggambarkan besarnya investasi dari berbagai sektor yang masuk pada tahun 2017. Secara mutlak nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar Rp. 17,87 Trilyun meningkat sebanyak 0,77 Trilyun dibandingkan tahun 2016 dimana nilai investasi daerah yang terealisasi adalah sebesar Rp. 17,10 Trilyun.

Tabel 2.87 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,44	5,72	5,3	5,83	-2,03	5,83	<
2.2.1.1	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha	%	5,44	5,72	5,73	5,83	-2,03	5,83	<
2.2.1.1.1	PDRB ADHK Menurut Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,4	1,08	-1,5	0,82	1,08	0,82	>
2.2.1.1.2	PDRB ADHK Menurut Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Pasuruan	%	2,03	3,97	2,45	1,25	-7,43	1,25	<
2.2.1.1.3	PDRB ADHK Menurut Industri Pengolahan	%	5,83	5,71	6,63	6,47	-0,032	6,47	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.1.1.4	PDRB ADHK Menurut Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,36	1,43	-3,56	0,17	-4,12	0,17	<
2.2.1.1.5	PDRB ADHK Menurut Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	%	6,9	6,48	4,19	5,51	4,22	5,51	<
2.2.1.1.6	PDRB ADHK Menurut Konstruksi	%	2	6,5	5,3	5,19	-4,95	5,19	<
2.2.1.1.7	PDRB ADHK Menurut Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,07	7,21	6,07	5,98	-9,35	5,98	<
2.2.1.1.8	PDRB ADHK Menurut Transportasi dan Pergudangan	%	8,86	9,38	7,67	6,94	-12,6	6,94	<
2.2.1.1.9	PDRB ADHK Menurut Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	%	8,86	9,38	7,67	6,94	-12,6	6,94	<
2.2.1.1.10	PDRB ADHK Menurut Informasi dan Komunikasi	%	8,5	8,55	6,76	7,1	9,35	7,1	>

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.1.1.11	PDRB ADHK Menurut Jasa Keuangan dan Asuransi	%	6,61	3,07	3,43	3,32	0,21	3,32	<
2.2.1.1.12	PDRB ADHK Menurut Real Estate	%	7	3,7	4,55	5,53	2,28	5,53	<
2.2.1.1.13	PDRB ADHK Menurut Jasa Perusahaan	%	6,8	4,8	6,5	5,91	-6,59	5,91	<
2.2.1.1.14	PDRB ADHK Menurut Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	%	4,9	2,2	4,22	3,5	-2,36	3,5	>
2.2.1.1.15	PDRB ADHK Menurut Jasa Pendidikan	%	6,01	3,95	4,1	6,54	1,75	6,54	<
2.2.1.1.16	PDRB ADHK Menurut Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	7,5	5,5	6,15	6,55	12,85	6,55	>
2.2.1.1.17	PDRB ADHK Menurut Jasa Lainnya	%	6	4,04	4,05	5,28	-14,39	5,28	<
2.2.1.2	Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi								

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.1.2.1	Inflasi	%	1,96	3,18	2,3	1,45	1,87	1,45	>
2.2.1.2.2	Indeks Gini	%	0,32	0,34	0,346	0,308	n/a	0.308	=
2.2.1.2.3	Indeks Wiliamson (Disparitas Wilayah) Kabupaten Pasuruan	Indeks	0,2553	0,2546	0,2561	0,2583	0,2777	0,2777	=
2.2.1.3	Kemiskinan								
2.2.1.3.1	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	168.06	165.64	152.48	141.09	151.43	151.43	=
2.2.1.3.2	Persentase Penduduk Miskin	%	10,34	10,34	9,45	8,68	9,26	9,26	=
2.2.1.3.3	Garis Kemiskinan	Rp/ Kapita/ bulan	315 141	315 141	331 057	335 653	355 299	355 299	=
2.2.1.3.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	P1	1,67	1,67	1,5	1,56	1,15	1,15	=
2.2.1.3.5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	P2	0,44	0,44	0,37	0,43	0,23	0,23	=
2.2.1.3.6	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	4,18	4,97	6,11	5,42	6,24	5,42	
2.2.1.4	Pembangunan Manusia								

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.1.4.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,71	66,69	67,41	68,29	68,6	68,29	>
2.2.2	Kesejahteraan Sosial								
2.2.2.1	Pendidikan								
2.2.2.1.1	APK SD/MI	%	118,37	118,43	118,5	118,58	118,58	118,58	=
2.2.2.1.2	APK SMP/MTs	%	99,94	101,91	102	102,42	102,42	102,42	=
2.2.2.1.3	APM SD/MI	%	99,99	100	100	100	100	100	=
2.2.2.1.4	APM SMP/MTs	%	95,74	95,78	95,8	95,80	95,81	95,80	>
2.2.2.2	Kesehatan								
2.2.2.2.1	Angka Harapan Hidup	%	69,87	69,9	70,01	70,17	70,23	70,17	>
2.2.2.2.2	Cakupan Balita Gizi Buruk	%	0,05	0,04	0,034	0,033	0,029	0,029	=
2.2.2.2.3	Presentase Desa Siaga Aktif	%	98,53	100	100	100	100	100	=
2.2.2.3	Ketenagakerjaan								
2.2.2.3.1	persentase Pencari kerja yang ditempatkan	(%)	73	76	70,03	70,05	43,44	70,05	<
2.2.2.3.2	Rasio Penduduk yang bekerja	%	95,82	95,03	93,89	94,58	93,76	94,58	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.2.3.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,41	66,61	69,59	68,64	74,01	68,64	>
2.2.2.4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.2.2.4.1	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I	%	42,24	40,95	40,65	40,11	n/a	40,12	<
2.2.2.4.2	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	%	72,74	72,87	72,90	73,12	74,91	73,13	>
2.2.2.4.3	TFR (Total Fertility Rate) atau angka kelahiran total	%	3.84	1.89	1.87	1.84	1.95	1.95	=
2.2.2.4.4	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern)	%	72.87	72.9	73.12	75.14	74.91	74.91	=
2.2.2.4.5	Unmet Need KB	%	11.17	13.4	11.17	11.16	10.58	10.58	
2.2.2.4.6	ASFR 15 – 19 atau Age Specific Fertility Rate 15 – 19	%	32.56	34.95	33.94	28.75	n/a	29	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.2.5	Keuangan								
2.2.2.5.1	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	11,57	10,49	-19,07	5,96	7,56	7,56	=
2.2.2.6	Pangan								
2.2.2.6.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	nilai	86,6	86,8	87,2	85,3	83,2	87,2	<
2.2.2.7	Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
2.2.2.7.1	Jumlah Atlit Berprestasi	orang	57	62	22	81	0	13	<
2.2.2.7.2	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	Kelompok	419	425	420	422	422	420	>
2.3	Aspek Pelayanan Umum								
2.3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar								
2.3.1.1	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
2.3.1.1.1	Pendidikan								
2.3.1.1.1.1	APK SD/MI	%	118,37	118,43	118,5	118,58	118,58	118,58	=



Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.1.2	APK SMP/MTs	%	99,94	101,91	102	102,42	102,42	102,42	=
2.3.1.1.1.3	APM SD/MI	%	99,99	100	100	100	100	100	=
2.3.1.1.1.4	APM SMP/MTs	%	95,74	95,78	95,8	95,80	95,81	95,80	<
2.3.1.1.1.5	APS SD/MI	%	0,07	0,04	0,02	0,03	0,02	0,03	<
2.3.1.1.1.6	APS SMP/Mts	%	0,05	0,02	0,02	0,21	0,02	0,21	<
2.3.1.1.1.7	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	97,21	100	97,21	>
2.3.1.1.1.8	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	97,33	100	97,33	>
2.3.1.1.1.9	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,83	99,87	99,91	76,66	n/a	76,66	=
2.3.1.1.1.10	AM dari SMP ke SMA	%	99,65	99,69	99,73	n/a	n/a	144	>
2.3.1.1.1.11	Rasio guru terhadap murid SD/MI	Rasio	157-599	189-210	189-319	n/a	n/a	189-319	<
2.3.1.1.1.12	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1,- 15	1,- 18	1,- 18	n/a	n/a	1,- 18	<
2.3.1.1.2	Kesehatan								
2.3.1.1.2.1	Jumlah bayi meninggal	orang	171	166	135	134	105	105	=
2.3.1.1.2.2	Jumlah bayi lahir hidup	orang	25.104	24.924	25.152	25.118	23.702	23.702	=
2.3.1.1.2.2	Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran hidup	/1000 KH	6,81	6,66	5,37	5	4,4	5	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.2.4	Jumlah ibu melahirkan yang mati	orang	23	21	28	21	19	19	=
2.3.1.1.2.5	Jumlah ibu melahirkan	orang	25.624	24.294	25.152	25.118	24.887	24.887	=
2.3.1.1.2.6	Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran hidup	/1000 KH	91,62	84,26	111,32	83,61	76,34	83,61	<
2.3.1.1.2.7	Jumlah Balita Gizi Buruk	orang	67	44	41	40	34	34	=
2.3.1.1.2.8	Jumlah Balita	orang	121.782	121.781	119.273	118.492	117.832	117.832	=
2.3.1.1.2.9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,05	0,04	0,03	0,03	0,029	0,03	<
2.3.1.1.2.10	Jumlah Posyandu Balita	Unit	1.893	1.898	1.907	1.909	1.911	1.911	=
2.3.1.1.2.11	Rasio Posyandu / Satuan Balita	Rasio	15,54	15,59	16,00	19,60	19,60	19,60	=
2.3.1.1.2.12	Rumah Tangga yang ber PHBS	Rumah Tangga	23,614	53.392	53.392	49.196	41.106	41.106	=
2.3.1.1.2.13	Jumlah RT/KK yang disurvei	RT/KK	53,124	112.718	112.718	94.026	84.864	84.864	=
2.3.1.1.2.14	Persentase Rumah Tangga PHBS	(%)	44,45	47,37	47,37	51,24	51,5	51,24	>
2.3.1.1.2.15	Persentase Sanitasi Sehat	%	68,75	74,29	n/a	83,88	n/a	84,88	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.2.16	Persentase Puskesmas dan RSUD terakreditasi madya	%	12	40	100	94,12	94	94,12	<
2.3.1.1.2.17	Jumlah Puskesmas Kabupaten Pasuruan	Unit	33	33	33	33	33	33	=
2.3.1.1.2.18	Persentase IKM Kabupaten Pasuruan	%	88,82	80,82	82,12	82,73	82,75	82,75	=
2.3.1.1.2.19	Prevalensi Kusta	%	1,33	1,45	0,98	0,96	0,62	0,96	<
2.3.1.1.2.20	Jumlah Kasus HIV	orang	225	257	430	456	267	267	=
2.3.1.1.2.21	Jumlah HIV yang akses ARV	orang	160	191	282	456	267	267	=
2.3.1.1.2.22	Persentase penderita HIV AIDS	%	71,11	74,32	66	100	100	100	=
2.3.1.1.2.23	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81,89	82,28	n/a	n/a	82,75	82,75	=
2.3.1.1.2.24	Angka usia harapan hidup	tahun	69,87	69,9	70,01	70,17	70,23	70,17	>
2.3.1.1.2.25	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	92,96	93,89	96,33	97,40	97,4	97,4	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.2.26	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,46	99,46	99,28	99,51	98,6	98,6	=
2.3.1.1.2.27	Cakupan kunjungan bayi	%	98,74	99,25	100	90,63	98,25	98,25	=
2.3.1.1.2.28	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	86,85	90,96	95,62	98,6	98,1	98,1	=
2.3.1.1.2.29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	89,77	100	100	100	100	100	=
2.3.1.1.2.30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	=
2.3.1.1.2.31	Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	%	96,71	101,15	103,59	127,58	92	127,58	<
2.3.1.1.2.32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	92,41	112,95	117,78	n/a	146,14	146,14	=



Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.2.33	Rasio Dokter persatuan Penduduk	%	48,94	51,08	69,77	n/a	n/a	69,77	<
2.3.1.1.2.34	<i>Bed Accupancy Rate</i> (BOR)	%	78,35	68,84	55,59	59,2	53,5	53,5	=
2.3.1.1.2.35	<i>Nett Dead Rate</i> (NDR)	/mil	19,82	19,78	20,67	11,2	12,1	12,1	=
2.3.1.1.2.36	Tercukupinya pelayanan masyarakat miskin	%	100	100	100	n/a	n/a	100	<
2.3.1.1.2.37	Persentase jumlah penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	%	16,49	16,79	15,81	n/a	n/a	15,81	<
2.3.1.1.2.38	Perentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	91,63	92,07	93,7	95	93,54	95	<
2.3.1.1.2.39	Perentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Bersalin sesuai standar	%	99,46	99,46	99,28	99,51	98,6	99,51	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.2.40	Perentase Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	98,74	99,25	100	90,63	98,25	90,63	>
2.3.1.1.2.41	Perentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	79,02	100	23,86	77,1	91	77,1	<
2.3.1.1.2.42	Perentase Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	16,66	95,21	94,6	75	73,69	75	<
2.3.1.1.2.43	Perentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	41,26	72,61	83,13	100	92,1	100	<
2.3.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.3.1.1.3.1	Rasio Jaringan Irigasi	(%)	9,55	10,89	12,27	13,47	14,77	13,47	>
2.3.1.1.3.2	Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	(Ha)	25.554	25.562	27.662	28.712	29.779	28.712	>



Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.3.3	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	88,51	96,95	98,7	98,90	98,99	98,90	>
2.3.1.1.3.4	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	73,33	75,71	78,21	80,20	82,10	80,20	>
2.3.1.1.3.5	Persentase penanganan darurat banjir	%	88,5	94	96,5	97,20	98,20	97,20	>
2.3.1.1.3.6	Ketersediaan Lahan untuk pembangunan Embung	Unit	6	6	6	7	7	7	=
2.3.1.1.3.7	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	77,85	80,52	84,04	79,50	81,23	79,50	>
2.3.1.1.3.8	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	99,3	99,73	100	81,47	83,09	81,47	>
2.3.1.1.3.9	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	24,81	25,87	26	26,72	26,92	26,72	>

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.3.10	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	44,21	46,03	48	49,25	49,46	49,25	>
2.3.1.1.3.11	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	dokumen	2	2	2	2	2	2	=
2.3.1.1.3.12	Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Titik	45.61	45.86	48.465	46.44	46.71	46.44	>
2.3.1.1.3.13	Indeks Ketahanan Air	Indeks	n/a	n/a	77.68	77.68	77.65	77.68	<
2.3.1.1.3.14	Rumah tangga pengguna air bersih (perdesaan dan perkotaan)	KK	340.28	360.77	380.784	389.184	405.07	397.584	>
2.3.1.1.3.15	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	%	70,02	75,01	80,7	78,85	82,45	79,85	>
2.3.1.1.3.16	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Indeks	n/a	n/a	1.19	1.2	1.3	1.3	=
2.3.1.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.4.1	Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan	m	166058,81	176.098,79	188.949,23	198.849,23	221.138,23	208.749,23	>
2.3.1.1.4.2	Rumah Tidak Layak Huni	%	67,04	93,99	100	28,11	32,28	29,11	>
2.3.1.1.4.3	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	=
2.3.1.1.4.4	Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	n/a	100	n/a	100	<
2.3.1.1.4.5	Indeks Permukiman Layak Huni	Indeks	n/a	n/a	n/a	71,46	78,7	100	<
2.3.1.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
2.3.1.1.5.1	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	kasus	1.486	530	1.223	990	738	990	<
2.3.1.1.5.2	Jumlah Seluruh Kasus Pelanggaran Perda	kasus	1.865	637	1.353	1.085	801	1.085	<
2.3.1.1.5.3	Persentase Penegakan Perda	%	79,68	83,2	90,39	91,24	92,13	91,24	>

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1.5.4	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum terhadap Masyarakat dan Badan Usaha	kali	34	24	12	n/a	n/a	26,62	<
2.3.1.1.5.5	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	%	15,79	20,65	26,62	n/a	n/a	15,79	
2.3.1.1.5.6	Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat	%	97,45	99,99	100	100	100	100	=
2.3.1.1.5.7	Persentase Konflik SARA	%	0	0	0	0	0	0	=
2.3.1.1.6	Sosial								
2.3.1.1.6.1	Persentase Penanganan PMKS	%	81,85	96,99	99,99	99,93	100	99,93	>
2.3.1.1.6.2	Persentase Jumlah PMKS Kabupaten Pasuruan	%	6,97	6,49	5,99	6,11	5,41	6,11	<
2.3.1.1.6.3	Jumlah PMKS yang dibina	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	54675	54675	=
2.3.1.1.6.4	Jumlah PMKS yang diberdayakan	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	219	219	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
2.3.1.2.1	Tenaga Kerja								
2.3.1.2.1.1	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah	4.051	5.989	9.499	2.45	1.839	2.45	<
2.3.1.2.1.2	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Orang	7.333	8.989	9.499	8.037	1.839	8.037	<
2.3.1.2.1.3	Jumlah Angkatan kerja yang terdaftar	Orang	10.014	12.395	13.564	11.473	4.233	11.473	<
2.3.1.2.1.4	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	41	47	80	80	66	80	<
2.3.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.3.1.2.2.1	Jumlah KDRT	kali	16	69	39	55	48	55	<
2.3.1.2.2.2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	0,004	0,016	0,009	n/a	n/a	0,009	<
2.3.1.2.2.3	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	46,91	48	56,54	n/a	n/a	56,54	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.2.4	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	n/a	n/a	100	>
2.3.1.2.2.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90.49	90.45	90.45	90.68	90.48	90.48	=
2.3.1.2.3	Pangan								
2.3.1.2.3.1	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	93	95	97	97	95	100	<
2.3.1.2.3.2	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	86,6	86,8	87,2	85,3	83,2	100	<
2.3.1.2.3.3	Rasio Ketersediaan pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan	Rasio	n/a	n/a	n/a	2,53	2,58	2,54	>
2.3.1.2.4	Pertanahan								
2.3.1.2.4.1	Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	=
2.3.1.2.5	Lingkungan Hidup								

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	n/a	n/a	57,10	57,37	62,547	62,547	=
2.3.1.2.5.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	n/a	n/a	82,25	78,83	79	82,22	<
2.3.1.2.5.3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Unit	n/a	n/a	50,00	50,00	53,73	52,14	>
2.3.1.2.5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	%	n/a	n/a	43,57	43,57	43,84	44,04	<
2.3.1.2.5..5	Nilai TPA (Program Adipura)	%	65	74	74	74	78	79	<
2.3.1.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.3.1.2.6.1	Kepemilikan KTP	%	92,24	93,06	93,08	93,09	93,11	93,09	>
2.3.1.2.6.2	Penerapan KTP Nasional Berbasik NIK	Jiwa	1.238.522	1.286.159	1.319.174	1.347.885	1.347.886	1.347.885	>
2.3.1.2.6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	Per 100 penduduk	281	688	694	700	720	700	>
2.3.1.2.6.4	Persentase Penduduk Wajib KK yang Memiliki KK	%	94,02	96,04	98,05	98,05	98,10	98,05	>
2.3.1.2.6.5	Jumlah KIA	Orang	n/a	n/a	n/a	1248	29594	37065	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.3.1.2.7.1	Persentase jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan	%	67,4	90,72	100	67,4	n/a	100	>
2.3.1.2.7.2	Peningkatan sarana prasarana pasar desa	Unit	59	74	102	59	n/a	102	>
2.3.1.2.7.3	Rata-rata jumlah binaan lembaga masyarakat	%	120,5	98,1	100	120,5	n/a	100	>
2.3.1.2.7.4	Rata-rata jumlah binaan kelompok masyarakat	%	63,3	77,67	100	63,3	n/a	100	>
2.3.1.2.7.5	Jumlah Desa Berkembang	Desa	n/a	n/a	195	260	248	2	<
2.3.1.2.7.6	Jumlah Desa Maju	Desa	n/a	n/a	22	41	89	22	<
2.3.1.2.7.7	Jumlah Desa Mandiri	Desa	n/a	n/a	0	2	4	365	<
2.3.1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.3.1.2.8.1	Presentase Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	%	72,74	72,87	72,90	73,12	74,91	73,13	>

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.8.2	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I	%	42,24	40,95	40,65	40,11	39,72	40,12	<
2.3.1.2.9	Perhubungan								
2.3.1.2.9.1	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	v	10.932	11.724	10.291	10.424	8.562	>.
2.3.1.2.9.2	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	4,78	2,164	1,71	3,25	1,06	2,164	<
2.3.1.2.9.3	Jumlah Terminal	Unit	5	5	5	3	3	5	<
2.3.1.2.9.4	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	n/a	n/a	n/a	7.18	7.91	7.91	=
2.3.1.2.9.5	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	727798	749737	769.737	678.112	415.2	749.737	<
2.3.1.2.10	Komunikasi dan Informatika								
2.3.1.2.10.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
2.3.1.2.10.2	Peningkatan sistem komunikasi antar Perangkat Daerah	Unit	65	65	65	65	65	65	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.10.3	Pusat layanan internet kecamatan / telecentre	Unit	4	5	5	4	4	4	=
2.3.1.2.10.4	Media luar ruang	Kali	26	12	10	7	7	26	<
2.3.1.2.10.5	Penyelenggaraan	Kegiatan	3	3	2	0	0	3	<
2.3.1.2.10.6	Keikutsertaan	Kali	11	11	2	0	0	11	<
2.3.1.2.10.7	Pembentukan KIM	Kelompok	132	137	121	121	121	132	<
2.3.1.2.10.8	Indeks SPBE	Indeks	n/a	n/a	n/a	2.73	3.13	3.13	=
2.3.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.3.1.2.11.1	Presentase Koperasi Aktif	%	88,95	89,69	90,12	89,7	89,56	89,56	=
2.3.1.2.11.2	Penilaian Kesehatan KSP / USP	Buah	185	161	150	200	181	181	=
2.3.1.2.11.3	Persentase KOPPONTREN Aktif	%	61,64	81,94	86,11	84,93	-	84,93	<
2.3.1.2.11.4	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	%	2,2	2,22	2,51	-1,91	2,82	2,82	=
2.3.1.2.11.5	Persentase Berkualitas Koperasi	%	50.74	53.81	58.32	n/a	n/a	100	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.11.6	Persentase Jumlah Usaha Kecil	%	4.33	4.36	4.38	n/a	n/a	100	<
2.3.1.2.12	Penanaman Modal								
2.3.1.2.12.1	Jumlah Penyelesaian Ijin	Ijin	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	=
2.3.1.2.12.2	Peningkatan nilai investasi yang ditanamkan di daerah	T(Rp)	1,75	0,77	-8,2	6,29	-8,9	6,29	<
2.3.1.2.12.3	Nilai Investasi yang terealisasi	T(Rp)	17,09	17,8	9,6	18,9	10,03	10,03	=
2.3.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga								
2.3.1.2.13.1	Jumlah Atlit Berprestasi	Orang	36	57	62	22	0	38	>
2.3.1.2.13.2	Jumlah Pemuda Berprestasi	orang	12	12	13	13	5	13	<
2.3.1.2.13.3	Jumlah Atlit yang Dibina	Orang	n/a	n/a	n/a	101	n/a	100	>
2.3.1.2.13.4	Jumlah Pemuda yang Dibina	Orang	n/a	n/a	n/a	88	82	82	>
2.3.1.2.14	Statistik								
2.3.1.2.14.1	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.14.2	Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	=
2.3.1.2.14.3	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan penyebaran informasi	%	n/a	n/a	n/a	92	84.67	84.67	=
2.3.1.2.15	Persandian								
2.3.1.2.15.1	Persentasi Pemenuhan Standart Keamanan Informasi	%	15	20	25	35	40	40	=
2.3.1.2.16	Kebudayaan								
2.3.1.2.16.1	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	Kelompok	388	419	425	420	422	420	>
2.3.1.2.16.2	Penyelenggaraan <i>event</i> seni dan budaya	Kali	11	17	18	18	2	18	<
2.3.1.2.16.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	2	1	5	5	5	5	=
2.3.1.2.17	Perpustakaan								

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	293,077	307,768	520,144	546,151	317,432	317,432	=
2.3.1.2.17.2	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	24.63	25.5	26.24	n/a	n/a	26,24	=
2.3.1.2.17.3	Jumlah judul buku	Buku	17.663	19.663	20.963	22.94	23.788	23.788	=
2.3.1.2.17.4	Jumlah koleksi buku	Buku	71.708	77.108	84.108	84.11	89.14	89.14	=
2.3.1.2.18	Kearsipan								
2.3.1.2.18.1	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	98,66	100	100	100	100	100	=
2.3.1.2.18.2	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	=
2.3.1.2.18.3	Persentase meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	%	n/a	3.86	13.91	1.45	4.84	4.84	>
2.3.1.2.18.4	Jumlah Unit Kerja Yang Dibina	Unit	149	149	149	149	149	149	=
2.3.1.2.18.5	Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	Unit	147	149	149	149	149	149	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2.18.6	Unit Kerja Mengelola Arsip Secara Baku	%	98,66	100	100	100	100	100	=
2.3.2	Layanan Urusan Pemerintah Pilihan								
2.3.2.1	Kelautan dan Perikanan								
2.3.2.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9.206,10	18.991,6	21.891,2	23.556,9	22.019,90	23.556,90	<
2.3.2.1.2	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	16.390,60	17.588,03	18.909,1	19.528,02	20.196,16	19.528,02	>
2.3.2.2	Pariwisata								
2.3.2.2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	2.270.624	2.930.495	2.533.447	2.687.987	1.431.668	2.687.987	<
2.3.2.3	Pertanian								
2.3.2.3.1	Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	9,45	-0,0186	25,93	4,16	2,096	4,16	<
2.3.2.3.2	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,33	0,0079	0,083	17,59	8,09	17,59	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.2.3.3	Peningkatan produksi tanaman buah tahunan	%	2,03	0,0355	0,4312	0,62	0,48	0,62	<
2.3.2.3.4	Peningkatan produksi tanaman sayur	%	2,543	0,0105	0,6104	1,16	0,56	1,16	<
2.3.2.3.5	Peningkatan produksi tanaman hias	%	3,307	0,0469	0,1218	0,60	0,36	0,60	<
2.3.2.3.6	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1,5	-19,40	5	0,82	0,99	0,82	<
2.3.2.3.7	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	1,16	1,19	1,15	1,07	2,15	0,18	>
2.3.2.3.8	Persentase Peningkatan Produksi Telur	%	1,16	1,03	1,03	0,97	3,30	0,18	>
2.3.2.3.9	Persentase Peningkatan Produksi Susu	%	1,18	1,15	1,15	1,15	2,15	0,02	>
2.3.2.3.10	Persentase Kematian Ternak Besar	%	0,14	0,15	0,13	0,14	0,16	0,20	<
2.3.2.3.11	Persentase Kematian Ternak Kecil	%	0,18	0,17	0,16	0,17	0,19	0,30	<
2.3.2.3.12	Persentase Kematian Unggas	%	1,3	1,2	1,2	1,8	1,8	2,00	<

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.2.3.13	Peningkatan Unit Usaha yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Produk Hewan (pra-NKV)	Unit	n/a	n/a	n/a	36	40	40	=
2.3.2.4	Perdagangan								
2.3.2.4.1	Nilai Transaksi Perdagangan	Rupiah	n/a	n/a	1.938.102.000	1.964.493.500	4.192.630.500	867.085.000	>
2.3.2.4.2	Pameran Dagang Nasional	Kali	7	4	4	7	1	5	<
2.3.2.4.3	Pameran Dagang Lokal	Kali	10	9	17	24	6	13	<
2.3.2.4.4	Penerbitan Surat Keterangan Asal	Skala	2.402	2.86	2.974	3.201	3.257	2.5	>
2.3.2.5	Perindustrian								
2.3.2.5.1	Jumlah IKMB	Unit	50	56	54	64	59	140	<
2.3.2.5.2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.181	2.584	2.299	2.643	2.437	2.3	>
2.3.2.5.3	Nilai Investasi	Rupiah (Ribu)	72.245.922	656.555.215,5	117.700.035	135.355.040	124.797.346	130.000.000	<
2.3.2.5.4	Nilai Produksi Sektor Industri	Jutaan Rupiah	51.743.162,7	54.696.836,5	58.374.043,5	62.147.131,6	61.896.361,3	63.318.425,3	<
2.3.2.6	Transmigrasi								

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.2.6.1	Jumlah kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi (komulatif)	Lokasi	8	8	n/a	n/a	n/a	8	<
2.3.2.6.2	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	KK	10	n/a	4	n/a	n/a	8	>
2.3.3	Penunjang Urusan								
2.3.3.1	Perencanaan Pembangunan								
2.3.3.1.1	Nilai SAKIP Perencanaan	Nilai	Ada	n/a	n/a	22.75	23.62	22	>
2.3.3.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.3.3.1.3	Ketepatan waktu penyusunan LKPJ Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	>
2.3.3.2	Keuangan								
2.3.3.2.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	11,57	10,49	-19,17	5,96	7,56	7,56	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.3.2.2	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.3.3.2.3	Penyampaian Bahan Raperda APBD tepat waktu	Peraturan	1	1	1	1	1	1	=
2.3.3.2.4	Penyampaian Bahan Raperda P-APBD tepat waktu	Peraturan	1	1	1	1	1	1	=
2.3.3.2.5	SKPD yang melaksanakan administrasi BMD dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	=
2.3.3.2.6	Presentase Laporan Keuangan sesuai standart akuntansi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	=
2.3.3.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
2.3.3.3.1	Jumlah seluruh pejabat struktural	Jumlah	1092	1093	1006	976	n/a	976	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.3.3.2	Persentase ASN yang pernah mengikuti Pendidikan & Latihan Struktural	%	65,75	69,53	82,50	89,13	n/a	89,13	=
2.3.3.3.3	Jumlah seluruh pegawai peserta ujian dinas TK.I	Jumlah	19	35	31	29	n/a	29	=
2.3.3.3.4	Jumlah seluruh pegawai peserta ujian dinas TK.II	Jumlah	0	0	2	2	n/a	2	=
2.3.3.3.5	Jumlah seluruh pegawai peserta penyesuaian ijazah	Jumlah	224	51	32	0	n/a	0	=
2.3.3.3.6	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	70.2	70.2	=
2.3.3.4	Penelitian dan Pengembangan								
2.3.3.4.1	Jumlah Penelitian yang Dilakukan Penelitian	Penelitian	14	8	4	5	n/a	5	=
2.3.3.4.2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.3.3.5	Pengawasan								

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.3.5.1	Presentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan (Tindak Lanjut Tuntas (TS))	%	94,56	95,95	98,70	98,24	97,63	97,63	=
2.3.3.6	Sekretariat Dewan								
2.3.3.6.1	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	%	104,5	58	66	90	n/a	90	=
2.3.3.6.2	Presentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil di fasilitasi	%	75	33	58	69	100	100	=
2.3.3.7	Sekretariat Daerah								
2.3.3.7.1	Persentase UPP yang memiliki SPP dan IKM (target UPP = 250UPP (tahun 2018 target UPP = 250 UPP))	%	95,59	93,83	92,21	n/a	n/a	92,21	<
2.3.3.7.2	Peningkatan jumlah mitra kerjasama daerah	MoU	13	20	24	28	n/a	28	>
2.3.3.7.3	Ketepatan waktu penyusunan LPPD	%	100	100	100	n/a	n/a	100	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.3.7.4	Persentase proyek fisik yang dimonitoring	%	80,65	87,96	63,89	76,66	n/a	76,67	<
2.3.3.7.5	NILAI SAKIP	Nilai	65,65 (B)	72,65 (BB)	72,70 (BB)	75,02 (BB)	n/a	75,02 (BB)	<
2.3.3.7.6	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai	81,00	82,35	83,65	84,75	n/a	85,75	>
2.3.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
2.3.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
2.3.4.2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita								
2.3.4.2.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/bln)	Rp/bln	791.986	904.062	n/a	n/a	n/a	904.062	=
2.3.4.2.2	Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita (%)	%	45,66	45,16	n/a	n/a	n/a	45,16	=
2.3.4.2.3	Produktivitas total daerah (Rp. Juta/angka kerja)	Rp. Juta/ angka kerja	n/a	152,54	n/a	n/a	n/a	152,54	=

Koding Gambaran Umum	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
	Pembangunan Daerah		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.4.3	Nilai Tukar Petani	Nilai	104,13	n/a	n/a	n/a	n/a	105	<
2.3.4.4	Daya Beli								
2.3.4.4.1	Indeks Daya Beli	Indeks	0,69	0,69	n/a	n/a	n/a	0.69	=
2.3.5	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
2.3.5.1	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	n/a	n/a	n/a	7.18	7.91	7.91	=
2.3.5.2	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	88,51	96,95	98,7	98,90	98,99	98,90	>
2.3.6	Fokus Iklim Berinvestasi	Rp	17.093.259. 895.706	17.866.326.9 30.105	9.655.229.12 1.273	18.944.471.13 1.733	10,03	10.03	=



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara, sehingga prinsip yang terkandung didalam pengelolaan keuangan daerah masih terintegrasi dengan keberadaan Undang-undang di bidang keuangan Negara seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan pengaturan yang komprehensif yang mampu mengakomodir serta mensinkronkan seluruh pengaturan mengenai aspek pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian serta memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Gambaran pengelolaan keuangan membahas mengenai analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, juga menganalisis perkembangan neraca daerah yang meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah perlu diketahui sebagai dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas: a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; dan c) Pembiayaan Daerah. Aspek Penerimaan Daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Aspek Pengeluaran Daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016-2020 ditampilkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	2.821.450.055.077,31	3.063.765.802.811,66	3.187.963.233.913,07	3.368.808.544.577,79	3.217.081.717.078,40	3,46
1.1	Pendapatan Asli Daerah	480.758.720.671,31	759.945.807.967,66	614.302.515.368,07	650.889.114.689,79	700.151.909.602,40	13,11
1.1.1	Pajak Daerah	239.596.481.121,96	383.743.763.642,93	357.264.301.332,79	364.181.321.493,99	360.889.758.442,02	13,57
1.1.2	Retribusi Daerah	46.002.640.748,00	41.354.143.308,33	40.328.017.626,33	51.893.891.085,33	34.236.693.406,00	-4,48
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	2.532.857.295,00	4.532.637.901,00	4.437.658.869,00	4.654.760.005,00	4.724.719.096,00	20,81
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	192.626.741.506,35	330.315.263.115,40	212.272.537.539,95	230.159.142.105,47	300.300.738.658,38	18,67
1.2	Pendapatan Transfer	2.245.784.424.640,00	2.273.944.406.869,00	2.450.834.158.545,00	2.559.411.338.278,00	2.352.250.387.009,00	1,34
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.087.984.077.197,00	2.080.303.031.668,00	2.185.098.553.219,00	2.307.091.406.493,00	2.137.265.579.626,00	0,72
1.2.2	Transfer antar - daerah	157.800.347.443,00	193.641.375.201,00	265.735.605.326,00	252.319.931.785,00	214.984.807.383,00	10,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	94.906.909.766,00	29.875.587.975,00	122.826.560.000,00	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	68,89
1.3.1	Hibah	34.162.409.766,00	7.706.787.975,00	122.826.560.000,00	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	362,31
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60.744.500.000,00	22.168.800.000,00	0	0	0	0
2	BELANJA	3.159.908.257.412,58	3.100.211.150.695,90	3.140.572.335.212,71	3.244.331.996.857,72	3.238.383.232.383,24	0,63

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1	Belanja Operasi	1.912.319.551.253,37	2.118.389.196.269,73	2.122.361.640.176,71	2.135.455.490.400,23	2.070.414.873.308,96	2,13
2.1.1	Belanja Pegawai	1.129.377.649.344,73	1.116.467.515.821,81	1.008.704.137.648,21	1.025.912.267.478,00	1.203.142.213.892,00	2,04
2.1.2	Belanja barang dan jasa	677.317.121.647,64	699.216.871.500,45	902.421.347.105,50	920.158.827.930,23	706.180.335.963,96	2,75
2.1.3	Belanja bunga	0	0	0	0	0	
2.1.4	Belanja subsidi	0	0	0	0	0	
2.1.5	Belanja Hibah	91.230.627.250,00	280.449.551.887,47	185.923.583.493,00	158.852.439.992,00	126.307.448.453,00	34,66
2.1.6	Belanja bantuan sosial	13.250.602.828,00	21.321.974.000,00	25.312.571.930,00	30.531.955.000,00	34.784.875.000,00	28,54
	Belanja bantuan keuangan	1.143.550.183,00	933.283.060,00	0	0	0	0
2.2	Belanja Modal	838.440.054.781,83	492.094.079.745,17	447.987.653.723,00	447.027.934.716,49	352.127.050.135,28	-17,92
2.2.1	Belanja Tanah	3.411.545.750,00	5.274.964.240,00	1.711.996.880,00	2.731.441.464,00	28.408.220,00	-13,08
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	165.374.656.316,00	74.255.175.359,00	68.976.281.207,00	105.226.322.192,00	114.363.487.979,20	-0,24
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	276.467.874.029,00	137.689.077.498,17	92.100.504.580,00	141.999.251.910,00	94.332.201.680,00	-15,67
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	382.203.075.006,93	247.791.872.494,00	265.003.376.242,00	191.066.074.390,49	135.206.224.587,00	-21,33
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	10.982.903.679,90	27.082.990.154,00	20.195.494.814,00	6.004.844.760,00	8.196.727.669,08	21,85
2.2.6	Belanja aset lainnya						
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.879.496.918,38	9.922.769.609,00	8.914.516.820,00	11.078.322.907,00	172.098.662.694,00	384,09
2.4	Belanja transfer	403.269.154.459,00	479.805.105.072,00	561.308.524.493,00	650.770.248.834,00	643.742.646.245,00	12,71
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	29.939.419.393,00	36.693.623.297,00	40.449.445.359,00	45.764.322.634,00	43.341.894.789,00	10,16

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	373.329.735.066,00	443.111.481.775,00	520.859.079.134,00	605.005.926.200,00	600.400.751.456,00	12,91
3	Pembiayaan	518.957.074.698,35	176.390.949.863,08	130.578.300.360,84	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27	3,56
3.1	Penerimaan Pembiayaan	543.355.118.167,35	180.498.872.363,08	139.907.151.978,84	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27	1,97
3.1.1	SiLPA	543.331.118.167,35	180.498.872.363,08	139.907.151.978,84	177.969.199.061,20	302.450.746.781,27	1,97
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	24.000.000,00		0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	5.000.000,00	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	24.398.043.469,00	4.107.922.500,00	9.328.851.618,00	0	0	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal daerah	24.398.043.469,00	4.107.922.500,00	9.328.851.618,00	0	0	0



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perautran perundang-undangan	0	0	0	0	0	0

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayan Persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	2.821.450.055.077,31	3.063.765.802.811,66	3.187.963.233.913,07	3.368.808.544.577,79	3.217.081.717.078,40	3,46
1.1	Pendapatan Asli Daerah	480.758.720.671,31	759.945.807.967,66	614.302.515.368,07	650.889.114.689,79	700.151.909.602,40	13,11
1.1.1	Pajak Daerah	239.596.481.121,96	383.743.763.642,93	357.264.301.332,79	364.181.321.493,99	360.889.758.442,02	13,57
1.1.2	Retribusi Daerah	46.002.640.748,00	41.354.143.308,33	40.328.017.626,33	51.893.891.085,33	34.236.693.406,00	-4,48
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	2.532.857.295,00	4.532.637.901,00	4.437.658.869,00	4.654.760.005,00	4.724.719.096,00	20,81
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	192.626.741.506,35	330.315.263.115,40	212.272.537.539,95	230.159.142.105,47	300.300.738.658,38	18,67
1.2	Pendapatan Transfer	2.245.784.424.640,00	2.273.944.406.869,00	2.450.834.158.545,00	2.559.411.338.278,00	2.352.250.387.009,00	1,34
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.087.984.077.197,00	2.080.303.031.668,00	2.185.098.553.219,00	2.307.091.406.493,00	2.137.265.579.626,00	0,72
1.2.2	Transfer antar - daerah	157.800.347.443,00	193.641.375.201,00	265.735.605.326,00	252.319.931.785,00	214.984.807.383,00	10,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	94.906.909.766,00	29.875.587.975,00	122.826.560.000,00	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	68,89
1.3.1	Hibah	34.162.409.766,00	7.706.787.975,00	122.826.560.000,00	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	362,31
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60.744.500.000,00	22.168.800.000,00	0	0	0	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan data selama tahun 2016-2020 perkembangan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2016, total pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.821.450.055.077,31. Angka tersebut terus mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut hingga 2019 mencapai angka Rp. 3.368.808.544.577,79. Namun pada tahun 2020 total pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan menurun menjadi Rp. 3.217.081.717.078,40 atau dengan penurunan 4,5% dari tahun sebelumnya. Naik turunnya perekonomian di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam grafik berikut:

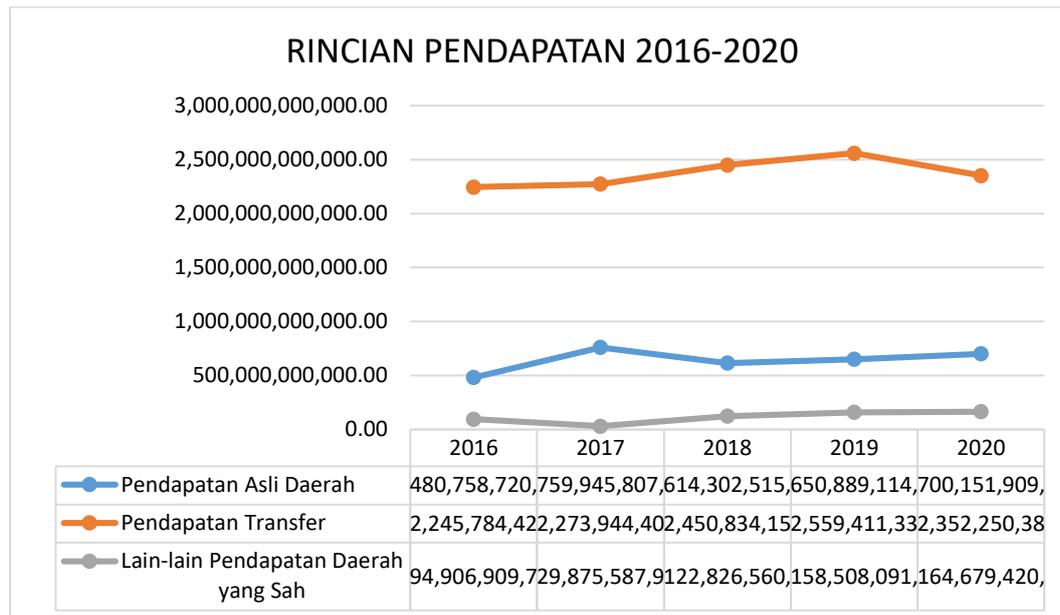


Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pada periode tersebut pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan fluktuatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 13,11%. PAD pada tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat cukup signifikan dengan pertumbuhan 58%, yakni dari Rp. 480758720671,31 menjadi Rp. 759945807967,66. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 19,16 % dari tahun sebelumnya dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 5,96 % dan 7,57% di tahun 2020. Hal tersebut sama halnya dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir untuk pendapatan transfer Kabupaten Pasuruan hampir setiap tahun mengalami peningkatan kecuali tahun terakhir, di tahun 2020 terjadi penurunan 8,1% dari tahun sebelumnya. Pada Lain-lain pendapatan yang sah terjadi penurunan pada tahun 2017 dengan penurunan 68,9% dari tahun 2016, namun pada 3

tahun terakhir yakni tahun 2018-2020 lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 114,7%. Sehingga realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 mencapai Rp. 164.679.420.467,00.



Grafik 3.2 Rincian Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan Grafik 3.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020 masih di dominasi oleh Pendapatan Transfer. Selanjutnya di urutan kedua adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada pendapatan transfer, pendapatan terbesar didominasi oleh Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata pertumbuhan 0,72% dalam 5 tahun terakhir. Namun secara keseluruhan, pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah memiliki rata-rata pertumbuhan 1,34%.

B. Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pilihan menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Pasuruan. Perkembangan realisasi belanja Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	3.159.908.257.412,58	3.100.211.150.695,90	3.140.572.335.212,71	3.244.331.996.857,72	3.238.383.232.383,24	0,63
2.1	Belanja Operasi	1.912.319.551.253,37	2.118.389.196.269,73	2.122.361.640.176,71	2.135.455.490.400,23	2.070.414.873.308,96	2,13
2.1.1	Belanja Pegawai	1.129.377.649.344,73	1.116.467.515.821,81	1.008.704.137.648,21	1.025.912.267.478,00	1.203.142.213.892,00	2,04
2.1.2	Belanja barang dan jasa	677.317.121.647,64	699.216.871.500,45	902.421.347.105,50	920.158.827.930,23	706.180.335.963,96	2,75
2.1.3	Belanja bunga	0	0	0	0	0	
2.1.4	Belanja subsidi	0	0	0	0	0	
2.1.5	Belanja Hibah	91.230.627.250,00	280.449.551.887,47	185.923.583.493,00	158.852.439.992,00	126.307.448.453,00	34,66
2.1.6	Belanja bantuan sosial	13.250.602.828,00	21.321.974.000,00	25.312.571.930,00	30.531.955.000,00	34.784.875.000,00	28,54
	Belanja bantuan keuangan	1.143.550.183,00	933.283.060,00	0	0	0	0
2.2	Belanja Modal	838.440.054.781,83	492.094.079.745,17	447.987.653.723,00	447.027.934.716,49	352.127.050.135,28	-17,92
2.2.1	Belanja Tanah	3.411.545.750,00	5.274.964.240,00	1.711.996.880,00	2.731.441.464,00	28.408.220,00	-13,08
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	165.374.656.316,00	74.255.175.359,00	68.976.281.207,00	105.226.322.192,00	114.363.487.979,20	-0,24
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	276.467.874.029,00	137.689.077.498,17	92.100.504.580,00	141.999.251.910,00	94.332.201.680,00	-15,67
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	382.203.075.006,93	247.791.872.494,00	265.003.376.242,00	191.066.074.390,49	135.206.224.587,00	-21,33
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	10.982.903.679,90	27.082.990.154,00	20.195.494.814,00	6.004.844.760,00	8.196.727.669,08	21,85
2.2.6	Belanja aset lainnya						
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.879.496.918,38	9.922.769.609,00	8.914.516.820,00	11.078.322.907,00	172.098.662.694,00	384,09
2.4	Belanja transfer	403.269.154.459,00	479.805.105.072,00	561.308.524.493,00	650.770.248.834,00	643.742.646.245,00	12,71
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	29.939.419.393,00	36.693.623.297,00	40.449.445.359,00	45.764.322.634,00	43.341.894.789,00	10,16

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(RP)	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	373.329.735.066,00	443.111.481.775,00	520.859.079.134,00	605.005.926.200,00	600.400.751.456,00	12,91

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021



Grafik 3.3 Total Belanja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Belanja daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokkan ke dalam Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dan terakhir adalah Belanja transfer yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selama empat tahun belanja operasi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 belanja operasi sebesar Rp. 1.912.319.551.253,37 dan di tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 2.135.455.490.400,23 dengan pertumbuhan 3,87%. Namun pada tahun 2020 belanja operasi mengalami penurunan 3,04% dari tahun sebelumnya yakni dengan total belanja operasi tahun 2020 Rp. 2.070.414.873.308,96.

Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jalan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Tahun 2017 Belanja modal menurun sebesar 41,03 % dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 492.094.079.745,17. Penurunan ditahun 2017 diikuti dengan tahun-tahun sesudahnya, yakni terjadi kecenderungan menurun meskipun tidak signifikan dari tahun 2018 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan

21,23% dari tahun 2019, dari Rp. 447.027.934.716,49 menjadi Rp. 352.127.050.135,28. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja modal Kabupaten Pasuruan pada 5 tahun terakhir adalah -17,92%.

Pada Belanja tidak terduga selama 5 tahun pada dasarnya terjadi peningkatan. Hanya saja sempat menurun di tahun 2018 sebesar 10,16 % dari angka Rp. 9.922.769.609 menjadi Rp. 8.914.516.920. Di tahun 2019 belanja tidak terduga meningkat lagi sebesar 24,27% menjadi Rp. 11.078.322.907. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020 dengan pertumbuhan belanja tidak terduga dari tahun 2019 mencapai 1453,88% dengan angka perbandingan ditahun sebelumnya Rp. 11.078.322.907,00 menjadi Rp. 172.098.662.694,00 di tahun 2020. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja tidak terduga Kabupaten Pasuruan pada 5 tahun terakhir adalah 384,1%. Selanjutnya adalah belanja transfer yang terdiri belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer selama 5 tahun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 12,71 %.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan perangkat daerah.

Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Uraian						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Pembiayaan	518.957.074.698,35	176.390.949.863,08	130.578.300.360,84	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27	3,56
3.1	Penerimaan Pembiayaan	543.355.118.167,35	180.498.872.363,08	139.907.151.978,84	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27	1,97
3.1.1	SiLPA	543.331.118.167,35	180.498.872.363,08	139.907.151.978,84	177.969.199.061,20	302.450.746.781,27	1,97
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	24.000.000,00		0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	5.000.000,00	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	24.398.043.469,00	4.107.922.500,00	9.328.851.618,00	0	0	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal daerah	24.398.043.469,00	4.107.922.500,00	9.328.851.618,00	0	0	0

No	Uraian						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perautran perundang-undangan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Memperhatikan Tabel 3.4 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan pada 5 tahun terakhir fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2016 total realisasi pembiayaan di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp. 518.957.074.698,35 dan menurun 66,01% di tahun 2017 yakni menjadi Rp. 176.390.949.863,08. Pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan jumlah realisasi realisasi pembiayaan sejumlah 25,97% menjadi Rp. 130.578.300.360,84. Tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi masing-masing tahunnya sebanyak 36,30% dan 69,94%. Sehingga rata-rata pertumbuhan pembiayaan Kabupaten Pasuruan pada 5 tahun terakhir menjadi 3,56%.

Penerimaan pembiayaan di dominasi oleh SiLPA dengan rata-rata pertumbuhan pada 5 tahun terakhir adalah 1,97, dan hanya ada penerimaan pembiayaan dari sumber lain yakni penerimaan pinjaman daerah di tahun 2016 sebesar Rp. 24.000.000,00 dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00. Selain itu tidak ada penerimaan pembiayaan dari sumber lain. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan di dominasi oleh penyertaan modal daerah dan itupun terjadi di tahun 2016 hingga tahun 2018 dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 penyertaan modal daerah mencapai Rp. 24.398.043.469,00 dan terjadi penurunan ditahun berikutnya menjadi Rp.4.107.922.500 yakni tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi Rp.9.328.851.618. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan.

3.1.2 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Keuangan Daerah menjelaskan bahwa neraca adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu.

Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2016-2020 seperti terlihat tabel berikut dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca daerah Kabupaten Pasuruan 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan %
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR	319.130.908.030,01	317.748.563.049,91	342.418.580.689,06	506.825.763.310,44	534.899.766.002,76	15,22
1.1.1	Kas	181.772.857.337,19	141.727.207.620,84	178.121.228.156,39	302.842.907.853,09	281.153.738.094,43	16,62
1.1.3	Piutang	103.683.635.143,49	128.472.682.066,85	106.953.089.471,12	153.987.671.736,91	157.694.124.966,75	13,38
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	214.565.361,09	330.078.573,92	345.184.647,83	474.457.724,33	604.361.449,44	30,81
1.1.7	Persediaan	33.459.850.188,24	47.218.594.788,30	56.999.078.413,72	49.520.725.996,11	95.447.541.492,14	35,36
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	82.672.092.651,52	87.309.938.306,05	98.760.604.344,72	99.127.603.810,69	100.355.462.455,37	5,08
1.2.1	Investasi Permanen	82.672.092.651,52	87.309.938.306,05	98.760.604.344,72	99.127.603.810,69	100.355.462.455,37	5,08
1.3	ASET TETAP	2.831.878.972.915,26	3.274.598.844.590,89	3.517.787.000.663,00	3.644.596.070.255,20	3.736.715.785.927,29	7,30
1.3.1	Tanah	572.559.448.761,00	920.071.876.969,83	1.026.832.975.639,33	1.029.451.916.603,33	1.032.222.721.482,33	18,20
1.3.2	Peralatan dan Mesin	856.649.285.277,17	877.107.160.881,00	950.319.724.114,00	1.061.137.230.510,00	1.201.864.635.828,73	8,91
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.359.223.794.975,97	1.487.621.579.680,88	1.589.219.780.325,31	1.757.771.052.781,94	1.876.455.512.362,07	8,40
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.368.342.009.717,13	1.612.699.966.909,41	1.876.735.057.542,02	2.038.114.053.287,47	2.174.110.996.475,18	12,37
1.3.5	Aset tetap lainnya	57.927.669.843,95	62.524.349.384,10	65.941.302.932,10	67.110.721.582,10	67.585.775.389,18	3,97
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	107.349.850.719,13	9.989.546.362,86	18.837.688.411,87	5.520.517.344,00	6.377.434.985,00	-14,32
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.490.173.086.379,09	-1.695.415.635.597,19	-2.010.099.528.301,63	-2.314.509.421.853,64	-2.621.901.290.595,20	15,19

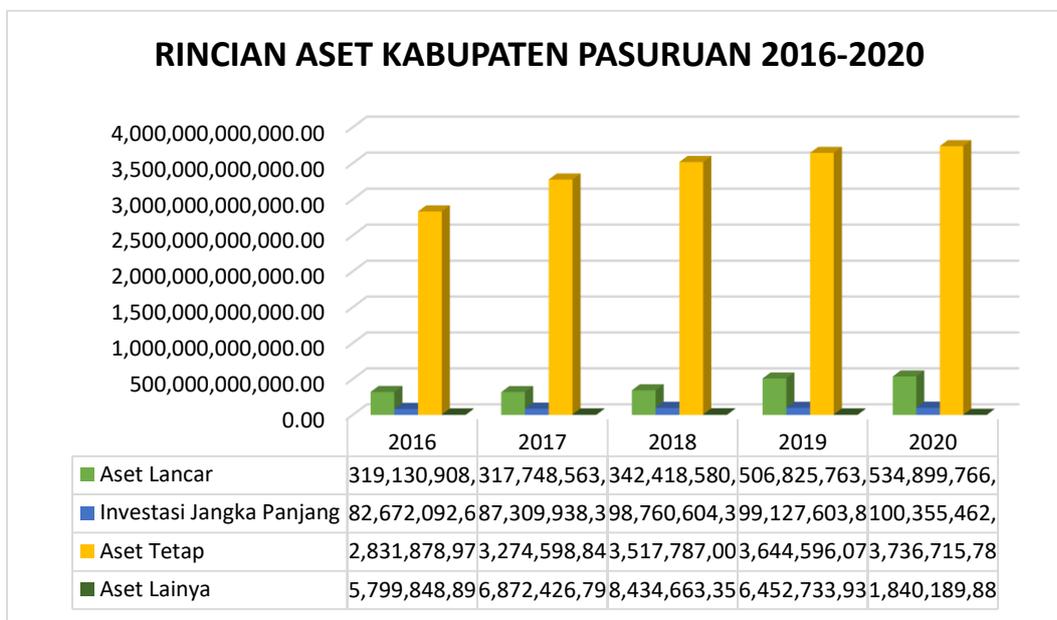


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan %
1.4	ASET LAINNYA	5.799.848.895,28	6.872.426.795,92	8.434.663.359,42	6.452.733.932,76	1.840.189.882,30	-13,44
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	19.790.625,00	0	49.611.666,00	26.356.469,34	4.283.333,67	0,00
1.4.3	Kemitraan dengan pihak <i>ketiga</i>	0	0	0	106.462.967,00	0	
1.4.4	Aset tak berwujud	482.045.900,00	1.773.490.400,00	1.422.538.700,00	1.439.375.800,00	831.553.500,00	51,76
1.4.5	Aset lain-lain	5.298.012.370,28	5.098.936.395,92	6.962.512.993,42	4.880.538.696,42	1.004.353.048,63	-19,13
	JUMLAH ASET DAERAH	3.239.481.822.492,07	3.686.529.772.742,77	3.967.400.849.056,20	4.257.002.171.309,09	4.373.811.204.267,72	7,86
2.	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.613.417.950,62	21.630.719.153,80	21.618.909.495,97	37.969.850.179,15	38.432.657.608,59	28,83
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	966.079.814,75	1.781.570.562,00	152.029.095,19	392.161.071,82	4.506.618,00	13,01
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0	0	0	0	0	
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	2.755.496.722,87	2.804.027.922,80	3.357.462.309,18	3.087.002.311,73	2.609.872.810,99	-0,50
2.1.4	Utang belanja	11.598.758.859,00	14.364.150.061,00	14.380.439.255,00	28.531.000.842,00	33.983.925.398,00	35,36
2.1.5	Utang jangka pendek lainnya	293.082.554,00	90.072.300,00	1.542.207.550,60	5.626.737.381,60	1.834.352.781,60	435,10
2.1.6	Utang Pihak ketiga lainnya	0	2.590.898.308,00	2.186.771.286,00	332.948.572,00	0	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan %
3.	EKUITAS DANA	3.223.868.404.541,45	3.664.899.053.588,97	3.945.781.939.560,23	4.219.032.321.129,94	4.335.378.546.659,13	7,76
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	-	-	-	-	-	
3.1.1	SILPA	0	0	0	0	0	
3.1.2	Cadangan Piutang	0	0	0	0	0	
3.1.3	Cadangan Persediaan	0	0	0	0	0	
3.1.4	Lain-lainnya	0	0	0	0	0	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	-	-	-	-	-	
3.2.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	0	0	0	0	0	
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0	0	0	0	0	
3.2.3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	0	0	0	0	0	
3.2.4	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0	0	0	0	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.239.481.822.492,07	3.686.529.772.742,77	3.967.400.849.056,20	4.257.002.171.309,09	4.373.811.204.267,72	7,86

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, dan (4) aset lainnya. Tahun 2016, Kabupaten Pasuruan memiliki aset senilai Rp. 3.239.481.822.492,07 dan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 9,86 % pertahun sehingga pada 2020 total aset Kabupaten Pasuruan mencapai Rp. 4.373.811.204.267,72. Jumlah aset terbesar berada pada aset tetap yang mencapai angka sebesar Rp. 3.736.715.785.927,29 di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 7,30 %. Berikut rincian aset pemerintah Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.



Grafik 3.4 Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2016-2020
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Namun pada Kabupaten Pasuruan hanya memuat kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 38.432.657.608,59 dengan jumlah tertinggi didominasi oleh utang belanja. Dari tahun 2016-2020, jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus meningkat kecuali di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,05%. Di tahun 2016 kewajiban jangka pendek

Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 15.613.417.950,62 dan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 38.432.657.608,59 dengan rata-rata pertumbuhan 28,83 %. Berikut dapat dilihat grafik kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasuruan :



Grafik 3.5 Rincian kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2016-2020
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, dan (2) Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Nilai ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 mencapai Rp. 4.335.378.546.659,13 dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2016-2020 adalah 7,76 %.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Idealnya, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran mengenai belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi realisasi belanja di periode tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan belanja ditahun berikutnya, sebagai berikut:

3.2.1.1 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan gambaran tentang belanja daerah yang disajikan menggunakan perbandingan realisasi dan anggaran belanja ditahun sebelumnya.

Tabel 3.6 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

No.	Uraian	2018			2019			2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Operasi		2.122.361.640.176,71			2.135.455.490.400,23		2.248.192.173.286,73	2.070.414.873.308,96	92%
1	Belanja Pegawai		1.008.704.137.648,21			1.025.912.267.478,00		1.046.738.603.167,65	1.203.142.213.892,00	115%
2	Belanja Barang dan Jasa		902.421.347.105,50			920.158.827.930,23		1.030.038.813.835,18	706.180.335.963,96	69%
3	Belanja Bunga		0			0			0	
4	Belanja Subsidi		0			0			0	
5	Belanja Hibah		185.923.583.493,00			158.852.439.992,00		132.392.381.283,90	126.307.448.453,00	95%
6	Belanja Bantuan Sosial		25.312.571.930,00			30.531.955.000,00		39.022.375.000,00	34.784.875.000,00	89%
7	Belanja Bantuan Keuangan		0			0		0	0	
B	Belanja Modal		447.987.653.723,00			447.027.934.716,49		400.536.960.202,53	352.127.050.135,28	88%
1	Belanja Tanah		1.711.996.880,00			2.731.441.464,00			28.408.220,00	
2	Belanja Peralatan dan Mesin		68.976.281.207,00			105.226.322.192,00			114.363.487.979,20	
3	Belanja Bangunan dan gedung		92.100.504.580,00			141.999.251.910,00			94.332.201.680,00	
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jalanan		265.003.376.242,00			191.066.074.390,49			135.206.224.587,00	
5	Belanja Aset tetap lainnya		20.195.494.814,00			6.004.844.760,00			8.196.727.669,08	
6	Belanja Aset Lainnya									
C	Belanja Tidak Terduga		8.914.516.820,00			11.078.322.907,00		191.494.770.000,00	172.098.662.694,00	90%
D	Belanja Transfer		561.308.524.493,00			650.770.248.834,00		654.507.174.395,02	643.742.646.245,00	98%
1	Belanja Bagi Hasil		40.449.445.359,00			45.764.322.634,00		43.406.157.391,02	43.341.894.789,00	100%
2	Belanja Bantuan Keuangan		520.859.079.134,00			605.005.926.200,00		611.101.017.004,00	600.400.751.456,00	98%

3.2.1.2 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan perbandingan jumlah total belanja untuk kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran daerah di tahun penganggaran. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja Untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2017	1.587.986.637.680,98	3.104.319.073.195,90	51,15
2	Tahun Anggaran 2018	1.587.593.547.368,21	3.149.901.186.830,71	50,4
3	Tahun Anggaran 2019	1.632.198.746.966,49	3.244.331.996.857,72	50,31
4	Tahun Anggaran 2020	1.469.988.207.183,24	3.238.383.232.383,24	45

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode 2017-2019, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.587.986.637.680,98, di tahun 2018 menurun menjadi Rp. 1.587.593.547.368,21 dan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi Rp. 1.632.198.746.966,49. Setelah terjadi peningkatan di tahun sebelumnya pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dengan total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Rp. 1.469.988.207.183,24. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur bersifat fluktuatif.



Grafik 3.6 Persentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan grafik yaitu persentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan. Di tahun 2017 persentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja sebesar 51,15% dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 45 %. Hal ini menunjukkan apabila jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun, berarti alokasi belanja yang semakin bertambah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit/surplus anggaran pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kurun tahun 2017-2019 dapat digambarkan pada Tabel berikut

Tabel 3.8 Surplus (Defisit Riil) Anggaran Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	(2018) Rp.	(2019) Rp.	(2020) Rp.
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.187.963.233.913,07	3.368.808.544.577,79	3.217.081.717.078,40
2	Belanja Daerah	3.140.572.335.212,71	3.244.331.996.857,72	3.238.383.232.383,24
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.328.851.618	0	0
	Defisit riil	38.062.047.082,36	124.476.547.720,07	-21.301.515.304,84

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan tabel defisit riil anggaran di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah dari 2018-2020 mengalami peningkatan yang signifikan ditunjukkan dengan data pada tahun 2018 pada perhitungan defisit riil anggaran Kabupaten Pasuruan surplus Rp. 38.062.047.082,36 dan meningkat menjadi Rp. 124.476.547.720,07 di tahun 2020. Besarnya surplus anggaran pada tahun 2018 dan 2019 menandakan rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah mencerminkan kinerja anggaran yang tidak optimal. Anggaran pendapatan daerah harusnya diserap secara optimal oleh pemerintah daerah, dengan demikian diharapkan dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat. Berputarnya perekonomian daerah pada tahap berikutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada tahun 2020 defisit riil anggaran berada pada angka minus Rp.21.301.515.304,84. Belanja selama 2 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018 Belanja daerah berjumlah Rp. 3.140.572.335.212,71 dan tahun 2019 berjumlah Rp. 3.244.331.996.857,72. Penurunan terjadi ditahun 2020 menjadi Rp.3.238.383.232.383,24. Selanjutnya dari pengeluaran pembiayaan daerah pada 2 tahun terakhir tidak ada sama sekali atau 0 rupiah. Pengeluaran pembiayaan terakhir ada di tahun 2018 dengan jumlah Rp. 9.328.851.618. Angka minus pada defisit anggaran jelas dikarenakan oleh jumlah pendapatan yang menurun pada tahun 2020, sehingga tidak dapat menutup jumlah realisasi belanja yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan.

Jumlah pendapatan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.187.963.233.913,07 dan meningkat ditahun berikutnya menjadi Rp.

3.368.808.544.577,79. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan menjadi Rp. 3.217.081.717.078,4 atau menurun sebanyak 4,5%. Minus dalam perhitungan defisit riil anggaran tahun 2020 karena jumlah realisasi belanja yakni Rp. 3.238.383.232.383,24 tidak dapat ditutup dengan realisasi pendapatan yang sebesar Rp. 3.217.081.717.078,4.

Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No	Uraian	Proporsi dari total defisit Riil		
		2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	139.945.601.978,84	177.969.199.061,20	302.450.746.781,27
2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	5.000.000,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Penutup defisit riil anggaran Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di dominasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya. SiLPA pada tahun 2018 yang digunakan sebagai penutup defisit sejumlah Rp. 139.945.601.978,84 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020 yakni berjumlah Rp. 302.450.746.781,27. Selain bersumber dari SiLPA, Penutup defisit riil anggaran Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 juga di dapat dari penerimaan piutang Daerah sebesar Rp. 5.000.000,00. Selain itu tidak terdapat sumber lain dalam menutup defisit riil atas belanja dan pengeluaran pembiayaan dibanding dengan pendapatn.

Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	139.945.601.978,84	100	177.969.199.061,20	100	302.450.746.781,27	100
2	Pelampauan Penerimaan PAD	47.747.050.133,66	34,12	18.334.871.410,07	10,30	(33.230.573.620,42)	(10,99)
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(112.081.762.697,23)	(80,09)	(47.567.329.894,53)	(26,73)	(125.230.280.414,45)	(41,41)
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(35.528.251.116,00)	(25,39)	(41.280.898.154,16)	(23,20)	3.242.056.895,00	1,07
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	239.808.565.658,41	171,36	248.482.555.699,82	139,62	457.669.543.921,14	151,32
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2018-2020), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, kondisi SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) fluktuatif. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

3.2.2 Pembiayaan Non Pemerintah

Penggunaan APBD Kabupaten Pasuruan dipergunakan pula dalam menunjang kegiatan BUMD yang melalui proses perencanaan dan penganggaran. Tujuan penyertaan modal kepada BUMD memiliki tujuan diantaranya: a) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian; b) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; serta c) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Nilai penyertaan modal kepada pihak ketiga Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Penyertaan Modal Pihak Ketiga

NO.	PIHAK PENERIMA	REALISASI
1.	PT. Bank Jatim	Rp. 11.152.625.000,00
2.	PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan	Rp. 42.485.609.278,00
3.	PT. BPR Mina Mandiri	Rp. 4.400.000.000,00
4.	PT. BPR Jatim	Rp. 560.000.000,00
5.	PDAM Kab. Pasuruan	Rp. 42.951.203.928,00
Total		Rp. 101.549.438.206,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Realisasi penyertaan modal kepada pihak ketiga Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2020 dilaksanakan kepada 5 BUMD terdiri dari: 1) PT. Bank Jatim dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 11.152.625.000,00; 2) PT. Jalan Tol Kabupaten

Pasuruan dengan penyertaan modal sebesar Rp. 42.485.609.278,00; 3) PT. BPR Bina Mandiri dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 4.400.000.000,00; 4) PT. BPR Jatim dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 560.000.000,00; dan 5) PDAM Kabupaten Pasuruan dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 42.951.203.928,00. Total keseluruhan jumlah penyertaan modal kepada BUMD Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2020 adalah senilai Rp. 101.549.438.206,00.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2021	%	PROYEKSI 2022	%	PROYEKSI 2023	%
1	PENDAPATAN	3.277.918.264.191,00	0,1	3.336.528.356.189,00	1,79	3.344.328.356.189,00	0,23
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	724.005.471.953,00	2,34	696.001.128.851,00	-3,87	702.001.128.851,00	0,86
1.1.1	Pajak Daerah	420.514.644.254,00	2,57	421.808.713.013,00	0,31	426.808.713.013,00	1,19
1.1.2	Retribusi Daerah	36.792.186.548,00	5,45	36.445.205.718,00	-0,94	35.445.205.718,00	-2,74
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.760.005,00	0	4.654.760.005,00	-	4.654.760.005,00	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	262.043.881.146,00	1,59	233.092.450.115,00	-11,05	235.092.450.115,00	0,86
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.386.634.192.238,00	-0,8	2.479.401.727.338,00	3,89	2.481.201.727.338,00	0,07
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.177.556.176.738,00	-0,64	2.316.179.594.000,00	6,37	2.316.179.594.000,00	-
1.2.2	Transfer Antar - Daerah	209.078.015.500,00	-2,73	163.222.133.338,00	-21,93	165.022.133.338,00	1,1
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	167.278.600.000,00	4,69	161.125.500.000,00	-3,68	161.125.500.000,00	-
1.3.1	Hibah	36.165.000.000,00	61,1	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	131.113.600.000,00	-4,08	161.125.500.000,00	22,89	161.125.500.000,00	-
2	BELANJA	3.453.882.171.225,00	-4,4	3.408.271.592.106,00	-1,32	3.416.071.592.106,00	0,23
2.1	BELANJA OPERASI	2.287.520.662.996,00	-5,2	2.222.069.321.212,00	-2,86	2.246.188.371.220,00	1,09
2.1.1	Belanja Pegawai	1.174.408.661.531,00	5	1.159.029.309.995,00	-1,31	1.211.730.775.490,00	4,55
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	876.631.351.306,00	-17,3	867.292.628.934,00	-1,07	828.710.213.446,00	-4,45
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2021	%	PROYEKSI 2022	%	PROYEKSI 2023	%
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	195.313.037.177,00	7,55	152.392.382.283,00	-21,98	157.392.382.284,00	3,28
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	41.167.612.982,00	1,71	43.355.000.000,00	5,31	48.355.000.000,00	11,53
2.2	BELANJA MODAL	500.598.581.266,00	31,2	458.894.802.746,00	-8,33	438.894.802.746,00	-4,36
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	0
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	0
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	0
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	0
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	0
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	-87	43.250.000.000,00	73	43.250.000.000,00	-
2.4	BELANJA TRANSFER	640.762.926.963,00	0,58	684.057.468.148,00	6,76	687.738.418.140,00	0,54
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	40.207.474.323,00	7,37	44.704.880.895,00	11,19	42.287.979.645,00	-5,41
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	600.555.452.640,00	1,15	639.352.587.253,00	6,46	645.450.438.495,00	0,95
	SURPLUS / (DEFISIT)	-175.963.907.034,00	-53	71.743.235.917,00	-59,23	-71.743.235.917,00	-
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	180.000.000.000,00	-50	75.000.000.000,00	-58,33	75.000.000.000,00	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	180.000.000.000,00	-50,4	75.000.000.000,00	-58,33	75.000.000.000,00	0
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2021	%	PROYEKSI 2022	%	PROYEKSI 2023	%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.036.093.016,00	147	3.256.764.083,00	-19,31	3.256.764.083,00	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.036.093.016,00	147	3.256.764.083,00	-19,31	3.256.764.083,00	-
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah dan / atau Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	175.963.906.984,00	-53	71.743.235.917,00	-59,23	71.743.235.917,00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

A. Kebijakan Pendapatan

Dari Tabel 3.7 di atas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.7. kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, serta Kabupaten dan Kota.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi

sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021-2024 sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 2 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

3. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.3.2 Penghitungan kerangka pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi prioritas. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil Keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama beberapa tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil Keuangan Daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Data kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan selama beberapa tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	PROYEKSI			
		2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Pendapatan	3.195.537.095.186,01	3.277.918.264.191,00	3.336.528.356.189,00	3.344.328.356.189,00
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai dengan Perda)	0	0	0	0
3	Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran	302.450.746.781,27	180.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
	Total Penerimaan	3.497.987.841.967,28	3.457.918.264.191,00	3.411.528.356.189,00	3.419.328.356.189,00
	Dikurangi :				
4	Belanja Tidak Langsung	0	0	0	0
5	Pengeluaran Pembiayaan	3.256.764.083,00	4.036.093.016,00	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.494.731.077.884,28	3.453.882.171.175,00	3.408.271.592.106,00	3.416.071.592.106,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Tabel 3.14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi			
		2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Kapasitas Riil kemampuan keuangan	3.494.731.077.884,28	3.453.882.171.175,00	3.408.271.592.106,00	3.416.071.592.106,00
1	Prioritas I (60%)	2.096.838.646.730,57	2.072.329.302.705,00	2.044.962.955.263,60	2.049.642.955.263,60
2	Prioritas II (40%)	1.397.892.431.153,71	1.381.552.868.470,00	1.363.308.636.842,40	1.366.428.636.842,40

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dan mengikat yang berhubungan dengan 6 urusan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicate*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitife harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas II berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini diharapkan dapat menjelaskan poin-poin penting dalam 5 (tahun) pembangunan Kabupaten Pasuruan. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah sebuah *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini dengan yang direncanakan, serta hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah dapat terjadi karena adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, peluang yang tidak dimanfaatkan, ancaman yang tidak diantisipasi, serta kelemahan yang tidak diatasi. Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan beberapa standar, misalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional/Target Tahunan di dalam RPJMD/capaian pada tahun sebelumnya, atau tren.

Tujuan adanya perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Urusan Pembangunan Daerah

No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
1	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil, dan Inklusif, serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua	Pendidikan	<p>a) Persentase Angka Putus Sekolah SD 2019 naik dibanding dengan 2018, dari 0,02% menjadi 0,03%. Sementara Angka Putus Sekolah SMP juga naik di tahun 2019 dari 0,02% menjadi 0,21%</p> <p>b) Angka Kelulusan tingkat SD pada tahun 2019 turun dibandingkan 2018, dari 100% menjadi 97,21%. Serta Angka Kelulusan SMP juga menurun di 2019 menjadi 97,33% yang mana di tahun sebelumnya adalah 100%.</p> <p>c) Keterpenuhan sarana buku teks mata pelajaran masih mencapai 70%</p>

No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
			d) Masih adanya 4% atau sekitar 40 SD/MI yang belum memiliki cukup guru. Hal tersebut dikarenakan penempatan tenaga guru yang belum merata dan adanya guru yang telah memasuki masa pensiun dan belum ada penggantinya
		Perpustakaan	a) Belum adanya bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam berbasis teknologi informasi dan komunikasi b) Belum adanya penggalan, pengelolaan, dan pelestarian bahan pustaka naskah kuno c) Koleksi bahan pustaka (cetak dan digital) masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah baru mencapai 26,24%.
2	Menjamin Kehidupan yang Sehat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia	Kesehatan	a) Angka kematian ibu pada 2018 naik menjadi 28 dari tahun 2017 yang sebelumnya di angka 21 kasus b) Turunnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang sebelumnya di tahun 2016-2017 mencapai 99,46% menjadi 99,28% pada 2018 c) Jumlah penderita penyakit TBC masih meningkat d) Belum tercapainya Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) e) Kurangnya kesadaran/ partisipasi masyarakat dalam menerapkan PHBS, dengan angka Rumah Tangga yang menerapkan PHBS masih 47,3% di tahun 2017 f) Jumlah desa yang ODF masih minim, yakni 5,75% atau sekitar 25 desa dari 365 desa/kelurahan
3	Menjamin ketersediaan, dan manajemen air, dan sanitasi secara berkelanjutan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengelolaan sanitasi lingkungan b) Belum optimalnya pelayanan air minum perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air c) Menurunnya persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menjadi 79,50% pada 2019 d) Menurunnya persentase jembatan dalam kondisi baik dari 100% pada 2018 menjadi 81,47% di 2019 e) Pada 2019 capaian drainase dalam kondisi baik masih 26,72%
4	Membuat kota, dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan	Perumahan dan Permukiman	a) Peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat yang tidak dibarengi dengan penyediaan sarana prasarana lingkungan permukiman sehingga menyebabkan kawasan permukiman kumuh baik di perdesaan maupun perkotaan b) Banjir di kawasan permukiman sepanjang Kali Mati yang memerlukan relokasi c) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
		Perhubungan	a) Masih rendahnya kepemilikan KIR angkutan umum b) Rendahnya ketersediaan pelayanan angkutan yang nyaman bagi masyarakat

No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
			<p>c) Tingginya angka kemacetan di wilayah Kabupaten Pasuruan, terutama saat hari libur;</p> <p>d) Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi antar wilayah</p> <p>e) Menurunnya jumlah uji KIR angkutan umum di tahun 2018</p>
5	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi, dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi, dan inovasi untuk negara kurang berkembang, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Komunikasi dan Informatika	<p>a) Terbatasnya Jumlah SDM TIK existing baik PNS maupun Tenaga Lepas yang memiliki keahlian dan Kemampuan pada spesifikasi bidang TIK</p> <p>b) Terbatasnya sarana prasarana lembaga penyiaran publik lokal</p> <p>c) Adanya wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terjangkau sinyal Komunikasi (Blank Spot) dikarenakan kondisi Geografisnya</p>
6	Meningkatkan masyarakat yang inklusif, dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	<p>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>Sosial</p> <p>Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>Kebudayaan</p> <p>Kearsipan</p>	<p>a) Terjadinya konflik di masyarakat yang berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok</p> <p>b) Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya baik pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah</p> <p>c) Masih banyak kelompok masyarakat yang mengutamakan kepentingan kelompok</p> <p>d) Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan anak muda dan anak sekolah</p> <p>e) Masih tingginya kasus pelanggaran perda</p> <p>a) Terbatasnya jaringan di desa terpencil dan dataran tinggi untuk mengakses data pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>b) Masih minimnya cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)</p> <p>c) Rata - Rata Cakupan Penerbitan KTP el, Kartu Keluarga , akte Kelahiran dan Pencatatan Sipil lainnya masih belum 100 %</p> <p>a) Belum optimalnya database terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi</p> <p>b) aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang masih terbatas</p> <p>c) Pendampingan PMKS belum dapat dilakukan secara optimal</p> <p>a) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan;</p> <p>b) Masih kurangnya pelestarian olahraga tradisional di kalangan masyarakat;</p> <p>c) Masih fluktuasinya jumlah atlet yang berprestasi di Kabupaten Pasuruan</p> <p>a) Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal</p> <p>a) Kurangnya sarana prasarana kearsipan (Rak arsip, lemari arsip, scanner peta, Depo yang kurang memadai dan representative), jika dibandingkan dengan arsip yang selalu bertambah dan belum adanya teknologi otomasi kearsipan;</p>

No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
7	Memperkuat sarana pelaksanaan, dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	a) Kurangnya jumlah ASN ditambah lagi dengan banyaknya ASN yang purna tugas
			b) Adanya ASN yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin pegawai
			c) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural masih fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2019
		Statistik	a) Belum adanya sistem data statistik yang terintegrasi
		Keuangan	a) Masih terjadinya peningkatan yang fluktuatif dalam capaian PAD
			b) Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat.
c) Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada.			
8	Mencapai kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan, dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a) Kecenderungan jumlah kasus KDRT masih tinggi dari 39 kasus pada 2018 naik menjadi 55 pada tahun 2019
			b) Turunnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 0,016 pada 2017 menjadi 0,009 pada 2018
9	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	Pangan	a) Masih rendahnya penguasaan sistem pemasaran online oleh petani/peternak
			b) Rendahnya daya saing produk peternakan & KP karena kurang menariknya kemasan produk dan promosi
			c) Ketergantungan masyarakat terhadap pangan dari beras masih tinggi
			d) Masih dijumpai daerah rawan pangan
			e) Masih rendahnya penerapan teknologi budidaya pertanian
			f) Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan untuk komoditas daging turun dari 2,72 pada 2017 menjadi 2,53 pada 2018
10	Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan, dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati	Lingkungan Hidup	a) Masih adanya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan
			b) Berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun
			c) Menurunnya kualitas udara akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan dan sektor transportasi
			d) Masih tingginya tingkat pencemaran air yang mencapai 66,67% pada tahun 2018
11	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, dan dampaknya	Penanggulangan Bencana Daerah	a) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin putting beliung, kebakaran hutan dan lahan);
			b) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana.
12	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a) Masih rendahnya daya saing dan nilai tawar badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha lainnya ;

No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua		<p>b) Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar</p> <p>c) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro tentang pentingnya legalitas usaha ;</p> <p>d) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro tentang pentingnya berjejaring/berasosiasi antar pelaku usaha</p> <p>e) Belum optimalnya pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan usaha dan pengembangan produk;</p> <p>f) Turunnya capaian persentase koperasi aktif dari 90,12% pada 2018 menjadi 89,7% pada 2019</p> <p>g) Menurunnya persentase koperasi pondok pesantren aktif dari 86,11% pada 2018 menjadi 84,93% pada 2019</p> <p>h) Masih kurangnya skema pembiayaan yang berpihak pada koperasi dan usaha mikro.</p>
		Pariwisata	<p>a) Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung SDM dan prasarana yang memadai.</p> <p>b) Pemahaman masyarakat yang belum sesuai terhadap konsep pemberdayaan.</p> <p>c) Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri belum maksimal</p> <p>d) Persebaran kunjungan wisatawan belum merata karena kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal dan aksebilitas beberapa data tarik wisata kurang mendukung</p> <p>e) Virus corona atau Covid-19 yang mewabah di seluruh penjuru negeri memengaruhi industri pariwisata</p>
13	Menjamin pola produksi, dan konsumsi pangan masyarakat yang berkelanjutan	Pertanian, dan Perikanan	<p>a) Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan. Beralihnya fungsi lahan pertanian akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan</p> <p>b) Jaringan pemasaran belum sepenuhnya bisa menyalurkan distribusi produk pertanian kepada konsumen</p> <p>c) Teknologi pertanian yang aplikatif dan spesifik lokasi belum sepenuhnya bisa diadopsi dan diterapkan oleh petani</p> <p>d) Kurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian</p>
14	Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan		<p>a) Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang kurang bertanggungjawab karena penggunaan alat penangkap ikan terlarang</p> <p>b) Overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat</p> <p>c) Sebagian besar pelaku usaha perikanan mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan dan ketrampilan usaha perikanan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya</p> <p>d) Armada tangkap masih didominasi oleh nelayan kecil dengan alat tangkap dan armada yang relatif sederhana dan keterbatasan kapasitas prasarana tambat labuh untuk nelayan kecil</p>

No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
			e) Kurangnya kepatuhan penerapan standar mutu pada usaha perikanan budidaya sesuai dengan kaidah penanganan yang baik dan benar dalam pemenuhan food safety dan jaminan mutu usahanya f) Masih rendahnya nilai tambah, mutu produk dan terbatasnya diversifikasi produk g) Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya skala kecil h) Penurunan daya dukung lingkungan perairan umum yang menyebabkan penurunan produksi perikanan tangkap dan budidaya i) Tingginya harga pakan yang berakibat pada tingginya biaya produksi budidaya serta terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu
15	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	Tenaga Kerja	a) Kompetensi yang dimiliki pencari kerja masih terbatas
16	Mengurangi ketimpangan dalam, dan antar negara		b) Turunnya penempatan tenaga kerja dari 9499 di tahun 2018 menjadi 2450 di tahun 2019, pencari kerja yang ditempatkan dari 9499 di tahun 2018 menjadi 8037 di tahun 2019, dan angkatan kerja yang terdaftar dari 13564 di tahun 2018 menjadi 11473 di tahun 2019 c) Turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dari 69,59% pada tahun 2018 menjadi 68,64% di tahun 2019
17	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif, dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi	Perindustrian dan Perdagangan	a) Nilai UMK Kab. Pasuruan cukup tinggi sehingga investor mempertimbangkan hal tersebut untuk berinvestasi dengan membandingkan UMK daerah lain yang lebih rendah
			b) Pedagang enggan menempati los/kios yang baru karena dianggap ukuran terlalu kecil
			c) Masih terdapat IKM yang memiliki skill rendah
			d) Turunnya nilai investasi di Kabupaten Pasuruan
			e) Menurunnya jumlah IKMB dari 56 di tahun 2017 menjadi 54 di tahun 2018

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2020

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pasuruan dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya kualitas dan produktifitas sektor produksi	1. Belum optimalnya akses pemasaran produk usaha mikro 2. Pengelolaan Kawasan wisata dan promosi wisata yang belum optimal	1. Turunnya capaian persentase koperasi aktif dari 90,12% pada 2018 menjadi 89,7% pada 2019 2. Menurunnya persentase koperasi pondok pesantren aktif dari 86,11% pada 2018 menjadi 84,93% pada 2019

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<p>dan produk unggulan</p> <p>2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang konektivitas dan aksesibilitas</p> <p>3. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal</p> <p>4. Belum optimalnya pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat</p> <p>5. Belum optimalnya pelestarian nilai budaya daerah yang dapat menunjang pembangunan daerah</p>	<p>3. Penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi tingkat daerah yang merata belum optimal</p> <p>4. Belum optimalnya penanganan dan perlindungan PMKS</p> <p>5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dengan tetap memperhatikan RTRW</p> <p>6. Pengelolaan sumberdaya air yang belum optimal</p> <p>7. Belum optimalnya penyediaan air baku, air tanah, dan pemeliharaan jaringan irigasi</p> <p>8. Belum optimalnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>9. Belum optimalnya pemerataan akses Pendidikan yang berkelanjutan</p> <p>10. Akses dan pelayanan Kesehatan yang belum optimal</p> <p>11. Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh dan akses untuk pemenuhan air minum dan sanitasi</p> <p>12. Belum optimalnya pengembangan area kawasan perumahan dan pemukiman yang layak huni</p> <p>13. Upaya pencegahan konflik masyarakat dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal</p> <p>14. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan generasi muda dalam pelestarian budaya daerah</p>	<p>3. Menurunnya persentase peningkatan usaha mikro dari 2018 yang mencapai 2,51% menjadi -1,91% pada 2019</p> <p>4. Masih rendahnya daya saing dan nilai tawar badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha lainnya</p> <p>5. Persebaran kunjungan wisatawan belum merata karena kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal dan aksesibilitas beberapa data tarik wisata kurang mendukung</p> <p>6. Virus corona atau Covid-19 yang mewabah di seluruh penjuru negeri memengaruhi industri pariwisata</p> <p>7. Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan untuk komoditas daging turun dari 2,72 pada 2017 menjadi 2,53 pada 2018</p> <p>8. Masih rendahnya penerapan teknologi budidaya pertanian</p> <p>9. Rendahnya daya saing produk peternakan karena kurang menariknya kemasan produk dan promosi</p> <p>10. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang masih terbatas</p> <p>11. Menurunnya persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menjadi 79,50% pada 2019</p> <p>12. Menurunnya persentase jembatan dalam kondisi baik dari 100% pada 2018 menjadi 81,47% di 2019</p> <p>13. Pada 2019 capaian drainase dalam kondisi baik masih 26,72%</p> <p>14. Masih adanya 4% atau sekitar 40 SD/MI yang belum memiliki cukup guru. Hal tersebut dikarenakan penempatan tenaga guru yang belum merata dan adanya guru yang telah memasuki masa pensiun dan belum ada penggantinya</p> <p>15. Kurangnya kesadaran/ partisipasi masyarakat dalam menerapkan PHBS, dengan angka Rumah Tangga yang menerapkan PHBS masih 47,3% di tahun 2017</p> <p>16. Jumlah desa yang ODF masih minim, yakni 5,75% atau sekitar 25 desa dari 365 desa/kelurahan</p> <p>17. Belum optimalnya pelayanan air minum perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air</p> <p>18. Masih tingginya kasus pelanggaran perda</p> <p>19. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal</p>

Sumber : Data Bab 2 Diolah, 2021

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten

Pasuruan. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goal's (SDG's)

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030. Maka dalam rangka mengakomodir lima poin dalam pelaksanaan SDGs disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;

2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*)

Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;

4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;

5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan;

6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)

Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;

7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*)

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;

10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

Mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*)

Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*)

Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;

13. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*)

Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;

14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*)

Melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;

15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*)

Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*)

Mendorong masyarakat yang damai, dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga,

dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goal's*)

Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Pasuruan memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan, serta kondisi daerah. Kemudian, Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah tersebut, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kabupaten Pasuruan.

4.2.1.2 Asean Economic Community (AEC)

AEC atau *Asean Economic Community* adalah produk yang dihasilkan oleh karena adanya globalisasi yang membentuk sebuah kesatuan ekonomi (*unity*) di Kawasan Asia Tenggara. Sama halnya Uni Eropa, fokus strategi AEC adalah pengembangan aset negara untuk mampu bersaing dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Indonesia yang berada di wilayah ASEAN tentunya harus menyiapkan berbagai aspek untuk bersaing di pasar bebas ASEAN ini. Namun, sebelum tampil dikancah daya saing ASEAN, daya saing nasional tentunya harus juga ditingkatkan. Hingga saat ini daya saing nasional, dan daerah di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, salah satu cara tepat yang dilakukan adalah mengartikulasi, dan atau merevitalisasi fungsi kelembagaan.

Tanpa mengabaikan adanya beragam indikator daya saing internasional bagi suatu negara, maka penguatan fungsi kelembagaan dalam rangka membangun daya saing nasional, dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Maka dari itu, dengan formula 5W+1H (*what, why, when, where, who, dan how*), telaah AEC bertujuan untuk menjelaskan *snapshot* daya saing nasional, dan daerah di Indonesia dalam memasuki era AEC.

Pertama, *What*, apa yang dimaksud daya saing. Konsep daya saing merupakan isu utama dalam wacana pembangunan setiap bangsa, atau negara. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu institusi (organisasi), kota, daerah, wilayah, atau negara dalam mempertahankan, atau meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki secara berkelanjutan. Konsep daya saing negara menurut *European Commission* adalah kemampuan memproduksi barang, dan jasa sesuai kebutuhan pasar internasional (global) yang diiringi dengan kemampuan. Menghadapi globalisasi ekonomi yang bercirikan persaingan bebas maka, suatu masyarakat, atau daerah hanya akan eksis, atau bertahan apabila mempunyai daya saing yang tinggi (Halwani, 2002: 423). Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan, dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul, baik secara kuantitas, ataupun kualitas pada skala nasional antar-daerah, atau pada skala internasional, antar-negara. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai pada implementasi, dan evaluasinya berbasis fungsi kelembagaan, dan tata kelola yang handal, serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Kedua, *Why*, mengapa daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan pada era AEC. Jawabannya, karena daya saing negara yang kuat secara keseluruhan menjadi pilar, dan ujung tombak daya saing nasional, serta akan menjadi faktor terpenting bagi Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Ketiga, *When*, kapan daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan. Sejatinya, indikator daya saing Negara, dan daerah dibutuhkan sejak dulu, sekarang, dan di masa akan datang, namun dimensi waktu (kapan) diperlukan penguatan kembali indikator daya saing Negara, dan daerah-daerah di semua bidang, sektor, dan kegiatan pembangunan semakin terasa urgensi, dan signifikansinya saat ini.

Keempat, *Where*, dimana lokus yang tepat bagi penguatan indikator daya saing negara. Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah di Indonesia diletakkan pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa level analisis penguatan kembali indikator daya saing Negara, bukan hanya pada tingkat nasional, dan provinsi, melainkan perlu diturunkan level analisisnya pada tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan level (lokus) daerah otonom yang diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 22/1999; dan 32/2004; 23/2014; 9/2015), bahkan sampai pada unit-unit pemerintahan yang terendah (kecamatan, kelurahan/desa) di masyarakat, sebagai lokus (area) pengembangan daya saing berbasis kompetensi lokal yang dimiliki.

Kelima, *Who*, siapa saja aktor (individu, institusi) yang berkepentingan terhadap penguatan, dan peningkatan daya saing negara pada era AEC. Aktor (birokrat) yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara (pemerintahan, pembangunan,

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat) terfokus pada aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional yang meliputi bidang reformasi birokrasi, dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi, dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, aparat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi negara pada 3 (tiga) bidang prioritas pembangunan lainnya, yaitu kesejahteraan rakyat; politik, hukum, keamanan; serta perekonomian.

Saat ini, dan di masa akan datang, tentu saja diharapkan selain melibatkan aktor-aktor pada lokus, dan fokus kelembagaan publik di atas, juga semakin melibatkan (kemitraan yang kolaboratif) pemangku kepentingan pada semua jenis, level, dan elemen masyarakat madani, baik di pusat maupun di daerah, bahkan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara anggota AEC.

Keenam, *How*, bagaimana cara (upaya) membangun, mempertahankan, dan meningkatkan daya saing Negara, atau daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu caranya adalah melakukan penataan, dan revitalisasi fungsi, serta peran kelembagaan (institusi birokrasi) di berbagai bidang, sektor, dan kegiatan, sebagai salah satu pilar daya saing.

4.2.1.3 Pandemi Corona Virus Disease 2019

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization.) Pandemi ini terjadi di sebagian besar negara-negara diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi ini telah menjangkiti banyak manusia, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.

Mulanya COVID-19 ini menyebar di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Pandemi ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Menurut data *Congressional Research Service* (CRS), pandemi dapat memangkas pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0% menjadi 6,0% pada tahun 2020. Penurunan ekonomi dari pandemi ini meningkatkan risiko resesi ekonomi global dengan meningkatnya pengangguran. Dalam jangka pendek prospek pemulihan ekonomi dunia diperkirakan tertahan seiring meluasnya COVID-19, yang memengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi.

4.2.2.2 RPJMN 2020-2024

Substansi dari Visi, Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang memiliki keterkaitan kuat dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut;

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



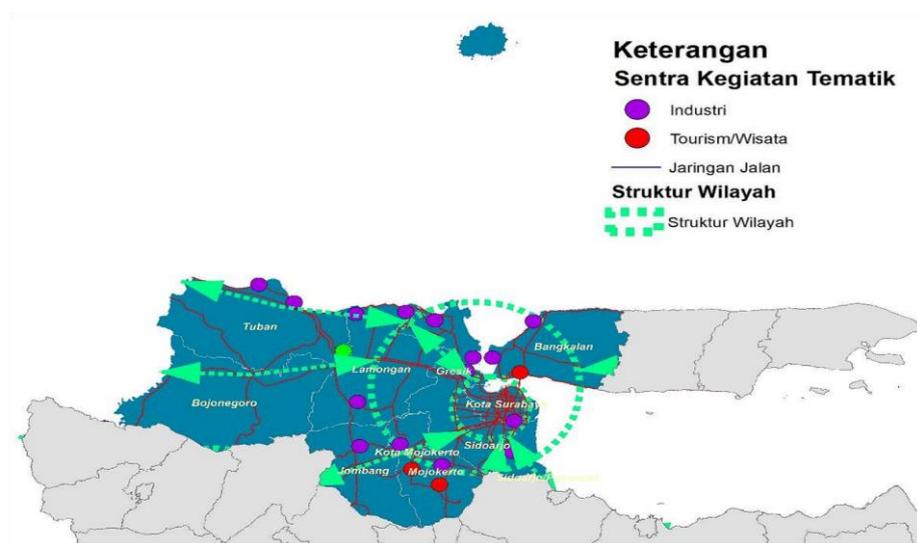
Gambar 4.1 Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020

Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai *guidance* bagi perumusan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4.2.2.3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Regulasi ini menjadi faktor pendorong strategis bagi percepatan pembangunan Jawa Timur yang meliputi beberapa wilayah pengembangan. Secara umum dua Kawasan penting yang terkait dengan pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah Kawasan prioritas gerbangkertosusila. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila merupakan bentuk wilayah dari segi nodalitas (titik) dimana wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara kawasan pusat (inti) dan kawasan penyangganya (hinterland). Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Luas Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota adalah sekitar 10.841,99 km² dengan luas Kabupaten/Kota yang tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro, dan terendah di Kota Mojokerto.



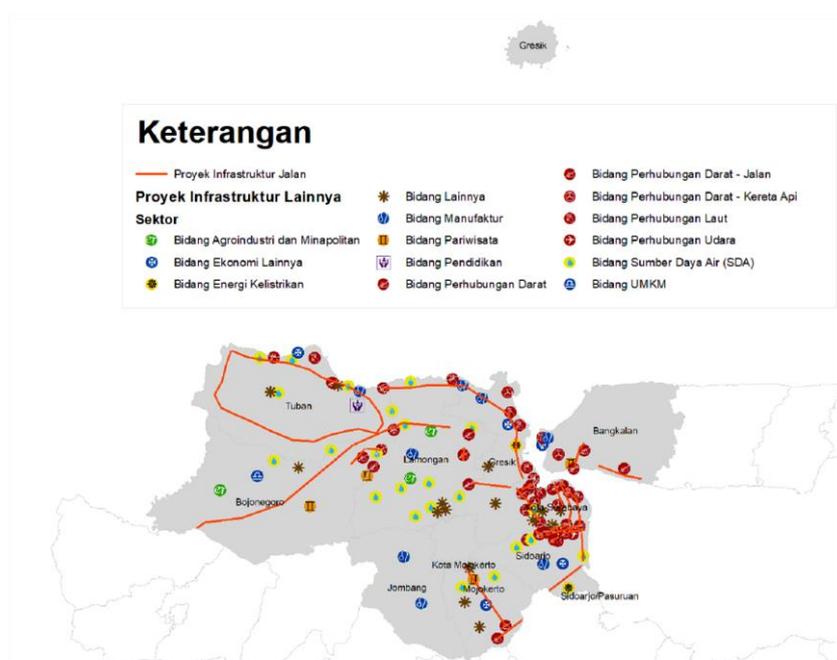
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2019 dan Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Gambar 4.2 Peta Kawasan prioritas Gerbangkertosusila

Guna mendukung konektivitas antar wilayah di lingkup Gerbangkertosusila dan sekitarnya, diperlukan proyek pembangunan transportasi public (Surabaya Regional

railways Line) sebesar Rp. 8.304 Miliar yang bersumber dari Kerjasama pemerintah dengan Badan usaha (KBPU). Beberapa daerah yang terkait yaitu kabupaten Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, kota dan Kabupaten Mojokerto. Kebijakan, program / kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara Juanda – Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong, Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan PLTSa di Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 4.3 Peta Lokasi Program di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila



Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunnya Klaster Migas dan Kondensat terutama dengan berdirinya Refinery Kilang Minyak dan Petrochemical di Tuban. Sebelumnya telah berdiri Oil Tank Terminal di Kabupaten Lamongan dan TTPI di Kabupaten Tuban. Dengan terbangunnya Industrialisasi Migas dan kondensat serta petrokimia tersebut, akan memicu berdirinya Kawasan-Kawasan Industri baik yang sudah dalam bentuk kawasan (dikelola oleh Pengembang Industrial Estate), maupun rencana-rencana kawasan industri baru yang terdaftar di Kementerian Perindustrian. Sedangkan kegiatan ekonomi lain yang dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan meliputi:

1. Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan – Kabupaten Lamongan;
2. Pengembangan Minapolitan Lamongan – Kabupaten Lamongan; dan
3. Pengembangan Agropolitan Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro.

Mengacu pada uraian di atas, keberadaan Perpres 80 tahun 2019 akan menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah maupun regional Jawa Timur.

4.2.2.6 Pandemi COVID-19 dan Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Dimulai dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, sekitar kuartal akhir tahun 2019, penyakit virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan menyebar juga masuk ke Indonesia, penyakit ini yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 menjadi pandemi/wabah yang merenggut korban jiwa. Dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan secara nasional baik secara langsung pada aspek kesehatan (korban jiwa), tetapi juga pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Pada kuartal II tahun 2020 dilakukan beberapa upaya mitigasi pandemi COVID-19 antara lain melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar termasuk DKI Jakarta dan Surabaya Metropolitan. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan atau angka minus pada kuartal II dan III sebesar 5,32% (Q2) dan 3,49% (Q3) yang mengindikasikan terjadi resesi ekonomi yang merupakan dampak pandemi COVID-19. Selain dari dampak aspek ekonomi, untuk memitigasi pandemi COVID-19, diberlakukan “*social distancing*” dan pendidikan diselenggarakan secara daring / online yang menyebabkan perubahan pola pergerakan orang dan sosial.

Sebagai bagian upaya mitigasi pandemi COVID-19 dan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, Pemerintah mengambil langkah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang antara lain berupa dukungan pada dunia usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN, berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan stimulus kredit. Pemulihan Ekonomi Nasional juga mengupayakan pinjaman lunak kepada Pemerintah Daerah untuk menambah ketersediaan anggaran daerah dalam kegiatan atau proyek untuk upaya penanganan dan mitigasi dampak pandemi COVID-19.

4.2.2.7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa harapan perubahan sistematis dalam pengelolaan pemerintah dalam rangka percepatan investasi dan pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian baik administratif maupun teknis agar harapan percepatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja terwujud, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Implementasi Undang-Undang yang dikenal sebagai UU Ciptaker ini beraplikasi cukup luas yaitu pada aspek kelembagaan dan aspek pembangunan sektor hulu hingga hilir antara lain terkait

pertanian, pangan, perkebunan, minyak dan gas, kehutanan, Perindustrian, penataan ruang, hingga perizinan, ketenagakerjaan, Perbankan, dan Perkoperasian.

4.2.3 Isu Strategis Regional

4.2.3.1 RPJMD Jawa Timur 2019-2024

Adapun isu-isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur di bawah rata-rata Nasional, komponen yang perlu mendapatkan perhatian adalah indeks Pendidikan dan indeks kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan masa depan.

Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya. Peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal, melalui kegiatan pembelajaran yang bermutu dan efektif kepada siswa. Semakin banyak pihak yang peduli dan saling bekerjasama, maka semakin besar peluang kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah terus meningkat dari 7,05 tahun 2014 menjadi 7,34 pada tahun 2017, selanjutnya untuk Harapan Lama Sekolah juga terus meningkat, yaitu masing-masing 12,45 tahun (2014); 12,66 tahun (2015); 12,98 tahun (2016); dan 13,09 tahun (2017). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan secara umum. APK dapat digunakan sebagai indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, untuk tingkat pendidikan SD dan SMP selalu diatas seratus persen. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA berkisar diangka 70 hingga 81 persen.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2014 sebesar 24,50 dan terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 23,10 di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKI sudah menunjukkan kemajuan. Upaya penurunan AKB yaitu dengan melaksanakan Capacity Building kepada bidan, untuk meningkatkan profesionalitas bidan dalam mendukung penurunan AKB. Selain itu secara komprehensif kepada stakeholder dilakukan capacity building dan edukasi terkait pengetahuan dan kemampuan terhadap penanganan bayi, peningkatan status kesehatan ibu hamil dengan perbaikan gizi, penanganan calon bayi dan janinnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menjadi pihak harus digandeng dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB).

Secara umum selama tahun 2014-2017 Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur terus menunjukkan penurunan, pada tahun 2014 capaiannya sebesar 93,53 kemudian pada tahun 2017 menjadi 91,92. Upaya promotif terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan calon ibu untuk melakukan perencanaan kehamilan dan menjalani asuhan yang teratur dan berkualitas. Angka kematian ibu melahirkan paling banyak disebabkan pendarahan, hipertensi, dan infeksi. Peningkatan kesadaran bagi ibu yang memiliki resiko tinggi agar lebih peduli, dapat meminimalkan terjadinya komplikasi selama kehamilan yang diharapkan bisa menekan Angka Kematian Ibu (AKI).

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Dalam hal ini Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang pertama di wilayah kerjanya masing-masing. Puskesmas sesuai dengan fungsinya (sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan

masyarakat dan keluarga serta pusat pelayanan kesehatan dasar) berkewajiban mengupayakan, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang.

2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan namun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka bertambah dan angka kemiskinan tinggi. Pembangunan ekonomi Jawa Timur semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2014 sebesar Rp. 1.540,70 triliun, kemudian terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi Rp. 2.019,20 triliun. Pada tahun 2018 (TW III) PDRB ADHB sebesar Rp. 569,39 triliun. Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2014 Rp. 1.262,68 triliun, selanjutnya terus meningkat pada tahun 2015-2017 yaitu masing-masing Rp. 1.331,39 triliun (2015), Rp. 1.405,56 triliun (2016), Rp. 1.482,15 triliun (2017), dan pada tahun 2018 (TW III) menjadi Rp. 403,68 triliun.

Peningkatan PDRB ADHK Jawa Timur dibandingkan tahun sebelumnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2014 perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,86%, kemudian tahun 2016 mengalami perlambatan, yaitu 5,44%. Hal ini diduga karena melemahnya daya beli masyarakat akibat kebijakan pemerintah terkait dengan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang berakibat naiknya harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Pada tahun 2016 pertumbuhan meningkat menjadi 5,57%, salah pendorongnya yaitu menguatnya kinerja sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 kembali melemah menjadi 5,45%. Menurunnya produksi tanaman pangan menjadi penyebab utama melemahnya pertumbuhan tersebut.

Perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan berfluktuasi memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi

masyarakat. Secara tahunan selama kurun waktu 2014-2018 inflasi tahun kalender di Jawa Timur tertinggi terjadi pada 2014 yaitu mencapai 7,77% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 2,74%.

Selanjutnya, Isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kecenderungan menurun. Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa terdapat pengurangan penduduk yang pendapatannya masih lebih rendah dari garis kemiskinan yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 12,28% dengan jumlah penduduk miskin 4.748,42 ribu jiwa, kemudian terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 10,85% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4 292,15 ribu jiwa.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibatnya banyaknya keluarga yang ekonominya kurang baik, lapangan kerja yang masih kurang, pendidikan yang rendah, dan kurangnya keterampilan. Salah satu prasyarat keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan wilayah sasaran dengan tepat. Program pengentasan dan pemulihan nasib orang miskin tergantung dari langkah awal yaitu ketetapan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan di mana dia berada. Aspek di mana “si miskin” dapat ditelusuri melalui si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan profil wilayah atau karakter geografis.

Mengingat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk melakukan usaha sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

Isu strategis lainnya Pengangguran dan lapangan kerja. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 sebesar 4,19%,

kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 4,47%. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016); 4,00 (2017); dan 3,99 (2018). Penurunan TPT ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan beberapa kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 cukup banyak menyerap tenaga pengangguran.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Provinsi Jawa Timur berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor USAHA MIKRO berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

3. Tata kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Peningkatan kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwujudan good governance. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi:

1. Pembinaan ASN yang mempunyai fungsi melayani, disiplin dan bersih;
2. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Hal ini dilaksanakan melalui pengawasan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PANRB menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Efisiensi birokrasi diwujudkan melalui penerapan E-Government. Dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik, Money Follow Program, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi setiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

4. Demokrasi

Demokrasi kewargaan berhubungan dengan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum dan pemerintahan. Komponen Demokrasi terdiri dari :

1. Kebebasan sipil meliputi kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, bebas dari diskriminasi;
2. Hak politik meliputi hak memilih dan dipilih serta Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan;
3. Partisipasi politik meliputi lembaga demokrasi, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi dan peradilan yang independen.

Pemerintah bersama aparatur memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewargaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

5. Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas dan aksesibilitas wilayah berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi penguatan sistem konektivitas secara global di Jawa Timur akan meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi diantara pusat- pusat pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menguraikan bahwa setiap orang berhak untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat terhadap perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuninya.

4.2.4. Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Pasuruan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pasuruan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pasuruan. Penelaahan terhadap isu strategis RTRW, bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur, dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur, dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 20 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. Berikut adalah kebijakan, dan strategi penataan ruang Kabupaten Pasuruan. Di dalam Konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa Kawasan yaitu:

- a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
- b. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
- c. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- d. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

- e. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
- f. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan perikanan darat dan/atau tangkap, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengelolaan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
- g. Kawasan Strategis Provinsi atau disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- h. Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- i. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- j. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- k. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- l. Kawasan Industri atau disingkat KI adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.
- m. Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat KIT-UMKM adalah kawasan industri (KI) yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan industri usaha mikro, kecil dan menengah industri, dengan batasan luasan paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
- n. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Tabel 4.3 Kawasan Strategis Kabupaten Pasuruan

Kawasan Strategis	Lokasi
Kawasan Strategis Nasional untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan YONKAV VIII di Kecamatan Beji; 2. Kawasan penunjang fasilitas TNI-AL STASCAR di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton; 3. Kawasan TNI AU Raci di Kecamatan Rembang dan Kraton; 4. Kawasan BRIMOB Watukosek di Desa Watukosek, Kecamatan Gempol; 5. Kawasan Latihan Tembak di Kecamatan Gempol; 6. Kawasan PUSLATPUR TNI-AL di Kecamatan Lekok;
Kawasan Strategis Kabupaten untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan dengan peruntukan industri, baik kawasan industri seperti PIER, maupun kawasan peruntukan industri yang tersebar proporsional di seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan termasuk Kawasan Industri UMKM Meubel di Kecamatan Rejoso-Winongan; 2. Pengembangan kawasan di sekitar interchange yaitu Kawasan sekitar interchange Gempol, Bangil, Pandaan, Rembang-Kraton, Purwodadi dan Grati; 3. Penetapan kawasan agropolitan di beberapa kecamatan diantaranya, kecamatan Tutur, Pasrepan, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, serta terdapatnya keterdekatan/keterkaitan lokasi dengan interchange Grati dan interchange Purwodadi sebagai penghubung kawasan agropolitan
Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara di Desa Watukosek Kecamatan Gempol, yang dimiliki oleh LAPAN Indonesia; 2. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati di Kecamatan Lekok.
Kawasan Strategis Kabupaten Untuk Kepentingan Sosio-Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Candi Jawi di Kecamatan Prigen; 2. Kawasan Candi Makutoromo di Kecamatan Purwosari; 3. Kawasan Candi Sepilar di Kecamatan Purwodadi; 4. Kawasan Candi Watu Tetek Belahan di Kecamatan Gempol; 5. Kawasan Candi Gunung Gangsir di Kecamatan Beji; 6. Kawasan Pertapaan Indrakila di Kecamatan Prigen; 7. Kawasan Pertapaan Abiyoso di Kecamatan Purwosari; 8. Kawasan Makam Segoropuro di Kecamatan Rejoso; 9. Kawasan Vulcano Park Gunung Bromo di Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo dan Lumbang; 10. Kawasan Budaya Suku Tengger di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari; 11. Kawasan Makam Mbah Semedi di Kecamatan Winongan.
Kawasan Strategis Kabupaten untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pengendalian Air Bawah Tanah di Kecamatan Gempol, dan Pandaan, serta Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gempol, Prigen, Purwosari, Tutur, Tosari, Puspo, Pasrepan, dan Kecamatan Lumbang

Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan

4.2.5. Telaahan KLHS Kabupten Pasuruan

Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan, dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip

pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar, dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 7/2018 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan, atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak, atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses, dan produk kebijakan. Terdapat 3 (tiga) nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium), dan keadilan (justice).

Dengan mempertimbangkan beberapa masukan perbaikan untuk visi- misi, tujuan, arah kebijakan dalam RPJMD, catatan rekomendasi ini yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan rumusan-rumusan dalam RPJMD, baik secara konseptual, maupun secara praktis dalam program, dan kegiatan. Hal ini terutama dalam bidang pemberdayaan aparatur daerah, peningkatan kualitas lingkungan, serta pematapan ekonomi demi memberikan definisi yang lebih terarah pada visi-misi membentuk Kabupaten Pasuruan yang “sejahtera”. Berikut ini, disajikan rumusan rekomendasi KLHS dalam Penyusunan RPJMD, dan Renstra OPD. Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditentukan Isu strategis prioritas yang dijalankan di Kabupaten Pasuruan. Isu strategis prioritas ditentukan berdasarkan peringkat gap capaian indikator TPB, daya dukung dan daya tampung (DDDT), serta urusan wajib pelayanan dasar. Indikator TPB diperingkatkan berdasarkan besarnya gap capaian Kabupaten Pasuruan dengan target RPJMN tahun 2019. Gap yang paling besar mendapatkan peringkat tertinggi.

Terdapat 12 indikator yang termasuk dalam DDDT. Indikator yang memiliki kaitan dengan DDDT (Daya Dukung dan Daya Tampung) diberi skor 21 poin, sehingga apabila indikator tersebut memiliki nilai gap besar dan termasuk kedalam DDDT akan berada pada peringkat teratas sementara. Dari hasil pemeringkatan besar gap capaian TPB dan DDDT, indikator yang berada pada peringkat pertama maksimal memiliki skor 50 poin. Tahap terakhir adalah pemeringkatan indikator sementara terhadap kategori jenis urusan wajib pelayanan dasar yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 4.4 Isu Strategis Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Indikator	Target RPJMN Tahun 2019	Permasalahan	Isu Strategis
TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Capaian peserta program Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan masih 70%	<p>1.) Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</p> <p>2.) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Persentase rumah tangga yang terlayani oleh air minum layak masih belum memenuhi target nasional sebesar 31 %	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan belum memenuhi target RPJMN sebesar 29,80%	
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan belum memenuhi target RPJMN 2019 sebesar 24,08 %	
	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi belum mencapai target RPJMN sebesar 1%	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Pasuruan belum memenuhi target nasional sebesar 3,03%	
	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasuruan masih kurang ditingkatkan sebesar 3,86% agar mencapai target RPJMN 2019.	

Tujuan	Indikator	Target RPJMN Tahun 2019	Permasalahan	Isu Strategis
TUJUAN 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 15 wilayah sungai	1) Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
TUJUAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum memenuhi target RPJMN sebesar 25,01%	2) Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3) Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi belum memenuhi target RPJMN 2019 sebesar 7,3%	
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih belum memenuhi target RPJMN sebesar 2,10 %	
	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Unmet need pelayanan kesehatan belum memenuhi target RPJMN 2019 sebesar 0,41%	
TUJUAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	SD/MI yang berakreditasi B pada Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi target	1) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B belum memenuhi target nasional sebesar 5,8 %	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat sudah mencapai target RPJMN	

Tujuan	Indikator	Target RPJMN Tahun 2019	Permasalahan	Isu Strategis
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini sudah memenuhi target nasional	
TUJUAN 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih masih belum mencapai target nasional sebesar 22%	1) Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 2) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
	1) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1) Meningkatkan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m ³ /detik (2015: 51,44 m ³ /detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau. 2) Meningkatkan akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	1) Kapasitas prasarana air baku di Kabupaten Pasuruan masih belum memenuhi target nasional dengan selisih 118,4 m ³ /det 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih masih belum mencapai target nasional sebesar 31%	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak masih belum mencapai target sebesar 30%.	
TUJUAN 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan kurang ditingkatkan sebesar 6,55 % agar mencapai target RPJMN 2019.	1) Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan 2) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	PDB per kapita sudah memenuhi target RPJMN	
	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Laju pertumbuhan PDB per kapita masih sudah memenuhi target RPJMN	
	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Laju pertumbuhan PDB per kapita sudah memenuhi target RPJMN %	

Tujuan	Indikator	Target RPJMN Tahun 2019	Permasalahan	Isu Strategis
TUJUAN 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Koefisien Gini belum mencapai target RPJMN sebesar 36 %	ISU STRATEGIS: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Cakupan penanganan sampah perkotaan masih memiliki gap 60 % dari target RPJMD 2019.	ISU STRATEGIS: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
TUJUAN 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah masih kurang ditingkatkan sebesar 35,6 % agar mencapai target RPJMN 2019.	ISU STRATEGIS: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran masih kurang ditingkatkan sebesar 10,35 % agar mencapai target RPJMN 2019.	
TUJUAN 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 0,78 %	ISU STRATEGIS: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2021

4.2.6. Telaah Isu Strategis Daerah Sekitar

A. RPJMD Perubahan Kota Surabaya 2016-2021

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Persaingan Global
2. Terpeliharanya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kerukunan Tata Kehidupan Bermasyarakat
3. Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi
4. Melestarikan Budaya Lokal untuk Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Luhur Kehidupan Masyarakat
5. Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional
6. Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
7. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global

B. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

1. Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Inovatif dan Handal
2. Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Infrastruktur Publik yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
4. Optimalisasi Potensi Sektoral
5. Integrasi Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Iklim Investasi yang Kondusif dan Pengelolaan Hubungan Industrial yang Harmonis
7. Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Kuat Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi, dan UMKM
8. Kebijakan Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana
9. Pembangunan Desa Mandiri dan Penguatan Pasar Tradisional

4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Pasuruan

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak, yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Adapun tahapan perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 melalui tahapan Penentuan, dan Pembobotan. Secara teknis, proses Tahapan Penentuan isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting, dan permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Pasuruan, yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait mengenai pembangunan Kabupaten Pasuruan, serta hasil FGD yang dilaksanakan dengan perwakilan OPD terkait, dan Bidang sektoral Bappeda Kabupaten Pasuruan. Penentuan isu tersebut tersaji dalam Daftar Panjang identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pasuruan berdasarkan urusan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Berikut Penentuan daftar panjang Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Tabel 4.5 Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Pasuruan

No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
1.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil, dan Inklusif, serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua	Pendidikan	Pemerataan kualitas sarana prasarana dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan Pemerataan aksesibilitas pendidikan secara berkelanjutan
		Perpustakaan	Optimalisasi koleksi bahan pustaka nasional dan daerah Pengembangan pelayanan ke daerah dan perpustakaan digital Peningkatan kesadaran aparatur akan pentingnya tertib kearsipan
2.	Menjamin Kehidupan yang Sehat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia	Kesehatan	Peningkatan akses dan standar pelayanan kesehatan dasar Menguatkan kesadaran masyarakat dalam hidup pola bersih dan sehat berwawasan lingkungan Peningkatan cakupan JKN di daerah
3.	Menjamin ketersediaan, dan manajemen air, dan sanitasi secara berkelanjutan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional



No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
			<p>Pengendalian dan penyesuaian pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan</p> <p>Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Air</p> <p>Akselerasi penyediaan air baku, air tanah, dan pemeliharaan jaringan irigasi</p>
4.	Membuat kota, dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan	Perumahan dan Permukiman	<p>Peningkatan area kawasan perumahan dan pemukiman yang layak huni</p> <p>Percepatan penanganan kawasan kumuh dan akses untuk pemenuhan air minum & sanitasi</p>
		Perhubungan	<p>Pengembangan sistem jaringan transportasi umum yang optimal</p> <p>Percepatan penekanan angka kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas</p>
5.	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi, dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi, dan inovasi untuk negara kurang berkembang, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Komunikasi dan Informatika	<p>Optimalisasi teknologi infomatika yang terintegrasi</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi hingga ke tingkat daerah</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM perihal teknologi informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat</p>
6.	Meningkatkan masyarakat yang inklusif, dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>Optimalisasi upaya pencegahan konflik di tengah masyarakat</p>
		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan database dan tata kelola layanan dasar administrasi kependudukan



No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
		Sosial	Optimalisasi penanganan dan perlindungan PMKS yang terpadu
		Kepemudaan dan Olahraga	Optimalisasi sistem pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan Percepatan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan
		Kebudayaan	Peningkatan peran serta masyarakat dan generasi muda dalam pelestarian budaya daerah Peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya daerah
		Kearsipan	Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan pengelolaan kearsipan Peningkatan pengelolaan kearsipan dengan memanfaatkan teknologi Peningkatan sarana prasarana kearsipan
7.	Memperkuat sarana pelaksanaan, dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan manajemen dan sistem kepegawaian secara profesional Penguatan sinkronisasi data kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi
		Statistik	Optimalisasi integrasi statistik data sektoral
		Keuangan	Optimalisasi teknologi informasi dalam bidang keuangan (e-budgeting, e-purchasing, e-payment, e-reporting) Peningkatan pengelolaan data aset tanah dengan melakukan inventarisasi bertahap



No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
8.	Mencapai kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan, dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Percepatan pemahaman masyarakat perihal isu kesetaraan gender Optimalisasi akses pelaporan kekerasan pada perempuan dan anak Optimalisasi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas Penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
9.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	Pangan	Penekanan angka produk makanan yang mengandung bahan berbahaya Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi
10.	Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan, dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati	Lingkungan Hidup	Optimalisasi manajemen pengelolaan limbah dan sampah oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha Percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
11.	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, dan dampaknya	Penanggulangan Bencana Daerah	Percepatan pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana Optimalisasi sistem peringatan dini bencana pada wilayah rawan bencana
12.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Percepatan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro melalui standarisasi nasional Peningkatan akses pemasaran produk usaha mikro hingga ke konsumen



No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
			Peningkatan kemudahan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro
		Pariwisata	Peningkatan kompetensi kapasitas SDM pelaku pariwisata Penguatan pengelolaan kawasan wisata dan promosi wisata daerah
13.	Menjamin pola produksi, dan konsumsi pangan masyarakat yang berkelanjutan	Pertanian, dan Perikanan	Penguatan kelembagaan petani Percepatan penanganan dan pencegahan penyakit ternak Optimalisasi penanganan pasca panen untuk komoditas pertanian
14.	Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat sektor pertanian dan kelautan Peningkatan pengawasan nelayan perihal penggunaan alat tangkap terlarang Peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan
15.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan dengan berdasarkan integrasi kurikulum pendidikan kejuruan dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan di dunia kerja Optimalisasi perlindungan tenaga kerja
16.	Mengurangi ketimpangan dalam, dan antar negara		

No	Sustainable Development Goal's	Urusan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
17.	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif, dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi	Perindustrian	<p>Peningkatan kesadaran perijinan formal yang dilakukan oleh industri kecil</p> <p>Optimalisasi daya saing industri melalui peningkatan penguasaan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi</p>

Adapun tahapan berikutnya, diidentifikasi isu strategis yang telah ditentukan kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan, dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan manakah isu strategis yang paling prioritas, dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi, dan misi. Isu strategis RPJMD tersebut, telah dipetakan berdasarkan pilihan Tema Pembangunan Prioritas Kabupaten Pasuruan, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan Kebijakan Prioritas, dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023. Penentuan data, atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah, dan masyarakat;
- 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan, atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pasuruan, yang diklasifikasikan berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Pasuruan dapat diambil langkah selanjutnya, yaitu penapisan menggunakan 6 kriteria isu strategis. Penapisan isu strategis, dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis di Kabupaten Pasuruan, yang dapat menjadi dasar penentuan Kebijakan, dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023. Apabila terdapat isu yang memiliki persentase pemenuhan keenam kriteria tersebut, dapat dikatakan isu tersebut paling strategis dibandingkan yang lain. Pada tahapan pembobotan ini, akan menghasilkan daftar pendek terhadap isu strategis terpilih, yang mana berdasarkan pada penilaian tingkat prioritas. Proses pemilihan isu pembangunan ini, diselenggarakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), yang bertujuan untuk memberi penilaian terhadap

isu-isu strategis, dan upaya penapisan agar terpilih isu strategis paling prioritas. Proses penapisan isu pembangunan daftar panjang menjadi daftar pendek dilakukan dengan tahapan dibawah ini:

1. Verifikasi Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan

Verifikasi ini, dimaksudkan untuk *cross-check* ulang identifikasi yang sudah tim temukan pada tahap penentuan permasalahan, dan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan tema pembangunan prioritas, dan urusan pembangunan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan, sebagaimana yang tersaji pada tabel.

2. Penilaian Daftar Panjang (*Long list*)

Penilaian daftar panjang Isu Pembangunan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Urusan tersebut menggunakan metode *Rating*. Metode *scoring* yang akan dilakukan adalah dengan memberi penilaian terhadap isu yang memiliki pengaruh terhadap 6 kriteria yang telah ditentukan. Metode penilaian *scoring* menggunakan interval penilaian dari angka 1 hingga 5. Semakin tinggi penilaian yang diberikan, dapat diartikan bahwa isu tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kriteria yang ditentukan. Nilai skala pengukuran terhadap kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Skala Penilaian Metode Scoring

Level Pengaruh	Nilai
Tidak berpengaruh	1-2
Kurang berpengaruh	3-4
Cukup berpengaruh	5-6
Berpengaruh	7-8
Sangat berpengaruh	9-10

Berdasarkan skala level pengaruh yang sudah ditentukan oleh tim penyusun RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Pasuruan, terhadap daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan (PB), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Daftar Panjang Isu PB

No.	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Pemerataan kualitas sarana prasarana dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	9	9	9	8	7	9	51
2	Pemerataan aksesibilitas pendidikan secara berkelanjutan	10	9	10	7	7	10	53
3	Optimalisasi koleksi bahan pustaka nasional dan daerah	3	6	3	3	3	3	21
4	Pengembangan pelayanan ke daerah dan perpustakaan digital	3	6	4	3	4	3	23
5	Peningkatan kesadaran aparatur akan pentingnya tertib kearsipan	3	5	4	3	3	3	21
6	Peningkatan akses dan standar pelayanan kesehatan dasar	9	9	10	8	7	10	53
7	Menguatkan kesadaran masyarakat dalam hidup pola bersih dan sehat berwawasan lingkungan	6	7	6	5	6	7	37
8	Peningkatan cakupan JKN di daerah	9	8	9	8	8	9	51
9	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional	9	8	8	9	8	10	52

No.	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
10	Pengendalian dan penyesuaian pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan	7	8	8	7	7	8	45
11	Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Air	5	7	7	6	7	7	39
12	Peningkatan area kawasan perumahan dan pemukiman yang layak huni	5	8	8	5	6	8	40
13	Percepatan penanganan kawasan kumuh dan akses untuk pemenuhan air minum & sanitasi	5	8	8	5	6	8	40
14	Pengembangan sistem jaringan transportasi umum yang optimal	7	7	7	8	7	7	43
15	Percepatan penekanan angka kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas	4	7	6	6	4	4	31
16	Optimalisasi teknologi infomatika yang terintegrasi	4	6	6	6	3	8	33
17	Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi hingga ke tingkat daerah	3	5	7	6	4	6	31
18	Peningkatan kapasitas SDM perihal teknologi informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat	2	4	4	4	4	4	22
19	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	2	4	3	1	5	3	18
20	Optimalisasi upaya pencegahan konflik di tengah masyarakat	2	4	3	1	5	3	18
21	Peningkatan database dan tata kelola layanan dasar administrasi kependudukan	2	5	5	2	5	8	27
22	Optimalisasi penanganan dan perlindungan PMKS yang terpadu	3	7	7	4	5	4	30
23	Optimalisasi sistem pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan	3	6	3	4	5	3	24
24	Percepatan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	3	6	4	4	5	3	25
25	Peningkatan peran serta masyarakat dan generasi muda dalam pelestarian budaya daerah	4	3	3	2	2	5	19
26	Peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya daerah	4	3	3	4	4	5	23
27	Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan pengelolaan kearsipan	2	3	3	2	3	3	16
28	Peningkatan sarana prasarana kearsipan	2	3	4	3	3	3	18
29	Peningkatan pengelolaan kearsipan dengan memanfaatkan teknologi	2	3	4	4	3	3	19
30	Peningkatan manajemen dan sistem kepegawaian secara profesional	3	4	3	3	3	7	23
31	Penguatan sinkronisasi data kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi	2	3	2	2	3	3	15
32	Optimalisasi integrasi statistik data sektoral	2	3	4	3	4	7	23
33	Optimalisasi teknologi informasi dalam bidang keuangan (e-budgeting, e-purchasing, e-payment, e-reporting)	5	4	3	4	3	7	26
34	Peningkatan pengelolaan data aset tanah dengan melakukan inventarisasi bertahap	2	3	1	2	2	1	11
35	Percepatan pemahaman masyarakat perihal isu kesetaraan gender	3	3	3	2	2	2	15
36	Optimalisasi akses pelaporan kekerasan pada perempuan dan anak	3	3	4	2	3	2	17
37	Optimalisasi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	3	3	5	2	3	2	18
38	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	3	3	4	2	2	2	16
39	Penekanan angka produk makanan yang mengandung bahan berbahaya	2	4	5	3	5	4	23
40	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi	4	4	7	5	5	4	29
41	Optimalisasi manajemen pengelolaan limbah dan sampah oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha	2	4	4	4	3	1	18

No.	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
42	Percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	2	4	3	4	3	1	17
43	Percepatan pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana	2	4	4	2	2	1	15
44	Optimalisasi sistem peringatan dini bencana pada wilayah rawan bencana	2	4	4	2	2	1	15
45	Percepatan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro melalui standarisasi nasional	5	5	6	7	6	8	37
46	Peningkatan akses pemasaran produk usaha mikro hingga ke konsumen	5	6	7	7	6	7	38
47	Peningkatan kemudahan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro	5	5	6	5	5	7	33
48	Peningkatan kompetensi kapasitas SDM pelaku pariwisata	3	4	2	3	3	2	17
49	Penguatan pengelolaan kawasan wisata dan promosi wisata daerah	4	4	4	4	4	2	22
50	Penguatan kelembagaan petani	3	5	5	5	4	3	25
51	Percepatan penanganan dan pencegahan penyakit ternak	3	5	5	3	5	7	28
52	Optimalisasi penanganan pasca panen untuk komoditas pertanian	5	7	6	6	6	7	37
53	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat sektor pertanian dan kelautan	5	6	6	6	5	7	35
54	Peningkatan pengawasan nelayan perihal penggunaan alat tangkap terlarang	4	4	4	4	3	4	23
55	Peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan	6	6	5	5	5	6	33
56	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan dengan berdasarkan integrasi kurikulum pendidikan kejuruan dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan di dunia kerja	7	8	8	7	6	6	42
57	Optimalisasi perlindungan tenaga kerja	5	6	8	6	5	5	35
58	Peningkatan kesadaran perijinan formal yang dilakukan oleh industri kecil	5	6	8	6	5	5	35
59	Optimalisasi daya saing industri melalui peningkatan penguasaan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi	8	8	9	9	8	9	51

Keterangan Kriteria:

I	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
II	Merupakan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
III	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah, dan masyarakat
IV	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
V	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
VI	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Adapun setelah dilakukan pembobotan setiap poin Daftar Panjang Isu PB, terpilihlah Isu Strategis Pilihan Prioritas yang memiliki nilai pembobotan tertinggi dilihat dari enam kriteria yang sudah ada. Berikut ini uraian dari Isu Strategis Pilihan Prioritas.

4.2.7.1. Optimalisasi Daya Saing Usaha melalui peningkatan penguasaan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasuruan menghadapi tantangan terkait dengan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Oleh karena itu sangat mendesak untuk dilakukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terintegrasi dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maka dari itu diperlukan pula penerapan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan didukung ketersediaan infrastruktur

pertanian diantaranya jaringan irigasi untuk menjaga ketersediaan air dalam budidaya pertanian. Untuk menjaga ketahanan pangan daerah sangat diperlukan cadangan pangan yang dikelola oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani berupa lumbung pangan masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan panen akibat anomali iklim dan kejadian bencana.

Pengembangan urban farming sangat strategis untuk dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan keanekaragaman pangan masyarakat khususnya di wilayah perkotaan. Penerapan urban farming antara lain didorong dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sehingga partisipasi masyarakat akan meningkat.

Untuk menjaga kontinuitas produksi diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, namun regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian mengalami hambatan akibat menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian karena nilai tambah sektor pertanian lebih rendah dibandingkan sektor yang lain. Dalam rangka meningkatkan daya tarik sektor pertanian maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan agribisnis petani dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pendapatan petani bisa meningkat. Demi meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran maka pengembangan sektor pertanian dilakukan berbasis kawasan seperti agropolitan dan minapolitan. Pengembangan pertanian berbasis kawasan perlu didukung pembiayaan usaha yang berbasis skema khusus (pengembalian modal mengikuti siklus panen).

Di sisi lain pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pasuruan masih kurang beragam dan tergantung pada beras. Oleh sebab itu diperlukan penganekaragaman pangan masyarakat berbasis tanaman lokal. Untuk meningkatkan kemandirian pangan daerah maka diperlukan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi yang meliputi peningkatan ketersediaan pangan (produksi), distribusi pangan dan konsumsi. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergitas program lintas sektor.

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama dengan masyarakat. Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil), operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.

Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar. Keuntungan yang diperoleh diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa. Pendirian dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional.

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif khususnya di sektor kuliner, fashion dan kriya, karena mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan berada di usia produktif dan berkemungkinan menjadi creative class. Digitalisasi yang telah menjangkau sekitar 85% dari total penduduk Kabupaten Pasuruan memungkinkan untuk meningkatkan jumlah kelas menengah serta daya beli konsumen. Ekonomi kreatif meliputi sektor aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio serta kolaborasi antar sektor yang berpotensi dikembangkan. Langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif antara lain :

1. Penyediaan Co-working Space untuk ruang kreatif bagi komunitas kreatif;
2. Penyusunan Roadmap Ekonomi Kreatif agar pengembangannya lebih terarah dan terencana dengan target yang terukur;
3. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif untuk mengawal implementasi dari Roadmap Ekonomi Kreatif.

Selain itu, daya saing industry di Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan optimalisasi melalui peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.

4.2.7.2. Percepatan penanaman pemahaman nilai luhur budaya pada masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan untuk mendukung pembangunan daerah

Isu ketentraman dan ketertiban umum dapat terjadi di masyarakat. Potensi yang dapat terjadi yaitu masih adanya konflik dengan isu SARA yang terjadi di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga, potensi konflik perbatasan antara masyarakat Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan yang telah berlangsung lama. Selain itu juga masih ada kelompok-kelompok oportunistis yang mengancam keamanan lingkungan di masyarakat.

Kabupaten Pasuruan termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam, yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, erupsi gunung berapi dan angin puting beliung. Salah satu bencana alam yang sering terjadi dan berdampak cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat

adalah bencana banjir, dimana dengan perubahan iklim global dan dinamika pembangunan maka banjir di Kabupaten Pasuruan semakin meningkat.

Penanggulangan bencana, khususnya banjir, dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat (pembentukan desa tangguh bencana) dan penanganan sungai melalui normalisasi, penataan badan maupun bantaran sungai serta perbaikan tanggul-tanggul sungai. Untuk mengurangi banjir Kali Kedunglarangan salah satu hal yang harus dilakukan adalah penataan Bangil Tak (Kali Mati/ Kali Wrati).

4.2.7.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan mendukung pelaksanaan proyek strategis

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Dengan kata lain aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan bagaimana lokasi tataguna lahan berinteraksi satu dengan yang lain dan bagaimana mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Sedangkan mobilitas adalah suatu ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak yang biasanya dinyatakan dengan kemampuannya membayar biaya transportasi.

Salah satu poin smart governance adalah penyediaan transportasi massal yang handal dan terjangkau yang dapat melayani semua lapisan masyarakat. Dampak positif jika pemerintah dapat menyediakan transportasi yang handal adalah mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi tingkat pencemaran udara, mengurangi tingkat konsumsi bahan bakar minyak, mengurangi biaya pemeliharaan jalan dan kelengkapannya, efisiensi personil pengamanan jalan raya, dan meningkatkan pemasukan kas daerah. Hal ini pastinya harus memenuhi syarat seperti angkutan umum yang nyaman dengan kapasitas yang besar, alternatif jenis angkutan, ongkos terjangkau, jumlah angkutan lebih besar dari jumlah penumpang, melayani keseluruhan wilayah dan yang paling sangat penting adalah terintegrasi dengan moda.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka sistem transportasi saat ini sudah berbasis online. Pelayanan transportasi online di Kabupaten Pasuruan telah berkembang, oleh karena itu untuk kedepannya diperlukan regulasi daerah terkait transportasi online. Selain itu peningkatan kualitas infrastruktur yang semakin baik akan mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional. Peraturan Presiden No 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan membuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memperhatikan kondisi aksesibilitas dan

konektivitas wilayah untuk mensukseskan Kawasan Bromo Tengger Semeru yang diarahkan menjadi Kawasan Pariwisata Nasional.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktifitas manusia dengan kemampuan alam untuk menopangnya. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembangunan atau upaya pendayagunaan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Konsep strategis pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia sebagai berikut :

- 1 Penerapan perencanaan tata ruang yang tepat, yaitu pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan
- 2 Penempatan berbagai macam aktivitas yang mendayagunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut;
- 3 Sumber daya alam di suatu wilayah (region) hendaknya dialokasikan dalam beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya;
- 4 Penerapan dokumen lingkungan pada pelaksanaan kegiatan.

Sehingga setiap kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga layak secara lingkungan. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan selain meningkatkan kualitas hidup manusia, juga harus dapat mendukung prinsip-prinsip kehidupan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan, prinsip ini mencerminkan kewajiban untuk peduli kepada bentuk-bentuk kehidupan lain sekarang dan di masa datang;
2. Memperbaiki kualitas hidup manusia, sehingga pembangunan tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya;
3. Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi;
4. Menghindari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui;
5. Berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi;
6. Mengubah sikap dan gaya hidup perorangan;
7. Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri;
8. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan dan pelestarian;
9. Menciptakan kerja sama global.

4.2.7.4. Optimalisasi teknologi infomatika yang terintegrasi dengan disertai peningkatan kapasitas SDM guna mendukung tatakelola pemerintahan yang baik

Pelayanan publik harus diberikan oleh pemerintah secara maksimal dan optimal kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan dapat terukur, dan terarah, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah akan meningkat. Namun, tidak hanya pelayanan publik saja yang menjadi fokus utama bagi birokrasi dalam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan, melainkan seluruh unsur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting untuk menjadi fokus, sehingga akan berdampak positif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di era sekarang harusnya tidak lagi hanya mengandalkan sistem *Front Office*, melainkan pula harus menerapkan dan membuat sistem yang hemat energi, dan biaya, serta tidak lamban. Salah satu cara yang paling tepat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Mengingat, era sekarang telah beranjak dari sederhana menuju serba teknologi, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengadopsi unsur teknologi kedalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengadopsian teknologi dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mulai diterapkan yang mana diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tujuan dari SPBE yaitu agar pemerintah mampu melaksanakan dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta membentuk layanan berbasis elektronik yang berkualitas. Adapun ruang lingkup pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Ruang lingkup dalam upaya implementasi SPBE yang begitu kompleks tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SPBE dalam penyelenggaraan

pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus kuat guna diterapkan dalam mengimplemntasikan SPBE. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SPBE yaitu:

- a. Efektivitas;
- b. Keterpaduan;
- c. Kestinambungan;
- d. Efisiensi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Interoperabilitas; dan
- g. Keamanan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa penerapan SPBE dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena penerapan SPBE yang berlatar belakang teknologi tersebut harus diimbangi oleh kualitas sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya yang bersifat materil. Olehkarena itu, pengimplementasian SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara sistematis, dan terstruktur, sehingga prinsip-prinsip SPBE dapat terwujud.

4.2.7.5. Pemerataan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya secara berkelanjutan

Sumber daya manusia merupakan asset dalam membangun bangsa. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih, tidak akan bernilai tanpa addanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kabupaten Pasuruan harus menjamin kualitas serta pemerataan aksesibilitas pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 4. Salah satu cara peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dapat melalui akses pendidikan yang menyeluruh kepada masyarakat. Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat berharga dan signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Semua pihak mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang merata.

Sinergi antara pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain dari kacamata pembangunan pendidikan, pembangunan dan akses atas kesehatan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bukan sekadar pekerjaan rumah mengenai bagaimana memberikan akses terhadap kesehatan, namun juga

bagaimana Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memperhatikan bagaimana kualitas dari standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, kondisi covid-19 yang masih ada hingga saat ini membuat seluruh elemen termasuk Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu membuat terobosan untuk membendung penyebaran virus dan juga percepatan pemulihan kondisi ekonomi serta kesehatan di tengah masyarakat. Kebal COVID-19 (Keluarga Berdaya Lawan Covid-19) Kabupaten Pasuruan merupakan terobosan yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengantisipasi dampak lanjutan ekonomi pasca penanganan covid-19 di Kabupaten Pasuruan dalam rangka memasuki era *new normal*. Strategi kebijakan ini dilakukan melalui program dan gerakan dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya dengan keluarga sebagai ujung tombak yang harus diperkuat dalam memasuki era *new normal*.



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam kerangka ideologi Tri Sakti dan Agenda Nasional Nawa Cita. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kabupaten Pasuruan selama lima tahun yang akan datang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus.

5.1. VISI

Amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Undang-Undang tersebut memberi penegasan bahwa saat ini daerah memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan Baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Di samping mengacu pada regulasi di atas, sistematika pembahasan visi dan misi dalam bab ini juga merujuk pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun dalam setiap periodenya visi mempunyai jangkauan untuk dicapai selama 5 tahun. Hal ini berarti bahwa visi Kabupaten Pasuruan yang tercantum dalam RPJMD harus dicapai pada tahun 2023. Dalam tujuannya, visi juga dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholder* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi dalam pencapaiannya. Visi dan misi juga bersifat menjadi inspirasi, arah, dan posisi (*setting*) Kabupaten Pasuruan di masa depan.

Pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi, dan program dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 ini tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun juga telah dilakukan beberapa proses penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini ditegaskan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib untuk menyertakan visi pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Maka dari itu, mengacu pada hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018, RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 ini merupakan hasil perumusan dari pasangan pemenang Pilkada Kabupaten Pasuruan tahun 2018.

Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Pasuruan lima tahun terakhir (2013-2018) untuk mewujudkan “**Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat**” harus dilanjutkan untuk meraih prestasi pembangunan yang lebih Baik pada periode lima tahun mendatang (2018-2023). Berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 yaitu terwujudnya “**Kabupaten Pasuruan yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, dan Sejahtera**”, melalui tahapan periodisasi, maka periode 2018–2023 merupakan tahap pembangunan lima tahun ke tiga (2015–2020) “**Terwujudnya Daya Saing untuk**

Mencapai Kemandirian dan Kesejahteraan” dan ke empat (2020–2025) yaitu “Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Asri dan Lestari”.

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005–2015 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2013–2018 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2018–2023), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan. Salah satu Perubahan yang dilakukan yaitu terjabarkan pada Grand Design Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023.

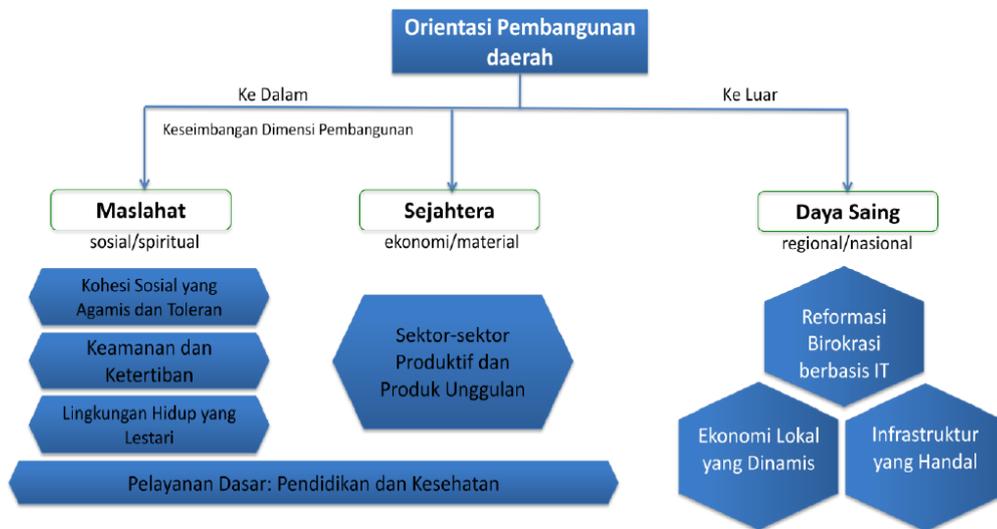


Gambar 5.1 Grand Design Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023
Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Visi pembangunan Kabupaten Pasuruan yang ingin diwujudkan pada periode 2018–2023 adalah:

“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”

Visi ini merupakan penerjemahan dari model pembangunan yang disebut dengan **“pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*)”**. Pencapaian pembangunan yang inklusif dilakukan melalui penguatan yang berorientasi kedalam dan keluar. Penguatan yang berorientasi kedalam melalui dua aspek yaitu Maslahat dan Sejahtera, sedangkan yang keluar melalui aspek Berdaya Saing. Kedua orientasi ini harus dapat dijalankan secara bersamaan dan seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini:



Gambar 5.2 Penjabaran Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Sejahtera

Sejahtera lebih bersifat ekonomi dan material melalui sektor-sektor produktif dan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Maslahat

Lebih bersifat sosial dan spiritual, melalui tiga aspek yaitu : (1) Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran; (2) Keamanan dan Ketertiban; dan (3) Lingkungan Hidup yang

Lestari. Masyarakat Kabupaten Pasuruan lima tahun kedepan tidak hanya sejahtera secara ekonomi atau material saja tetapi juga ada peningkatan aspek sosial dan spiritualnya secara bersamaan. Orientasi penguatan kedalam (Maslahat dan Sejahtera) tersebut adalah ditopang melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Berdaya Saing

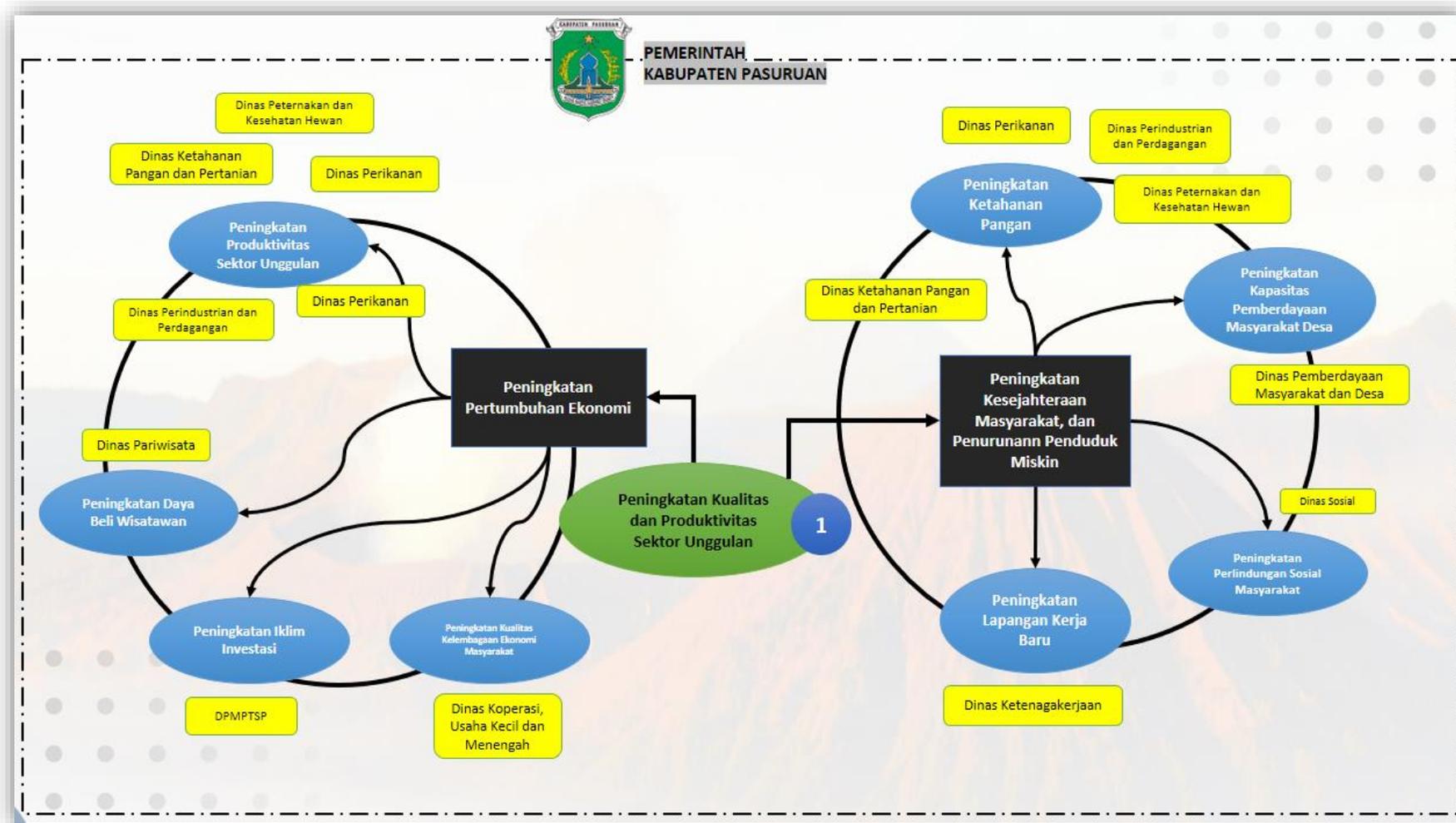
Memiliki keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui : (1) Reformasi Birokrasi berbasis IT; (2) Ekonomi Lokal yang Dinamis; dan (3) Infrastruktur yang Handal.

5.2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera dan Berdaya Saing” tersebut, ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

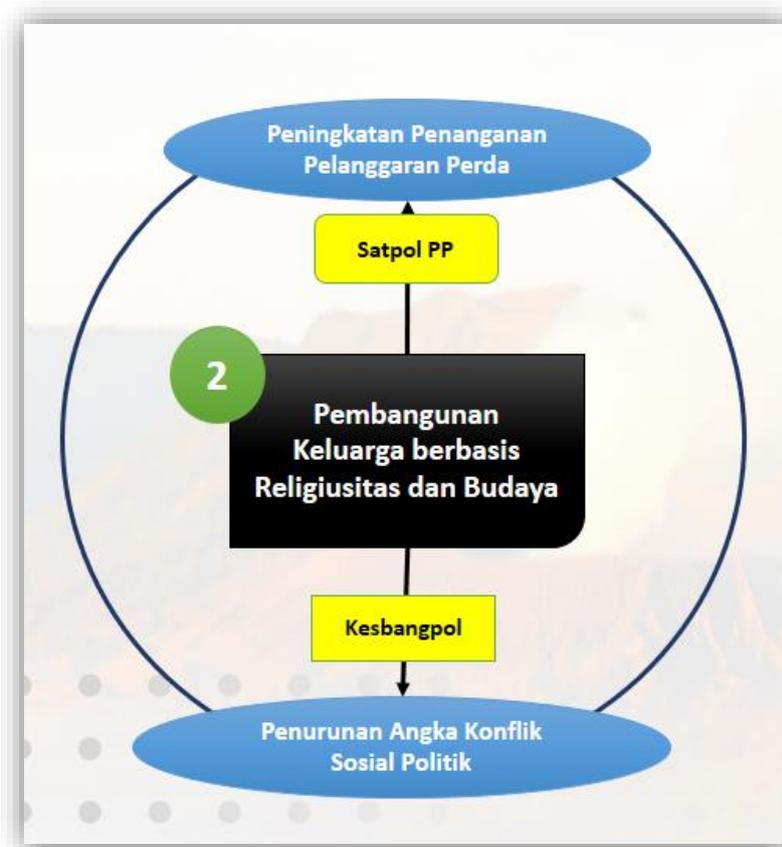
Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan meliputi UMKM/IKM, koperasi, pertanian dan pariwisata melalui penguatan kelembagaan desa serta mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah ekonomi. Meningkatkan nilai tambah dilakukan melalui peran pemerintah daerah dalam bentuk legalitas, pelatihan, penggunaan teknologi tepat guna sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah.



Gambar 5.2 Grand Design Misi 1 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023
 Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Misi 2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah komunitas, sehingga misi ini untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui pembangunan berbasis keluarga dengan memperkuat modal sosial (*social capital*) yaitu mewujudkan kekuatan dari dalam keluarga (kohesi sosial) sehingga akan tercipta imunitas sosial terhadap gangguan sosial dengan memperkuat religiusitas dan budaya.

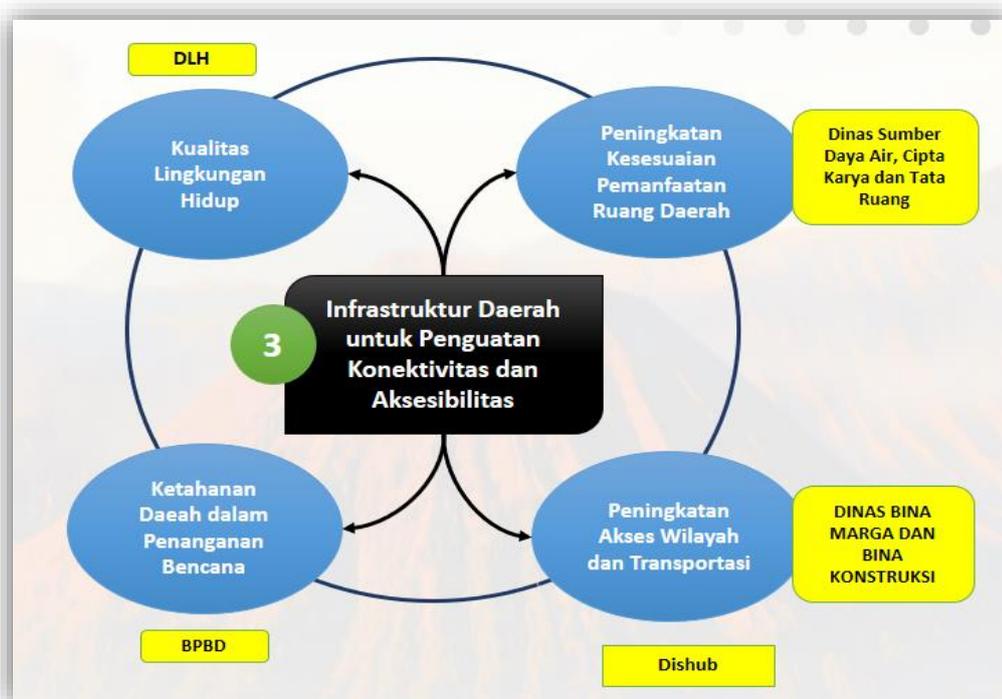


Gambar 5.3 Grand Design Misi 2 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Misi 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Misi ini bermakna menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi. Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Pasuruan dimanfaatkan dalam jangka panjang dan tidak merusak. Pemanfaatan SDA tersebut harus diimbangi dengan konservasi lingkungan sekaligus mengatasi masalah bencana alam yang ada di Kabupaten Pasuruan serta sebagai pendukung keberhasilan pembangunan diberbagai sektor (Infrastruktur). Sektor-sektor produktif dan unggulan Kabupaten Pasuruan akan semakin bersaing ketika didukung dengan infrastruktur wilayah yang Baik. Sehingga misi ini mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas dalam rangka daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur.

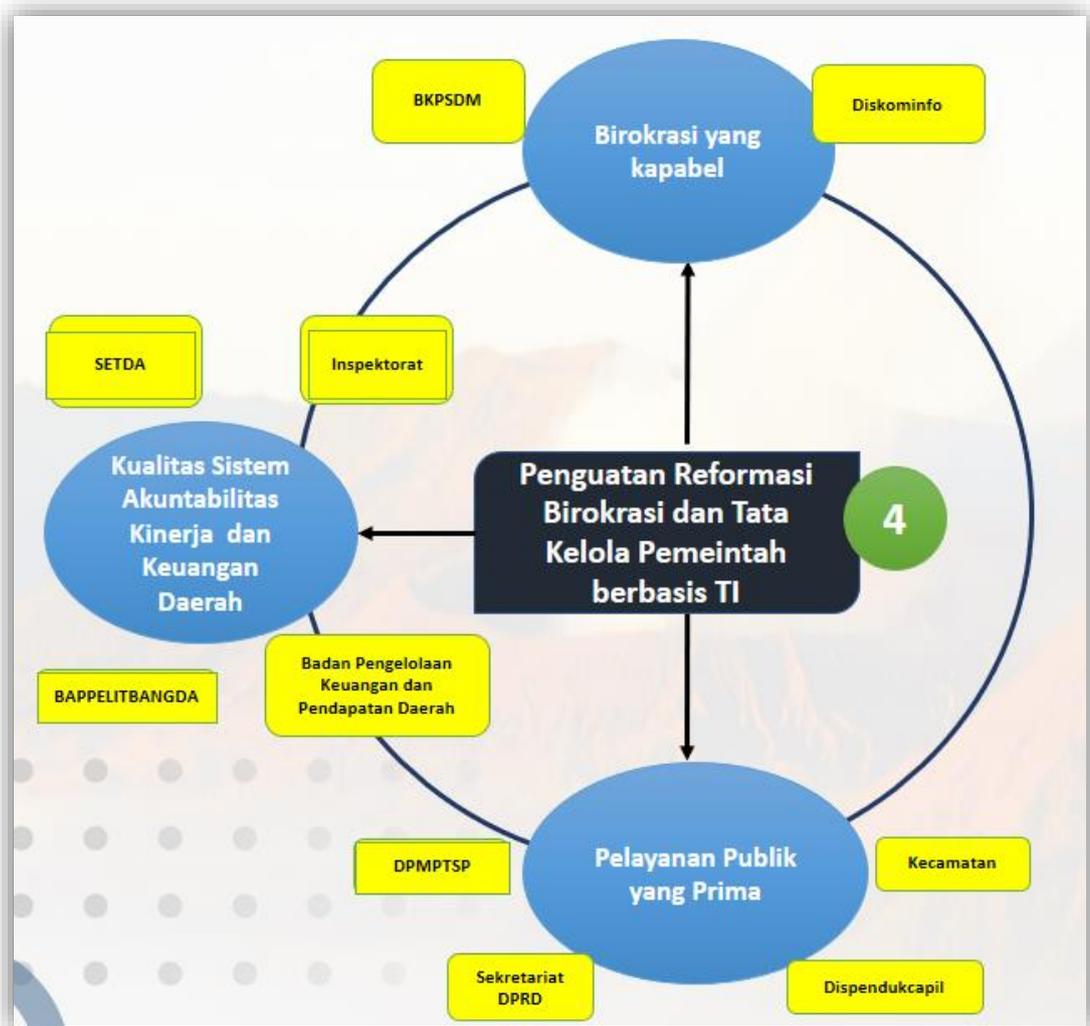


Gambar 5.4 Grand Design Misi 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Misi 4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

Misi ini mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis melalui reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik mengarah pada pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna memangkas jarak, waktu dan biaya (patologi birokrasi). Keterbukaan informasi publik akan dilakukan guna mendukung pemerintahan yang transparan. Melalui IT, masyarakat akan didorong agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

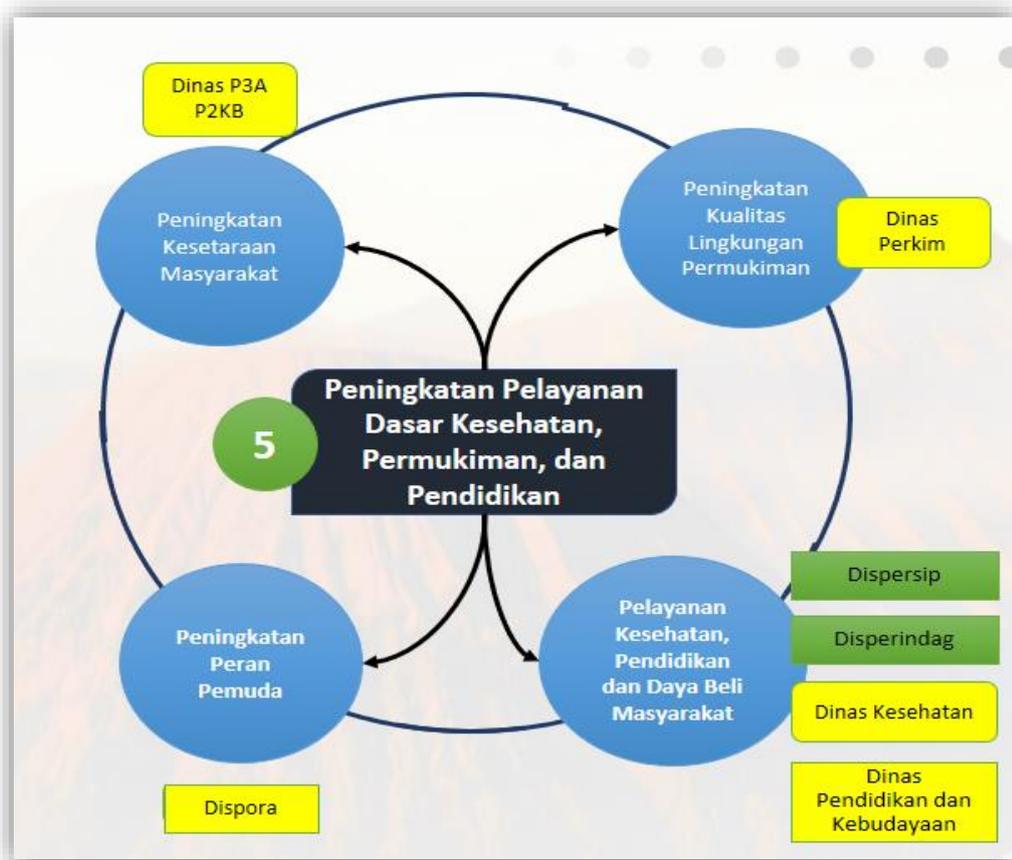


Gambar 5.5 Grand Design Misi 4 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Misi 5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah komunitas, sehingga misi ini untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui pembangunan berbasis keluarga dengan memperkuat modal sosial (*social capital*) yaitu mewujudkan kekuatan dari dalam keluarga (kohesi sosial) sehingga akan tercipta imunitas sosial terhadap gangguan sosial dengan memperkuat religiusitas dan budaya disertai dengan penyediaan layanan kesehatan dan permukiman serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pasuruan yang religius, cerdas dan mandiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan integrasi pendidikan formal dan non formal.



Gambar 5.6 Grand Design Misi 5 Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

5.3 Keselarasan Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah

Dalam rangka keselarasan pembangunan antara pusat dengan daerah. RPJMD Kabupaten Pasuruan harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah:

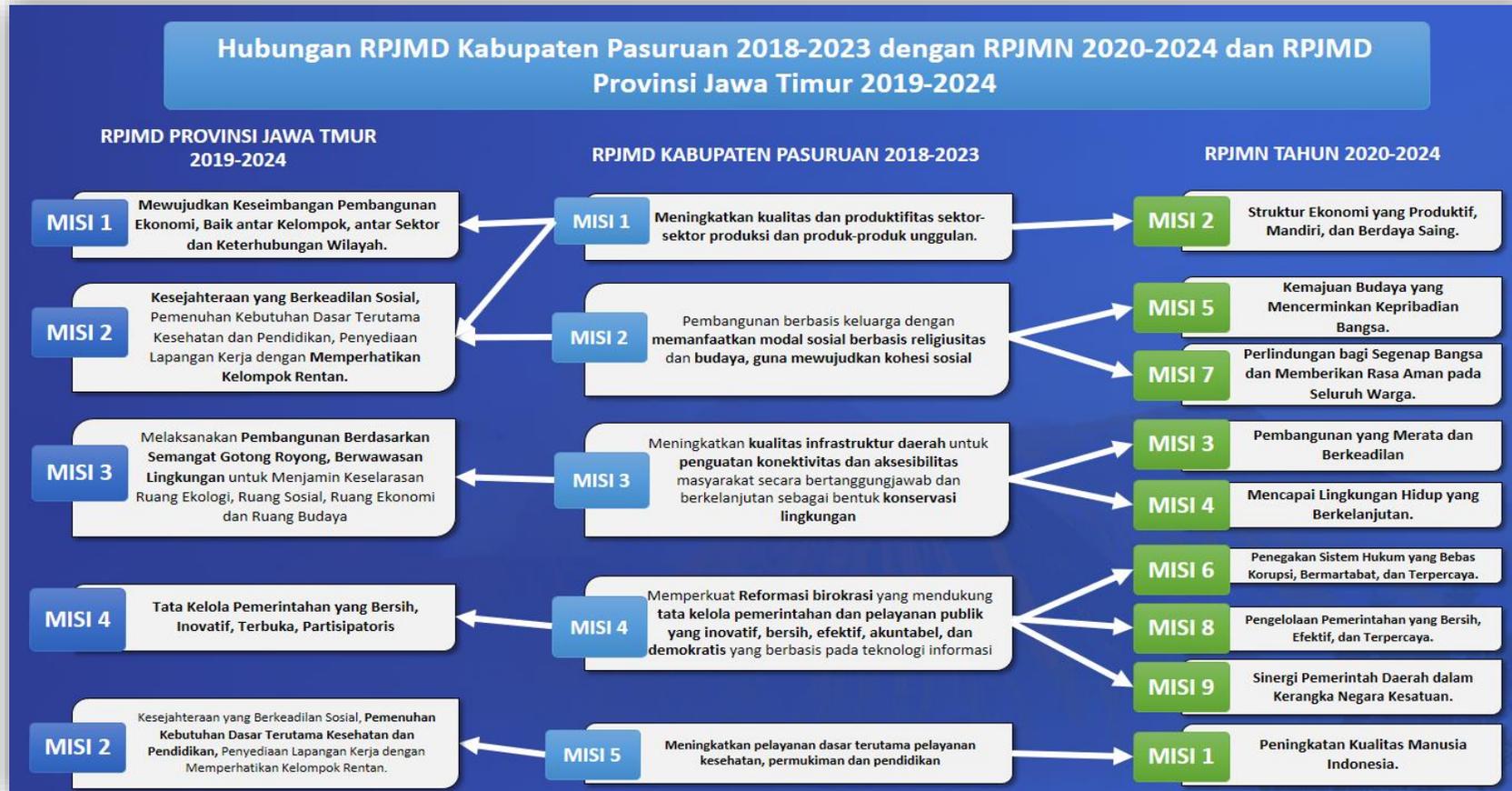
*“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”*

Upaya dalam rangka mewujudkan visi yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Hubungan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 dengan Visi Misi RPJMN 2020-2024

Keterwujudan sinergitas perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Pasuruan dengan RPJMN harus terjadi, mengingat tersajinya program dan kegiatan pembangunan pemerintah yang dilaksanakan di nasional harus disikapi dan ditindak lanjuti dengan program pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan.



Gambar 5.7 Hubungan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 dengan Visi Misi RPJMN 2020-2024 dan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023

Tabel 5.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Pasuruan dengan RPJMN

URAIAN		RPJMN 2020-2024		RPJMD KABUPATEN PASURUAN 2018-2023
VISI		Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.		Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing
MISI	Misi 1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.	Misi 5	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan
	Misi 2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.	Misi 1	Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
	Misi 3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.	Misi 3	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan



URAIAN		RPJMN 2020-2024		RPJMD KABUPATEN PASURUAN 2018-2023
				berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
	Misi 4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.	Misi 3	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
	Misi 5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.	Misi 2	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial
	Misi 6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.	Misi 4	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi
	Misi 7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.	Misi 2	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial
	Misi 8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.	Misi 4	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan

URAIAN		RPJMN 2020-2024		RPJMD KABUPATEN PASURUAN 2018-2023
				demokratis yang berbasis pada teknologi informasi
	Misi 9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.	Misi 4	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi

Hubungan Visi Misi RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 dengan Visi Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Sinergitas dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur menjadi keharusan dalam substansi RPJMD Kabupaten Pasuruan, karena secara kewilayahan Kabupaten Pasuruan berada pada Wilayah Jawa Timur. Berikut disajikan sinergitas Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Pasuruan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

URAIAN		RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024		RPJMD KABUPATEN PASURUAN 2018-2023
VISI		Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.		Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing
MISI	Misi 1	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	Misi 1	Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan



URAIAN		RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024		RPJMD KABUPATEN PASURUAN 2018-2023
				kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
	Misi 2	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	Misi 5	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan
			Misi 2	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
	Misi 3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	Misi 4	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi



URAIAN		RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024		RPJMD KABUPATEN PASURUAN 2018-2023
	Misi 4	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya	Misi 3	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan

5.4. TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada visi Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencapai misi **Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat** , maka terdapat 2 tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
- b. Meningkatnya Daya Beli Wisatawan
- c. Meningkatnya Iklim Investasi
- d. Meningkatnya Kualitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Ketahanan Pangan
- b. Meningkatnya Kemandirian Desa
- c. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat
- d. Meningkatnya kesempatan lapangan kerja baru

2. Dalam rangka mencapai misi **Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan**

budaya, guna mewujudkan kohesi sosial, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda.
- b. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik

3. Dalam rangka mencapai misi **Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani bencana
- c. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi
- d. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah

4. Dalam mencapai misi **Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah
- b. Meningkatnya Birokrasi yang kapabel

c. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

5. Dalam rangka mencapai misi **Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat;
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
- c. Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat
- d. Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan yang dijabarkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Sebelum Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing										
MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
				2019	2020	2021	2022	2023		
1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah	TUJUAN 1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,72	5,73 - 6	5,73 - 6	5,73 - 6	5,73 - 6	5,73 - 6	5,73 - 6	
	SASARAN 1.1.1 Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif	PDRB	Rp. 124.979,8 M	Rp. 132.103,648 M	Rp. 139.633,556 M	Rp. 147.592,669 M	Rp. 295.185,338 M	Rp. 312.010,902 M	Rp. 312.010,902 M	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Disperindag
	SASARAN 1.1.2 Meningkatkan kunjungan pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.390.496	2.582.200	2.780.200	2.900.400	3.007.700	3.198.100	3.198.100	Dinas Pariwisata

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	2023	
ah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.	SASARAN 1.1.3 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Omset Usaha Mikro Dan Koperasi (Rp.000)	1.295.048.000	1.312.681.000	1.330.491.000	1.348.471.000	1.366.621.000	1.384.951.000	1.384.951.000	Diskop dan UM
	SASARAN 1.1.4 Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	0	0,29	0,88	2,05	3,23	4,40	4,40	Dinas PMD
	SASARAN 1.1.5 Meningkatkan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	n/a	67	67,5	68	68,5	69	69	Disnak KP
	TUJUAN 1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,45	9,40	9,35	9,30	9,25	9,20	9,20	

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD	
				2019	2020	2021	2022	2023	2023		
	SASARAN 1.2.1 Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,11	6,02	5,08	5,04	5,01	4,89	4,89	Disnaker	
	SASARAN 1.2.2 Meningkatkan Penanggulangan PMKS	Persentase PMKS	6,49	6,4	6,0	5,7	5,2	4,7	4,7	Dinas Sosial	
2	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna	TUJUAN 2.1 Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	n/a	62,30	62,40	62,50	62,60	62,70	62,70	
		SASARAN 2.1.1 Meningkatkan Penanganan	Persentase Penegakan Perda	81,5%	91%	92%	93%	94%	95%	95%	Satpol PP

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	2023	
mewujudkan kohesi sosial	Pelanggaran Perda									
	SASARAN 2.2.2 Menurunnya Konflik Sara	Jumlah Konflik Sara	0	0	0	0	0	0	0	Bakesbangpol
3 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan	TUJUAN 3.1 Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan	Indek Wiliamson	0,265 (th. 2015)	0,260	0,255	0,250	0,245	0,240	0,240	
	SASARAN 3.1.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,10	58,42	59,73	61,34	62,65	64,26	64,26	DLH
	SASARAN 3.1.2 Menurunnya Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	214	212	210	208	206	204	204	BPBD

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2023	OPD
				2019	2020	2021	2022	2023		
an pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan	SASARAN 3.1.3 Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	n/a	1,20	1,30	1,35	1,41	1,47	1,47	Dinas Bina Marga
	SASARAN 3.1.4 Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi	Persentase Aksesibilitas Transportasi	n/a	10,4	11,29	12,17	13,04	13,92	13,92	Dinas Perhubungan
	SASARAN 3.1.5 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Ketahanan Air	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	PU SDA dan Tata Ruang
4 Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung	TUJUAN 4.1 Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional,	Indeks Reformasi Birokrasi	60,67	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00	

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	2023	
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi	Transparan, Akuntabel dan Responsif									
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	NILAI SAKIP	75,00 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)	Setda, Bappeda
	Sasaran 4.1.2 Meningkatkan kualitas Sistem Keuangan Daerah	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD, inspektorat
	Sasaran 4.1.3 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	IKM	Baik	82,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)	84,50 (Baik)	Dispendukcapil, DPMPT, Kominfo

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD	
				2019	2020	2021	2022	2023	2023		
										Sekwan, Perpus dan Arsip Kecamatan.	
	Sasaran 4.1.4 Meningkatkan Profesionalitas ASN	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	n/a	70	71	70,02	70,03	70,04	70,04	BKPPD	
5	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan	TUJUAN 5.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	IPM	66,69	68,18	68,90	69,61	70,30	70,98		
		SASARAN 5.1.1 Meningkatkan Pelayanan Dasar Kesehatan	INDEKS KESEHATAN	76,76	76,85	76,89	76,94	76,98	77,02	77,02	DINKES, RSUD

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2023	OPD
				2019	2020	2021	2022	2023		
nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.	SASARAN 5.1.2 Meningkatkan Pelayanan Dasar Pendidikan	INDEKS PENDIDIKAN	56,20	58,13	59,09	60,05	61,01	61,98	61,98	Dinas Pendidikan
	SASARAN 5.1.3 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	INDEKS DAYA BELI	n/a	70,94	71,98	72,99	73,97	74,91	74,91	Disperindag
	SASARAN 5.1.4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks Permukiman Layak Huni	n/a	76,05	81,18	85,60	92,50	96,55	96,55	Dinas perkim
	SASARAN 5.1.5 Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	(Indeks Pemberdayaan Gender) IPG	90,45	90,76	90,91	91,07	91,22	91,38	91,38	Dinas KBPP

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2023	OPD
				2019	2020	2021	2022	2023		
	SASARAN 5.1.6 Meningkatkan Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda (Per 100.000 Pemuda)	Rasio Pemuda Berprestasi	15	20	25	30	35	40	40	Dispora (level provinsi / Nasional)

Tabel 5.4 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing									
MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara	TUJUAN 1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,72	5,73-6	5,73-6	5,73-6	4,23-5,81	4,24-5,81	4,24-5,81
	SASARAN 1.1.1 Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	n/a	n/a	n/a	n/a	0,5	0,7	0,7
		Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	n/a	n/a	n/a	n/a	0,3	0,4	0,4

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.		Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan	n/a	n/a	n/a	n/a	0,4	0,5	0,5
	SASARAN 1.1.2 Meningkatnya Daya Beli Wisatawan	<i>Spending of Money in Tourism</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	787.417.400.000	866.159.140.000	866.159.140.000
	SASARAN 1.1.3 Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	n/a	n/a	n/a	n/a	0,5	0,6	0,6
	SASARAN 1.1.4 Meningkatnya Kualitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Dan Koperasi	n/a	n/a	n/a	n/a	5	7	7

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	TUJUAN 1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	9,45	9,4	9,35	9,30	10,25-10,38	10,20-10,33	10,20-10,33
		Indeks Gini	n/a	n/a	n/a	n/a	0,3482-0,3473	0,3472-0,3470	0,3472-0,3470
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,11	6,02	5,08	5,07-5,04	6,08-5,91	5,79-5,41	5,00-4,89
	SASARAN 1.2.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	n/a	67	67,5	68	68,5	69	69
	SASARAN 1.2.2 Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	0	0,29	0,88	2,05	3,23	4,40	4,4
	SASARAN 1.2.3 Meningkatnya Perlindungan	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan	6,49	6,4	6,0	5,7	5,2	4,7	4,7

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Sosial Masyarakat	Kesejahteraan Sosial (PPKS)							
	SASARAN 1.2.4 Meningkatnya kesempatan lapangan kerja baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	75%	76%	76%
Misi 2 : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial	TUJUAN 2.1 Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	n/a	62,30	62,40	62,50	62,60	62,70	62,70

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial	SASARAN 2.1.1 Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	n/a	n/a	n/a	n/a	70%	75%	75%
	SASARAN 2.1.2 Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik	Persentase konflik Sosial Politik yang tertangani	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	87%	87%
Misi 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka	TUJUAN 3.1 Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan	Indeks Wiliamson	0,265 (th. 2015)	0,260	0,26	0,271	0,265	0,250	0,240
	SASARAN 3.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,10	58,42	59,73	61,81	62,16	62,50	62,50

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan	SASARAN 3.1.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani bencana	Indeks Ketahanan Daerah	n/a	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74
	SASARAN 3.1.3 Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	n/a	1,20	1,30	1,35	1,41	1,47	1,47
	Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi	Indeks Konektivitas Wilayah	n/a	10,4	11,29	12,17	13,04	13,92	13,92
	SASARAN 3.1.4 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah	Indeks Ketahanan Air	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68
		Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	n/a	n/a	n/a	n/a	80%	85%	85%

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi	TUJUAN 4.1 Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	60,67	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00
	SASARAN 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	75,00 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	SASARAN 4.1.2 Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	70	71	70,02	70,03	70,04	70,04
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	n/a	n/a	n/a	n/a	80	82	82
	SASARAN 4.1.3 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	82,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)	84,50 (Baik)
Misi 5 : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan	TUJUAN 5.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,69	68,18	68,90	67,51-69,61	68,90-70,30	69,61-70,98	69,61-70,98
	SASARAN 5.1.1	Indeks Kesehatan	76,76	76,85	76,89	76,94	76,98	77,02	77,02

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat	Indeks Pendidikan	56,20	58,13	59,09	60,05	61,01	61,98	61,98
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	n/a	7	7	8	8
		Indeks Daya Beli	n/a	70,94	71,98	72,99	73,97	74,91	74,91
	SASARAN 5.1.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks Permukiman Layak Huni	n/a	76,05	81,18	85,6	92,5	96,55	96,55
	SASARAN 5.1.3 Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	90,45	90,76	90,91	91,07	91,22	91,38	91,38
	SASARAN 5.1.4 Meningkatnya Peran Serta	Rasio Pemuda Berprestasi	15	20	25	30	35	40	40

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Dan Eksistensi Pemuda (Per 100.000)								



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

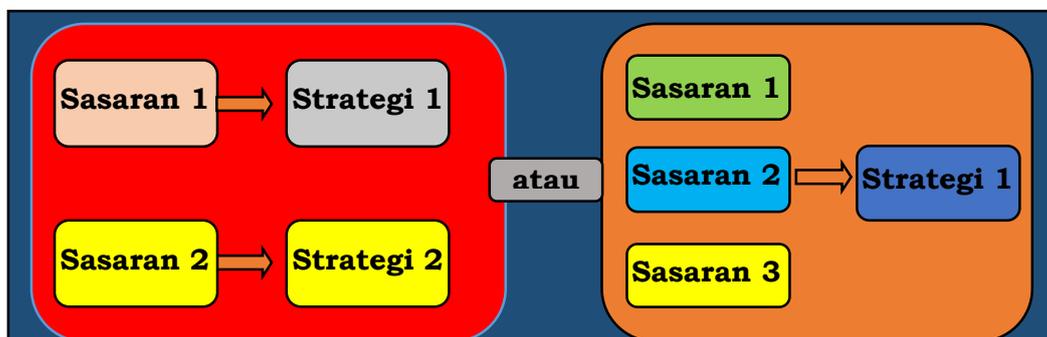
Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan diperlukan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera dan Berdaya Saing. Strategi merupakan serangkaian komitmen pemerintah daerah berupa pola tindakan yang diperlukan pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif.

Dalam pelaksanaan strategi perlu adanya manajemen strategis berupa arah kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah disusun agar lebih terarah pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

6.1. Strategi Umum Pembangunan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penyajian strategi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 akan didasarkan pada sasaran dari setiap misi. Berikut *cascading* (perencanaan) per-misi Kabupaten Pasuruan pada sisa implementasi RPJMD kedepan.

MISI 1: Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.1 Misi 1

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
1	Mewujudkan Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Meningkatkannya Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	4,24-5,81	1	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	n/a	0,7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
							Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	n/a	0,4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah	
	menuju kesejahteraan masyarakat.						Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan	n/a	0,5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
					2	Meningkatnya Daya Beli pariwisata	<i>Spending of Money in Tourism</i>	n/a	866.159.140.000	Dinas Pariwisata	
						3	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	n/a	2,7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						4	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Dan Koperasi	n/a	7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	10,20-10,34	5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	n/a	69	1. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
			Indeks Gini	0,3472-0,3470						2. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,79-5,41	6	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	0	4,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	6,49	4,7	Dinas Sosial
					8	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	n/a	76%	Dinas Ketenagakerjaan

Tujuan 1.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran 1.1.1: Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah

Merujuk sasaran berkenaan dengan **Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah**, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran **Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah**, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat harus dilakukan dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Sumber Daya Alam wilayah (Tanaman Pangan ,Hortikultura dan perkebunan) mendukung 2. Potensi sumber daya alam yang mendukung pembangunan perikanan yang ada 3. Ketersediaan tenaga kerja dan pelaku usaha perikanan, pertanian 4. Adanya kelembagaan formal dan informal pendukung pembangunan perikanan 5. Adanya Regulasi terkait Perdagangan dan Perindustrian 6. Potensi UTTP di Pasar Rakyat dan Pasar Modern 7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur dalam Perda Nomor 12 tahun 2010 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan modal yang dimiliki petani. 2. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan 3. Rendahnya pemasaran dan akses pasar 4. Menurunnya jumlah IKMB dari 56 di tahun 2017 menjadi 54 di tahun 2018
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Tepat Guna bidang pertanian yang tersedia 2. Perkembangan teknologi perikanan mulai budidaya, penangkapan dan pengolahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan pertanian 2. Masuknya komoditi import akibat adanya pasar global

<ol style="list-style-type: none"> 3. Tingginya potensi pasar perikanan nasional dan internasional 4. Koordinasi lintas sektor yang mendukung berjalan dengan optimal 4. Kerjasama antar Pemerintah, swasta dan petani 5. Lokasi Kabupaten Pasuruan yang sangat strategis (Segi Tigas Emas) 6. Peluang pasar produk industri semakin luas dengan revolusi industri 4.0 dan era globalisasi 7. Pelayanan tera dan tera ulang menciptakan PAD bagi Kab. Pasuruan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Turunnya nilai investasi di Kabupaten Pasuruan 4. Kurangnya Bahan Organik pada lahan pertanian 5. Kontinuitas produksi masih belum stabil diakibatkan oleh fluktuasi iklim 6. Penurunan daya dukung dan kualitas sumberdaya lingkungan perairan 7. Persaingan pemasaran produk industri yang semakin ketat dan menuntut standar tinggi
--	---

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah**. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.3 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan SDM di berbagai sektor melalui teknologi tepat guna
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Pemanfaatan usaha ekonomi kreatif sebagai upaya meminimalisir potensi bencana pada sumber daya alam	Memfasilitasi akses pasar dan permodalan usaha ekonomi sebagai upaya mengembangkan sektor unggulan

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu

“Memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0” sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 1.1.1 (S.1.1.1).

Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Daya Beli Wisatawan

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Daya Beli Wisatawan, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Daya Beli Wisatawan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.4 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai tradisi budaya tertentu 2. Keaneekaragaman potensi wisata 3. Aksesibilitas menuju destinasi wisata utama 4. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya angkutan umum menuju destinasi wisata unggulan 2. Adanya Permasalahan Persampahan di Sekitar destinasi wisata 3. Belum tersedianya branding Pariwisata daerah 4. Event atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih terbatas 5. Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri belum optimal
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pariwisata di Kabupaten Pasuruan dapat dikemas menjadi paket perjalanan wisata khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi dan promosi daya tarik wisata yang belum optimal

2. Terdapat peluang mengembangkan atraksi-atraksi di daya tarik wisata yang ada	2. Kualitas SDM dan pemahaman masyarakat terhadap wisata rendah
3. Dapat dikembangkan sebagai mass tourism	3. Persaingan perkembangan wisata daerah lain yang lebih maju/berkembang
4. Adanya dukungan regulasi kebijakan nasional di bidang pariwisata	4. Adanya pengaruh budaya global terhadap budaya local

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Daya Beli Wisatawan**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.5 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Meningkatkan Daya Ekonomi melalui Kebal Covid-19 dengan Memperkuat New Normal Kepariwisataaan Daerah	Memulihkan dan mengembangkan Destinasi Wisata alam dan Wisata Buatan Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Mengoptimalkan Destinasi Wisata dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Pengembangan Aksesibilitas menuju Wisata dan peningkatan promosi daya tarik wisata

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu **“Meningkatkan Daya Ekonomi melalui Kebal Covid-19 dengan Memperkuat New Normal Kepariwisataaan Daerah”** dan strategi WO yaitu **“Memulihkan dan mengembangkan Destinasi Wisata alam dan Wisata Buatan Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 1.1.2 (S.1.1.2).

Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Iklim Investasi

Merujuk sasaran berkenaan dengan **Meningkatnya Iklim Investasi**, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Iklim Investasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.6 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan sistem online untuk sistem pelayanan perizinan 2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang regulasi-regulasi baru terkait pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan memaksimalkan pelaksanaan SOP yang telah dibuat 4. Dibuatnya aplikasi terintegrasi secara elektronik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis sebagai tracking system 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat melakukan sistem pelayanan tatap muka dikarenakan pandemi covid-19 2. Kurangnya sosialisasi regulasi baru terkait pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Penyelesaian proses penerbitan izin membutuhkan waktu yang lama 4. Belum terintegrasinya secara online dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Jumlah Pengunjung Informasi Tata Ruang di DPMPPT Kabupaten Pasuruan 2. Banyaknya Jumlah Penyelesaian ijin yang memenuhi target 3. Adanya peningkatan nilai investasi yang ditanamkan di daerah 4. Adanya peningkatan Jumlah Investor bersekala Nasional PMDN dan PMA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena belum maksimal dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengakibatkan kurangnya Jumlah Ijin yang diterbitkan

- | |
|---|
| 5. Peningkatan Nilai Investasi Daerah Tahun 2015-2019 dengan nilai tertinggi Rp. 6,29 pada tahun 2019 |
|---|

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Iklim Investasi**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara Strength dan Opportunity akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara Strength dan Threats menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara Weakness dan Opportunity menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara Weakness dan Threats menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.7 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Mendorong pertumbuhan iklim investasi daerah	Peningkatan sistem informasi berbasis online sebagai upaya peningkatan kinerja
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Peningkatan pengelolaan sistem informasi sebagai upaya penanggulangan dampak Pandemi COVID-19	Mengoptimalkan tumbuh kembang lembaga ekonomi masyarakat dengan penetapan SOP yang jelas

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu **“Mendorong pertumbuhan iklim investasi daerah”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 1.1.3 (S.1.1.3).

Sasaran 1.1.4: Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk

itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.8 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Regulasi yang mendukung mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro serta Organisasi 2. Adanya Kenaikan jumlah koperasi dan usaha mikro dari tahun ke tahun 3. Terdapat Koperasi yang diakui secara nasional 4. Dekopinda sebagai mitra dalam pembinaan koperasi 5. Terbentuknya paguyuban koperasi wanita di tingkat kecamatan 6. Terbentuknya asosiasi UKM di Kabupaten Pasuruan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya persentase peningkatan usaha mikro dari 2018 yang mencapai 2,51% menjadi -1,91% pada 2019 2. Kapasitas SDM pembina tentang penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang masih kurang 3. Masih kurangnya dukungan dalam pengembangan ekonomi kreatif 4. Turunnya capaian persentase koperasi aktif dari 90,12% pada 2018 menjadi 89,7% pada 2019 5. Menurunnya persentase koperasi pondok pesantren aktif dari 86,11% pada 2018 menjadi 84,93% pada 2019
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya komitmen dan dukungan politik Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap pembangunan koperasi dan usaha mikro 2. Stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan yang relatif aman dan terjaga di Wilayah Kabupaten Pasuruan 3. Tersedianya jumlah penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang potensial dalam penciptaan wirausaha baru 4. Tersedianya bahan baku untuk proses produksi bagi pelaku usaha mikro 5. Berkembangnya sektor ekonomi kreatif yang semakin menjanjikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak meratanya kapasitas dan kualitas SDM pengelola koperasi terutama wilayah timur Pasuruan 2. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi 3. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi) 4. Masih terbatasnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan koperasi dan pengembangan usaha mikro 5. Dampak Pandemi COVID-19 yang belum berakhir berdampak pada UMKM di Kabupaten Pasuruan

6. Kemajuan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi dan pelaku usaha mikro	
7. Dukungan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terhadap pengembangan koperasi dan usaha mikro	
8. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mendukung dan membeli produk local	

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.9 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Mendorong tumbuh kembang dan kemandirian Lembaga ekonomi masyarakat yang terstandarisasi	Pengembangan Kapasitas SDM Pembina Koperasi dan Usaha Mikro sebagai upaya peningkatan kualitas lembaga ekonomi masyarakat
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Penguatan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa sebagai upaya peningkatan Perekonomian Desa	Peningkatan pengelolaan koperasi dan Usaha Mikro sebagai upaya penanggulangan dampak Pandemi COVID-19

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu **“Mendorong tumbuh kembang dan kemandirian Lembaga ekonomi masyarakat**

yang terstandarisasi” sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 1.1.4 (S.1.1.4).

Tujuan 1.2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Ketahanan Pangan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya ketahanan pangan, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.10 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas, terbitnya peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas dengan mengukuhkan kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memberikan pelayanan publik secara berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 521/778/HK/424.013/2016 tentang Penetapan Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan dan masyarakat sekitar kawasan hutan 3. Besarnya jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani; 4. Adanya Petugas teknis peternakan dan penyuluh pertanian; 5. Adanya lembaga pembelian gabah baik swasta maupun pemerintah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang tersedia kurang memadai (kuantitas/kualitas), secara kuantitas dan kualitas, ketersediaan SDM peternakan masih belum memadai sehingga memperlambat proses pelayanan publik; 2. Sarana & prasarana peternakan belum memadai, masih ada sarana dan prasarana yang kurang memenuhi syarat atau mengalami penyusutan; 3. Lemahnya kelembagaan dan akses petani terhadap informasi, teknologi, permodalan dan pasar; 4. Ketergantungan masyarakat pada beras dan terigu masih tinggi; 5. Infrastruktur untuk kelancaran distribusi pangan masih belum memadai 6. Masih terdapat daerah rawan pangan; 7. Pengawasan keamanan pangan yang kurang optimal.
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi peternakan, potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Pasuruan masih terbuka luas, utamanya dalam mendukung program swasembada daging, telur dan susu. 2. Motivasi peternak, prospek peternakan yang menjanjikan dapat mendorong tumbuhnya motivasi peternak untuk mengembangkan usaha peternakannya. 3. Ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH terus meningkat. 4. Perkembangan IPTEK untuk meningkatkan produktivitas pertanian, teknologi pertanian khususnya peternakan terus berkembang, utamanya teknologi tepat guna spesifik lokal, memudahkan peternak dalam penganeekaragaman usaha peternakan; 5. Tersedianya potensi sumberdaya alam untuk pengembangan pangan; 6. Adanya regulasi tentang kelembagaan petani,; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjangkitnya penyakit ternak secara eksplosif, Berjangkitnya penyakit ternak eksplosif seperti flu burung, flu babi, antraks, brucella mencemaskan sebagian besar pemangku kepentingan bidang peternakan. 2. Masuknya produk peternakan dari luar negeri: Adanya peredaran produk peternakan impor sangat mempengaruhi kestabilan produk peternakan dalam negeri. 3. Kurangnya modal usaha peternakan; Sebagian besar peternak bermodal kecil sehingga mempengaruhi skala kepemilikan dan model usahanya. 4. Menurunnya produktifitas ternak; 5. Kurangnya pengetahuan peternak untuk mempertahankan ternak dengan kualitas unggul dengan produktifitas tinggi menyebabkan usaha peternakan kurang menguntungkan 6. Masih adanya Gizi Buruk dan daerah rawan pangan; 7. Terjadinya penurunan harga saat panen raya; 8. Penggunaan zat tambahan makanan yang berbahaya; 9. Tidak adanya kebijakan rekrutmen aparat penyuluh.

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.11 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Meningkatkan Daya Ekonomi melalui Kebal Covid-19 dengan Memperkuat lumbung pangan keluarga/komunitas	Meningkatkan Kelembagaan, Sarana Prasarana Pangan sebagai upaya memperlancar distribusi, meningkatkan produksi, dan mendorong diversifikasi pangan
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Peningkatan produksi pangan dan penguatan akses permodalan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan	Mengoptimalkan pengawasan keamanan pangan dan memperkuat permodalan sebagai upaya memperlancar distribusi pangan

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu **“Meningkatkan Daya Ekonomi melalui Kebal Covid-19 dengan Memperkuat lumbung pangan keluarga/komunitas”** dan strategi WO yaitu **“Meningkatkan Kelembagaan, Sarana Prasarana Pangan sebagai upaya memperlancar distribusi, meningkatkan produksi, dan mendorong diversifikasi pangan”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 1.2.1 (S.1.2.1)

Sasaran 1.2.2: Meningkatnya Kemandirian Desa

Merujuk sasaran berkenaan dengan **Meningkatnya Kemandirian Desa**, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai

dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana **Meningkatnya Kemandirian Desa** adalah melalui Persentase Desa Mandiri.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran **Meningkatnya Kemandirian Desa**, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.12 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan lembaga masyarakat yang mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018 2. Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Desa tahun 2015-2018 3. Lembaga Ekonomi Pedesaan yang terbina di Kabupaten Pasuruan sebanyak 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya BUMDes terbentuk di Kabupaten Pasuruan yaitu 117unit dari 341 Desa
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya BUMDes di setiap Desa 2. Peningkatan Perekonomian Desa 3. Adanya Desa Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pengelolaan BUMDes

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Kemandirian Desa**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara

Weakness dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara Weakness dan Threats menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.13 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Penguatan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa sebagai upaya peningkatan Perekonomian Desa	Mendorong inovasi pemerintahan desa dalam mengoptimalkan sumber daya desa
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Pengelolaan Lembaga Masyarakat dalam mempertahankan BUMDes	Mengoptimalkan Penambahan dan pengelolaan Lembaga Ekonomi Desa

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu **“Penguatan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa sebagai upaya peningkatan Perekonomian Desa”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 1.2.2 (S.1.2.2).

Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat , maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Kesejahteraan sosial berkaitan dengan urusan sosial yang merupakan urusan layanan dasar yang penting untuk diperhatikan oleh seluruh daerah khususnya Kabupaten Pasuruan. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sekaligus perekonomian masyarakat yang secara tidak langsung berdampak terhadap daerah. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat adalah melalui Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal

perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.14 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial 2. Kondisi sosial ekonomi yang kondusif di Kabupaten Pasuruan 3. Adanya mitra kerja dan lembaga sosial yang peduli dengan masalah social 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan PPKS yang belum optimal 2. Sarana dan Prasarana Penanganan PMKS yang masih kurang
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Koordinasi Lintas Sektoral dengan Dinas terkait 2. Adanya Jaringan kemitraan antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 3. Adanya Jaringan kemitraan antara Pemerintah dengan dunia usaha 4. Adanya Jaringan kemitraan antara Pemerintah dengan dunia Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penambahan PPKS di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.15 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Mengembangkan Daya Sosial melalui Kebal Covid-19 dengan memperkuat jaringan kemitraan dengan Masyarakat, tokoh agama, komunitas pesantren, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan dan LSM sebagai upaya menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah social	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan PMKS dan Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral dengan Lembaga terkait
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan social	Peningkatan Kelembagaan Pengelola PMKS sebagai upaya menurunkan PMKS

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu **“Mengembangkan Daya Sosial melalui Kebal Covid-19 dengan memperkuat jaringan kemitraan dengan Masyarakat, tokoh agama, komunitas pesantren, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan dan LSM sebagai upaya menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah social”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 1.2.3 (S.1.2.3).

Sasaran 1.2.4: Meningkatnya Kesempatan Kerja

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan *sustainable development goals* (SDGs) dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menarik tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru adalah melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.16 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan Kompetensi 2. Tersedianya Sarana Prasarana pelatihan UPT.LKD 3. Adanya Sumber Daya Manusia Bidang Hubungan Industrial yang kompeten 4. Hubungan yang harmonis antara dinas dengan pengusaha dan SP/SB 5. Adanya lembaga LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan 6. Adanya CSR perusahaan di Kab. Pasuruan 7. LPKS yang ada sesuai kejuruan masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Skill masyarakat yang relatif rendah 2. Adanya Relokasi Perusahaan di Kabupaten Pasuruan 3. Tidak adanya data kebutuhan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja 4. Kualitas SDM peserta pelatihan yang tidak merata 5. Pelatihan yang disediakan tidak sesuai dengan pasar kerja 6. Turunnya penempatan tenaga kerja dari 9499 di tahun 2018 menjadi 2450 di tahun 2019 7. Angkatan kerja yang terdaftar dari 13564 di tahun 2018 menjadi 11473 di tahun 2019
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peluang kerja yang terbuka di segala sektor 2. Optimalisasi Peran dan fungsi Lembaga LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan 3. Sarana Prasarana pelatihan UPT.LKD ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 4. Pemanfaatan CSR Perusahaan untuk pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja 5. Kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan agar produktivitas meningkat 6. Munculnya wirausaha baru dari peserta pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan Pencari Kerja dari luar daerah 2. Adanya Unjuk Rasa 3. Adanya Mogok Kerja

7. UPT. LKD memiliki instruktur pelatihan sendiri yang memadai	
--	--

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.17 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Optimalisasi Daya wirausaha melalui Kebal Covid-19 dengan memperkuat fasilitasi pelatihan keterampilan dan fasilitasi tumbuh kemangnya wirausaha pemula Pasca Pandemi	Memfasilitasi tumbuh kembangnya wirausaha pemula
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya menumbuhkan wirausaha dan tenaga kerja yang berkualitas	Peningkatan skill dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan sesuai kejuruan

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi ST yaitu **“Mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya menumbuhkan wirausaha dan tenaga kerja yang berkualitas”** dan strategi SO yaitu **“Optimalisasi Daya wirausaha melalui Kebal Covid-19 dengan memperkuat fasilitasi pelatihan keterampilan dan fasilitasi tumbuh kemangnya wirausaha pemula Pasca Pandemi”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 1.2.4 (S.1.2.4).

MISI 2: Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial

Tabel 6.18 Misi 2

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
2	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial	TUJUAN 2.1 Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	62,70	1	SASARAN 2.1.1 Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	81,5%	75%	Satpol PP
					2	SASARAN 2.2.2 Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik	Persentase konflik Sosial Politik yang tertangani	n/a	87%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, 2020

Tujuan 2.1: Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum

Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran di atas. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuinya. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana meningkatnya penanganan pelanggaran perda adalah Persentase Penurunan Pelanggaran Perda.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.19 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
1. Adanya Upaya Patroli yang dilakukan Satpol PP	1. Kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam penanganan kasus penegakan perda
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)

1. Menurunnya kasus pelanggaran Perda	1. Masih tingginya kasus pelanggaran perda
---------------------------------------	--

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.20 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Penguatan upaya Satpol PP dalam Penurunan kasus Penegakan Perda	Optimalisasi Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah melalui Pencegahan dan Penegakan yang humanis serta Peningkatan Sinergitas antar Lembaga/Instansi Pemerintah
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Optimalisasi koordinasi antar instansi terkait penanganan pelanggaran Perda	Koordinasi lintas sektor sebagai upaya penegakan perda

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WO yaitu **“Optimalisasi Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah melalui Pencegahan dan Penegakan yang humanis serta Peningkatan Sinergitas antar Lembaga/Instansi Pemerintah”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 2.1.1 (S.2.1.1).

Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik

Merujuk sasaran berkenaan Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik adalah Persentase Konflik Sosial Politik yang tertangani.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.21 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
1. Adanya peningkatan pencegahan konflik berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok	1. Terjadinya konflik di masyarakat yang berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
1. Adanya Penurunan konflik di masyarakat berkaitan dengan sosial maupun politik	1. Peningkatan kasus Konflik SARA di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO)

dan penyilangan antara Weakness dan Threats menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.22 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Peningkatan Edukasi Masyarakat melalui pendidikan bela negara di masyarakat	Optimalisasi Pencegahan Konflik Sosial Politik melalui Penguatan Kearifan Lokal/agama yang didukung Daya Spiritual Kebal Covid-19 serta Sinergitas antar Tokoh Agama/Masyarakat dan Stakeholders
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Meningkatkan upaya pencegahan dan mengantisipasi terjadinya konflik	Optimalisasi Pencegahan Konflik berbasis masyarakat

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WO yaitu “**Optimalisasi Pencegahan Konflik Sosial Politik melalui Penguatan Kearifan Lokal/agama yang didukung Daya Spiritual Kebal Covid-19 serta Sinergitas antar Tokoh Agama/Masyarakat dan Stakeholders**” sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 2.1.2 (S.2.1.2).

MISI 3: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 6.23 Misi 3

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan	Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan	Indeks Wiliamson	0,25	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,10	62,50	Dinas Lingkungan Hidup
					2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani bencana	Indeks Ketahanan Daerah	n/a	0,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					3	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi	Indeks Aksesibilitas Wilayah	n/a	1,47	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
							Indeks Konektivitas Wilayah	n/a	13,92	Dinas Perhubungan
					4	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah	Indeks Ketahanan Air	77,68	77,68	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
							Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	n/a	85%	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tujuan 3.1: Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan

Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran di atas. Lingkungan Hidup merupakan urusan layanan dasar yang penting untuk diperhatikan oleh seluruh daerah khususnya di Kabupaten Pasuruan. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup maka akan berpengaruh terhadap kehidupan kedepan, serta tata kelola perencanaan pembangunan yang lebih baik kedepan. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (*kekuatan (strengths)*, *kelemahan (weaknesses)*, *peluang (opportunities)* dan *tantangan (threats)*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.24 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat 2. Pembangunan yang sejalan dan diselenggarakan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 3. Pencegahan degradasi lingkungan melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup 4. Koordinasi Lintas Sektor masing-masing Dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan LH baik oleh Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dan dunia usaha 2. Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran lingkungan oleh seluruh masyarakat dan menjaga kondisi dan kualitas lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan

<p>2. Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup yang berada pada kondisi optimum dalam mendukung kehidupan bermasyarakat yang sejahtera</p>	<p>2. Menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan karena tidak terjaganya <i>catchment area</i> maupun daerah aliran sungai</p> <p>3. Berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun</p> <p>4. Menurunnya kualitas udara akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan dan sektor transportasi</p>
--	--

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.25 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
<p>Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan</p>	<p>Peningkatan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melibatkan stakholder</p>
Strategi (ST)	Strategi (WT)
<p>Meningkatkan pengawasan dan penindakan kasus-kasus pelanggaran hukum lingkungan</p>	<p>Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder sebagai upaya Peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan</p>

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WT

yaitu “**Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder sebagai upaya Peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan**” sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 3.1.1 (S.3.1.1).

Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani bencana

Merujuk sasaran berkenaan Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menangani bencana, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Kabupaten Pasuruan memiliki potensi akan kebakaran hutan, serta banjir. Selain itu, masalah kebencanaan menjadi bagian penting dari urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan agar Kabupaten Pasuruan mampu untuk mengantisipasi, sekaligus mampu untuk membentuk Kabupaten Tangguh Bencana. Salah satu indikator yang berkaitan dengan bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menangani bencana, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.26 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana pada kebijakan, perencanaan dan program pembangunan yang berkelanjutan 2. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan 3. Adanya Desa Tangguh Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya Desa Tangguh Bencana terbentuk di Kabupaten Pasuruan
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Desa Tangguh Bencana di seluruh Kabupaten Pasuruan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, ancaman erupsi gunung berapi dan rob.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani bencana**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.27 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Optimalisasi integrasi kebijakan penanganan Bencana antar level baik Daerah maupun Pusat	Meningkatkan upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Optimalisasi upaya mitigasi Bencana melalui Desa Tangguh Bencana	Pengurangan Risiko Bencana dengan mengoptimalkan kesiap-siagaan bencana

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WO yaitu **“Meningkatkan upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 3.1.2 (S.3.1.2).

Sasaran 3.1.3: Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran di atas. Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang

ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukannya. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana meningkatnya aksesibilitas wilayah adalah melalui Indeks Aksesibilitas Wilayah dan Indeks Konektivitas Wilayah.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.28 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam program pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan pendukungnya di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan 2. Tersediannya Pelayanan Masyarakat atas Uji Kendaraan Laik Jalan yang memadai 3. Tersedianya SIM (Sistem Informasi Managemen) Lalu lintas dan Angkutan Jalan PTC = Pasuruan Transport Center 4. Dukungan Data dan Informasi Lalu lintas yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam ikut serta memelihara jalan yang sudah terbangun 2. Kurangnya kesadaran dunia usaha sebagai pengguna jalan agar ikut serta memelihara jalan dan memanfaatkan jalan sesuai ketentuan (tonase muatan) 3. Pengawasan dan peningkatan system pelayanan masyarakat yang masih belum maksimal 4. Jumlah sarana dan fasilitas LLAJ yang masih kurang guna menunjang keselamatan berlalu lintas 5. Sumber daya manusia di bidang teknis perhubungan yang masih kurang sehingga kurang optimal memberikan pelayan kepada masyarakat 6. kelemahan dan keterbatasan tersedianya moda transportasi angkutan 7. Kurangnya fasilitas halte yang nyaman dan aman
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan peran serta pemerintah pusat dan provinsi serta masyarakat pada program pembangunan infrastruktur jalan cukup tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah hujan yang tinggi mempengaruhi umur konstruksi jalan

<p>2. Pengembangan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan</p> <p>3. Rencana pembangunan <i>Dobel Track</i> kereta api untuk pengangkutan barang berpeluang untuk dinas Perhubungan mengembangkan terminal cargo atau terminal khusus angkutan barang sebagai pengurangan beban angkutan jalan raya</p> <p>4. pelayanan angkutan berpeluang bagi Dinas perhubungan untuk memberikan payung hukum daerah bagi operator angkutan online.</p>	<p>2. Adanya proyek strategis nasional berpengaruh pada umur konstruksi jalan kabupaten</p> <p>3. Rendahnya keinginan dan kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum</p> <p>4. Kemacetan yang tidak bisa dihindari akibat perkembangan belanja kendaraan pribadi bagi masyarakat jaman sekarang</p> <p>5. Meningkatnya kepadatan lalu lintas akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor</p> <p>6. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi</p>
---	--

Sumber: Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.29 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Meningkatkan Pemerataan pembangunan jalan dengan melibatkan Stakeholder	Meningkatkan aksesibilitas wilayah dan Meningkatkan konektivitas transportasi melalui sistem transportasi yang terintegrasi
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Mengoptimalkan pembangunan jalan dengan meminimalisir potensi kerusakan akibat kondisi iklim	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat)

alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WO yaitu **“Meningkatkan aksesibilitas wilayah dan Meningkatkan konektivitas transportasi melalui sistem transportasi yang terintegrasi”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 3.1.3 (S.3.1.3).

Sasaran 3.1.4: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah

Merujuk sasaran berkenaan Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara khusus menjabarkan mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu sebuah pola pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, indikator yang dapat mengukur Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah, adalah melalui Indeks Ketahanan Air. Dan terkait dengan indikator Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.30 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam program rehabilitasi jaringan irigasi dan normalisasi secara berkelanjutan 2. Jumlah titik lama & luas genangan dan banjir di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan 3. Sarana Prasarana terkait pengelolaan SDA dan Tata Ruang dirasa cukup memadai 4. Adanya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan SDA 2. Belum optimalnya sistem informasi pendukung penataan ruang dan pertanahan yang memadai 3. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan 4. Masih minimnya kuantitas tenaga lapangan (juru pengairan dan PPA)

Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> Sinergitas dalam penanganan SDA dan Penataan Ruang dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta masyarakat terkait hal pokok tersebut diatas cukup intens dan lebih baik 	<ol style="list-style-type: none"> Curah hujan yang cukup tinggi di bagian hulu dan juga konservasi yang kurang optimal Masih banyaknya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.31 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Peningkatkan Sarana Prasarana Sumber Daya Air sesuai Integrasi Penataan Ruang	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan SDM Pengelola
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Meningkatkan infrastruktur sumber daya air sebagai upaya meminimalisir potensi bencana banjir	Meningkatkan infrastruktur irigasi guna menjaga ketersediaan dan kecukupan Sumber Daya Air

Beberapa strategi disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WT yaitu **“Meningkatkan infrastruktur irigasi guna menjaga ketersediaan dan kecukupan Sumber Daya Air”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 3.1.4 (S.3.1.4).

MISI 4: Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

Tabel 6.32 Misi 4

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah	
4.	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	70	1	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	75,00 (BB)	89,00 (A)	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat	
							Opini BPK	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, inspektorat	
						2	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas Asn	n/a	74	Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Penelitian Daerah
								Indeks SPBE	n/a	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
						3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	IKM	Baik	84,50 (Baik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPPT, Sekretariat Dewan, Kecamatan

Tujuan 4.1: Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif

Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran di atas. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat diperlukan dan membantu seluruh Instansi yang ada di Daerah. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana meningkatnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah melalui Nilai SAKIP, Opini BPK.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.33 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas 2. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Nilai SAKIP 3. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendasari Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset, Pengelolaan Pendapatan dan Akuntansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya integrasi dan koordinasi lintas sektor 2. Penerimaan Pendapatan Daerah yang sering berfluktuasi
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)

<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung peningkatan program pembangunan daerah 2. Adanya Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Adanya potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sinkronnya antara perencanaan, keuangan dan pelaksanaan kegiatan di lintas sektor 2. Adanya tuntutan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Adanya tuntutan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Adanya tuntutan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
--	--

Sumber: Sekretariat Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.34 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Meningkatkan manajemen kinerja aparatur pemerintah daerah	Mengoptimalkan Koordinasi lintas sektor sebagai upaya meningkatkan manajemen kinerja, Penguatan pengawasan keuangan, dan peningkatan profesionalitas ASN di lingkup instansi pemerintah daerah
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Mengoptimalkan sumber daya perencana sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan keuangan daerah	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan keuangan melalui koordinasi lintas sektor

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai

tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WO yaitu **“Mengoptimalkan Koordinasi lintas sektor sebagai upaya meningkatkan manajemen kinerja, Penguatan pengawasan keuangan, dan peningkatan profesionalitas ASN di lingkup instansi pemerintah daerah”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 4.1.1 (S.4.1.1).

Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran di atas. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana Meningkatnya Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi adalah melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.35 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan Daerah yang mendorong Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu 2. Pelayanan Administrasi Kependudukan hingga ke tingkat kecamatan 3. Adanya dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Daerah 4. Adanya Komitmen Pimpinan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya penguasaan Teknologi informasi 2. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) 3. Proses Penyelesaian Dokmen Administrasi Kependudukan selama 5 hari dianggap terlalu lama 4. Masih belum optimalnya koordinasi lintas sektor / lintas OPD terhadap pelayanan pemanfaatan data administrasi kependudukan
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Adanya dukungan dana dari pusat berupa dana DAK untuk penyelenggaraan administrasi Kependudukan 3. Banyak pemangku kepentingan (stakeholder) yang mensyaratkan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan 4. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan 5. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses 6. Komitmen kepala daerah mengenai <i>e government</i> dan dibangunnya data center 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pencetakan KTP el yang masih terpusat di kantor Dispenduk Capil memperlambat proses pelayanan 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan 3. Mobilitas penduduk yang tinggi yang mengakibatkan berubahnya data administrasi kependudukan dengan sangat cepat 4. Masyarakat kurang memahami teknologi informasi untuk memanfaatkan layanan perpustakaan dan arsip yang berbasis digital

Sumber: Dinas Kominfo, Dispendukcapil, DPMPT, Serta Kecamatan Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan

strategi (WO) dan penyilangan antara Weakness dan Threats menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.36 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Mendorong tumbuhnya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik	Menguatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada dan mendirikan BUMD baru yang potensial dan layak untuk dikembangkan
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempercepat proses pelayanan dan memangkas birokrasi	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan mendorong tumbuhnya inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WT yaitu **“Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan mendorong tumbuhnya inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 4.1.2 (S.4.1.2).

MISI 5: Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 6.37 Misi 5

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
5	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	IPM	69,61-70,99	1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat	Indeks Kesehatan	76,76	77,02	Dinas Kesehatan
							Indeks Pendidikan	56,20	61,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	8	Dinas Perpustakaan dan Arsip
							Indeks Daya Beli	n/a	74,91	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks Permukiman Layak Huni	n/a	96,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							3	Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	90,45



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
										Penduduk dan Keluarga Berencana
					4	Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda (Per 100.000 Pemuda)	Rasio Pemuda Berprestasi	15	40	Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2020

Tujuan 5.1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Pelayanan dasar kesehatan sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan kesehatan masyarakat di masing-masing daerah khususnya di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Pasuruan yaitu melalui Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dan Indeks Daya Beli.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.38 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang cukup yaitu RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan di berbagai jenjang / strata yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Angka Putus Sekolah SD 2019 naik dibanding dengan 2018, dari 0,02% menjadi 0,03% 2. Angka Putus Sekolah SMP juga naik di tahun 2019 dari 0,02% menjadi 0,21% 3. Angka Kelulusan tingkat SD pada tahun 2019 turun dibandingkan 2018, dari 100% menjadi 97,21% 4. Angka Kelulusan SMP juga menurun di 2019 menjadi 97,33% yang mana di tahun sebelumnya adalah 100%.

	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya 4% atau sekitar 40 SD/MI yang belum memiliki cukup guru Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mana koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah baru mencapai 26,24%
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap upaya program pembangunan kesehatan Adanya dukungan dari pihak terkait baik lintas program, lintas sektor dan Tokoh Masyarakat terhadap program pembangunan kesehatan Komitmen pemimpin daerah meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan Dasar dan Madin; 	<ol style="list-style-type: none"> Angka kematian ibu pada 2018 naik menjadi 28 dari tahun 2017 yang sebelumnya di angka 21 kasus Jumlah penderita penyakit TBC masih meningkat Kurangnya kesadaran/ partisipasi masyarakat dalam menerapkan PHBS, dengan angka Rumah Tangga yang menerapkan PHBS masih 47,3% di tahun 2017 Jumlah desa yang ODF masih minim, yakni 5,75% atau sekitar 25 desa dari 365 desa/kelurahan

Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **meningkatkan pelayanan dasar kesehatan**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.39 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Mengoptimalkan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dengan melibatkan dukungan pihak lintas sektoral bagi seluruh masyarakat dan peningkatan daya beli masyarakat	Mengoptimalkan pelayanan dasar kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan
Strategi (ST)	Strategi (WT)

Menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat	Meningkatkan pemerataan partisipasi sekolah, meminimalisir kesenjangan dan mengintegrasikan dengan seluruh masyarakat
--	---

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu **“Mengoptimalkan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dengan melibatkan dukungan pihak lintas sektoral bagi seluruh masyarakat dan peningkatan daya beli masyarakat”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 5.1.1 (S.5.1.1).

Sasaran 5.1.2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan. Permukiman layak huni adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permukiman dikatakan layak apabila kondisi elemen fisik permukimannya memenuhi standar yang berlaku. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman adalah melalui Indeks Permukiman Layak Huni.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu,

maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.40 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
1. Pemanfaatan sumber mata air Umbulan untuk memenuhi kebutuhan air minum baik di kawasan Kabupaten Pasuruan maupun di kota lain seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik	1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
1. Pemanfaatan CSR untuk mendukung kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1. Universal Akses yang mentargetkan pencapaian 100-0-100, 100% akses air bersih, 0% penanganan kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.41 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Optimalisasi peningkatan Air Minum melalui CSR	Meningkatkan kualitas lingkungan rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Optimalisasi Penanganan permukiman kumuh sebagai upaya peningkayan kualitas	Peningkatan lingkungan permukiman melalui peningkatan akses sanitasi, air bersih, rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi WT yaitu **“Peningkatan lingkungan permukiman melalui peningkatan akses sanitasi, air bersih, rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 5.1.2 (S.5.1.2).

Sasaran 5.1.3: Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya kesetaraan masyarakat, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana Meningkatnya kesetaraan masyarakat adalah melalui Indeks Pembangunan Gender.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.42 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tempat - tempat pelayanan KB disetiap jenjang wilayah. 2. Berkembangnya komunikasi dan interaksi antar pelaku pengembangan program KB 3. Terdapat institusi pemberdayaan ekonomi keluarga sampai di tingkat desa/kelurahan 4. Tersedianya potensi penggerak program Kesehatan Reproduksi Remaja 5. Adanya dukungan dari berbagai pihak terutama penegak hukum dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan KB yang berkualitas. 2. Terbatasnya sarana pelayanan KB paripurna. 3. Belum meratanya pengguna/pemakai kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4. Belum maksimalnya kegiatan Bina Keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, BKL) 5. Belum Pulihnya kemampuan masyarakat yang disebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. 6. Minimnya keberadaan tenaga pelayanan kontrasepsi MKJP (MOW/MOP) sehingga mendatangkan dari luar wilayah Kabupaten Pasuruan
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peluang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif keluarga di pedesaan. 2. Adanya lembaga ekonomi masyarakat / dunia usaha yang dapat atau bersedia menjadi mitra usaha 3. Masih tingginya kesadaran masyarakat / minat untuk menjadi peserta KB khususnya pada kelompok keluarga berencana tua paritas tinggi. 4. Terbukanya pangsa pasar terhadap produk daerah. 5. Adanya peluang untuk mengembangkan kegiatan bina keluarga 6. melalui kegiatan posyandu-padu atau kegiatan BKB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap program bersubsidi oleh pemerintah. 2. Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan terhambat perkembangan kemandirian ber KB. 3. Rendahnya partisipasi perempuan dalam Politik 4. Rendahnya kualitas hidup perempuan 5. Kurangnya kesadaran perempuan tentang kesetaraan dan keadilan gender 6. Kurangnya keberanian perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan terhadapnya.

Sumber: Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran

pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.43 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Optimalisasi Peningkatan kesetaraan Gender Berbasis kegiatan Bina Keluarga	Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam menangani urusan publik
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui kemitraan dengan masyarakat berbasis kegiatan bina keluarga	Optimalisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender di Masyarakat

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi ST yaitu “Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui kemitraan dengan masyarakat berbasis kegiatan bina keluarga” sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 5.1.3 (S.5.1.3).

Sasaran 5.1.4: Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam penyusunan strategi yang mengacu pada sasaran diatas. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda adalah Rasio Pemuda Berprestasi.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis

pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran Meningkatkan Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.44 Pemetaan SWOT Pembangunan Daerah

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai, 2. Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga, 3. Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis, 2. Sinergisitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal,
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, 2. Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang difasilitasi pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional, 2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi pemuda dan olahraga,

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran **Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda**. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel :

Tabel 6.45 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Memfasilitasi kegiatan kepemudaan untuk menumbuh kembangkan prestasi pemuda	Peningkatan Kapasita Pemuda sebagai upaya mewujudkan peningkatan prestasi pemuda
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Peningkatan Sarana Prasarana dan failitas kegiatan kepemudaan sebagaii upaya peningkatan prestasi	Optimalisasi sinergitas antar sektor dalam mengembangkan prestasi pemuda

Beberapa strategi di atas disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung langsung misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dari 4 (empat) alternatif strategi yang dipilih berdasarkan pembobotan dan FGD adalah strategi SO yaitu **“Memfasilitasi kegiatan kepemudaan untuk menumbuh kembangkan prestasi pemuda”** sebagai strategi yang tepat untuk mencapai sasaran ke 5.1.4 (S.5.1.4).

Pemetaan SWOT diatas berguna untuk memahami kondisi riil Kabupaten Pasuruan termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Diskusi-diskusi yang intens dapat sangat membantu dalam penajaman setiap komitmen. Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas dan berbagai analisis isu strategis daerah dapat ditentukan alternatif strategis permasalahan yang ada. Berikut Pemetaan Strategi dalam upaya mendukung tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pasuruan berdasarkan empat Perspektif Strategi :

1. Perspektif Masyarakat/layanan

Tema Strategi dalam perspektif ini yaitu :

- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui :
 - **Satrya Emas (Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat)**
Pendampingan UMKM.
 - **Pelatihan BLK**
Untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan siap ditempatkan di perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
 - **Pelasan (Pelatihan Santri)**
Menumbuh kembangkan wirausaha dikalangan pesantren (santri). Dikembangkan sesuai kecocokan daerah pesantren (berbasis potensi lokal).
 - **Perwira Keluarga (Perempuan Wirausaha berbasis Keluarga)**
Pemberdayaan perempuan hal ekonomi dengan memberikan kesempatan berusaha agar lebih produktif.

- Melanjutkan dan meningkatkan Program **Sakera Jempol** (Program Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola).
- **Gerakan Yuk Nonggo**
Gerakan agar modal masyarakat tidak keluar dari daerah (Capital Out Flow) dengan cara Ayo tuku nang tonggo dewe (yuk nonggo).
- **Komitmen terhadap Pengembangan Pasar Tradisional**
- **Pengembangan Kawasan Dan Menurunkan Ketimpangan Ekonomi Antar Kawasan**
Pasuruan Podo Roso merupakan strategi yang dilakukan dalam rangka menurunkan ketimpangan melalui peningkatan SDM dan pengembangan Kawasan baik dalam hal infrastruktur maupun pelayanan public terutama Kawasan Timur
- **Meningkatkan infrastruktur jalan dan Fasilitas Publik**
- **Menciptakan iklim EoDB (Ease of Doing Business)**
- **Kebijakan Pendidikan, Pesantren dan Madrasah Diniyah**
Wak Moqidin(Wayahe Kumpul Mbangon TPQ dan Madin) merupakan salah satu strategi pengembangan Pendidikan berbasis kearifan local
- **Mewujudkan kesehatan yang baik melalui :**
 - ODHA-Link
 - Surya Mas Jelita
 - Kasih Ibu dan Anak (menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB))
 - AGAWE (Ayo Gawe WC)
 - Pembangunan RSUD Grati
 - Peningkatan RS Bangil menjadi Tipe B
- **Mengentaskan Kemiskinan dan Mencegah Kriminalitas**
 - Meningkatkan Kesempatan Berusaha
 - Kemisan (koordinasi intensif pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan setiap hari Kamis)
 - Peningkatan keamanan dengan koordinasi dengan aparat keamanan (Babinkantibmas) dan peran serta masyarakat (siskamling)
- **Menanggulangi Kenakalan Remaja dan narkoba**

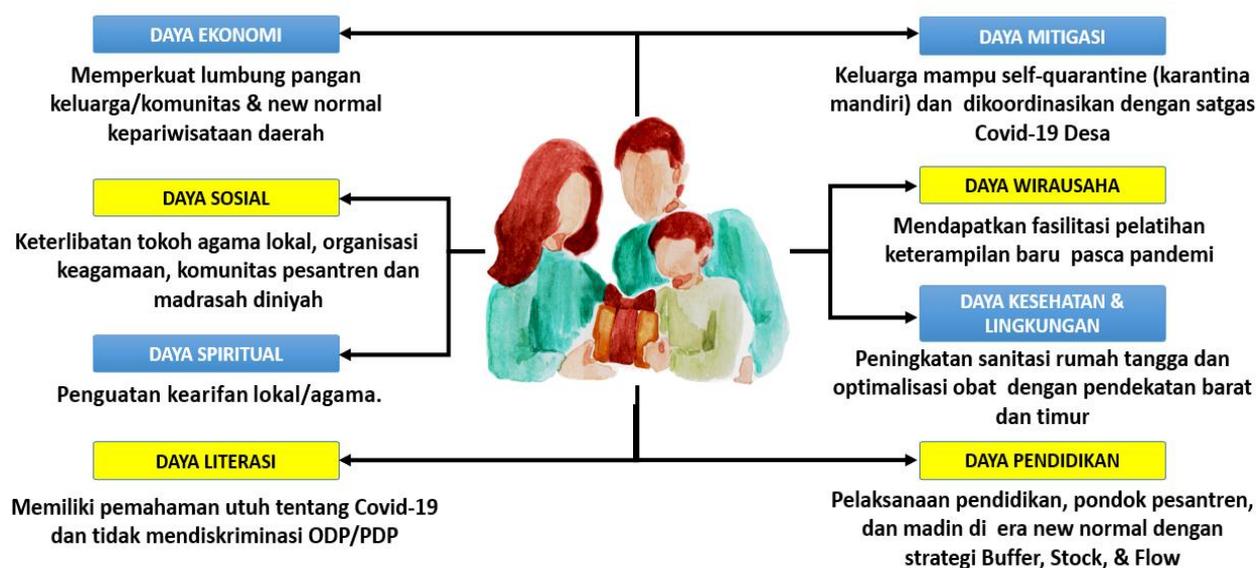
2. Perspektif proses Internal

Tema Strategi dalam perspektif ini yaitu :

- Kebijakan *E-Planning* dan *E-Budgeting*
- Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dan Terbuka (*Open Governance*) diantaranya melalui kegiatan KENDUREN MAS

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
3. Perspektif Kelembagaan
- Tema Strategi dalam perspektif ini yaitu :
- Strategi Reformasi Birokrasi & Komitmen Pemberantasan Korupsi
4. Perspektif Keuangan
- Tema Strategi dalam perspektif ini yaitu :
- Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
 - Penerapan *E-Budgeting*

Selain itu, di Kabupaten Pasuruan juga terdapat integrasi strategi dalam menjawab adanya Pandemi Covid-19. Hal tersebut berupa inovasi penyesuaian strategi dalam percepatan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah yang dinamakan *Kebal Covid-19* atau *Keluarga Berdaya Lawan Covid-19*. Di dalam *Kebal Covid* tersebut terdapat 8 Daya yang diimplementasikan. Dari sisi daya ekonomi, daya sosial, daya spiritual, daya literasi, daya mitigasi, daya wirausaha, daya kesehatan dan lingkungan, dan daya pendidikan. Berikut merupakan definisi daya pada *Kebal Covid-19*.



Gambar 6.2 Inovasi Kebal Covid-19 Kabupaten Pasuruan
Sumber: Bappeda Kabupaten Pasuruan, 2021

Tabel 6.46 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Pasuruan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Strategi
<p>MISI 1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.</p>		
<p>Tujuan 1.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Sasaran 1.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah</p>	<p>Memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0</p>
	<p>Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Daya Beli Wisatawan</p>	<p>1. Memulihkan dan mengembangkan Destinasi Wisata alam dan Wisata Buatan Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal 2. Meningkatkan Daya Ekonomi melalui Kebal Covid-19 dengan Memperkuat New Normal Kepariwisataaan Daerah</p>
	<p>Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Iklim Investasi</p>	<p>Mendorong pertumbuhan iklim investasi daerah</p>
	<p>Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat</p>	<p>Mendorong tumbuh kembang dan kemandirian Lembaga ekonomi masyarakat yang terstandarisasi</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1.2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 1.2.1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kelembagaan, Sarana Prasarana Pangan sebagai upaya memperlancar distribusi, meningkatkan produksi, mendorong diversifikasi pangan 2. Meningkatkan Daya Ekonomi melalui Kebal Covid-19 dengan Memperkuat lumbung pangan keluarga/komunitas
	Sasaran 1.2.2. Meningkatnya Kemandirian Desa	Penguatan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa sebagai upaya peningkatan Perekonomian Desa
	Sasaran 1.2.3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Daya Sosial melalui Kebal Covid-19 dengan memperkuat jaringan kemitraan dengan Masyarakat, tokoh agama, komunitas pesantren, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan dan LSM sebagai upaya menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah sosial
	Sasaran 1.2.4. Meningkatkan Kesempatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya menumbuhkan dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas 2. Optimalisasi Daya wirausaha melalui Kebal Covid-19 dengan memperkuat fasilitasi pelatihan keterampilan dan fasilitasi tumbuh kemangnya wirausaha pemula Pasca Pandemi
MISI 2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.		

Tujuan 2.1. Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda	Optimalisasi Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah melalui Pencegahan dan Penegakan yang humanis serta Peningkatan Sinergitas antar Lembaga/Instansi Pemerintah
	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik	Optimalisasi Pencegahan Konflik Sosial Politik melalui Penguatan Kearifan Lokal/agama yang didukung Daya Spiritual Kebal Covid-19 serta Sinergitas antar Tokoh Agama/Masyarakat dan Stakeholders
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.		
Tujuan 3.1. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder sebagai upaya Peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menangani bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat yang terkoordinasi dengan satgas bencana 2. Meningkatkan Daya Mitigasi melalui karantina Mandiri Keluarga yang terkoordinasi dengan Satgas Covid-19
	Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi	Meningkatkan aksesibilitas wilayah dan konektivitas transportasi melalui sistem transportasi yang terintegrasi
	Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, serta Optimalisasi Pengendalian daya rusak air

		2. Meningkatkan Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang
MISI 4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.		
Tujuan 4.1. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Mengoptimalkan Koordinasi lintas sektor sebagai upaya meningkatkan manajemen kinerja dan Penguatan pengawasan keuangan ASN di lingkup instansi pemerintah daerah
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam peningkatan profesionalitas ASN dan meningkatkan integrasi teknologi informasi
	Sasaran 4.1.3. Meningkatkan pelayanan publik prima	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan mendorong tumbuhnya inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.		
Tujuan 5.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Daya Kesehatan melalui Kebal Covid-19 dengan Mengoptimalkan pelayanan dasar kesehatan dan optimalisasi obat dengan pendekatan Barat dan Timur. 2. Optimalisasi Daya Pendidikan melalui Kebal Covid-19 dengan melibatkan dukungan pihak lintas sektoral bagi seluruh masyarakat di era new normal dengan strategi Buffer, Stock, & Flow 3. Meningkatkan Daya Literasi melalui Kebal Covid-19 dengan memperkuat pemahaman

Sasaran 5.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Kesejahteraan Masyarakat		masyarakat tentang Covid-19 dan tidak mendiskriminasi ODP/PDP 4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengalokasian belanja barang/jasa pemerintah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta mendorong gerakan Yuk Nonggo
	Sasaran 5.1.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Optimalisasi Kualitas Lingkungan Permukiman melalui peningkatan akses sanitasi, Peningkatan Akses air bersih, Rehailitasi rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh dengan Daya Lingkungan Kebal Covid-19
	Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat	Peningkatan Kesetaraan dengan meniadakan diskriminasi dan Keadilan Gender melalui kemitraan dengan masyarakat berbasis kegiatan bina keluarga
	Sasaran 5.1.4. Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan untuk menumbuhkembangkan prestasi pemuda.

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2020

6.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagai panduan untuk pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah yaitu tahun 2018-2023 untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan.

Tabel 6.47 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan

2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik	Konektivitas Infrastruktur	Kelembagaan Ekonomi Desa	Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2020

Dalam rangka mengimplementasikan visi-misi pembangunan daerah agar lebih menarik, mudah dikenal dan diingat masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan beberapa “program unggulan”. Program unggulan tersebut dikemas dalam susunan kata/bahasa yang menarik semacam “jargon” yang telah disampaikan pada masa kampanye. Tidak hanya itu, program dan jargon tersebut juga mendukung tagline “Pasuruan Always Fresh”, tagline ini merupakan perwujudan dari daerah yang memiliki potensi luar biasa baik potensi alam, pertanian dan produk lokal. Pasuruan Always Fresh memiliki makna, Kata Pasuruan yang dimaksud dalam tagline tersebut ialah Kabupaten Pasuruan dengan pesona alamnya begitu indah, yang bisa dikelola sebagai kawasan pariwisata. Sementara kata “Always Fresh” memiliki makna selalu segar yang juga bermakna inovasi dan kreativitas dari warga Kabupaten Pasuruan. “Itu terwujud dengan hasil produk-produk UKM yang selalu terus berinovasi agar mampu bersaing di pasaran. Program unggulan tersebut secara operasional teridentifikasi melalui program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 6.4 sebagai berikut :

Tabel 6.48 Program Pembangunan Jargon Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan

NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019-2020	2021-2023	
1	Misi 1: Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.	PELASAN	Menumbuhkembangkan wirausaha di kalangan pesantren/santri. Dikembangkan sesuai kecocokan daerah pesantren (berbasis potensi lokal)	Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Perikanan Tangkap	Program Pelayanan izin Usaha Simpan Pinjam	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program Perizinan Usaha Pertanian	DINAS PERIKANAN			
		SATRYA EMAS	Pendampingan UMKM dan stimulus kepada masyarakat berwirausaha	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Fasilitasi Permodalan dan pengendalian Simpan Pinjam Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Program Penyuluhan Pertanian	
		Program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
GERAKAN YUK NONGGO	Gerakan agar modal masyarakat tidak keluar dari Daerah (Capital Out	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019-2020	2021-2023	
			Flow) dengan cara Ayo tuku nang Tonggo dewe (yuk nonggo)	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Program Penggunaan Pemasaran dan Produk Dalam Negeri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Fasilitasi Kemitraan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		KEMISAN	Koordinasi intensif pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan setiap hari kamis	Pemberdayaan Sosial.	Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL
				Fakir Miskin dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
				Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
				Program Upaya Kesehatan masyarakat	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINAS SOSIAL
		PASURUAN PODO ROSO	Pemerataan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Daerah Sosialisasi Ketentuan Umum di bidang cukai	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DINAS PARIWISATA
				Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Program Promosi Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2019-2020	2021-2023			
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
				Program Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	Misi 2: Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.	PUSAKA	Bersama Pemuda dan Santri untuk Pencegahan Narkoba	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN		
				Pemberantasan Penyakit Masyarakat				
				Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
				Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Pendidikan Non Formal.	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			PASURUAN GUMUYU	Kabupaten Pasuruan yang Guyub Rukun dan Bersatu Padu	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	
					Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Program Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	

NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019-2020	2021-2023	
				Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN
3	Misi 3: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan	SDSB	Program Satu desa satu Bak Sampah	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Program Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pengembangan Destinasi Wisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINAS PARIWISATA
		ADUS KALI	Mencari Sumber Masalah dengan menyusuri aliran sungai mulai hulu sampai hilir	Pengendalian Pencemaran & Perusak LH.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pengembangan dan Pengelolaan JI, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Perencanaan dan Pengembangan Irigasi		
				Pengelolaan Sumber Daya Air		
		Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		
		AGAWE	Program pembangunan jamban di setiap rumah	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembinaan Lingkungan Sosial	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
4	Misi 4: Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung	KENDUREN MAS	Merupakan Sistem Perencanaan yang interaktif	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019-2020	2021-2023	
	tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi		antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat	Pelayanan administrasi perkantoran	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
				Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Program Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pencatatan sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Optimalisasi Fasilitas Reformasi Birokrasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
5	Misi 5: Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud	PERWIRA KELUARGA	Pemberdayaan perempuan hal ekonomi dengan memberikan kesempatan usaha agar lebih produktif.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2019-2020	2021-2023		
	afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.				Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				RUMAHKU SURGAKU	Pembangunan berbasis keluarga		Pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Lingkungan Sehat Kawasan Permukiman.			Program Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.			Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		SAKERA JEMPOL	Program sadari kekerasan perempuan dan Anak dengan jempot bola		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.		
					Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019-2020	2021-2023	
				Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		WAK MOQIDIN	Wayaha Kumpul Mbangun TPQ dan Madin	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pendidikan Non Formal.		
				Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengembangan Kurikulum	
				Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan		
				Pendidikan Karakter	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Pendidikan Anak Usia Dini			
		SURYA MAS JELITA	Penanganan Penderita Kusta secara Komprehensif	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
				Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

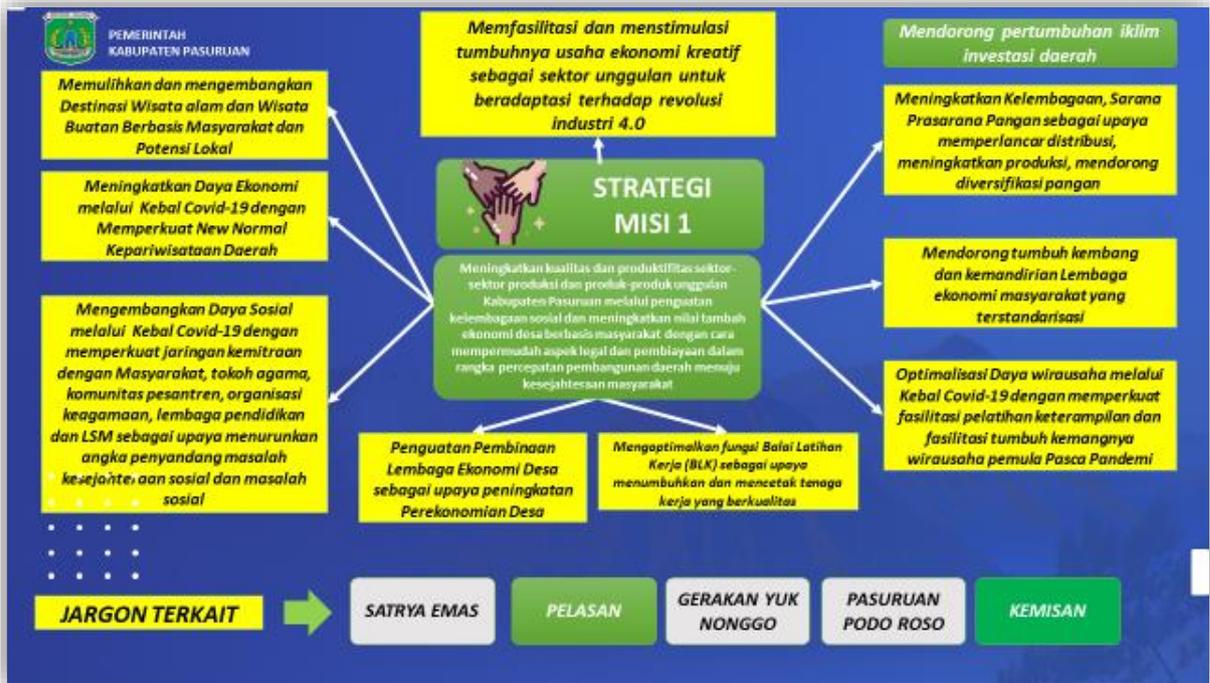
NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019-2020	2021-2023	
		ODHA LINK	Inovasi yang memberikan ruang kepada penderita HIV/AIDS untuk mereka bebas berkunjung ke klinik	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		PUSAKA	Bersama Pemuda dan Santri untuk Pencegahan Narkoba	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
				Pemberantasan Penyakit Masyarakat		
				Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Pendidikan Non Formal.	Program Pengelolaan Pendidikan	
		PEMUDA PELOPOR PEMBANGUNAN DESA	Mengefektifkan peran dan fungsi Karang Taruna dan Pemberdayaan Ormas Kepemudaan	Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.	Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINAS PEMBERDAYAAN Masyarakat desa

NO.	MISI TERKAIT	PROGRAM UNGGULAN BUPATI/DAERAH	DEFINISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019-2020	2021-2023	
		PASURUAN GUMUYU	Kabupaten Pasuruan yang Guyub Rukun dan Bersatu Padu	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
				Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Program Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
				Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

Selain melalui pemetaan program pembangunan yang ada di setiap Misi, di Kabupaten Pasuruan juga melakukan integrasi strategi antara Kebal Covid-19 dengan Jargon atau Program Unggulan Kepala Daerah yang dapat mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Integrasi antara Jargon dengan Strategi terintegrasi pada infografis berikut ini.

1. Integrasi Strategi Misi 1



Gambar 6.3 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 1

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah, 2021

2. Integrasi Strategi Misi 2



Gambar 6.4 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 2

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah, 2021

3. Integrasi Strategi Misi 3



Gambar 6.5 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 3

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah, 2021

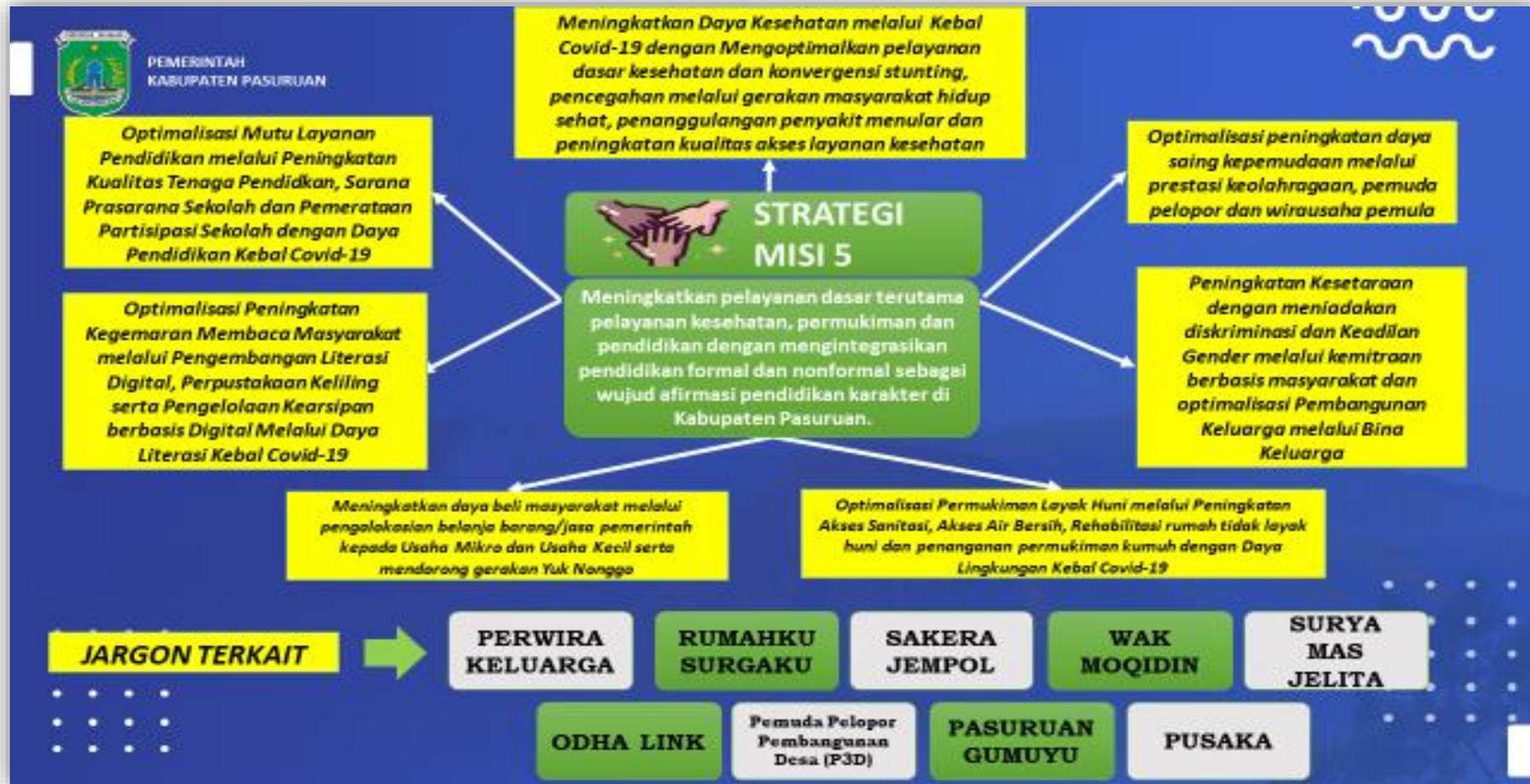
4. Integrasi Strategi Misi 4



Gambar 6.6 Integrasi Jargon, Kebal Covid-19 dan Strategi pada Misi 4

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah, 2021

5. Integrasi Strategi Misi 5



Gambar 6.7 Integrasi Jargon, KeBal Covid-19 dan Strategi pada Misi 4
Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah, 2021

Tabel 6.49 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.										
Tujuan 1.1. : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,72	5,73 - 6		4,23 - 5,81		4,24-5,81		4,24-5,81	
Sasaran : 1.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	n/a	0,5		0,7		0,7		0,7	
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	n/a	0,3		0,4		0,4		0,4	
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	n/a	0,4		0,5		0,5		0,5	
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
P1										
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian	n/a	75%	Rp 3.972.022.978	75%	Rp 2.291.140.615	75%	Rp 11.823.594.600	75%	Rp 18.086.758.193
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	n/a	1,18%	Rp 915.093.660	1,19%	Rp 8.646.506.402	1,20%	Rp 16.073.455.798	1,20%	Rp 25.635.055.860
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi	n/a	75%	Rp 478.626.000	75%	Rp 774.508.990	75%	Rp 888.250.000	75%	Rp 2.141.384.990
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha	n/a	75%	Rp 58.317.000	75%	Rp 26.100.800	75%	Rp 90.000.000	75%	Rp 174.417.800
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	n/a	2%	Rp 104.435.000	2%	Rp 19.463.900	2%	Rp 135.100.000	2%	Rp 258.998.900
Dinas Perikanan										
P1										
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	n/a	6 %	Rp 766.353.000	7 %	Rp 254.494.000	8 %	Rp 1.411.287.100	8 %	Rp 2.432.134.100
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya	n/a	6 %	Rp 1.307.287.850	7 %	Rp 1.525.866.350	8 %	Rp 2.564.118.400	8 %	Rp 5.397.272.600
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya yang tertib aturan	n/a	-		75	Rp 35.560.000	80	Rp 200.000.000	80	Rp 235.560.000
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Omzet Pelaku Usaha Perikanan	n/a	17 Milyar	Rp 802.568.000	17 Milyar	Rp 220.207.000	17 Milyar	Rp 1.031.607.280	17 Milyar	Rp 2.054.382.280
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan										
P1										
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengembangan Sarana Peternakan	n/a	100	Rp 1.658.450.559	100	Rp 1.033.619.181	100	Rp 2.031.891.368	100	Rp 4.723.961.108
	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	n/a	100		100		100			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	n/a	5	Rp 200.746.000	5	Rp 834.244.138	5	Rp 1.629.446.600	15	Rp 2.664.436.738
	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan	n/a	5		5		5			

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kematian ternak (Ternak Besar)	n/a	0,2	Rp 1.432.440.291	0,2	Rp 652.169.758	0,2	Rp 1.892.380.162	0,2	Rp 3.976.990.211
	Persentase angka kematian ternak (Ternak Unggas)	n/a	2		2		2			
	Persentase angka kematian ternak (Ternak Kecil)	n/a	0,3		0,3		0,3			
	Persentase unit usaha yang memenuhi syarat pra-NKV	n/a	10		10		10			
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha	n/a	100%	Rp 31.704.374	100%	Rp 31.786.800	100%	Rp 113.411.524	100%	Rp 176.902.698
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelembagaan usaha olahan hasil ternak	n/a	5	Rp 1.641.674.670	5	Rp 1.248.730.260	5	Rp 1.104.529.800	15	Rp 3.994.934.730
Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
P1										
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	n/a	39,82%	Rp 50.000.000	42%	Rp 17.156.030	42%	Rp 100.000.000	42%	Rp 167.156.030
	Persentase perusahaan eksportir yang dibina	n/a	5,61%	Rp 10.000.000	5,61%	Rp 5.000.000	5,61%	Rp 25.000.000	5,61%	Rp 40.000.000
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	n/a	14%	Rp 295.000.000	21%	Rp 158.608.480	21%	Rp 3.400.000.000	21%	Rp 3.853.608.480
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil	n/a	100%	Rp 113.110.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 317.000.000	100%	Rp 445.110.000
Program Pengembangan Ekspor	Persentase nilai ekspor	n/a	1%	Rp 411.105.000	1%	Rp 33.554.600	1%	Rp 1.320.000.000	1%	Rp 1.764.659.600
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	n/a	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 560.000.000
Program Penggunaan Pemasaran dan Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang terfasilitasi	n/a	10%	Rp 25.785.000	10%	Rp 35.000.000	20%	Rp 220.000.000	20%	Rp 280.785.000
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM yang terbina	n/a	2,28%	Rp 3.934.659.375	2,28%	Rp 1.167.616.950	2,28%	Rp 2.475.756.950	2,28%	Rp 7.578.033.275
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IHT yang Terawasi	n/a	2,29%	Rp 19.847.530			2,29%	Rp 9.923.765	2,29%	Rp 29.771.295
Sasaran : 1.1.2. Meningkatnya Daya Beli Wisatawan	Spending of Money in Tourism	n/a	n/a	n/a	787.417.400.000	787.417.400.000	866.159.140.000	866.159.140.000	866.159.140.000	866.159.140.000
DINAS PARIWISATA										
P1										
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	n/a	20%	Rp 494.050.000	25%	Rp 862.578.800	30%	Rp 2.175.000.000	30%	Rp 3.531.628.800
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata bersertifikat CHSE	n/a	20%	Rp 1.335.408.600	25%	Rp 640.000.000	30%	Rp 4.500.000.000	30%	Rp 6.475.408.600
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungan wisatanya	n/a	20%	Rp 725.000.000	30%	Rp 317.500.000	40%	Rp 1.250.000.000	40%	Rp 2.292.500.000
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya	n/a	-	-	20%	Rp 1.450.000.000	25%	Rp 2.175.000.000	25%	Rp 3.625.000.000
Sasaran : 1.1.3. Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	n/a	n/a	n/a	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu										

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	
P1											
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal	n/a	100%	Rp 254.550.000	-	-	100%	Rp 337.250.000	100%	Rp 591.800.000	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	n/a	100%	Rp 669.460.000	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Perusahaan yang melakukan pengembangan	n/a	-	-	100 Perusahaan	Rp 375.000.000	100 Perusahaan	Rp 885.500.000	100 Perusahaan	Rp 1.929.960.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal	n/a	100%	Rp 2.778.331.400	-	-	-	-	-	-	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu (GPP)	n/a	-	-	87	Rp 502.550.000	88	Rp 3.100.900.000	88	Rp 6.381.781.400	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal	n/a	100%	Rp 144.350.000	-	-	-	-	-	-	
	Persentase perusahaan yang melakukan LKPM	n/a	-	-	80%	Rp 372.462.000	80%	Rp 184.360.000	80%	Rp 701.172.000	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal	n/a	-	-	100%	Rp 27.250.000	100%	Rp 172.500.000	100%	Rp 199.750.000	
Sasaran : 1.1.4. Meningkatnya Kualitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Dan Koperasi	n/a	n/a		5		7		7		
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
P1											
Program Pelayanan izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Kop. Yang memiliki ijin Usaha Simpan Pinjam	n/a	100%	Rp 17.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 20.567.096	100%	Rp 337.567.096	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan patuh	n/a	80%	Rp 312.493.000	82,5%	Rp 250.000.000	85%	Rp 378.116.336	85%	Rp 940.609.336	
Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP	Persentase KSP/ USP yang sehat	n/a	46,31 %	Rp 150.000.000	47,99 %	Rp 350.000.000	49,55 %	Rp 181.499.939	49,55 %	Rp 681.499.939	
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti DIKLAT	n/a	31,97 %	Rp 607.116.800	32,18 %	Rp 759.181.000	32,39 %	Rp 734.611.245	32,39 %	Rp 2.100.909.045	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi	n/a	0,5 %	Rp 568.000.000	0,5 %	Rp 900.000.000	0,5 %	Rp 687.279.985	0,5 %	Rp 2.155.279.985	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro	n/a	30%	Rp 250.000.000	30%	Rp 700.000.000	30%	Rp 919.594.192	30%	Rp 1.869.594.192	
Tujuan : 1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	9,45	9,3		10,25-10,38		10,20-10,33		10,20-10,34		
	Indeks Gini	n/a	n/a		0,3482- 0,3473		0,3472-0,3470		0,3472-0,3470		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,11	5,07-5,04		6,08-5,91		5,79-5,41		5,79-5,41		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Sasaran : 1.2.1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	n/a	68		68,5		69		69	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										
P1										
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	n/a	70%	Rp 25.000.000	75%	Rp 518.936.988	80%	Rp 2.000.000.000	80%	Rp 2.543.936.988
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	n/a	85	Rp 353.110.333	85,5	Rp 278.904.635	86	Rp 618.105.535	86	Rp 1.250.120.503
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa/kecamatan rawan pangan yang tertangani	n/a	100%	Rp 89.580.000	100%	Rp 72.464.540	100%	Rp 114.579.840	100%	Rp 276.624.380
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	n/a	100%	Rp 16.000.000	100%	Rp 16.000.000	100%	Rp 61.000.000	100%	Rp 93.000.000
Sasaran : 1.2.2. Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	0	2,05		3,23		4,4		4,4	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
P1										
Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang sarana prasarannya difasilitasi	n/a	42	Rp 39.000.000	20	Rp 35.000.000	25	Rp 13.387.500	30	Rp 87.387.500
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa yang membentuk Kerjasama	n/a	0,04	Rp 40.000.000	4,2	Rp 605.350.000	0,42	Rp 635.617.500	0,42	Rp 1.280.967.500
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Tertib Administrasi Perencanaan dan Perkembangan Desa	n/a	75	Rp 71.743.500	78	Rp 320.431.000	80	Rp 449.952.550	80	Rp 842.127.050
	Prosentase Desa yang memiliki BUMDes bermitra dan Profil Desa yang update	n/a	90	Rp 520.000.000	90	Rp 1.673.559.600	90	Rp 1.758.237.580	90	Rp 3.951.797.180
	Prosentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	n/a	80	Rp 1.375.183.700	80	Rp 9.896.377.448	80	Rp 10.903.765.530	80	Rp 22.175.326.678
	Prosentase Desa tertib administrasi keuangan desa yang akuntabel	n/a	80	Rp 76.628.300	80	Rp 39.999.800	80	Rp 41.999.790	80	Rp 158.627.890
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif	n/a	100	Rp 444.756.460	100	Rp 1.835.659.300	100	Rp 1.482.439.365	100	Rp 3.762.855.125
	Prosentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang meningkat volume usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) dan Pemanfaatan TTTG	n/a	72	Rp 70.000.000	75	Rp 505.000.000	80	Rp 530.250.000	80	Rp 1.105.250.000
Sasaran : 1.2.3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	6,49	5,7		5,2		4,7		4,7	
DINAS SOSIAL										
P1										
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan PSKS	n/a	0,07%	Rp 983.500.000	6,58%	Rp 527.300.000	6,58%	Rp 903.000.000	6,58%	Rp 2.413.800.000
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan	n/a	0,86%	Rp 10.000.000	85,65%	Rp 10.000.000	85,65%	Rp 10.000.000	85,65%	Rp 30.000.000
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	n/a	0,86%	Rp 2.235.500.000	85,65%	Rp 1.139.092.000	85,65%	Rp 2.182.500.000	85,65%	Rp 5.557.092.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS dan Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan Sosialnya	n/a	0,86%	Rp 503.231.820	85,65%	Rp 243.900.000	85,65%	Rp 503.000.000	85,65%	Rp 1.250.131.820

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	n/a	6,58%	Rp 270.000.000	658,00%	Rp 152.100.000	658,00%	Rp 220.000.000	658,00%	Rp 642.100.000
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP	n/a	6,58%	Rp 102.500.000	658,00%	Rp 66.600.000	658,00%	Rp 77.500.000	658,00%	Rp 246.600.000
Sasaran : 1.2.4. Meningkatnya kesempatan lapangan kerja baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	n/a	n/a	75%	76%	76%				
DINAS KETENAGAKERJAAN										
P1										
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun	n/a			100%	Rp 325.000.000	100%	Rp 325.000.000	100%	Rp 650.000.000
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang lulus uji kompetensi	n/a	40%	Rp 952.456.000	40%	Rp 1.700.000.000	40%	Rp 2.501.000.000	40%	Rp 5.153.456.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang di tempatkan	n/a	40%	Rp 515.672.500	40%	Rp 200.000.000	40%	Rp 1.755.000.000	40%	Rp 2.470.672.500
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor	n/a	50%	Rp 190.000.000	50%	Rp 500.000.000	50%	Rp 500.000.000	50%	Rp 1.190.000.000
Program Hubungan Industrial	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	n/a	50%	Rp 962.696.000	50%	Rp 471.264.500	50%	Rp 7.275.000.000	50%	Rp 8.708.960.500
Misi 2. : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial										
Tujuan 2.1. : Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	n/a	62,50	62,60	62,70	62,70				
Sasaran : 2.1.1. Meningkatnya penanganan pelanggaran perda.	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	n/a	n/a	70%	75%	75%				
SATPOL PP										
P1										
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100%	Rp 4.384.903.950	100%	Rp 2.690.812.500	100%	Rp 7.581.458.200	100%	Rp 14.657.174.650
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kejadian Kebakaran	n/a	100%	Rp 1.313.820.000	100%	Rp 1.128.657.700	100%	Rp 1.754.237.900	100%	Rp 4.196.715.600
Sasaran : 2.1.2. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik	Persentase konflik Sosial Politik yang tertangani	0	0	85%	87%	87%				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
P1										
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memahami ideologi Pacasila	N/A	80%	Rp 313.066.000	85%	Rp 745.815.200	90%	Rp 629.321.000	85%	Rp 1.688.202.200
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah	N/A	25,98%	Rp 2.243.302.500	25,98%	Rp 3.167.114.100	28%	Rp 2.975.993.000	26,65%	Rp 8.386.409.600
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	N/A	100%	Rp 6.227.898.000	100%	Rp 4.373.911.350	100%	Rp 6.561.002.000	100%	Rp 17.162.811.350

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketaatan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang terfasilitasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	N/A	100%	Rp 134.300.000	100%	Rp 234.976.400	100%	Rp 258.305.000	100%	Rp 627.581.400
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	N/A	100%	Rp 5.124.860.000	100%	Rp 5.449.897.600	100%	Rp 5.917.522.600	100%	Rp 16.492.280.200
Misi 3. : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan										
Tujuan 3.1. : Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Williamson (Indeks Gini)	0,265	0,271		0,265		0,25		0,25	
Sasaran : 3.1.1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,1	61,34		62,65		64,26		64,26	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
P1										
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	N/A	100%	Rp 12.977.000	100%	Rp 12.977.000	100%	Rp 12.977.000	100%	Rp 38.931.000
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	N/A	85	Rp 15.000.000	85	Rp 77.480.000	85	Rp 77.477.700	85	Rp 169.957.700
	Persentase usaha dan/ kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	N/A	72		74		76		76	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sungai yang tidak tercemar	N/A	30	Rp 11.114.551.731	30	Rp 404.841.000	30	Rp 404.825.714	30	Rp 11.924.218.445
	Persentase lokasi pemantauan kualitas udara yang tidak tercemar	N/A	75		80		85		85	
	persentase penurunan lahan kritis di wilayah kabupaten pasuruan	N/A	20		25		30		30	
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik	N/A	0,05	Rp 7.911.554.874	0,051	Rp 541.018.000	0,055	Rp 541.017.750	0,055	Rp 8.993.590.624
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengelolaan kegiatan usaha pengumpulan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis	N/A	100	Rp 20.000.000	100	Rp 6.680.000	100	Rp 6.679.900	100	Rp 33.359.900
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/ kegiatan	N/A	50	Rp 30.000.000	50	Rp 19.280.000	50	Rp 19.280.000	50	Rp 68.560.000
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui	N/A			0		0		0	-
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	13	Rp 10.000.000	16	Rp 26.169.000	19	Rp 26.169.000	19	Rp 62.338.000
	Persentase sekolah/ponpes yang berwawasan lingkungan	N/A	19		21		25			
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	persentase perusahaan berwawasan lingkungan (proper)	N/A	20	Rp 27.570.000	20	Rp 38.357.000	25	Rp 38.357.000	25	Rp 104.284.000
	Persentase sekolah / madrasah berwawasan lingkungan (adiwiyata)	N/A	23		23		25			
Program Pengelolaan Persampahan	persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	N/A	100	Rp 9.706.991.395	100	Rp 2.157.348.000	100	Rp 2.157.365.749	100	Rp 14.021.705.144
	persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	N/A	100		100		100			
Sasaran : 3.1.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani bencana	Indeks Ketahanan Daerah	n/a	0,72		0,73		0,74		0,74	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
P1										
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		5,71%	Rp 1.105.570.000	8,57%	Rp 755.619.603	11,42%	Rp 1.877.198.400	11,42%	Rp 3.738.388.003
Sasaran : 3.1.3. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi	Indeks Aksesibilitas Wilayah	n/a	1,35		1,41		1,47			1,47
	Persentase Aksesibilitas Transportasi	n/a	12,17		13,04		13,92			13,92
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi										
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	n/a	7,22%	Rp 189.708.724.709	6,79%	Rp 41.332.545.000	6,67%	Rp 41.332.545.000	20,86%	Rp 272.373.814.709
Dinas Perhubungan										
P1										
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase wilayah terkoneksi sarana angkutan umum yang berkeselamatan	n/a	12,17%	Rp 6.004.050.000	13,04%	Rp 1.040.071.456	13,92%	Rp 30.301.500.000	13,92%	Rp 37.345.621.456
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang										
P1										
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Irigasi	n/a	60,4	Rp145.248.036.556	62,4	Rp 12.848.019.265	64,4	Rp 12.835.115.056	64,4	Rp 170.931.170.877
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan berusaha yang diproses	n/a	90%	Rp1.525.000.000	91%	Rp 1.526.000.000	9200%	Rp 1.526.001.660	9200%	Rp 4.577.001.660
Misi 4. : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi										
Tujuan 4.1. : Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	60,67	66		68		70		70	
Sasaran : 4.1.1. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	NILAI SAKIP	75,00 (BB)	81 (A)		85 (A)		89 (A)		89 (A)	
	OPINI BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah										
P1										
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	n/a	100%	Rp 1.803.722.996	100%	Rp 1.803.722.996	100%	Rp 1.799.888.996	100%	Rp 5.540.657.588
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD	n/a	91%	Rp 2.641.479.891	93%	Rp 2.641.479.891	100%	Rp 3.046.456.600	100%	Rp 9.144.220.500
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan Kelitbangan	n/a	-	-	20%	Rp 2.437.150.000	20%	Rp 2.437.150.000	20%	Rp 4.874.300.000
SEKRETARIAT DAERAH										
P1										
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	n/a	100%	Rp 21.995.400.000	100%	Rp 17.752.207.798	100%	Rp 18.817.351.815	100%	Rp 58.564.959.613
	Persentase kebijakan terkait fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%			
	Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	n/a	100%		100%		100%			

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan	n/a	96%		98%		99%		99%	
	Persentase terlaksananya Kebijakan, koordinasi dan pengawasan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n/a	80%	Rp 3.644.663.700	85%	Rp 9.586.424.890	95%	Rp 10.992.510.449	95%	Rp 24.223.599.039
	Persentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	n/a	100%		100%		100%			
	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	n/a	2%		2%		5%		5%	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah										
P1										
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	n/a	100%	Rp 667.386.190.421	100%	Rp 690.632.147.540	100%	Rp 738.232.926.323	100%	Rp 2.096.251.264.284
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD yang Sesuai Standar	n/a	100%	Rp 116.629.298.832	100%	Rp 928.150.000	100%	Rp 1.391.000.000	100%	Rp 118.948.448.832
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	n/a	4%	Rp 4.705.966.948	4%	Rp 4.345.752.500	5%	Rp 5.340.000.000	5%	Rp 14.391.719.448
	IKM/ SKM Layanan Pajak daerah	n/a	85%		87%		88%			
INSPEKTORAT										
P1										
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	n/a	84%	Rp 3.335.180.000	86%	Rp 2.837.800.000	87%	Rp 3.833.589.930	258%	Rp 6.172.980.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Asistensi	Persentase terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	n/a	100%	Rp 240.000.000	100%	Rp 14.400.000	100%	Rp 90.000.000	300%	Rp 254.400.000
Sasaran : 4.1.2. Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	72		73		74		74	
	Indeks SPBE	n/a	30		40		50		50	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3	n/a	66%	Rp 3.008.985.375	67%	Rp 2.680.677.244	68%	Rp 7.934.866.000	68%	Rp 13.624.528.619
	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian ijazah	n/a	74%		75%		76%			
	Persentase pelanggaran disiplin	n/a	0,17%		0,16%		0,15%			
	Persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP	n/a	99%		99%		99%			
	Persentase pegawai yang lulus diklat kompetensi ASN	n/a	63%		64%		65%			
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang lulus diklat assesment jabatan	n/a	63%	Rp 1.659.839.750	64%	Rp 640.000.000	65%	Rp 3.292.235.920	65%	Rp 5.592.075.670
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	n/a	16%	Rp 3.560.800.000	25%	Rp 417.600.000	50%	Rp 7.587.149.859	50	Rp 11.565.549.859
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemanfaatan saluran media komunikasi publik	n/a	50%	Rp 3.539.555.000	60%	Rp 662.600.000	70%	Rp 2.705.004.760	70%	Rp 6.907.159.760
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	n/a	100%	Rp 6.214.592.000	100%	Rp 25.103.990.095	100%	Rp 26.804.502.885	85%	Rp 58.123.084.980
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	n/a	20	Rp 111.100.000	90%	Rp 900.000.000	75	Rp 971.500.000	75	Rp 1.982.600.000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	n/a	20	Rp 111.100.000	90%	Rp 900.000.000	75	Rp 971.500.000	75	Rp 1.982.600.000
Sasaran : 4.1.3. Meningkatkan pelayanan publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	baik	83,50 (Baik)		84,00 (Baik)		84,50 (Baik)		84,50 (Baik)	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
P1										
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	n/a	97,58	Rp 1.775.000.000	98	Rp 366.867.230	99	Rp 2.640.821.230	99	Rp 6.144.615.940
Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	75	Rp 1.848.027.000	76	Rp 395.015.050	77	Rp 1.366.252.570	77	Rp 3.387.406.690

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyediaan Database Kependudukan dan Pencapil di Tingkat Kabupaten	n/a	100	Rp 1.310.000.000	100	Rp 173.681.900	100	Rp 1.169.306.870	100	Rp 2.427.847.390
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	n/a	100	Rp 400.000.000	100	Rp 198.968.790	100	Rp 732.824.140	100	Rp 1.434.949.920
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
P1										
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal	n/a	100%	Rp 254.550.000			100%	Rp 337.250.000	100%	Rp 591.800.000
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	n/a	100%	Rp 669.460.000	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perusahaan yang melakukan pengembangan	n/a	-	-	100 perusahaan	Rp 375.000.000	100 perusahaan	Rp 885.500.000	100 perusahaan	Rp 1.929.960.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal	n/a	100%	Rp 2.778.331.400	-	-	-	-	-	-
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu (GPP)	n/a	-	-	87	Rp 502.550.000	88	Rp 3.100.900.000	88	Rp 6.381.781.400
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal	n/a	100%	Rp 144.350.000	-	-	-	-	-	-
	Persentase perusahaan yang melakukan LKPM	n/a	-	-	80%	Rp 372.462.000	80%	Rp 184.360.000	80%	Rp 701.172.000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal	n/a	-	-	100%	Rp 27.250.000	100%	Rp 172.500.000	100%	Rp 199.750.000
SEKRETARIAT DAERAH										
P1										
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	n/a	100%		100%		100%		100%	
	Persentase kebijakan terkait fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	n/a	100%	Rp 21.995.400.000	100%	Rp 17.752.207.798	100%	Rp 18.817.351.815	100%	Rp 58.564.959.613
	Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	n/a	100%		100%		100%		100%	
	Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan	n/a	96%		98%		99%		99%	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya Kebijakan, koordinasi dan pengawasan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n/a	80%		85%		95%		95%	
	Persentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	n/a	100%	Rp 3.644.663.700	100%	Rp 9.586.424.890	100%	Rp 10.992.510.449	100%	Rp 24.223.599.039
	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	n/a	2%		2%		5%		5%	
KECAMATAN										
KECAMATAN BANGIL										
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 102.400.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 2.404.115.944	100%	Rp 2.521.515.944
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 13.098.556.612	100%	Rp 7.130.528.277	100%	Rp 7.843.581.105	100%	Rp 28.072.665.994
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Porsentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 93.375.000					100%	Rp 93.375.000
KECAMATAN BEJI										
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 300.990.000	100%	Rp 395.427.054	100%	Rp 567.734.100	100%	Rp 1.264.151.154

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 2.343.304.000	100%	Rp 1.331.292.443	100%	Rp 1.905.548.747	100%	Rp 5.580.145.190	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 263.196.570	100%	Rp 10.175.000	100%	Rp 11.080.000	100%	Rp 284.451.570	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintah Desa	n/a	-	-	-	-	100%	Rp 1.000.000	100%	Rp 1.000.000	
KECAMATAN GEMPOL											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik	n/a	100%	Rp 18.700.000	100%	Rp 18.800.000	100%	Rp 32.302.500	100%	Rp 69.802.500	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	65%	Rp 36.100.000	70%	Rp 12.800.000	75%	Rp 19.900.000	75%	Rp 68.800.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	n/a	100%	Rp 3.800.000	100%	Rp 7.600.000	100%	Rp 7.600.000	100%	Rp 19.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintah Desa	n/a	-	-	100%	Rp 1.000.000	100%	Rp 1.000.000	100%	Rp 2.000.000	
KECAMATAN GONDANGWETAN											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 290.000.000	100%	Rp 178.000.000	100%	Rp 265.688.797	100%	Rp 733.688.797	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 1.178.402.000	100%	Rp 818.152.000	100%	Rp 672.044.979	100%	Rp 2.668.598.979	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 18.000.000	100%	Rp 34.073.600	100%	Rp 60.073.600	
KECAMATAN GRATI											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	90%	Rp 355.500.000	95%	Rp 145.000.000	90%	Rp 159.896.870	90%	Rp 660.396.870	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	n/a	70%	Rp 1.214.252.000	75%	Rp 848.152.000	80%	Rp 1.019.017.200	80%	Rp 3.081.421.200	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 11.780.000	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 71.780.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintahan Desa	n/a	70%	Rp 58.216.000	75%	Rp 15.000.000	80%	Rp 46.750.000	80%	Rp 119.966.000	
KECAMATAN KEJAYAN											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	80%	Rp 145.880.000	80%	Rp 144.847.800	85%	Rp 160.033.610	85%	Rp 450.761.410	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	80%	Rp 1.261.652.000	80%	Rp 726.696.119	85%	Rp 10.999.780	85%	Rp 1.999.347.899	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	n/a	80%	Rp 10.000.000	80%	Rp 108.000.000	85%	Rp 95.882.743	85%	Rp 213.882.743	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintahan Desa	n/a	-	Rp 10.000.000			85%	Rp 9.955.000	85%	Rp 19.955.000	
KECAMATAN LEKOK											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	85%	Rp 27.800.000	85%	Rp 17.600.000	90%	Rp 23.000.000	100%	Rp 68.400.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	85%	Rp 18.600.000	85%	Rp 50.000.000	90%	Rp 120.000.000	90%	Rp 188.600.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 11.494.000	100%	Rp 11.550.000	100%	Rp 33.044.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	n/a	70%	Rp 10.000.000	75%	Rp 20.000.000			80%	Rp 30.000.000	
KECAMATAN LUMBANG											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	95%	Rp 48.507.500	95%	Rp 24.018.500	100%	Rp 24.018.300	100%	Rp 96.544.300	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 114.630.000	100%	Rp 11.116.377	100%	Rp 11.116.300	100%	Rp 136.862.677	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 7.200.000	100%	Rp 39.998.100	100%	Rp 39.998.100	100%	Rp 87.196.200	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	n/a	-	-	-	-	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000	
KECAMATAN NGULING											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 22.866.217	100%	Rp 97.866.217	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 110.000.000	100%	Rp 7.000.000	100%	Rp 1.690.128	100%	Rp 118.690.128	
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	-	-	100%	Rp 52.088.867	100%	Rp 52.088.867	100%	Rp 52.088.867	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintah Desa	n/a	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 88.303.719	100%	Rp 88.303.719	100%	Rp 98.303.719	
KECAMATAN PANDANAAN											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 187.800.000	100%	Rp 877.439.258	100%	Rp 965.183.184	100%	Rp 2.030.422.442	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 4.768.702.428	100%	Rp 2.238.868.404	100%	Rp 2.462.755.244	100%	Rp 9.470.326.076	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	90%	Rp 39.200.000	90%	Rp 18.500.000	90%	Rp 233.979.478	90%	Rp 291.679.478	
KECAMATAN PASREPAN											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik	n/a	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 60.026.769	100%	Rp 100.026.769	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina	n/a	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 15.840.000	100%	Rp 90.840.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	70%	Rp 7.500.000	70%	Rp 5.000.000	70%	Rp 7.202.250	70%	Rp 19.702.250	
KECAMATAN POHJENTREK											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 19.800.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 11.218.020	100%	Rp 41.018.020	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.300.000	100%	Rp 10.890.000	100%	Rp 17.190.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 9.515.000	100%	Rp 21.515.000	
KECAMATAN PRIGEN											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 569.842.500	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 569.842.500	100%	Rp 1.149.685.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 3.553.356.000	100%	Rp 803.152.000	100%	Rp 3.524.706.000	100%	Rp 7.881.214.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 14.450.000	100%	Rp 342.799.900	100%	Rp 342.799.900	100%	Rp 357.249.900	
KECAMATAN PURWODADI											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 22.500.000	100%	Rp 114.596.559	100%	Rp 167.096.559	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 31.350.000	100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 14.523.000	100%	Rp 54.873.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	n/a	83%	Rp 2.000.000	83%	Rp 2.000.000	83%	Rp 27.000.000	83%	Rp 29.000.000	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 40.800.000	-	Rp 10.500.000	-	-	100%	Rp 51.300.000	
KECAMATAN PURWOSARI											

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 80.100.000	85,78%	Rp 17.000.000	85,78%	Rp 18.700.000	85,78%	Rp 115.800.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 1.437.187.462	85,78%	Rp 909.464.009	85,78%	Rp 1.000.410.410	85,78%	Rp 3.347.061.881	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	n/a	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 27.500.000	100%	Rp 77.500.000	
KECAMATAN PUSPO											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	95%	Rp 69.150.000	95%	Rp 16.000.000	100%	Rp 24.018.300	100%	Rp 109.168.300	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 75.270.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 11.116.300	100%	Rp 94.386.300	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 8.500.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 39.998.100	100%	Rp 56.498.100	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	n/a	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000	
KECAMATAN REJOSO											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	80%	Rp 30.640.000	85%	Rp 15.000.000	90%	Rp 78.150.000	100%	Rp 123.790.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	70%	Rp 119.240.000	75%	Rp 20.000.000	80%	Rp 132.400.000	80%	Rp 271.640.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 13.395.000	100%	Rp 2.035.000	100%	Rp 14.500.000	100%	Rp 29.930.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	n/a	70%	Rp 43.805.000	75%	Rp 2.035.000	80%	Rp 29.310.600	80%	Rp 75.150.600	
KECAMATAN REMBANG											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik	n/a	100%	Rp 59.100.000	100%	Rp 45.000.000	100%	Rp 44.895.400	100%	Rp 148.995.400	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 64.400.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 19.844.000	100%	Rp 104.244.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	n/a	100%	Rp 17.100.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 8.838.000	100%	Rp 33.938.000	
KECAMATAN SUKOREJO											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 47.166.840	100%	Rp 17.475.000	100%	Rp 13.255.000	100%	Rp 77.896.840	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 91.000.000	100%	Rp 14.000.000	100%	Rp 8.167.500	100%	Rp 113.167.500	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	83%	Rp 11.000.000	83%	Rp 9.905.000	83%	Rp 2.475.000	83%	Rp 23.380.000	
KECAMATAN TOSARI											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 100.625.000	100%	Rp 67.500.000	100%	Rp 57.403.500	100%	Rp 225.528.500	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 79.625.000	100%	Rp 34.500.000	100%	Rp 36.602.500	100%	Rp 150.727.500	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 14.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 17.006.000	100%	Rp 46.006.000	
KECAMATAN TUTUR											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 62.000.000	100%	Rp 12.000.000	100%	Rp 262.551.990	100%	Rp 336.551.990	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik; Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 76.050.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 336.050.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 4.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 28.000.000	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN WINONGAN										
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	100%	Rp 108.800.000	100%	Rp 6.300.000	100%	Rp 28.058.003	100%	Rp 143.158.003
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	100%	Rp 110.000.000	100%	Rp 55.108.000	100%	Rp 19.362.000	100%	Rp 184.470.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 6.720.000	100%	Rp 6.720.000	100%	Rp 7.056.000	100%	Rp 20.496.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	n/a	-	-	100%	Rp 10.300.000	100%	Rp 10.815.000	100%	Rp 21.115.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	n/a	-	-	100%	Rp 9.718.800	100%	Rp 10.204.740	100%	Rp 19.923.540
KECAMATAN WONOREJO										
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	79%	Rp 30.000.000	81%	Rp 30.000.000	83%	Rp 41.041.000	83%	Rp 101.041.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	83%	Rp 20.000.000	85%	Rp 20.000.000	90%	Rp 26.789.400	90%	Rp 66.789.400
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	87%	Rp 10.000.000	89%	Rp 10.000.000	91%	Rp 10.220.788	91%	Rp 30.220.788
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	n/a	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 60.000.000
KECAMATAN KRATON										
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	n/a	97%	Rp 46.720.000	97%	Rp 5.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 66.720.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	n/a	98%	Rp 57.730.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 29.930.120	100%	Rp 102.660.120
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	n/a	100%	Rp 89.800.000	100%	Rp 33.000.000	100%	Rp 29.015.140	100%	Rp 151.815.140
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	n/a	97%	Rp 33.655.000	97%	Rp 15.000.000	100%	Rp 29.058.250	100%	Rp 77.713.250
Misi 5. : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan..										
Tujuan 5.1. : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	66,69	70,61	68,90-70,31	69,61-70,99	69,61-70,99	69,61-70,99	69,61-70,99	69,61-70,99	69,61-70,99
	Indeks Kesehatan	76,76	76,94	76,98	77,02	77,02	77,02	77,02	77,02	77,02
Sasaran : 5.1.1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat	Indeks Pendidikan	56,2	60,05	61,01	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98
	Tingkat Kegemaran Membaca	n/a	n/a	75%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
	Indeks Daya Beli	n/a	72,99	73,97	74,91	74,91	74,91	74,91	74,91	74,91
DINAS KESEHATAN										
P1										
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif	n/a	100%	Rp 1.614.932.750	100%	Rp 1.606.495.500	100%	Rp 1.762.864.972	100%	Rp 4.984.293.222
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional dan administrasi	n/a	91%	Rp 868.389.490	92%	Rp 2.665.279.000	93%	Rp 1.050.751.282	93%	Rp 4.584.419.772
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi, Alkes, dan Makmin yang memenuhi Standar	n/a	80%	Rp 430.397.960	82%	Rp 430.000.000	85%	Rp 520.781.532	85%	Rp 1.381.179.492
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan	n/a	100%	Rp 40.551.186.795	100%	Rp 55.173.888.168	100%	Rp 64.641.887.705	100%	Rp 160.366.962.668
	Prevlensi Balita Stunting	n/a	26%	Rp 5.554.032.876	25%	Rp 7.064.608.620	24%	Rp 6.798.909.009	24%	Rp 19.417.550.505
	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai Standar	n/a	95%	Rp 122.091.250.032	96%	Rp 126.799.299.053	97%	Rp 72.237.573.306	97%	Rp 321.128.122.391
	Persentase Angka Kontak FKTP	n/a	10%	Rp 102.610.763.066	11%	Rp 99.609.142.154	12%	Rp 125.223.930.870	12%	Rp 327.443.836.090
RSUD BANGIL										
P1										

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	100%	Rp 35.188.025.454	100%	Rp 62.465.272.700	100%	Rp 60.500.000.000	100%	Rp 158.153.298.154
	RSUD GRATIS	n/a								
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	82,85	Rp 31.533.500.000	83%	Rp 31.533.500.000	83%	Rp 35.000.000.000	83%	Rp 98.067.000.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
P1										
Program Pengelolaan Pendidikan	1) APM SD/MI	n/a	100%	Rp 174.469.254.030	100%	Rp 291.443.198.468	100%	Rp 333.597.236.283	100%	Rp 799.509.688.781
	2) APM SMP/MTS	n/a	95,82%		95,85%		95,87%			
	3) APK PAUD	n/a	92,45%		92,47%		92,49%			
	4) Angka Kelulusan Peserta Warga Belajar Kesetaraan	n/a	1600 Orang		3000 Orang		3500 Orang			
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	n/a	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 160.000.000	100%	Rp 560.000.000
	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	n/a					100%	Rp 3.900.000.000	100%	Rp 3.900.000.000
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin	n/a	-	-	100%	Rp 50.000.000			100%	Rp 50.000.000
	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin	n/a	-	-			95,03%	Rp 450.000.000	95,03%	Rp 450.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
P1										
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A	n/a	7%	Rp 199.500.000	8%	Rp 225.960.487	9%	Rp 993.199.300	9%	Rp 1.418.659.787
Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koleksi Nasional dan naskah Kuno yang dilestarikan	n/a	-	-	5%	Rp 10.000.000	5%	Rp 200.000.000	5%	Rp 210.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
P1										
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	n/a	39,82%	Rp 50.000.000	42%	Rp 17.156.030	42%	Rp 100.000.000	42%	Rp 167.156.030
	Persentase perusahaan eksportir yang dibina	n/a	5,61%	Rp 10.000.000	5,61%	Rp 5.000.000	5,61%	Rp 25.000.000	5,61%	Rp 40.000.000
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	n/a	14%	Rp 295.000.000	21%	Rp 158.608.480	21%	Rp 3.400.000.000	21%	Rp 3.853.608.480
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil	n/a	100%	Rp 113.110.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 317.000.000	100%	Rp 445.110.000
Program Pengembangan Ekspor	Persentase nilai ekspor	n/a	1%	Rp 411.105.000	1%	Rp 33.554.600	1%	Rp 1.320.000.000	1%	Rp 1.764.659.600
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	n/a	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 560.000.000
Program Penggunaan Pemasaran dan Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang terfasilitasi	n/a	10%	Rp 25.785.000	10%	Rp 35.000.000	20%	Rp 220.000.000	20%	Rp 280.785.000
Sasaran : 5.1.2. Meningkatkan kualitas Lingkungan permukiman	Indeks Pemukiman Layak Huni	n/a		85,6		92,5		96,55		96,55
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										
P1										
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	n/a	88,81%	Rp 7.195.231.000	-		-		88,81%	Rp 7.195.231.000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	n/a	89,2%	Rp 2.000.000.000	-		-		89,2%	Rp 2.000.000.000
Program Pengembangan Permukiman	Persentase tercapainya pengembangan kawasan permukiman	n/a	8,66%	Rp 10.682.607.926	-		-		8,66%	Rp 10.682.607.926

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Tertangani	n/a	99,99%	Rp 55.431.323.650	-	-	-	-	99,99%	Rp 55.431.323.650
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang Tertangani	n/a	100%	Rp 800.000.000	-	-	-	-	100%	Rp 800.000.000
Program Kawasan Permukiman	Persentase tercapainya pengembangan permukiman	n/a	12,84%	Rp 35.322.144.000	15,64%	Rp 39.700.474.627	15,64%	Rp 2.811.535.980	12,84%	Rp 77.834.154.607
Program Pengembangan Perumahan	Prosentase tercapainya Pengembangan perumahan	n/a	27%	Rp 400.000.000	12,84%	Rp 253.350.480	15,64%	Rp 6.049.999.208	15,64%	Rp 6.703.349.688
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	n/a	-	Rp 100.000.000	6,26%	Rp 105.341.800	9,38%	Rp 2.811.535.980	16%	Rp 3.016.877.780
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase ketersediaan rumah layak huni	n/a	-	-	42,57%	Rp 50.916.144.580	47,73%	Rp 56.007.759.038	47,73%	Rp 106.923.903.618
Sasaran : 5.1.3. Meningkatnya kesetaraan masyarakat	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	90,45		91,07		91,22		91,38		91,38
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
P1										
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase dokumen PPRG yang disampaikan	n/a	100%	Rp 515.000.000	100%	Rp 552.000.000	100%	Rp 211.995.000	100%	Rp 1.278.995.000
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	n/a	100%	Rp 70.000.000	100%	Rp 77.000.000	100%	Rp 271.862.000	100%	Rp 418.862.000
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	n/a	100%	Rp 85.000.000	100%	Rp 63.500.000	100%	Rp 317.566.000	100%	Rp 466.066.000
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	n/a	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 22.000.000	100%	Rp 376.209.000	100%	Rp 418.209.000
Sasaran : 5.1.6. Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio pemuda berprestasi	15		30		35		40		40
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA										
P1										
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	n/a	100%	Rp 1.448.945.000	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 2.662.537.500	100%	Rp 4.611.482.500
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet berprestasi yang dibina	n/a	100%	Rp 6.720.005.000	100%	Rp 4.421.604.500	100%	Rp 38.128.867.147	100%	Rp 49.270.476.647
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	n/a	80%	Rp 510.000.000	80%	Rp 300.000.000	100%	Rp 1.853.302.500	100%	Rp 2.663.302.500



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat mengenai program dalam visi serta misi Kepala Daerah. Selain itu pada bagian ini juga memuat indikasi program serta kerangka pendanaan program dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang didalamnya berisikan program-program dari organisasi perangkat daerah untuk menunjang keberhasilan visi misi tersebut. Pada bagian ini tentu saja penting karena menjadi rencana pembangunan jangka menengah dalam waktu lima tahun ke depan.

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pasuruan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program perangkat daerah yang akan mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak perlu dituangkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan. Penyusunan kerangka pendanaan berdasarkan kemampuan pendanaan dari Kabupaten Pasuruan itu sendiri serta pendanaan penunjang lainnya. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2 halaman berikut:

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023

1	REKENING	APBD	Rata 2	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
		2018	%	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KAPASITAS RILL KEUANGAN	3,376,868,296,332.53		3,698,739,776,695.86	3.494.731.077.884,28	3,340,592,905,586.81	3,370,843,205,957.16	3,400,824,545,379.44
1	Belanja Operasi	2,292,101,702,921.94		2,429,283,743,572.85	2.070.414.873.308,96	2,226,278,375,973.35	2,256,528,676,343.70	2,286,510,015,765.98
	Belanja Pegawai	1,056,530,389,659.9 9		1,131,645,590,587.80	1.203.142.213.892,0 0	1,073,859,821,036.91	1,114,945,516,907.26	1,139,926,856,329.54
	Belanja Barang dan Jasa	1,009,492,712,067.9 5		1,102,491,270,567.05	706.180.335.963,96	916,411,184,936.44	916,411,184,936.44	916,411,184,936.44
	Belanja Bunga	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	199,050,601,194.00		163,067,882,418.00	126.307.448.453,00	197,474,870,000.00	184,639,474,500.00	184,639,474,500.00
	Belanja Bantuan Sosial	27,028,000,000.00		32,079,000,000.00	34.784.875.000,00	38,532,500,000.00	40,532,500,000.00	45,532,500,000.00
2	Belanja Modal	506,488,851,528.0 2		585,656,323,299.84	352.127.050.135,2 8	445,617,493,879.68	445,617,493,879.68	445,617,493,879.68
	Belanja Tanah	0.00		0.00	28.408.220,00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	0.00		0.00	114.363.487.979,20	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bangunan dan Gedung	0.00		0.00	94.332.201.680,00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00		0.00	135.206.224.587,00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00		0.00	8.196.727.669,08	0.00	0.00	0.00

Tabel 7.2 (T-C. 16) Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pasuruan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				Rp 852.681.745.830		Rp 827.726.579.180		Rp 694.379.754.135		Rp 2.374.788.079.145	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 668.371.891.800	100%	Rp 529.537.380.712	100%	Rp 349.840.047.152	100%	Rp 1.547.749.319.664	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Pendidikan	1) APM SD/MI	%	100%	Rp 174.469.254.030	100%	Rp 291.443.198.468	100%	Rp 333.597.236.283	100%	Rp 799.509.688.781	
	2) APM SMP/MTS	%	95,82%		95,85%		95,87%				
	3) APK PAUD	%	92,45%		92,47%		92,49%				
	4) Angka Kelulusan Peserta Warga Belajar Kesetaraan	%	1600 Orang		3000 Orang		3500 Orang				
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	%	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 160.000.000	100%	Rp 560.000.000	
	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	%					100%	Rp 3.900.000.000	100%	Rp 3.900.000.000	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin	%	-	-	100%	Rp 50.000.000			100%	Rp 50.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin	%	-	-			95,03%	Rp	450.000.000	95,03%	Rp	450.000.000			
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Guru Bahasa Daerah yang mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah	%			100%	Rp	100.000.000	100%	Rp	54.000.000	100%	Rp	154.000.000		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan	%	97,6%		97,6%	Rp	9.590.600.000	97,6%	Rp	6.378.470.700,00	97,6%	Rp	22.415.070.700		
	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan	%	90%	90%	90%			90%							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
DINAS KESEHATAN				Rp 601.087.478.423		Rp 692.906.277.087		Rp 689.307.211.700		Rp 1.983.300.967.210					
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif	%	100%	Rp	1.614.932.750	100%	Rp	1.606.495.500	100%	Rp	1.762.864.972	100%	Rp	4.984.293.222	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	%	100%	Rp	127.865.000.000	100%	Rp	126.266.500.000	100%	Rp	136.170.513.024	100%	Rp	390.302.013.024	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional dan administrasi	%	91%	Rp	868.389.490	92%	Rp	2.665.279.000	93%	Rp	1.050.751.282	93%	Rp	4.584.419.772	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi, Alkes, dan Makmin yang memenuhi Standar	%	80%	Rp	430.397.960	82%	Rp	430.000.000	85%	Rp	520.781.532	85%	Rp	1.381.179.492	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan	%	100%	Rp 40.551.186.795	100%	Rp 55.173.888.168	100%	Rp 64.641.887.705	100%	Rp 160.366.962.668	
	Prevalensi Balita Stunting	%	26%	Rp 5.554.032.876	25%	Rp 7.064.608.620	24%	Rp 6.798.909.009	24%	Rp 19.417.550.505	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai Standar	%	95%	Rp 122.091.250.032	96%	Rp 126.799.299.053	97%	Rp 72.237.573.306	97%	Rp 321.128.122.391	
	Persentase Angka Kontak FKTP	%	10%	Rp 102.610.763.066	11%	Rp 99.609.142.154	12%	Rp 125.223.930.870	12%	Rp 327.443.836.090	
SUB UNIT DINAS KESEHATAN											
1. RSUD BANGIL				Rp 163.053.025.454		Rp 222.565.272.700		Rp 225.600.000.000		Rp 611.218.298.154	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 127.865.000.000	1%	Rp 160.100.000.000	1%	Rp 165.100.000.000	1%	Rp 453.065.000.000	RSUD Bangil
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100%	Rp 35.188.025.454	100%	Rp 62.465.272.700	100%	Rp 60.500.000.000	100%	Rp 158.153.298.154	
2. RSUD GRATI				Rp 36.448.500.000		Rp 50.725.791.892		Rp 55.300.000.000		Rp 142.474.291.892	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	%	80	Rp 4.915.000.000	85%	Rp 19.192.291.892	90%	Rp 20.300.000.000	90%	Rp 44.407.291.892	RSUD Grati
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,85	Rp 31.533.500.000	83%	Rp 31.533.500.000	83%	Rp 35.000.000.000	83%	Rp 98.067.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI				Rp 233.846.713.709		Rp 82.113.687.174		Rp 82.113.687.174		Rp 398.074.088.057	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	Rp 40.707.989.000	100%	Rp 40.594.403.940	100%	Rp 40.594.403.940	100%	Rp 121.896.796.880	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase yang dibangun	%	0,60%	Rp 3.430.000.000	0,86%	Rp 100.000.000	1,17%	Rp 100.000.000	2,63%	Rp 3.630.000.000	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	%	7,22%	Rp 189.708.724.709	6,79%	Rp 41.332.545.000	6,67%	Rp 41.332.545.000	20,86%	Rp 272.373.814.709	
Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yg berkompentensi	%	-		100%	Rp 86.738.234	100%	Rp 86.738.234	100%	Rp 173.476.468	
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				Rp 165.175.182.556		Rp 175.246.889.545		Rp 180.354.692.155		Rp 520.776.764.256	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Irigasi	Indeks	60,4	Rp145.248.036.556	62,4	Rp 12.848.019.265	64,4	Rp 12.835.115.056	64,4	Rp 170.931.170.877	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan berusaha yang diproses	%	90%	Rp1.525.000.000	91%	Rp 1.526.000.000	9200%	Rp 1.526.001.660	9200%	Rp 4.577.001.660	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%			0,89%	Rp 5.211.963.000	89,91%	Rp 31.816.000.000	88,81%	Rp 37.027.963.000	
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%					50%	Rp 5.000.000.000	50%	Rp 5.000.000.000	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi/air limbah domestik (layak dan aman)	%			84,38%	Rp 2.634.949.000	85,23%	Rp 10.709.000.000	89,20%	Rp 13.343.949.000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengembangan Permukiman	Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik	%			9,09%	Rp 400.000.000	9,09%	Rp 22.768.000.000	9,09%	Rp 23.168.000.000	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	%			99,99%	Rp 133.763.430.280	99%	Rp 76.073.000.000	99%	Rp 209.836.430.280	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan yang sesuai RTBL	%			100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 852.000.000	100%	Rp 952.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	Rp 18.402.146.000	10000 %	Rp 18.762.528.000	100%	Rp 18.775.575.439	100%	Rp 55.940.249.439	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp 76.109.162.576						Rp 76.109.162.576	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	88,81%	Rp 7.195.231.000	-		-		88,81%	Rp 7.195.231.000	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	%	89,2%	Rp 2.000.000.000	-		-		89,2%	Rp 2.000.000.000	
Program Pengembangan Permukiman	Persentase tercapainya pengembangan kawasan permukiman	%	8,66%	Rp 10.682.607.926	-		-		8,66%	Rp 10.682.607.926	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Tertangani	%	99,99%	Rp 55.431.323.650	-		-		99,99%	Rp 55.431.323.650	
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang Tertangani	%	100%	Rp 800.000.000	-		-		100%	Rp 800.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp 46.322.655.850		Rp 102.957.959.712		Rp 80.861.743.253		Rp 230.142.358.815	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100%	Rp 10.500.511.850	100%	Rp 11.982.648.225	100%	Rp 13.180.913.047	100%	Rp 35.664.073.122	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase tercapainya pengembangan permukiman	%	12,84%	Rp 35.322.144.000	15,64%	Rp 39.700.474.627	15,64%	Rp 2.811.535.980	12,84%	Rp 77.834.154.607	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya pengembangan perumahan	%	27%	Rp 400.000.000	12,84%	Rp 253.350.480	15,64%	Rp 6.049.999.208	15,64%	Rp 6.703.349.688	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	-	Rp 100.000.000	6,26%	Rp 105.341.800	9,38%	Rp 2.811.535.980	16%	Rp 3.016.877.780	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase ketersediaan rumah layak huni	%	-	-	42,57%	Rp 50.916.144.580	47,73%	Rp 56.007.759.038	47,73%	Rp 106.923.903.618	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				Rp 3.668.812.500		Rp 3.459.606.446		Rp 4.761.532.400		Rp 11.889.951.346	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 2.563.242.500	100%	Rp 2.703.986.843	100%	Rp 2.884.334.000	100%	Rp 8.151.563.343	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	%	5,71%	Rp 1.105.570.000	8,57%	Rp 755.619.603	11,42%	Rp 1.877.198.400	11,42%	Rp 3.738.388.003	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				Rp 14.720.699.650		Rp 15.119.473.327		Rp 27.673.061.550		Rp 57.513.234.527	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pemenuhan Layanan Kantor	%	100%	Rp 9.021.975.700	100%	Rp 11.300.003.127	100%	Rp 18.337.365.450	100%	Rp 38.659.344.277	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	Rp 4.384.903.950	100%	Rp 2.690.812.500	100%	Rp 7.581.458.200	100%	Rp 14.657.174.650	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kejadian Kebakaran	%	100%	Rp 1.313.820.000	100%	Rp 1.128.657.700	100%	Rp 1.754.237.900	100%	Rp 4.196.715.600	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
DINAS SOSIAL				Rp 9.267.748.820		Rp 7.124.779.302		Rp 5.777.320.000		Rp 22.169.848.122	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	1%	Rp 5.163.017.000	100%	Rp 4.985.787.302	100%	Rp 1.881.320.000	100%	Rp 12.030.124.302	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan PSKS	%	0,07%	Rp 983.500.000	6,58%	Rp 527.300.000	6,58%	Rp 903.000.000	6,58%	Rp 2.413.800.000	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan	%	0,86%	Rp 10.000.000	85,65%	Rp 10.000.000	85,65%	Rp 10.000.000	85,65%	Rp 30.000.000	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	0,86%	Rp 2.235.500.000	85,65%	Rp 1.139.092.000	85,65%	Rp 2.182.500.000	85,65%	Rp 5.557.092.000	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS dan Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosialnya	%	0,86%	Rp 503.231.820	85,65%	Rp 243.900.000	85,65%	Rp 503.000.000	85,65%	Rp 1.250.131.820	
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	6,58%	Rp 270.000.000	6,58%	Rp 152.100.000	6,58%	Rp 220.000.000	6,58%	Rp 642.100.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP	%	6,58%	Rp 102.500.000	6,58%	Rp 66.600.000	658%	Rp 77.500.000	6,58%	Rp 246.600.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
DINAS KETENAGAKERJAAN				Rp 10.732.485.096		Rp 10.291.925.500		Rp 22.982.000.000		Rp 44.006.410.596	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminitrasi Kantor	%	100%	Rp 8.301.660.596	100%	Rp 7.595.661.000	100%	Rp 11.126.000.000	100%	Rp 27.023.321.596	Dinas Ketenagakerjaan
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun	%			100%	Rp 325.000.000	100%	Rp 325.000.000	100%	Rp 650.000.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan yang lulus uji kompetensi	%	40%	Rp 952.456.000	40%	Rp 1.700.000.000	40%	Rp 2.501.000.000	40%	Rp 5.153.456.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang di tempatkan	%	40%	Rp 515.672.500	40%	Rp 200.000.000	40%	Rp 1.755.000.000	40%	Rp 2.470.672.500	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	50%	Rp 962.696.000	50%	Rp 471.264.500	50%	Rp 7.275.000.000	50%	Rp 8.708.960.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,				Rp 6.906.714.000		Rp 5.921.596.000		Rp 6.566.809.000		Rp 19.395.119.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 6.216.714.000	100%	Rp 5.207.096.000	100%	Rp 5.389.177.000	100%	Rp 16.812.987.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase dokumen PPRG yang disampaikan	%	100%	Rp 515.000.000	100%	Rp 552.000.000	100%	Rp 211.995.000	100%	Rp 1.278.995.000		
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100%	Rp 70.000.000	100%	Rp 77.000.000	100%	Rp 271.862.000	100%	Rp 418.862.000		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	%	100%	Rp 85.000.000	100%	Rp 63.500.000	100%	Rp 317.566.000	100%	Rp 466.066.000		
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	%	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 22.000.000	100%	Rp 376.209.000	100%	Rp 418.209.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				Rp 483.690.333		Rp 886.306.163		Rp 2.793.685.375		Rp 4.163.681.871		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	%	70%	Rp 25.000.000	75%	Rp 518.936.988	80%	Rp 2.000.000.000	80%	Rp 2.543.936.988	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85	Rp 353.110.333	85,5	Rp 278.904.635	86	Rp 618.105.535	86	Rp 1.250.120.503		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	%	100%	Rp 89.580.000	100%	Rp 72.464.540	100%	Rp 114.579.840	100%	Rp 276.624.380		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	%	100%	Rp 16.000.000	100%	Rp 16.000.000	100%	Rp 61.000.000	100%	Rp 93.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				Rp 632.566.970						Rp 632.566.970	
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	100%	Rp 99.892.500					100%	Rp 99.892.500	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Program pengelolaan izin membuka tanah	Persentase pemanfaatan tanah aset pmda yang sesuai ketentuan	%	8,35%	Rp 154.779.920					8,35%	Rp 154.779.920	
Program penatagunaan tanah	Persentase luas tanah aset pmda yang direncanakan penggunaannya	%	9,04%	Rp 377.894.550					9,04%	Rp 377.894.550	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp 740.000.000		Rp 736.000.000		Rp 2.124.490.000		Rp 3.600.490.000	
Program Pengelolaan Izin Lokasi	prosentase luas tanah yg sudah keluar izin lokasi	%	-	-			100%	Rp 110.000.000	100%	Rp 110.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	-	-			100%	Rp 220.000.000	100%	Rp 220.000.000	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase masyarakat yg menerima ganti kerugian	%	-	-			63,76%	Rp 220.000.000	63,76%	Rp 220.000.000	
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	-			100%	Rp 770.000.000	100%	Rp 770.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 129.490.000	100%	Rp 329.490.000	
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pemanfaatan Aset PEMDA yang dimanfaatkan	%	18.08%	Rp 220.000.000	18.08%	Rp 220.000.000	27.11%	Rp 250.000.000	27.11%	Rp 690.000.000	
Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset PEMDA yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya	%	18.08%	Rp 420.000.000	18.08%	Rp 416.000.000	27%	Rp 425.000.000	27%	Rp 1.261.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				Rp 39.578.124.000		Rp 13.425.414.762		Rp 13.425.414.762		Rp 66.428.953.524	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100%	Rp 12.977.000	100%	Rp 12.977.000	100%	Rp 12.977.000	100%	Rp 38.931.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	Rp 10.729.479.000	100	Rp 10.141.264.762	100	Rp 10.141.264.949	100	Rp 31.012.008.711	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	85	Rp 15.000.000	85	Rp 77.480.000	85	Rp 77.477.700	85	Rp 169.957.700	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase usaha dan/ kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	%	72		74		76		76		
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sungai yang tidak tercemar	%	30	Rp 11.114.551.731	30	Rp 404.841.000	30	Rp 404.825.714	30	Rp 11.924.218.445	
	Persentase lokasi pemantauan kualitas udara yang tidak tercemar	%	75		80		85		85		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	persentase penurunan lahan kritis di wilayah kabupaten pasuruan	%	20		25		30		30			
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik	%	0,05	Rp 7.911.554.874	0,051	Rp 541.018.000	0,055	Rp 541.017.750	0,055	Rp 8.993.590.624		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengelolaan kegiatan usaha pengumpulan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis	%	100	Rp 20.000.000	100	Rp 6.680.000	100	Rp 6.679.900	100	Rp 33.359.900		
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/ kegiatan	%	50	Rp 30.000.000	50	Rp 19.280.000	50	Rp 19.280.000	50	Rp 68.560.000		
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui				0		0		0	-		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	13	Rp 10.000.000	16	Rp 26.169.000	19	Rp 26.169.000	19	Rp 62.338.000		
	Persentase sekolah/ponpes yang berwawasan lingkungan	%	19		21		25		25			
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	persentase perusahaan berwawasan lingkungan (proper)	%	20	Rp 27.570.000	20	Rp 38.357.000	25	Rp 38.357.000	25	Rp 104.284.000		
	Persentase sekolah / madrasah berwawasan	%	23		23		25		25			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	lingkungan (adiviyata)											
Program Pengelolaan Persampahan	persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	%	100	Rp 9.706.991.395	100	Rp 2.157.348.000	100	Rp 2.157.365.749	100	Rp 14.021.705.144		
	persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	%	100		100		100		100			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				Rp 14.714.843.432		Rp 11.483.608.820		Rp 22.391.756.577		Rp 55.510.267.116		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	Rp 9.381.816.432	100	Rp 10.349.075.850	100	Rp 16.482.551.767	100	Rp 42.115.447.176	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	97,58	Rp 1.775.000.000	98	Rp 366.867.230	99	Rp 2.640.821.230	99	Rp 6.144.615.940		
Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	75	Rp 1.848.027.000	76	Rp 395.015.050	77	Rp 1.366.252.570	77	Rp 3.387.406.690		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyediaan Database Kependudukan dan Pencapil di Tingkat Kabupaten	%	100	Rp 1.310.000.000	100	Rp 173.681.900	100	Rp 1.169.306.870	100	Rp 2.427.847.390		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	Rp 400.000.000	100	Rp 198.968.790	100	Rp 732.824.140	100	Rp 1.434.949.920		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 8.094.243.625		Rp 20.519.785.178		Rp 22.292.433.679		Rp 50.906.462.482	
Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Rp 5.456.931.665	100	Rp 5.608.408.030	100	Rp 6.476.783.864	100	Rp 17.542.123.559	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang sarana prasarananya difasilitasi	%	42	Rp 39.000.000	20	Rp 35.000.000	25	Rp 13.387.500	30	Rp 87.387.500	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa yang membentuk Kerjasama	%	0,04	Rp 40.000.000	4,2	Rp 605.350.000	0,42	Rp 635.617.500	0,42	Rp 1.280.967.500	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Tertib Administrasi Perencanaan dan Perkembangan Desa	%	75	Rp 71.743.500	78	Rp 320.431.000	80	Rp 449.952.550	80	Rp 842.127.050	
	Prosentase Desa yang memiliki BUMDes bermitra dan Profil Desa yang update	%	90	Rp 520.000.000	90	Rp 1.673.559.600	90	Rp 1.758.237.580	90	Rp 3.951.797.180	
	Prosentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	%	80	Rp 1.375.183.700	80	Rp 9.896.377.448	80	Rp 10.903.765.530	80	Rp 22.175.326.678	
	Prosentase Desa tertib administrasi keuangan desa yang akuntabel	%	80	Rp 76.628.300	80	Rp 39.999.800	80	Rp 41.999.790	80	Rp 158.627.890	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif	%	100	Rp 444.756.460	100	Rp 1.835.659.300	100	Rp 1.482.439.365	100	Rp 3.762.855.125	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prosentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang meningkat volume usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) dan Pemanfaatan TTG	%	72	Rp 70.000.000	75	Rp 505.000.000	80	Rp 530.250.000	80	Rp 1.105.250.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp 9.583.369.500		Rp 9.313.982.633		Rp 11.110.029.000		Rp 30.007.381.133	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru	%	100%	Rp 37.050.000	100%	Rp 35.000.000	100%	Rp 124.450.000	100%	Rp 196.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru	%	100%	Rp 8.125.920.000	100%	Rp 7.931.577.683	100%	Rp 9.456.400.000	100%	Rp 25.513.897.683	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase dimensi ketentraman	%	20,00 %	Rp 978.399.800	20,20	Rp 817.404.950	20,4 %	Rp 966.551.000	20,4 %	Rp 2.762.355.750	
	Persentase dimensi kemandirian	%	17,50 %	Rp 434.999.800	17,66	Rp 500.000.000	17,82 %	Rp 472.508.000	17,82 %	Rp 1.407.507.800	
	Persentase dimensi kebahagiaan	%	13,75 %	Rp 6.999.900	13,89	Rp 30.000.000	14,03 %	Rp 90.120.000	14,03 %	Rp 127.119.900	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
DINAS PERHUBUNGAN				Rp 18.965.858.090		Rp 11.821.754.230		Rp 83.564.200.000		Rp 114.351.812.320	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	Rp 12.961.808.090	100%	Rp 10.781.682.774	100%	Rp 53.262.700.000	100%	Rp 77.006.190.864	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase wilayah terkoneksi sarana angkutan umum yang berkeselamatan	%	12,17%	Rp 6.004.050.000	13,04%	Rp 1.040.071.456	13,92%	Rp 30.301.500.000	13,92%	Rp 37.345.621.456	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Rp 13.314.947.000		Rp 26.184.190.095		Rp 37.096.657.504		Rp 76.595.794.599	
Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	%	16%	Rp 3.560.800.000	25%	Rp 417.600.000	50%	Rp 7.587.149.859	50	Rp 11.565.549.859	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemanfaatan saluran media komunikasi publik	%	50%	Rp 3.539.555.000	60%	Rp 662.600.000	70%	Rp 2.705.004.760	70%	Rp 6.907.159.760	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	%	100%	Rp 6.214.592.000	100%	Rp 25.103.990.095	100%	Rp 26.804.502.885	85%	Rp 58.123.084.980	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				Rp 1.904.609.800		Rp 3.259.181.000		Rp 12.569.658.648		Rp 8.085.459.593	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100%	Rp 5.427.688.950	100%	Rp 9.647.989.855	100%	Rp 9.647.989.855	100%	Rp 24.723.668.660	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pelayanan izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Yang memiliki ijin Usaha Simpan Pinjam	%	100%	Rp 17.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 20.567.096	100%	Rp 337.567.096	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan patuh	%	80%	Rp 312.493.000	82,5%	Rp 250.000.000	85%	Rp 378.116.336	85%	Rp 940.609.336	
Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase KSP/ USP yang sehat	%	46,31 %	Rp 150.000.000	47,99 %	Rp 350.000.000	49,55 %	Rp 181.499.939	49,55 %	Rp 681.499.939	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti DIKLAT	%	31,97 %	Rp 607.116.800	32,18 %	Rp 759.181.000	32,39 %	Rp 734.611.245	32,39 %	Rp 2.100.909.045	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi	%	0,5 %	Rp 568.000.000	0,5 %	Rp 900.000.000	0,5 %	Rp 687.279.985	0,5 %	Rp 2.155.279.985	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro	%	30%	Rp 250.000.000	30%	Rp 700.000.000	30%	Rp 919.594.192	30%	Rp 1.869.594.192	
Program Pengembangan UMKM	Persentase Omset Usaha Mikro	%	3%	Rp 1.300.000.000					3%	Rp 1.300.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				Rp 8.856.159.080		Rp 7.053.600.549		Rp 11.751.065.800		Rp 27.660.825.429	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	Rp 5.009.467.680	100%	Rp 5.776.338.549	100%	Rp 7.070.555.800	100%	Rp 17.856.362.029	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal	%	100%	Rp 254.550.000			100%	Rp 337.250.000	100%	Rp 591.800.000	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	100%	Rp 669.460.000	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Perusahaan yang melakukan pengembangan	Perusahaan	-	-	100 perusahaan	Rp 375.000.000	100 perusahaan	Rp 885.500.000	100 perusahaan	Rp 1.929.960.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal	%	100%	Rp 2.778.331.400	-	-	-	-	-	-	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		-	-	87	Rp 502.550.000	88	Rp 3.100.900.000	88	Rp 6.381.781.400	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	terhadap pelayanan terpadu (GPP)											
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal	%	100%	Rp 144.350.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase perusahaan yang melakukan LKPM	%	-	-	80%	Rp 372.462.000	80%	Rp 184.360.000	80%	Rp 701.172.000		
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal	%	-	Rp -	100%	Rp 27.250.000	100%	Rp 172.500.000	100%	Rp 199.750.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				Rp 13.192.286.960		Rp 9.678.926.918		Rp 48.252.088.187		Rp 71.123.302.065		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	Rp 4.513.336.960	100%	Rp 4.457.322.418	100%	Rp 5.607.381.040	100%	Rp 14.578.040.418		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	100%	Rp 1.448.945.000	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 2.662.537.500	100%	Rp 4.611.482.500		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet berprestasi yang dibina	%	100%	Rp 6.720.005.000	100%	Rp 4.421.604.500	100%	Rp 38.128.867.147	100%	Rp 49.270.476.647		
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	%	80%	Rp 510.000.000	80%	Rp 300.000.000	100%	Rp 1.853.302.500	100%	Rp 2.663.302.500		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Rp 166.000.000				Rp 266.000.000		Rp 432.000.000		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	31%	Rp 166.000.000			100%	Rp 266.000.000	100%	Rp 432.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Rp 111.100.000		Rp 900.000.000		Rp 971.500.000		Rp 1.982.600.000	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	Indeks	20	Rp 111.100.000	90%	Rp 900.000.000	75	Rp 971.500.000	75	Rp 1.982.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				Rp 1.180.311.164		Rp 735.000.000		Rp 5.270.000.000		Rp 7.185.311.164	
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Cagar Budaya yang dilestarikan	Jenis	20	Rp 155.000.000	22	Rp 50.000.000	24	Rp 370.000.000	24	Rp 575.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan kebudayaan	Jumlah Kebudayaan Yang Dikembangkan	Jenis	4	Rp 680.311.164	6	Rp 635.000.000	8	Rp 4.050.000.000	18	Rp 5.365.311.164	
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan koleksi museum	%	100	Rp 145.000.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 300.000.000	100	Rp 465.000.000	
Program pengembangan kesenian tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	Jenis	2	Rp 200.000.000	-		6	Rp 550.000.000	12	Rp 750.000.000	
Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang dipublikasikan	%			100%	Rp 30.000.000			100%	Rp 30.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				Rp 5.936.463.850		Rp 5.274.471.588		Rp 7.081.581.300		Rp 18.292.516.738	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 5.736.963.850	100%	Rp 5.038.511.101	100%	Rp 5.888.382.000	100%	Rp 16.663.856.951	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A	%	7%	Rp 199.500.000	8%	Rp 225.960.487	9%	Rp 993.199.300	9%	Rp 1.418.659.787	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koleksi Nasional dan naskah Kuno yang dilestarikan	%	-	-	5%	Rp 10.000.000	5%	Rp 200.000.000	5%	Rp 210.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				Rp 219.218.000		Rp 100.000.000		Rp 950.000.000		Rp 1.269.218.000	
Program Pengelolaan Arsip	Kategori Pengelolaan Arsip Statis	Nilai	60	Rp 219.218.000	65	Rp 93.200.000	70	Rp 850.000.000	70	Rp 1.162.418.000	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	%	-	-	35%	Rp 6.800.000	40%	Rp 100.000.000	40%	Rp 106.800.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
DINAS PERIKANAN				Rp 7.857.196.017		Rp 7.171.313.503		Rp 11.574.538.330		Rp 26.603.047.850	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100 %	Rp 4.980.987.167	100 %	Rp 5.135.186.153	100 %	Rp 6.367.525.550	100 %	Rp 16.483.698.870	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	%	6 %	Rp 766.353.000	7 %	Rp 254.494.000	8 %	Rp 1.411.287.100	8 %	Rp 2.432.134.100	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya	%	6 %	Rp 1.307.287.850	7 %	Rp 1.525.866.350	8 %	Rp 2.564.118.400	8 %	Rp 5.397.272.600	Dinas Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya yang tertib aturan	%	-		75	Rp 35.560.000	80	Rp 200.000.000	80	Rp 235.560.000	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Omzet Pelaku Usaha Perikanan	Rp	17 Milyar	Rp 802.568.000	17,5 Milyar	Rp 220.207.000	18 Milyar	Rp 1.031.607.280	18 Milyar	Rp 2.054.382.280	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
DINAS PARIWISATA				Rp 9.985.069.000		Rp 10.362.964.261		Rp 19.085.285.345		Rp 39.433.318.606	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%	100%	Rp 7.430.610.400	100%	Rp 7.092.885.461	100%	Rp 8.985.285.345	100%	Rp 23.508.781.206	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	%	20%	Rp 494.050.000	25%	Rp 862.578.800	30%	Rp 2.175.000.000	30%	Rp 3.531.628.800	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata bersertifikat CHSE	%	20%	Rp 1.335.408.600	25%	Rp 640.000.000	30%	Rp 4.500.000.000	30%	Rp 6.475.408.600	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkatkan kunjungan wisatanya	%	20%	Rp 725.000.000	30%	Rp 317.500.000	40%	Rp 1.250.000.000	40%	Rp 2.292.500.000	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkatkan omsetnya	%	-	-	20%	Rp 1.450.000.000	25%	Rp 2.175.000.000	25%	Rp 3.625.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				Rp 13.229.359.000		Rp 30.598.880.235		Rp 49.317.393.398		Rp 93.145.632.633	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100%	Rp 7.700.864.362	100%	Rp 18.841.159.528	100%	Rp 20.306.993.000	100%	Rp 46.849.016.890	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian	%	75%	Rp 3.972.022.978	75%	Rp 2.291.140.615	75%	Rp 11.823.594.600	75%	Rp 18.086.758.193	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	%	1,18%	Rp 915.093.660	1,19%	Rp 8.646.506.402	1,20%	Rp 16.073.455.798	1,20%	Rp 25.635.055.860	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi	%	75%	Rp 478.626.000	75%	Rp 774.508.990	75%	Rp 888.250.000	75%	Rp 2.141.384.990	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha	%	75%	Rp 58.317.000	75%	Rp 26.100.800	75%	Rp 90.000.000	75%	Rp 174.417.800	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	2%	Rp 104.435.000	2%	Rp 19.463.900	2%	Rp 135.100.000	2%	Rp 258.998.900	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				Rp 24.935.475.244		Rp 18.013.809.855		Rp 22.491.844.549		Rp 65.441.129.648	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100%	Rp 19.970.459.350	100	Rp 14.213.259.718	100	Rp 15.720.185.095	100	Rp 49.903.904.163	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengembangan Sarana Peternakan	%	100	Rp 1.658.450.559	100	Rp 1.033.619.181	100	Rp 2.031.891.368	100	Rp 4.723.961.108	
	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	%	100		100		100		100		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	%	5	Rp 200.746.000	5	Rp 834.244.138	5	Rp 1.629.446.600	15	Rp 2.664.436.738	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan	%	5		5		5		15		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kematian ternak (Ternak Besar)	%	0,2	Rp 1.432.440.291	0,2	Rp 652.169.758	0,2	Rp 1.892.380.162	0,2	Rp 3.976.990.211	
	Persentase angka kematian ternak (Ternak Unggas)	%	2		2		2		2		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Persentase angka kematian ternak (Ternak Kecil)	%	0,3		0,3		0,3		0,3			
	Persentase unit usaha yang memenuhi syarat pra-NKV	%	10		10		10		30			
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha	%	100%	Rp 31.704.374	100%	Rp 31.786.800	100%	Rp 113.411.524	100%	Rp 176.902.698		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelembagaan usaha olahan hasil ternak	%	5	Rp 1.641.674.670	5	Rp 1.248.730.260	5	Rp 1.104.529.800	15	Rp 3.994.934.730		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				Rp 15.600.328.000		Rp 16.000.062.631		Rp 25.332.173.792		Rp 56.932.564.423		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100%	Rp 14.495.328.000	100%	Rp 15.675.743.521	100%	Rp 19.650.173.792	100%	Rp 49.821.245.313		
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	%	39,82%	Rp 50.000.000	42%	Rp 17.156.030	42%	Rp 100.000.000	42%	Rp 167.156.030		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase perusahaan eksportir yang dibina	%	5,61%	Rp 10.000.000	5,61%	Rp 5.000.000	5,61%	Rp 25.000.000	5,61%	Rp 40.000.000		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	14%	Rp 295.000.000	21%	Rp 158.608.480	21%	Rp 3.400.000.000	21%	Rp 3.853.608.480		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil	%	100%	Rp 113.110.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 317.000.000	100%	Rp 445.110.000		
Program Pengembangan Ekspor	Persentase nilai ekspor	%	1%	Rp 411.105.000	1%	Rp 33.554.600	1%	Rp 1.320.000.000	1%	Rp 1.764.659.600		
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTPP di Kabupaten	%	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 560.000.000		
Program Penggunaan Pemasaran dan Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang terfasilitasi	%	10%	Rp 25.785.000	10%	Rp 35.000.000	20%	Rp 220.000.000	20%	Rp 280.785.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				Rp 3.954.506.905		Rp 1.167.616.950		Rp 2.485.680.715		Rp 7.607.804.570		
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM yang terbina	%	2,28%	Rp 3.934.659.375	2,28%	Rp 1.167.616.950	2,28%	Rp 2.475.756.950	2,28%	Rp 7.578.033.275	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IHT yang Terawasi	%	2,29%	Rp 19.847.530			2,29%	Rp 9.923.765	2,29%	Rp 29.771.295		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
DINAS KETENAGAKERJAAN				Rp 190.000.000		Rp 500.000.000		Rp 500.000.000		Rp 1.190.000.000		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor	%	50%	Rp 190.000.000	50%	Rp 500.000.000	50%	Rp 500.000.000	50%	Rp 1.190.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DAERAH												
SEKRETARIAT DAERAH				Rp 63.267.067.389		Rp 61.135.056.496		Rp 65.634.368.303		Rp 190.036.492.188		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata ketersediaan kebutuhan pimpinan dan administrasi	%	87%	Rp 37.627.003.689	88%	Rp 33.796.423.808	100%	Rp 35.824.506.039	100%	Rp 107.247.933.536	Sekretariat Daerah	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	kesekretariatan daerah											
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan yang akuntabel	%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Perangkat Daerah yang dibina menuju Nilai SAKIP minimal BB	%	100%		100%		100%		100%		100%	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100%	Rp 21.995.400.000	100%	Rp 17.752.207.798	100%	Rp 18.817.351.815	100%	Rp 58.564.959.613		
	Persentase kebijakan terkait fasilitasi kerjasama	%	100%		100%		100%		100%			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	yang ditindaklanjuti											
	Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	%	100%		100%		100%		100%			
	Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan	%	96%		98%		99%		99%			
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya Kebijakan, koordinasi dan pengawasan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	80%		85%		95%		95%			
	Persentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	100%	Rp 3.644.663.700	100%	Rp 9.586.424.890	100%	Rp 10.992.510.449	100%	Rp 24.223.599.039		
	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	%	2%		2%		5%		5%			
SEKRETARIAT DPRD												
SEKRETARIAT DPRD				Rp 71.283.567.339		Rp 48.576.625.530		Rp 71.283.567.339		Rp 191.143.760.208		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Administrasi dan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	%	100%	Rp 39.885.836.139	100%	Rp 39.969.023.778	100%	Rp 39.885.836.139	100%	Rp 119.740.696.056		Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan	%	100%	Rp 31.397.731.200	100%	Rp 8.607.601.752	100%	Rp 31.397.731.200	100%	Rp 71.403.064.152	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
PERENCANAAN											
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Rp 12.007.300.527		Rp 12.007.300.527		Rp 12.167.465.886		Rp 37.162.079.668	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	100%	Rp 7.562.097.640	100%	Rp 7.562.097.640	100%	Rp 7.321.120.290	100%	Rp 22.477.201.580	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	%	100%	Rp 1.803.722.996	100%	Rp 1.803.722.996	100%	Rp 1.799.888.996	100%	Rp 5.540.657.588	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD	%	91%	Rp 2.641.479.891	93%	Rp 2.641.479.891	100%	Rp 3.046.456.600	100%	Rp 9.144.220.500	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						Rp 2.437.150.000		Rp 2.437.150.000		Rp 4.874.300.000	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan Kelitbangan	%	-	-	20%	Rp 2.437.150.000	20%	Rp 2.437.150.000	20%	Rp 4.874.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
KEUANGAN											
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				Rp 894.829.863.371		Rp 920.036.910.487		Rp 874.346.926.323		Rp 2.689.213.700.181	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 106.108.407.170	100%	Rp 224.130.860.447	100%	Rp 129.383.000.000	100%	Rp 459.622.267.617	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	%	100%	Rp 667.386.190.421	100%	Rp 690.632.147.540	100%	Rp 738.232.926.323	100%	Rp 2.096.251.264.284	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD yang Sesuai Standar	%	100%	Rp 116.629.298.832	100%	Rp 928.150.000	100%	Rp 1.391.000.000	100%	Rp 118.948.448.832	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	4%	Rp 4.705.966.948	4%	Rp 4.345.752.500	5%	Rp 5.340.000.000	5%	Rp 14.391.719.448	
	IKM/ SKM Layanan Pajak daerah	Nilai	85%		87%		88%		88%		
KEPEGAWAIAN											
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAERAH				Rp 15.230.004.915		Rp 11.939.163.739		Rp 19.684.310.400		Rp 53.437.950.894	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	A (80,70)	Rp 8.901.340.040	A (80,79)	Rp 7.978.486.495	A (80,80)	Rp 11.749.444.400	A (80,80)	Rp 28.629.270.935	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Penelitian Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3	%	66%	Rp 3.008.985.375	67%	Rp 2.680.677.244	68%	Rp 7.934.866.000	68%	Rp 13.624.528.619	
	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian ijazah	%	74%		75%		76%		76%		
	Persentase pelanggaran disiplin	%	0,17%		0,16%		0,15%		0,15%		
	Persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP	%	99%		99%		99%		99%		
	Persentase pegawai yang lulus diklat kompetensi ASN	%	63%		64%		65%		65%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAERAH				Rp 1.659.839.750		Rp 640.000.000		Rp 3.292.235.920		Rp 5.592.075.670	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang lulus diklat assesment jabatan	%	63%	Rp 1.659.839.750	64%	Rp 640.000.000	65%	Rp 3.292.235.920	65%	Rp 5.592.075.670	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
INSPEKTORAT DAERAH											
INSPEKTORAT DAERAH				Rp 11.490.690.988		Rp 9.252.994.257		Rp 10.890.925.212		Rp 20.743.685.245	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang Urusan Pemerintah	%	100%	Rp 7.915.510.988	100%	Rp 6.400.794.257	100%	Rp 6.967.335.282	300%	Rp 14.316.305.245	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	%	84%	Rp 3.335.180.000	86%	Rp 2.837.800.000	87%	Rp 3.833.589.930	258%	Rp 6.172.980.000	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	%	100%	Rp 240.000.000	100%	Rp 14.400.000	100%	Rp 90.000.000	300%	Rp 254.400.000	
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
KECAMATAN BANGIL				Rp 22.851.499.612		Rp 16.377.625.162		Rp 20.888.419.624		Rp 60.117.544.398	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 9.557.168.000	100%	Rp 9.232.096.885	100%	Rp 10.640.722.575	100%	Rp 29.429.987.460	Kecamatan Bangil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 102.400.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 2.404.115.944	100%	Rp 2.521.515.944	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 13.098.556.612	100%	Rp 7.130.528.277	100%	Rp 7.843.581.105	100%	Rp 28.072.665.994	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Porsentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 93.375.000					100%	Rp 93.375.000	
KECAMATAN BEJI				Rp 6.450.773.570		Rp 5.359.921.038		Rp 6.298.690.825		Rp 18.109.385.433	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 3.543.283.000	100%	Rp 3.623.026.541	100%	Rp 3.813.327.978	100%	Rp 10.979.637.519	Kecamatan Beji
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 300.990.000	100%	Rp 395.427.054	100%	Rp 567.734.100	100%	Rp 1.264.151.154	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 2.343.304.000	100%	Rp 1.331.292.443	100%	Rp 1.905.548.747	100%	Rp 5.580.145.190	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 263.196.570	100%	Rp 10.175.000	100%	Rp 11.080.000	100%	Rp 284.451.570	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintah Desa	%	-	-	-	-	100%	Rp 1.000.000	100%	Rp 1.000.000	
KECAMATAN GEMPOL				Rp 3.181.464.000		Rp 2.885.315.764		Rp 3.497.097.340		Rp 9.563.877.104	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 3.122.864.000	100%	Rp 2.845.115.764	100%	Rp 3.436.294.840	100%	Rp 9.404.274.604	Kecamatan Gempol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik	%	100%	Rp 18.700.000	100%	Rp 18.800.000	100%	Rp 32.302.500	100%	Rp 69.802.500	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	65%	Rp 36.100.000	70%	Rp 12.800.000	75%	Rp 19.900.000	75%	Rp 68.800.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	%	100%	Rp 3.800.000	100%	Rp 7.600.000	100%	Rp 7.600.000	100%	Rp 19.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintah Desa	%	-	-	100%	Rp 1.000.000	100%	Rp 1.000.000	100%	Rp 2.000.000	
KECAMATAN GONDANGWETAN				Rp 5.508.807.000		Rp 4.149.641.719		Rp 4.564.645.491		Rp 14.223.094.210	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 4.032.405.000	100%	Rp 3.135.489.719	100%	Rp 3.592.838.115	100%	Rp 10.760.732.834	Kecamatan Gondangwetan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 290.000.000	100%	Rp 178.000.000	100%	Rp 265.688.797	100%	Rp 733.688.797	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 1.178.402.000	100%	Rp 818.152.000	100%	Rp 672.044.979	100%	Rp 2.668.598.979	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 18.000.000	100%	Rp 34.073.600	100%	Rp 60.073.600	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN GRATI				Rp 5.276.853.000		Rp 4.605.440.900		Rp 6.116.916.120		Rp 15.999.210.020	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	80%	Rp 3.637.105.000	80%	Rp 3.592.288.900	90%	Rp 4.836.252.050	90%	Rp 12.065.645.950	Kecamatan Grati
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	90%	Rp 355.500.000	95%	Rp 145.000.000	90%	Rp 159.896.870	90%	Rp 660.396.870	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	%	70%	Rp 1.214.252.000	75%	Rp 848.152.000	80%	Rp 1.019.017.200	80%	Rp 3.081.421.200	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 11.780.000	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 71.780.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintahan Desa	%	70%	Rp 58.216.000	75%	Rp 15.000.000	80%	Rp 46.750.000	80%	Rp 119.966.000	
KECAMATAN KEJAYAN				Rp 4.849.014.000		Rp 4.658.657.411		Rp 4.466.305.150		Rp 13.973.976.561	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 3.421.482.000	100%	Rp 3.679.113.492	100%	Rp 4.189.434.017	100%	Rp 11.290.029.509	Kecamatan Kejayan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	80%	Rp 145.880.000	80%	Rp 144.847.800	85%	Rp 160.033.610	85%	Rp 450.761.410	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	80%	Rp 1.261.652.000	80%	Rp 726.696.119	85%	Rp 10.999.780	85%	Rp 1.999.347.899	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	%	80%	Rp 10.000.000	80%	Rp 108.000.000	85%	Rp 95.882.743	85%	Rp 213.882.743	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintahan Desa	%	-	Rp 10.000.000			85%	Rp 9.955.000	85%	Rp 19.955.000	
KECAMATAN LEKOK				Rp 2.243.327.000		Rp 595.079.100		Rp 2.447.712.000		Rp 5.286.118.100	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 2.176.927.000	100%	Rp 495.985.100	100%	Rp 2.293.162.000	100%	Rp 4.966.074.100	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	85%	Rp 27.800.000	85%	Rp 17.600.000	90%	Rp 23.000.000	100%	Rp 68.400.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	85%	Rp 18.600.000	85%	Rp 50.000.000	90%	Rp 120.000.000	90%	Rp 188.600.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 11.494.000	100%	Rp 11.550.000	100%	Rp 33.044.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	%	70%	Rp 10.000.000	75%	Rp 20.000.000	-	Rp -	80%	Rp 30.000.000	
KECAMATAN LUMBANG				Rp 2.514.702.000		Rp 2.511.366.347		Rp 2.511.366.290		Rp 7.537.434.637	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	95%	Rp 2.344.364.500	100%	Rp 2.436.233.370	100%	Rp 2.431.233.590	100%	Rp 7.211.831.460	Kecamatan Lumbang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	95%	Rp 48.507.500	95%	Rp 24.018.500	100%	Rp 24.018.300	100%	Rp 96.544.300	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 114.630.000	100%	Rp 11.116.377	100%	Rp 11.116.300	100%	Rp 136.862.677	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 7.200.000	100%	Rp 39.998.100	100%	Rp 39.998.100	100%	Rp 87.196.200	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	%	-		-		100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000	
KECAMATAN NGULING				Rp 3.211.006.000		Rp 3.001.025.156		Rp 8.703.390.971		Rp 14.915.422.127	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 3.031.006.000	100%	Rp 2.979.025.156	100%	Rp 8.538.442.041	100%	Rp 14.548.473.197	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 22.866.217	100%	Rp 97.866.217	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 110.000.000	100%	Rp 7.000.000	100%	Rp 1.690.128	100%	Rp 118.690.128	Kecamatan Nguling
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	-	-			100%	Rp 52.088.867	100%	Rp 52.088.867	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintah Desa	%	100%	Rp 10.000.000				100%	Rp 88.303.719	100%	Rp 98.303.719	
KECAMATAN PANDANAAN				Rp 10.713.396.428		Rp 3.681.161.109		Rp 9.886.886.508		Rp 24.281.444.045		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 5.717.694.000	100%	Rp 546.353.447	100%	Rp 6.224.968.602	100%	Rp 12.489.016.049	Kecamatan Pandanaan	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 187.800.000	100%	Rp 877.439.258	100%	Rp 965.183.184	100%	Rp 2.030.422.442		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 4.768.702.428	100%	Rp 2.238.868.404	100%	Rp 2.462.755.244	100%	Rp 9.470.326.076		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	90%	Rp 39.200.000	90%	Rp 18.500.000	90%	Rp 233.979.478	90%	Rp 291.679.478		
KECAMATAN PASREPAN				Rp 2.412.856.000		Rp 2.423.466.086		Rp 2.708.582.624		Rp 7.544.904.710		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 2.315.356.000	100%	Rp 2.393.466.086	100%	Rp 2.625.513.605	100%	Rp 7.334.335.691	Kecamatan Pasrepan	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik	%	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 60.026.769	100%	Rp 100.026.769		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina	%	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 15.840.000	100%	Rp 90.840.000		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	70%	Rp 7.500.000	70%	Rp 5.000.000	70%	Rp 7.202.250	70%	Rp 19.702.250		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN POHJENTREK				Rp 2.673.137.000		Rp 2.717.426.029		Rp 2.989.168.632		Rp 8.379.731.661	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 2.647.337.000	100%	Rp 2.695.126.029	100%	Rp 2.957.545.612	100%	Rp 8.300.008.641	Kecamatan Pohjentrek
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 19.800.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 11.218.020	100%	Rp 41.018.020	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.300.000	100%	Rp 10.890.000	100%	Rp 17.190.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 9.515.000	100%	Rp 21.515.000	
KECAMATAN PRIGEN				Rp 8.128.272.000		Rp 5.044.449.205		Rp 8.343.851.900		Rp 21.516.573.105	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 3.990.623.500	100%	Rp 4.231.297.205	100%	Rp 3.906.503.500	100%	Rp 12.128.424.205	Kecamatan Prigen
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 569.842.500	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 569.842.500	100%	Rp 1.149.685.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 3.553.356.000	100%	Rp 803.152.000	100%	Rp 3.524.706.000	100%	Rp 7.881.214.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 14.450.000			100%	Rp 342.799.900	100%	Rp 357.249.900	
KECAMATAN PURWODADI				Rp 2.980.226.000		Rp 2.767.207.316		Rp 3.021.877.614		Rp 8.769.310.930	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan	%	100%	Rp 2.878.076.000	100%	Rp 2.723.207.316	100%	Rp 2.865.758.055	100%	Rp 8.467.041.371	Kecamatan Purwodadi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penunjang Urusan Pemerintahan											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 22.500.000	100%	Rp 114.596.559	100%	Rp 167.096.559		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 31.350.000	100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 14.523.000	100%	Rp 54.873.000		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	%	83%		83%	Rp 2.000.000	83%	Rp 27.000.000	83%	Rp 29.000.000		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 40.800.000	-	Rp 10.500.000	-	Rp -	100%	Rp 51.300.000		
KECAMATAN PURWOSARI				Rp 5.009.235.414		Rp 4.505.144.361		Rp 4.955.658.797		Rp 14.470.038.572		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 3.466.947.952	100%	Rp 3.553.680.352	100%	Rp 3.909.048.387	100%	Rp 10.929.676.691		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 80.100.000	85,78%	Rp 17.000.000	85,78%	Rp 18.700.000	85,78%	Rp 115.800.000		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 1.437.187.462	85,78%	Rp 909.464.009	85,78%	Rp 1.000.410.410	85,78%	Rp 3.347.061.881		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	%	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 27.500.000	100%	Rp 77.500.000	Kecamatan Purwosari	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN PUSPO				Rp 1.698.086.000		Rp 2.109.267.000		Rp 2.511.366.290		Rp 6.318.719.290	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 1.545.166.000	100%	Rp 2.077.267.000	100%	Rp 2.431.233.590	100%	Rp 6.053.666.590	Kecamatan Puspo
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	95%	Rp 69.150.000	95%	Rp 16.000.000	100%	Rp 24.018.300	100%	Rp 109.168.300	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 75.270.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 11.116.300	100%	Rp 94.386.300	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 8.500.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 39.998.100	100%	Rp 56.498.100	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	%	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000	
KECAMATAN REJOSO				Rp 2.660.897.000		Rp 2.110.180.921		Rp 3.006.411.256		Rp 7.777.489.177	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 2.453.817.000	100%	Rp 2.071.110.921	100%	Rp 2.752.050.656	100%	Rp 7.276.978.577	Kecamatan Rejoso
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	80%	Rp 30.640.000	85%	Rp 15.000.000	90%	Rp 78.150.000	100%	Rp 123.790.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	70%	Rp 119.240.000	75%	Rp 20.000.000	80%	Rp 132.400.000	80%	Rp 271.640.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan	%	100%	Rp 13.395.000	100%	Rp 2.035.000	100%	Rp 14.500.000	100%	Rp 29.930.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ketertiban Umum yang Berkualitas											
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	%	70%	Rp 43.805.000	75%	Rp 2.035.000	80%	Rp 29.310.600	80%	Rp 75.150.600		
KECAMATAN REMBANG				Rp 2.902.072.000		Rp 2.378.542.948		Rp 2.439.485.550		Rp 7.720.100.498		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 2.761.472.000	100%	Rp 2.305.542.948	100%	Rp 2.365.908.150	100%	Rp 7.432.923.098	Kecamatan Rembang	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik	%	100%	Rp 59.100.000	100%	Rp 45.000.000	100%	Rp 44.895.400	100%	Rp 148.995.400		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 64.400.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 19.844.000	100%	Rp 104.244.000		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	%	100%	Rp 17.100.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 8.838.000	100%	Rp 33.938.000		
KECAMATAN SUKOREJO				Rp 3.004.936.000		Rp 2.850.774.135		Rp 3.135.851.549		Rp 8.991.561.684		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 2.855.769.160	100%	Rp 2.809.394.135	100%	Rp 3.111.954.049	100%	Rp 8.777.117.344	Kecamatan Sukorejo	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 47.166.840	100%	Rp 17.475.000	100%	Rp 13.255.000	100%	Rp 77.896.840		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 91.000.000	100%	Rp 14.000.000	100%	Rp 8.167.500	100%	Rp 113.167.500		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	83%	Rp 11.000.000	83%	Rp 9.905.000	83%	Rp 2.475.000	83%	Rp 23.380.000	
KECAMATAN TOSARI				Rp 2.194.156.000		Rp 2.397.080.715		Rp 2.508.088.787		Rp 7.099.325.502	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 1.999.906.000	100%	Rp 2.280.080.715	100%	Rp 2.397.076.787	100%	Rp 6.677.063.502	Kecamatan Tosari
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 100.625.000	100%	Rp 67.500.000	100%	Rp 57.403.500	100%	Rp 225.528.500	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 79.625.000	100%	Rp 34.500.000	100%	Rp 36.602.500	100%	Rp 150.727.500	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 14.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 17.006.000	100%	Rp 46.006.000	
KECAMATAN TUTUR				Rp 2.038.876.000		Rp 2.187.891.248		Rp 2.858.741.000		Rp 7.085.508.248	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 1.891.826.000	100%	Rp 2.161.891.248	100%	Rp 2.331.189.010	100%	Rp 6.384.906.258	Kecamatan Tuteur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 62.000.000	100%	Rp 12.000.000	100%	Rp 262.551.990	100%	Rp 336.551.990	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik; Persentase Kelompok Masyarakat yang	%	100%	Rp 76.050.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 336.050.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Terbina dengan Baik											
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 4.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 28.000.000		
KECAMATAN WINONGAN				Rp 3.015.396.000		Rp 2.709.582.481		Rp 3.036.934.068		Rp 8.761.912.549		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 2.789.876.000	100%	Rp 2.621.435.681	100%	Rp 2.961.438.325	100%	Rp 8.372.750.006	Kecamatan Winongan	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	100%	Rp 108.800.000	100%	Rp 6.300.000	100%	Rp 28.058.003	100%	Rp 143.158.003		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	100%	Rp 110.000.000	100%	Rp 55.108.000	100%	Rp 19.362.000	100%	Rp 184.470.000		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 6.720.000	100%	Rp 6.720.000	100%	Rp 7.056.000	100%	Rp 20.496.000		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	%	-	-	100%	Rp 10.300.000	100%	Rp 10.815.000	100%	Rp 21.115.000		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	%	-	-	100%	Rp 9.718.800	100%	Rp 10.204.740	100%	Rp 19.923.540		
KECAMATAN WONOREJO				Rp 2.899.755.000		Rp 2.750.824.452		Rp 996.225.243		Rp 6.646.804.695		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	79%	Rp 2.819.755.000	81%	Rp 2.670.824.452	83%	Rp 898.174.055	83%	Rp 6.388.753.507	Kecamatan Wonorejo
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	79%	Rp 30.000.000	81%	Rp 30.000.000	83%	Rp 41.041.000	83%	Rp 101.041.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	83%	Rp 20.000.000	85%	Rp 20.000.000	90%	Rp 26.789.400	90%	Rp 66.789.400	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	87%	Rp 10.000.000	89%	Rp 10.000.000	91%	Rp 10.220.788	91%	Rp 30.220.788	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	%	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 60.000.000	
KECAMATAN KRATON				Rp 3.169.036.000		Rp 3.421.762.962		Rp 4.100.511.858		Rp 10.691.310.820	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	Rp 2.941.131.000	100%	Rp 3.353.762.962	100%	Rp 3.997.508.348	100%	Rp 10.292.402.310	Kecamatan Kraton
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	%	97%	Rp 46.720.000	97%	Rp 5.000.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 66.720.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	98%	Rp 57.730.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 29.930.120	100%	Rp 102.660.120	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	%	100%	Rp 89.800.000	100%	Rp 33.000.000	100%	Rp 29.015.140	100%	Rp 151.815.140	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	%	97%	Rp 33.655.000	97%	Rp 15.000.000	100%	Rp 29.058.250	100%	Rp 77.713.250	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp 19.138.988.350		Rp 31.161.794.548		Rp 32.865.168.910		Rp 83.165.951.808	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100%	Rp 5.095.561.850	100%	Rp 17.190.079.898	100%	Rp 16.523.025.310	100%	Rp 38.808.667.058	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memahami ideologi Pancasila	%	80%	Rp 313.066.000	85%	Rp 745.815.200	90%	Rp 629.321.000	85%	Rp 1.688.202.200	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah	%	25,98%	Rp 2.243.302.500	25,98%	Rp 3.167.114.100	28%	Rp 2.975.993.000	26,65%	Rp 8.386.409.600	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100%	Rp 6.227.898.000	100%	Rp 4.373.911.350	100%	Rp 6.561.002.000	100%	Rp 17.162.811.350	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang terfasilitasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100%	Rp 134.300.000	100%	Rp 234.976.400	100%	Rp 258.305.000	100%	Rp 627.581.400	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	%	100%	Rp 5.124.860.000	100%	Rp 5.449.897.600	100%	Rp 5.917.522.600	100%	Rp 16.492.280.200	
TOTAL				Rp 3.434.440.226.633		Rp 3.313.441.471.793		Rp 3.416.071.592.106		Rp 10.157.898.918.320	



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan yaitu Tahun 2018-2023. Target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan periode 2018-2023 mengalami perubahan karena dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama dan target selama lima tahun ke depan disajikan dalam Tabel 8.1

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,73 - 6	5,73 - 6	5,73 - 6	4,23-5,81	4,24-5,81
2	Persentase Penduduk Miskin	9,40	9,35	9,30	10,25-10,38	10,20-10,33
3.	Indeks Kesalehan Sosial	62,30	62,40	62,50	62,60	62,70
4	Indek Wiliamson	0,260	0,26	0,25	0,265	0,250
5	Indeks Reformasi Birokrasi	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
6	IPM	68,18	68,90	69,61	68,90-70,30	69,61-70,98
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02	5,08	5,04	6,08-5,91	5,79-5,41
8	Indeks Gini	n/a	n/a	n/a	0,3482 - 0,3473	0,3472-0,3470

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2021

8.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian kinerja indikator yang ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2018-2023 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah dari tujuan dan sasaran

pembangunan daerah oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas lokal daerah, nilai tukar petani, dan lama pelayanan perijinan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten pasuruan tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 8.2 sebagai berikut:

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
				2019		2020			2021	2022	2023	
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi												
1.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	5,79	5,73 - 6	5,83	5,73 - 6	-2,03	Awal	5,73-6	5,73-6	5,73-6	5,73 - 6
								Perubahan	5,73- 7	4,23- 5,82	4,24-5,81	4,24-5,82
1.2	Persentase Penduduk Miskin	%	9,45	9,4	8,68	9,35	9,26	Awal	9,3	9,25	9,2	9,2
								Perubahan	10,3	10,25- 10,39	10,20- 10,33	10,20-10,34
1.3	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	n/a	62,3	72,21	62,4	76,6	Awal	62,5	62,6	62,7	62,7
								Perubahan	62,5	62,6	62,7	62,7
1.4	Indek Wiliamson	Indeks	0,2561	0,26	0,2583	0,26	0,277	Awal	0,25	0,245	0,24	0,24
								Perubahan	0,25	0,265	0,25	0,25
1.5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	n/a	62	62,75	64	n/a	Awal	66	68	70	70
								Perubahan	66	68	70	70
1.6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,41	68,18	68,29	68,9	68,6	Awal	69,61	70,3	70,98	70,98
								Perubahan	70,61	68,90- 70,31	69,61- 70,98	69,61-70,99
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,11	6,02	5,42	5,08	6,24	Awal	5,04	5,01	4,89	4,89
								Perubahan	6,04	6,08- 5,92	5,79-5,41	5,79-5,42
1.8	Indeks Gini (**)	Indeks	0,324	n/a	0,308	n/a	0,346	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	n/a	0,3482 - 0,3474	0,3472- 0,3470	0,3472-0,3471

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
				2019	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
B.	Aspek Pelayanan Umum											
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar											
2.1	Pendidikan											
2.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	57,2	58,13	57,89	59,09	59,42	Awal	60,05	61,01	61,98	61,98
								Perubahan	60,05	61,01	61,98	61,98
2.2	Kesehatan											
2.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	76,76	76,85	82,73	76,94	82,75	Awal	76,94	76,98	77,02	77,02
								Perubahan	76,94	76,98	77,02	77,02
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2.3.1	Indeks Ketahanan Air	Indeks	77,68	77,68	77,68	77,68	77,65	Awal	77,68	77,68	77,68	77,68
								Perubahan	77,68	77,68	77,68	77,68
2.3.2	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Indeks	n/a	1,2	1,2	1,3	1,3	Awal	1,35	1,41	1,47	1,47
								Perubahan	1,35	1,41	1,47	1,47
2.3.3	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (**)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	80%	85%	85%	88,5
								Perubahan	80%	85%	85%	88,5
2.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											

Keterangan:

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
				2019	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
2.4.1	Indeks Permukiman Layak Huni	Indeks	n/a	76,05	71,46	81,18	78,7	Awal	85,6	92,5	96,55	96,55
								Perubahan	85,6	92,5	96,55	96,55
2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
2.5.1	Persentase Penegakan Perda	%	81,50%	91%	91,24%	92%	92,13%	Awal	93%	94%	95%	95%
								Perubahan	93%	94%	95%	95%
2.5.2	Indeks Ketahanan Daerah (**)	Nilai	N/A	0,7	0,7	0,71	0,71	Awal	0,72	0,73	0,74	0,74
								Perubahan	0,72	0,73	0,74	0,74
2.6	Sosial											
2.6.1	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (**)	(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	5,7	5,2	4,7	4,7
								Perubahan	5,7	5,2	4,7	4,7
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
2.1	Ketenagakerjaan											
2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (**)	Jumlah	n/a	n/a	5,42	n/a	6,24	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	n/a	75%	76%	76%
2.2	Pangan											
2.2.1	Indeks Ketahanan Pangan	n/a	67	67,5	69,38	68	68,78	Awal	68,5	69	69	95
								Perubahan	68,5	69	69	95
2.3	Lingkungan Hidup											

(*) : Indikator digunakan sampai dengan tahun 2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
				2019	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
2.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,1	58,42	59,73	61,81	62,54	Awal	61,34	62,65	64,26	64,26
								Perubahan	61,81	62,16	62,50	62,50
2.4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.4.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,45	90,76	90,68	90,91	90,68	Awal	91,07	91,22	91,38	91,38
								Perubahan	91,07	91,22	91,38	91,38
2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2.5.1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	n/a	85	n/a	86	86	Awal	87	88	89	89
								Perubahan				
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2.6.1	Persentase Desa Mandiri	%	0	0,29	0,59	0,88	1,17	Awal	2,05	3,23	4,40	4,40
								Perubahan	2,06	3,23	4,40	4,40
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
2.7.1	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	%	73,12	73	75,14	75,2	74,91	Awal	75,4	75,6	75,8	75,8
								Perubahan	75,4	75,6	75,8	75,8
2.8	Perhubungan											
2.8.1	Indeks Konektivitas Wilayah	Unit	n/a	10,4	7,18	11,29	7,91	Awal	12,17	13,04	13,92	13,92
								Perubahan	12,17	13,04	13,92	13,92

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
				2019	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
2.9	Komunikasi dan Informatika											
2.9.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (**)	Indeks	n/a	10	n/a	20	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	30	40	50	50
2.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
2.10.1	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Dan Koperasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	n/a	5	7	7
2.11	Penanaman Modal											
2.11.1	Jumlah Nilai Investasi yang terrealisasi	T(Rp)	18,9	9 T	18 T	9,6 T	10 T	Awal	10 T	10,5 T	11 T	11 T
								Perubahan	10 T	10,25 T	10,52 T	10,52 T
2.12	Kepemudaan dan Olahraga											
2.12.1	Rasio Pemuda Berprestasi	Rasio	15	20	n/a	25	1: 1,2	Awal	30	35	40	40
								Perubahan	30	35	40	40
2.13	Statistik											
2.13.1	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan penyebarluasan informasi	%	n/a	82,5	92	84	84,67	Awal	84	85	85	85
								Perubahan	84	85	85	85
2.14	Persandian											

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
				2019	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
2.14.1	Persentasi OPD yang menerapkan e-Gov	%	n/a	40	100	45	32,84	Awal	50	55	60	60
								Perubahan	50	55	60	60
2.15	Kebudayaan											
2.15.1	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	Kelompok	433	410	420	415	422	Awal	422	422	424	424
								Perubahan	422	424	425	425
2.16	Perpustakaan											
2.16.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat(**)	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	n/a	75%	76%	76%
2.17	Kearsipan											
2.17.1	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	62,15	70	79,67	75	79,67	Awal	77	80	81	81
								Perubahan	77	80	81	81
2.18	Pertanahan											
2.18.1	Prosentase penyelesaian sengketa tanah Garapan (**)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	100%	100%	100%	100%
3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
3.1	Pariwisata											
3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisata (*)	Orang	2.687.987	2.582.200	2.687.987	2.780.200	1.431.668	Awal	2.780.200	3.007.700	3.198.100	3.198.100
								Perubahan	n/a	n/a	n/a	n/a
3.1.2	Spending of Money in Tourism (**)	Rupiah (Rp000)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	787.417,5	866.159,15	952.775,06	952.776,05

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
				2019	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
3.2	Pertanian											
3.2.1	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (**)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	0,5	0,7	0,7	0,7
3.3	Perdagangan											
3.3.1	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran, resReparasi Mobil dan Sepeda Motor (**)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	0,3	0,4	0,4	0,4
3.3.2	Indeks Daya Beli	Indeks	n/a	70,94	n/a	71,98	n/a	Awal	72,99	73,97	74,91	74,91
								Perubahan	72,99	73,97	74,91	74,91
3.4	Perindustrian											
3.4.1	Nilai Produksi Sektor Industri	Jutaan Rupiah	62.147.131, 6	n/a	n/a	63.318.4 25,34	61.896.361, 30	Awal	66.484.3 46,61	69.808.5 63,94	73.298.99 2,13	73.298.992,13
								Perubahan	66.484.3 46,62	69.808.5 63,95	73.298.99 2,13	73.298.992,13
3.4.2	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (**)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	0,4	0,5	0,5	0,5
3.5	Kelautan dan Perikanan											



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
				2019	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
3.5.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.556,9	22.547,9 4	23.556,90	22.985,7 6	22.019,90	Awal	23.423,5 8	23.861,4 1	24.080,32	24.080,32
								Perubahan	23.204,7 6	23.423,5 8	23.642,50	23.642,50
3.5.2	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.528,02	19.476,4 1	19.528,02	19.854,5 9	20.196,16	Awal	20.232,7 8	20.610,9 6	20.800,05	20.800,05
								Perubahan	20.043,6 5	20.232,7 4	20.421,83	20.421,83
4	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan											
4.1	Perencanaan Pembangunan											
4.1.1	Nilai SAKIP Perencanaan	%	22,75	23	23,62	24,50	n/a	Awal	24,50	25	25,50	25,50
								Perubahan	24,50	25	25,50	25,50
4.2	Keuangan											
4.2.1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Awal	WTP	WTP	WTP	WTP
								Perubahan	WTP	WTP	WTP	WTP
4.3	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan											
4.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	n/a	70	71	71	72	Awal	72	73	74	74
								Perubahan	72	73	74	74
4.4	Penelitian dan Pengembangan											
4.4.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	n/a	80%	100%	85%	100%	Awal	100 %	100%	100 %	100%
								Perubahan	100 %	100%	100 %	100%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2018	Target 2019	Realisasi	Target	Realisasi	RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2023
					2019	2020	2020		2021	2022	2023	
4.5	Pengawasan											
4.5.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif (*)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Awal	n/a	n/a	n/a	n/a
								Perubahan	2%	5%	8%	8%
4.6	Kesekretariatan Daerah											
4.6.1	NILAI SAKIP	Nilai	72,70 (BB)	79,00 (BB)	75,02 (BB)	80,00 (BB)	n/a	Awal	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)
								Perubahan	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)
4.7	Kewilayahan											
4.6.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	82,50 (Baik)	82,75 (Baik)	83,00 (Baik)	85,97 (Baik)	Awal	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)	84,50 (Baik)
								Perubahan	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)	84,50 (Baik)

(**)

: Indikator digunakan mulai tahun 2021



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB IX

PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan yang menjadi penyelarasan antara dokumen rencana jangka panjang sekaligus penghubung dengan jangka pendek dibawahnya , sehingga terdapat keselarasan dan kesinambungan diantara dokumen yang ada yang menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dan terjaga secara terarah, terpadu, berkelanjutan.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Pada Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2024, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) pada tahun 2024 yang harus disusun pada tahun 2023 harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 serta RPJM Nasional agar terdapat sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya dokumen RPJMD ini, maka di ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

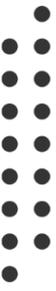
- 1 Bupati/Wakil Bupati Pasuruan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama periode kepemimpinan lima tahun berkewajiban untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah di bantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Pasuruan;
- 2 Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 serta Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra PD;
- 3 Dalam hal pelaksanaan program prioritas yang dapat didanai selain dana yang bersumber dari APBD maupun APBN dimungkinkan untuk didanai melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha, *Public Private Partnership* atau melalui pelaksanaan CSR (*Coorporate Social Responsibility*).
- 4 Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2018 – 2023 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan;
- 5 RKPD Kabupaten Pasuruan harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
- 6 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2018 – 2023 dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi kinerja dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a). Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- 7 Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka RPJMD dapat direvisi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M.IRSYAD YUSUF



PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

